



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SUKABUMI
2026**



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk barang/jasa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar

pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 meliputi :

- a. memudahkan sinkronisasi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Wilayah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan) juga untuk digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP melalui serangkaian Musrenbang; dan
- b. tersedianya dokumen perencanaan tahunan Daerah Kabupaten yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 meliputi:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pemerintah pusat dan Daerah Kabupaten;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. menjamin terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagai acuan dan/atau pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 maupun penilaian kinerja pemerintahan di Daerah Kabupaten

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD

b. BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

c. BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional, provinsi, dan kebijakan ekonomi daerah; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

d. BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2026 yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

e. BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat secara eksplisit rencana kerja rencana program dan rincian pendanaan kegiatan pembangunan daerah

f. BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

g. BAB 7 PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.

Pasal 6

Penjabaran dan penjelasan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal *25 Juli 2025*



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal *25 Juli 2025*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



AOE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN *2025* NOMOR *23*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum	I – 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 7
1.4 Maksud Dan Tujuan	I – 8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I – 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Sukabumi	II – 1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	II – 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 24
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II – 48
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II – 139
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Serta Realisasi RPJMD.....	II – 145
2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2024.....	II – 145
2.2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....	II – 183
2.2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II – 184
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 188
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi	III – 1
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	III – 4
3.1.3 Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran.....	III – 7
3.1.4 Inflasi	III – 10
3.1.5 Analisis Sektor Basis pada Perekonomian di Kabupaten Sukabumii.....	III – 10
3.1.6 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global.....	III – 12
3.1.7 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Nasional	III – 13
3.1.8 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Jawa Barat ...	III – 15
3.1.9 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Kabupaten Sukabumi.....	III – 15
3.1.10 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	III – 16
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 20
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III – 22
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 24
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 25
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV – 1

4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV – 1
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV – 2
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi....	IV – 3
4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.....	IV – 32
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV – 32
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026....	IV – 47
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 .	IV – 48
4.2.4	Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026	IV – 67
4.2.5	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV – 90
4.3	Kebijakan Pembangunan Wilayah	IV – 95
4.3.1	Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2025- 2029.....	IV – 95
4.3.2	Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Sukabumi.....	IV – 98
4.3.3	Arah Pengembangan Kawasan Kabupaten Sukabumi.....	IV – 100
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V – 1
5.1	Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026	V – 1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	V – 34
5.3	Rencana Pendanaan yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026	V – 66
5.4	Sinergitas Program Mendukung Prioritas Nasional.....	V – 73
5.5	Rencana Pendanaan yang Mendukung Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	V – 78
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI – 1
6.1	Indikator Kinerja Makro	VI – 1
6.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sukabumi	VI – 2
6.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VI – 8
6.4	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	VI – 22
6.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VI – 24
BAB VII	PENUTUP	VII – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.....	II – 1
Tabel 2.2	Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Sukabumi Tahun 2024....	II – 8
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	II – 9
Tabel 2.4	Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024-2028.....	II – 11
Tabel 2.5	Komposisi Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	II – 22
Tabel 2.6	Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	II – 23
Tabel 2.7	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukabumi (persen) Tahun 2020–2024	II – 26
Tabel 2.8	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	II – 28
Tabel 2.9	Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Ribu Jiwa) 2020 – 2024.....	II – 32
Tabel 2.10	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi, 2020–2024	II – 32
Tabel 2.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, 2020–2024	II – 33
Tabel 2.12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024...	II – 42
Tabel 2.13	Indeks Literasi Digital Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022.....	II – 43
Tabel 2.14	Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 45
Tabel 2.15	Rasio Posyandu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 58
Tabel 2.16	Persentase Stunting di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 59
Tabel 2.17	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024	II – 60
Tabel 2.18	Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 60
Tabel 2.19	Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 61
Tabel 2.20	Rasio Perawat Dan Bidan Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 61
Tabel 2.21	Cakupan Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 62
Tabel 2.22	Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 63
Tabel 2.23	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 63
Tabel 2.24	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024	II – 65

Tabel 2.25	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 66
Tabel 2.26	Luasan RTH Realisasi dan Target Berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 66
Tabel 2.27	Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 67
Tabel 2.28	Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 69
Tabel 2.29	Lingkungan yang didukung PSU di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019- 2023.....	II – 69
Tabel 2.30	Persentase Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 70
Tabel 2.31	Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 70
Tabel 2.32	Data K3 di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 71
Tabel 2.33	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 72
Tabel 2.34	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 72
Tabel 2.35	Nilai Indeks Rasa Aman Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 74
Tabel 2.36	Nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 75
Tabel 2.37	Jumlah PPKS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Jiwa).....	II – 75
Tabel 2.38	Jumlah Panti dan Penghuninya di Kabupaten Sukabumi 2020-2024.....	II – 77
Tabel 2.39	Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 77
Tabel 2.40	Permasalahan Sosial Masyarakat di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.....	II – 79
Tabel 2.41	Permasalahan Sosial Masyarakat Berdasarkan Jumlah Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.....	II – 79
Tabel 2.42	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 80
Tabel 2.43	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 81
Tabel 2.44	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 82
Tabel 2.45	Persentase Pekerja Perempuan yang Menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 83
Tabel 2.46	Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 84
Tabel 2.47	Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 85

Tabel 2.48	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II – 89
Tabel 2.49	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II – 90
Tabel 2.50	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024.....	II – 90
Tabel 2.51	Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II – 91
Tabel 2.52	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 92
Tabel 2.53	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023.....	II – 95
Tabel 2.54	Persentase kepemilikan KTP Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023.....	II – 97
Tabel 2.55	Persentase Anak Berakta Kelahiran Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 97
Tabel 2.56	Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 98
Tabel 2.57	Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 99
Tabel 2.58	Cakupan PUS yang Istrinya <20 Tahun Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 100
Tabel 2.59	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 100
Tabel 2.60	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 101
Tabel 2.61	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 101
Tabel 2.62	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 102
Tabel 2.63	PPKS Setiap Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 102
Tabel 2.64	Cakupan Remaja Dalam PIK R Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 103
Tabel 2.65	Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 103
Tabel 2.66	Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 104
Tabel 2.67	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB di setiap Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 104
Tabel 2.68	Jumlah Faskes Dan Jejaring Yang Bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 105
Tabel 2.69	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 105
Tabel 2.70	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 106

Tabel 2.71	Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 107
Tabel 2.72	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami, Melaksanakan Pengasuhan, dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023	II – 107
Tabel 2.73	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Unit)	II – 108
Tabel 2.74	Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan dan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	II – 109
Tabel 2.75	Investasi Kabupaten Sukabumi dalam Sektor Dominan.....	II – 112
Tabel 2.76	Publikasi Buku Statistik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 113
Tabel 2.77	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Sukabumi Periode 2020 – 2024	II – 113
Tabel 2.78	Jumlah Koleksi Buku di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024.....	II – 114
Tabel 2.79	Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Jiwa)	II – 115
Tabel 2.80	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II – 116
Tabel 2.81	Jumlah Obyek Wisata Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 117
Tabel 2.82	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024.....	II – 118
Tabel 2.83	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	II – 119
Tabel 2.84	Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Ha).....	II – 121
Tabel 2.85	Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi.....	II – 121
Tabel 2.86	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 122
Tabel 2.87	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 122
Tabel 2.88	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi, 2020–2024	II – 123
Tabel 2.89	Jumlah Industri Kecil Menengah Berdasarkan Bidang Usaha Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023.....	II – 123
Tabel 2.90	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Jiwa).....	II – 124
Tabel 2.91	Jumlah Transmigran yang ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa Tahun 2024	II – 124
Tabel 2.92	Gambaran Umum Perikanan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	II – 124

Tabel 2.93	Produksi Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sukabumi (Kg), 2021-2024	II – 131
Tabel 2.94	Produksi Telur Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Sukabumi (Kg), 2021-2024	II – 132
Tabel 2.95	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 133
Tabel 2.96	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 135
Tabel 2.97	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 137
Tabel 2.98	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023	II – 138
Tabel 2.99	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 139
Tabel 2.100	Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 141
Tabel 2.101	Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	II – 143
Tabel 2.102	Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022	II – 143
Tabel 2.103	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023	II – 144
Tabel 2.104	Perkembangan Indikator Makro Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024	II – 147
Tabel 2.105	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024.....	II – 150
Tabel 2.106	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024.....	II – 151
Tabel 2.107	Capaian Indikator Kinerja Program Kabupaten Sukabumi sampai dengan Tahun 2024	II – 154
Tabel 2.108	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Terhadap Capaian Mutu Minimal Dan Penerima Layanan Dasar.....	II – 284
Tabel 2.109	Penerapan SPM per Bidang Pada Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	II – 201
Tabel 2.110	Capaian Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2024.....	II – 201
Tabel 2.111	Pemetaan Masalah Berdasarkan Kondisi Pemerintah Kabupaten Sukabumi.....	II – 190
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2020-2024.....	III – 5
Tabel 3.2	Produk Domestik Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah).....	III – 8
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	III – 9
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	III – 9

Tabel 3.5	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.....	III – 10
Tabel 3.6	Nilai LQ Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024.....	III – 11
Tabel 3.7	Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022-2024.....	III – 12
Tabel 3.8	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2025-2026.....	III – 13
Tabel 3.9	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	III – 14
Tabel 3.10	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)	III – 14
Tabel 3.11	Target Indikator Makro Nasional Tahun 2026.....	III – 15
Tabel 3.12	Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2026.....	III – 15
Tabel 3.13	Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	III – 16
Tabel 3.14	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2026.....	III – 22
Tabel 3.15	Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2023-2026	III – 24
Tabel 3.16	Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2026.....	III – 24
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sukabumi.....	IV – 6
Tabel 4.2	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	IV – 10
Tabel 4.3	Program Direktif Presiden pada RKP Tahun 2026	IV – 34
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	IV – 50
Tabel 4.5	Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	IV – 57
Tabel 4.6	Dukungan Program Perangkat Daerah Pada Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026.....	IV – 59
Tabel 4.7.	Dukungan Program Perangkat Daerah Pada Proyek Strategis Nasional Tahun 2026	IV - 65
Tabel 4.8	Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan dengan Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	IV – 86
Tabel 4.9	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukabumi	IV – 90
Tabel 4.10	Keselarasan Kebijakan Kewilayahan RKP 2026 dan RKPD Tahun 2026.....	IV – 108
Tabel 5.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	V – 2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Indikasi Pagu Perangkat Daerah Per Program Pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	V – 34
Tabel 5.3	Rencana Pendanaan yang Mendukung SPM Tahun 2026.....	V – 67
Tabel 5.4	Rekapitulasi Program mendukung Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026.....	V – 73

Tabel 5.5	Rekapitulasi Program mendukung Penanggulangan Stunting Tahun 2026.....	V – 73
Tabel 5.6	Rekapitulasi Program Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2026.....	V – 74
Tabel 5.7	Rekapitulasi Program Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026.....	V – 75
Tabel 5.8	Rekapitulasi Program Mendukung Penanganan Inflasi Tahun 2026.....	V – 76
Tabel 5.9	Rekapitulasi Program Mendukung Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2026	V – 76
Tabel 5.10	Rekapitulasi Program mendukung Pengembangan UMKM Tahun 2026.....	V – 77
Tabel 5.11	Rekapitulasi Program mendukung Pengembangan Pariwisata Tahun 2026.....	V – 77
Tabel 5.12	Rekapitulasi Rencana Program mendukung Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	V – 78
Tabel 6.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 .	VI – 1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.....	VI – 2
Tabel 6.3	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026	VI – 7
Tabel 6.4	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukabumi Tahun 2026	VI – 23
Tabel 6.5	Penetapan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukabumi Tahun 2026	IV – 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	I – 8
Gambar 2.1	Peta Topografi Kabupaten Sukabumi	II – 3
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukabumi	II – 3
Gambar 2.3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Sukabumi	II – 4
Gambar 2.4	Peta Formasi Batuan Kabupaten Sukabumi	II – 5
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sukabumi	II – 7
Gambar 2.6	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Sukabumi	II – 8
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Sukabumi.....	II – 9
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 .	II – 11
Gambar 2.9	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Sukabumi	II – 13
Gambar 2.10	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi	II – 13
Gambar 2.11	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sukabumi.....	II – 14
Gambar 2.12	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sukabumi	II – 14
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukabumi.....	II – 15
Gambar 2.14	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukabumi	II – 15
Gambar 2.15	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Sukabumi	II – 16
Gambar 2.16	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Salak di Kabupaten Sukabumi.....	II – 16
Gambar 2.17	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Sukabumi.....	II – 17
Gambar 2.18	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan di Kabupaten Sukabumi	II – 19
Gambar 2.19	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air di Kabupaten Sukabumi.....	II – 20
Gambar 2.20	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi	II – 20
Gambar 2.21	Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Sukabumi.....	II – 21
Gambar 2.22	Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 22
Gambar 2.23	Piramida Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	II – 23
Gambar 2.24	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sukabumi (Miliar Rupiah), 2020– 2024	II – 25
Gambar 2.25	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi 2020 – 2024	II – 25
Gambar 2.26	Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (%), 2024	II – 29
Gambar 2.27	Laju Inflasi Per Bulan di Kabupaten Sukabumi 2023 – 2024 ...	II – 29
Gambar 2.28	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat 2020-2024.....	II – 30
Gambar 2.29	Indeks Gini Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat 2014-2024.....	II – 31
Gambar 2.30	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Barat Tahun 2024.....	II – 31
Gambar 2.31	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Data Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024..	II – 32

Gambar 2.32	IPM Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2020-2024..	II – 34
Gambar 2.33	IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024.....	II – 35
Gambar 2.34	Tren Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Ribu Rp).....	II – 36
Gambar 2.35	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2024 (Ribu Rupiah).....	II – 36
Gambar 2.36	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat 2014-2024	II – 37
Gambar 2.37	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat 2014-2024	II – 38
Gambar 2.38	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi, 2019-2024 (Tahun).....	II – 39
Gambar 2.39	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi, 2019-2024 (Tahun).....	II – 39
Gambar 2.40	IPLM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	II – 42
Gambar 2.41	Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi 2014-2024	II – 44
Gambar 2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2020-2024	II – 46
Gambar 2.43	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 47
Gambar 2.44	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024.....	II – 50
Gambar 2.45	Angka Putus Sekolah Siswa Kabupaten Sukabumi.....	II – 51
Gambar 2.46	Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Sukabumi.....	II – 51
Gambar 2.47	Rasio Guru-Murid di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024	II – 52
Gambar 2.48	Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 53
Gambar 2.49	Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 53
Gambar 2.50	Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Sukabumi.....	II – 54
Gambar 2.51	Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Sukabumi.....	II – 54
Gambar 2.52	Angka Kematian Bayi Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 56
Gambar 2.53	Angka Kematian Ibu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024..	II – 57
Gambar 2.54	Aksesibilitas Sarana Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.....	II – 58
Gambar 2.55	Kondisi jalan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024	II – 64
Gambar 2.56	Rasio Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi 2020 – 2024	II – 68
Gambar 2.57	Indeks Demokrasi (ID) Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	II – 73
Gambar 2.58	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Jawa Barat Tahun 2020-2023.....	II – 78
Gambar 2.59	Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Sukabumi 2019 – 2023	II – 86
Gambar 2.60	IPG, IPM Kabupaten Sukabumi, dan IPG Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2024.....	II – 87
Gambar 2.61	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023	II – 88

Gambar 2.62	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	II – 89
Gambar 2.63	Ketersediaan Energi Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 93
Gambar 2.64	Ketersediaan Protein Perkapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 93
Gambar 2.65	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Target IKLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 95
Gambar 2.66	Capaian Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 96
Gambar 2.67	Jumlah Peserta KB Menurut Jenis Alat KB di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.....	II – 99
Gambar 2.68	Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi	II – 110
Gambar 2.69	Jumlah Koperasi di Kabupaten Sukabumi	II – 111
Gambar 2.70	Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Sukabumi	II – 112
Gambar 2.71	Jumlah Koleksi Buku di Kabupate Sukabumi Tahun 2020-2024	II – 115
Gambar 2.72	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2024.....	II – 116
Gambar 2.73	Jumlah Total Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024.....	II – 118
Gambar 2.74	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024	II – 119
Gambar 2.75	Struktur dan Pola Ruang untuk Kegiatan Perikanan	II – 125
Gambar 2.76	Jumlah Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Palabuhanratu.	II – 126
Gambar 2.77	Nilai Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Palabuhanratu	II – 127
Gambar 2.78	PAD Sektor Perikanan Kabupaten Sukabumi 2019-2023	II – 128
Gambar 2.79	Grafik Target dan Realisasi Tangkapan Ikan di Kabupaten Sukabumi.....	II – 129
Gambar 2.80	Target dan Realisasi Produksi Olahan Produk Perikanan di Kabupaten Sukabumi.....	II – 130
Gambar 2.81	Produksi Susu Sapi di Kabupaten Sukabumi (Kg), 2021-2024.	II – 132
Gambar 2.82	Perbandingan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sukabumi, 2021-2023.....	II – 135
Gambar 2.83	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023.....	II – 136
Gambar 2.84	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023	II – 136
Gambar 2.85	Persentase ASN Diklat Formal dan Pejabat ASN Diklat Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023	II – 138
Gambar 2.86	Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Barat Bulan Januari-Desember Tahun 2024.....	II – 140
Gambar 2.87	Jumlah Restoran di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 ...	II – 142
Gambar 2.88	Jumlah Hotel di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.....	II – 142
Gambar 2.89	Penerapan SPM per Bidang Pada Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.....	II – 185
Gambar 3.1	Produk Domestik Bruto (PDB) C 2020-2024 (Triliun Rupiah).	III – 2
Gambar 3.2	Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	III – 3
Gambar 3.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	III – 4

Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (YoY) (%)	III – 6
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	III – 7
Gambar 3.6	Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi	III – 21
Gambar 4.1	Prioritas Pembangunan Pada RKP 2026	IV – 33
Gambar 4.2	Kawasan Pertanian	IV – 102
Gambar 4.3	Kawasan/Sentra Peternakan	IV – 104
Gambar 4.4	Kawasan/Sentra Perikanan	IV – 105
Gambar 4.5	Kawasan Pariwisata	IV – 106
Gambar 4.6	Sentra IKM	IV – 107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 2 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045

untuk pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun, RPJMD Tahun 2025-2029 untuk pembangunan periode 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan 1 (satu) tahun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2026 maka disusunlah dokumen RKPD tahun 2026. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat ringkasan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9 secara substansi menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan secara proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 dalam perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 berpedoman pada Visi, Misi dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025 – 2029 penyusunan RKPD tahun 2026 juga memperhatikan (1) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024; (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029; (3) RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045; (4) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043; (5) RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; (6) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (7) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026; serta (8) Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029, tema pembangunan pada Tahun 2026 adalah **“Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”**. Pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 diarahkan kepada penguatan tata Kelola kelembagaan untuk penguatan agorindustri dan pariwisata. RKPD tahun 2026 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025 – 2029. Tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 sejalan dengan tema pembangunan Jawa Barat tahun 2026 yaitu **“pemerataan distribusi akses layanan dasar”**, serta tema pembangunan Nasional tahun 2026 **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 disusun dengan mengidentifikasi isu strategis, permasalahan serta program prioritas daerah guna menjawab proyek prioritas serta menyelesaikan target-target sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan 2026, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir

RKPD, dan penetapan RKPD melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Untuk memastikan bahwa dokumen RKPD merupakan hasil kesepakatan multi pihak, maka dalam prosesnya dilakukan pembahasan-pembahasan dalam bentuk forum konsultasi publik, forum Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi dan keterkaitan dengan tema pembangunan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

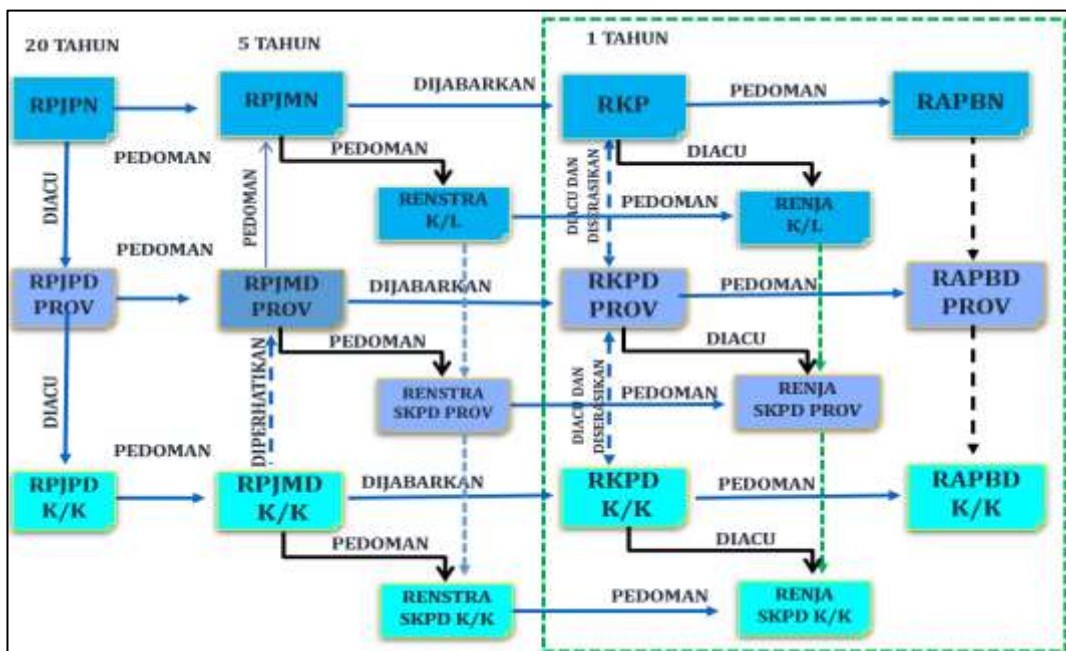
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode satu tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJPD tersebut sehingga RKPD Kabupaten Sukabumi bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan operasionalisasi RKPD oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun hubungan antar dokumen pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, 2025 (Diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026. Di samping itu, RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Selain itu, RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2026 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun berkenaan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2026;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; serta
5. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintahan, maupun antar pelaku pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional, provinsi, dan kebijakan ekonomi daerah; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2026 yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat secara eksplisit rencana kerja rencana program dan rincian pendanaan kegiatan pembangunan daerah.

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

BAB 7 PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Sukabumi

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sukabumi berada dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh sejauh 95 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan sejauh 120 Km dari Ibu Kota Negara Indonesia. Kabupaten Sukabumi terletak antara 6°57'-7°25' Lintang Selatan dan 106°49'-107° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi sekitar 4.164,15 km². Wilayah Kabupaten Sukabumi berada pada 0 - 2.960 meter di atas permukaan laut dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia, serta
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi ke dalam 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa. Dari 386 desa/kelurahan yang ada, wilayah yang dikategorikan masuk perkotaan sebanyak 120 desa/kelurahan dan sisanya 266 desa/kelurahan merupakan kategori pedesaan. Kecamatan Cisaat, Cisolok dan Cicurug memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 13 desa, sedangkan kecamatan Cidolog, Lengkong, Kebon pedes, Cireunghas, dan Bojong Genteng memiliki jumlah desa/kelurahan terkecil hanya mempunyai 5 desa/kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa, dan jumlah kelurahan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dalam data wilayah administratif kabupaten Sukabumi pada Tabel dibawah.

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Kelurahan
1	Ciomas	304,48	9	0
2	Ciracap	148,53	8	0
3	Waluran	98,82	6	0
4	Surade	119,34	11	1
5	Cibitung	88,84	6	0
6	Jampangkulon	62,59	10	1
7	Cimanggu	62,58	6	0
8	Kalibunder	86,08	7	0
9	Tegalbuleud	255,54	8	0
10	Cidolog	95,73	5	0
11	Sagaranten	113,02	12	0
12	Cidadap	85,81	6	0
13	Curugkembar	55,87	7	0
14	Pabuaran	115,70	7	0
15	Lengkong	146,51	5	0
16	Palabuhanratu	91,77	9	1
17	Simpenan	167,93	7	0

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Kelurahan
18	Warungkiara	94,97	12	0
19	Bantargadung	76,01	7	0
20	Jampang Tengah	198,49	11	0
21	Purabaya	116,02	7	0
22	Cikembar	89,84	10	0
23	Nyalindung	104,38	10	0
24	Gegerbitung	67,65	7	0
25	Sukaraja	42,00	9	0
26	Kebonpedes	10,83	5	0
27	Cireunghas	30,72	5	0
28	Sukalarang	30,90	6	0
29	Sukabumi	29,91	6	0
30	Kadudampit	69,99	9	0
31	Cisaat	21,49	13	0
32	Gunungguruh	26,31	7	0
33	Cibadak	63,06	9	1
34	Cicantayan	34,90	8	0
35	Caringin	36,54	9	0
36	Nagrak	71,19	10	0
37	Ciambar	53,46	6	0
38	Cicurug	52,16	12	1
39	Cidahu	35,30	8	0
40	Parakansalak	36,88	6	0
41	Parungkuda	24,01	8	0
42	Bojonggenteng	20,37	5	0
43	Kalapanunggal	49,37	7	0
44	Cikidang	155,01	12	0
45	Cisolok	173,47	13	0
46	Cikakak	113,14	9	0
47	Kabandungan	136,67	6	0
Kabupaten Sukabumi		4.164,15	381	5

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

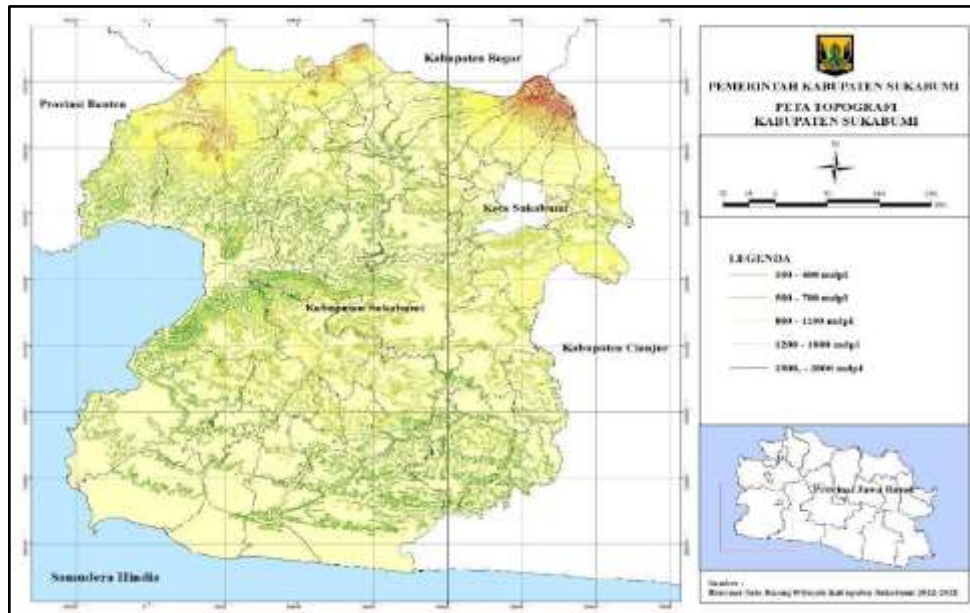
Tabel diatas menunjukkan Kecamatan Ciemas merupakan kecamatan paling luas di Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah mencapai 304,48 km², sedangkan Kecamatan Kebonpedes merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 10,83 km².

Kabupaten Sukabumi memiliki garis pantai yang membentang dari Cibangban di Kecamatan Cisolok hingga Ujung Genteng di Kecamatan Ciracap, dengan panjang total sekitar 117 kilometer. Daerah pantai ini berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Sebagian besar garis pantai termasuk dalam kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGG). Batas pantai di Kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah Palabuhanratu, meliputi Pantai Karang Buleud di sebelah timur hingga Muara Cibareno, dengan total panjang pantai sekitar 130,860 km. Di sebelah barat, umumnya terdapat pantai karang, pantai berbatu, dan pantai berpasir. Abrasi pantai terjadi di pantai timur pada musim timur (angin bertiup dari timur ke barat), dan material abrasi diendapkan di pantai barat.

B. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukabumi umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah selatan, bentuk permukaan pegunungan di daerah bagian utara, bentuk

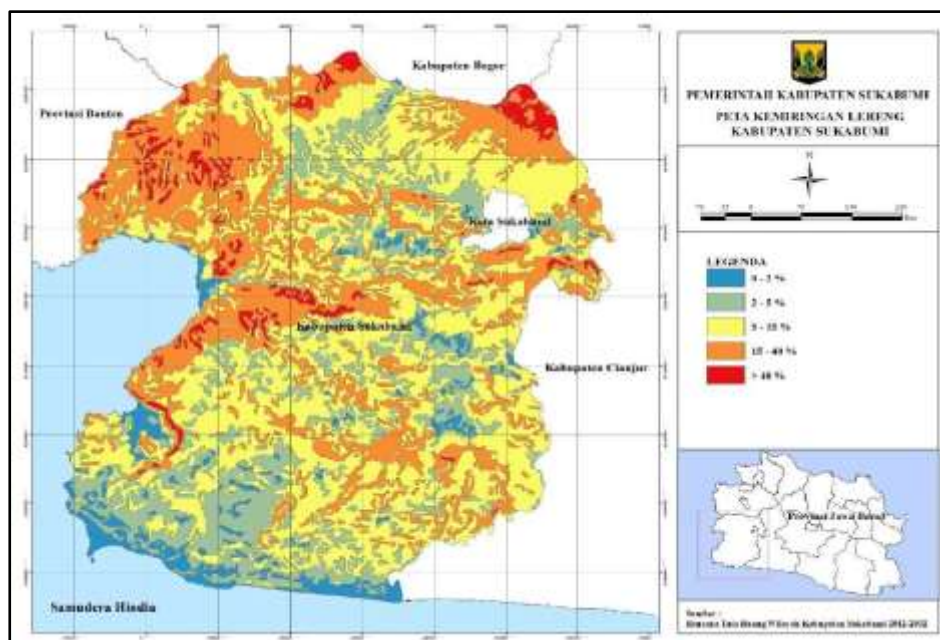
permukaan berbukit di daerah wilayah bagian tengah, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 2.960 mdpl, secara detail dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1. Peta Topografi Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Topografi Kabupaten Sukabumi terbentang dari daerah pesisir hingga pegunungan. Terdapat 2 (dua) gunung api aktif di Kabupaten Sukabumi, yaitu Gunung Halimun dan Gunung Gede yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian setinggi 1.925 mdpl dan 2.958 mdpl. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Sukabumi memiliki lereng yang sangat miring sebesar lebih dari 35°. Wilayah Kabupaten Sukabumi dengan kemiringan antara 13° – 35° meliputi 37 persen, kemiringan antara 2° - 13° meliputi 21 persen, dan sisanya daerah datar meliputi 13 persen. Sebaran kemiringan wilayah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar berikut:

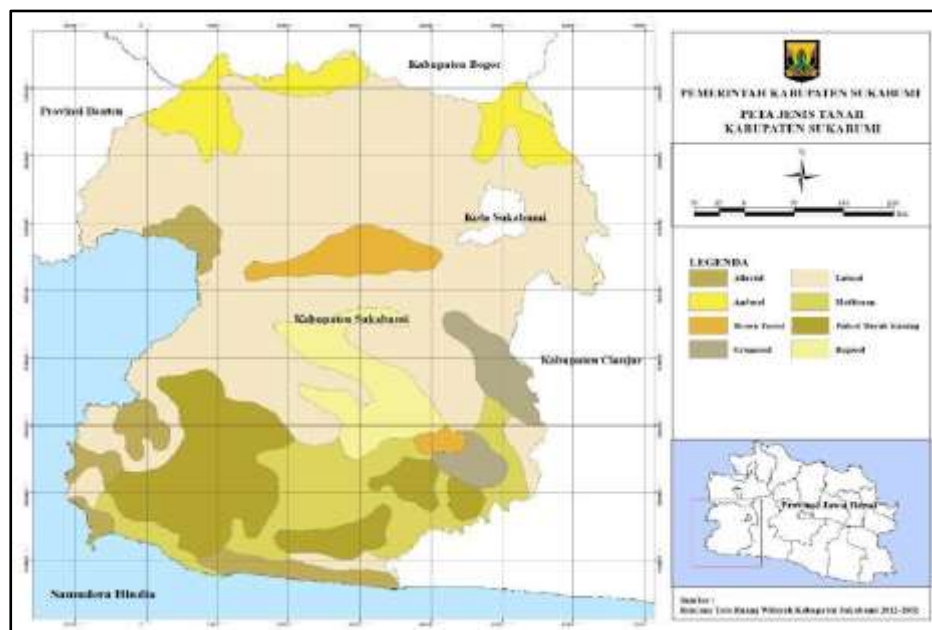


Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Peta di atas menunjukkan bahwa terdapat wilayah yang memiliki kemiringan 15 sampai 40 persen yang ditandai dengan wilayah berwarna merah dan jingga. Dengan tingkat kemiringan seperti itu, wilayah tersebut dapat diklasifikasikan memiliki kemiringan dari agak curam hingga curam. Daerah dengan kemiringan dengan kurang dari 15 persen dapat diklasifikasikan sebagai daerah dengan kemiringan datar atau landai, seperti pada Kabupaten Sukabumi bagian selatan didominasi dengan kemiringan yang landai.

Kontur permukaan Kabupaten Sukabumi yang bergelombang dengan derajat dan persentase kemiringan yang beragam serta terdapat wilayah pegunungan di wilayah utara, dan pesisir di wilayah selatan mengakibatkan terdapat perbedaan dan ciri khas jenis tanah di setiap wilayah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena mengalami perubahan yang alami dikarenakan pengaruh air, udara, dan macam macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati (Dokuchaev, 1870). Informasi mengenai jenis tanah dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan pada sektor pertanian untuk menentukan komoditas yang ditanam. Berdasarkan data dalam peta jenis tanah, di Kabupaten Sukabumi di dominasi oleh jenis tanah latosol, aluvial, dan mediteran. Menurut (Supriyo, 2009), tanah aluvial berasal dari endapan yang berlapis-lapis, sifat dan kesuburannya dipengaruhi oleh sumber bahan asalnya. Tanah aluvial dapat terendap dari sungai atau aliran besar yang banyak mengandung unsur hara dan cocok untuk ditanami padi. Tanah aluvial dapat pula terendap dari gunung merapi yang dapat menyebabkan tanah menjadi subur. Tanah latosol merupakan jenis tanah mineral yang cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanah di Kabupaten Sukabumi lebih detail dapat dilihat pada gambar dibawah:

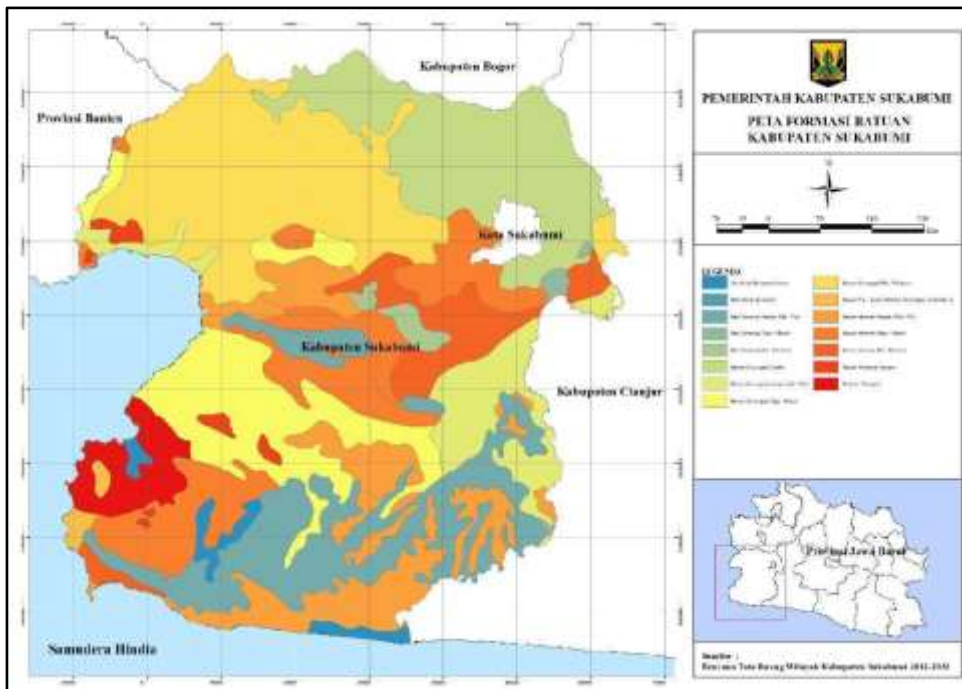


Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

C. Geologi

Geologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan mengenai kebumihan yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya, membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, dan proses yang bekerja di dalam ataupun di atas permukaan bumi (Noor, 2014). Informasi mengenai geologi bagi rencana pembangunan memiliki peranan yang penting sebagai informasi penunjang dan pendukung bagi program rencana pembangunan disuatu wilayah. Salah satu informasi geologi yang dapat dimanfaatkan yaitu jenis dan sebaran batuan wilayah. Hal ini diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan aspek fisik maupun non-fisik. Peta mengenai formasi batuan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar dibawah:



Gambar 2.4. Peta Formasi Batuan Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

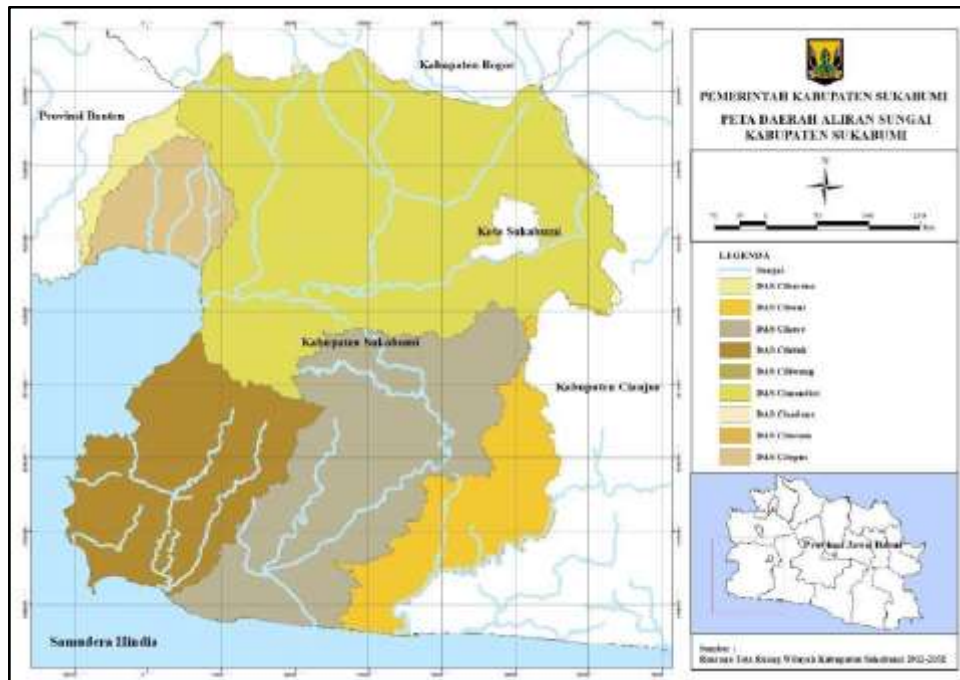
Pada Gambar diatas menunjukkan formasi batuan di Kabupaten Sukabumi yang beragam di setiap wilayah. Formasi batuan tersebut berdasarkan batuan penyusunnya dapat dikelompokkan dalam batuan Gunungapi, Batu Gamping, Batuan Pra-Tersier, Batuan Sedimen, dan Sedimen Paleogen. Batuan gunungapi merupakan batuan yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas gunung api baik langsung maupun tidak langsung. Aktivitas gunung api dapat berupa proses erupsi atau keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan dalam berbagai bentuk. Magma atau bahan erupsi yang keluar setelah mendingin kemudian akan mengendap dan membentuk batuan. Batuan gunungapi banyak ditemui di sukabumi bagian utara Kabupaten Sukabumi. Menurut (Gaffar, 2014) batuan gunungapi di Kabupaten Sukabumi dapat berasal dari batuan produk Gunungapi tua Gunung Beser, Gunung Butak, Gunung Salak, Gunung Gede dan Pangrango.

Batu gamping atau disebut dengan istilah batu kapur merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme, atau endapan dari kalsium karbonat dari air danau ataupun air laut. Batu gamping juga dapat ditemukan di dalam gua berupa stalaktit atau stalakmit akibat dari penguapan, sehingga wilayah di Sukabumi yang terdapat banyak batu gamping merupakan daerah yang terdapat banyak gua, daerah yang sebelumnya merupakan lautan atau daerah yang dekat dengan lautan. Batu gamping dapat digunakan sebagai bahan material konstruksi seperti landasan jalan dan kereta api, bahan pembuatan semen Portland. Batu gamping banyak ditemukan di Kabupaten Sukabumi bagian selatan yaitu di Kecamatan Surade, Jampangkulon, Kalibunder, Cidolog, Cidadap, Sagaranten, dan Curug Kembar.

Struktur geologi wilayah di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten/kota lain di Jawa Barat banyak dipengaruhi oleh peristiwa tumbukan lempeng atau peristiwa geologi tektonik, dengan batuan sedimen yang banyak membentuk pola lipatan. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu merupakan salah satu kawasan geologi yang unik terbentuk akibat peristiwa tumbukan antar lempeng. Jenis batuan sedimen yang terdapat banyak di kawasan Kabupaten Sukabumi merupakan batuan yang banyak mengandung mineral dan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan konstruksi yang bernilai ekonomi tinggi, dan berpotensi sebagai bahan galian tambang. Berdasarkan data ESDM Provinsi Jawa Barat potensi bahan tambang yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu batu gamping/kapur, feldspar, pasir kuarsa, trass, pasir besi, dan batu ares.

D. Hidrologi

Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air siklus hidrologi dan sumber daya air. Bila diamati keberadaan sumber air di Kabupaten Sukabumi, terdapat kuantitas sumber air yang cukup banyak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aliran sungai seperti DAS Cimanteri dan anak sungainya, DAS Cibareno, Cibuni, Cikaso, Ciletuh, Ciliwung, Cisadane, Citarum, dan Citepus yang dapat dilihat pada gambar dibawah. Sumber air tersebut digunakan masyarakat untuk keperluan mengairi lahan pertanian dan kegiatan non pertanian lainnya.

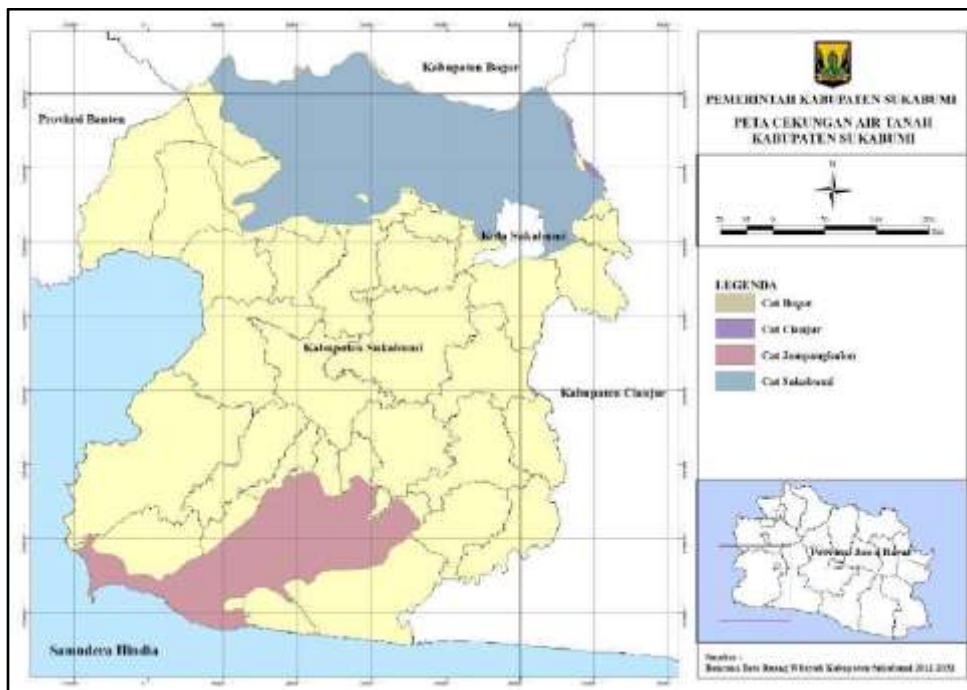


Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi dimana air berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. DAS yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cikarang, DAS Cikaso, DAS Cibuni, dan DAS Cibareno.

Air hujan yang jatuh dan mengalir dapat pula menyerap ke bawah permukaan tanah hingga mencapai zona jenuh dan terbentuk air tanah. Daerah yang terbentuk karena memiliki cadangan air tanah atau groundwater disebut dengan daerah Cekungan Air Tanah. Cekungan Air Tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Terdapat Cekungan Air Tanah Sukabumi di bagian utara Sukabumi, CAT Jampangkulon, dan CAT dari perbatasan Bogor dan Cianjur. Peta sebaran cekungan air tanah di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

E. Klimatologi

Klimatologi merupakan kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu tertentu. Klimatologi digunakan untuk mempelajari dinamika atau pola cuaca dan iklim di suatu daerah/kawasan. Data klimatologi Kabupaten Sukabumi setiap bulan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

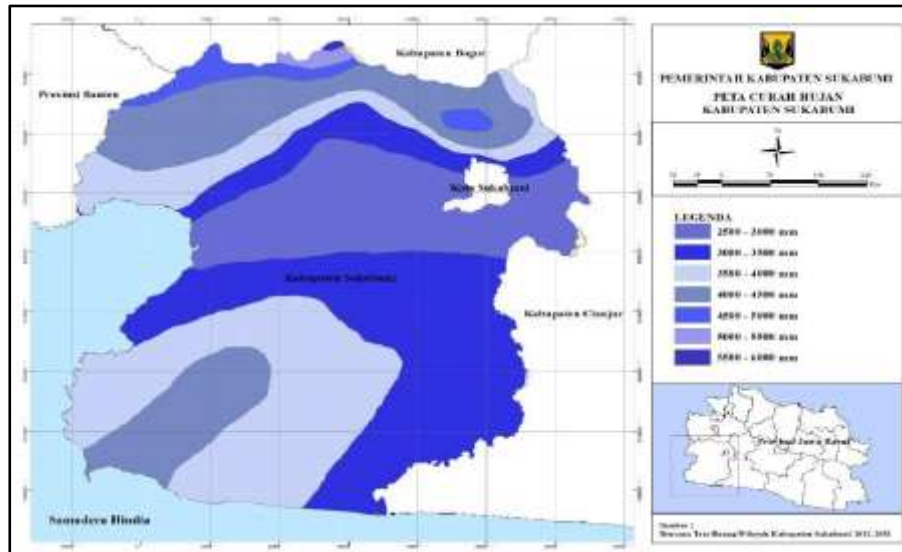
Tabel 2.2. Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Bulan <i>Month</i>	Suhu(°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	-	26,8	33,1	72,0	76,0	98,0
Februari	-	27,1	32,8	68,0	87,0	98,0
Maret	-	26,8	32,8	64,0	88,0	97,0
April	-	27,4	29,4	60,0	86,0	98,0
Mei	-	26,9	33,2	65,0	87,0	96,0
Juni	-	26,8	32,6	57,0	85,0	96,0
Juli	-	26,1	33,4	49,0	81,0	95,0
Agustus	-	26,1	33,4	49,4	79,0	96,3
September	-	27,1	34,0	49,2	77,0	95,2
Oktober	-	27,9	34,4	46,8	78,0	94,6
November	-	26,9	28,8	66,5	87,0	96,4
Desember	-	26,4	32,8	63,8	87,0	98,2

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Kabupaten Sukabumi sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, memiliki kelembaban yang cukup tinggi, mencapai 100 persen pada malam hingga pagi hari. Pada tahun 2024, tren suhu di Kabupaten Sukabumi secara umum baik dengan suhu minimum dan maksimum per bulan cenderung stabil, dengan bervariasi rata-rata sekitar 26,9°C setiap tahunnya. Curah hujan Kabupaten Sukabumi mencapai 1000-6000 mm per tahun, dengan rata-rata curah hujan bulanan antara 3-1.094 mm per bulan. Curah hujan yang cukup tinggi di

Kabupaten Sukabumi salah satunya disebabkan oleh posisi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan samudera hindia dan termasuk ke dalam daerah beriklim tropis basah, sehingga memiliki iklim laut yang sifatnya lembab dan sering terjadi hujan. Sebaran curah hujan di Kabupaten Sukabumi secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi meliputi kawasan hutan lahan pertanian (ladang, rumput/ilalang, sawah, semak belukar, perkebunan, kebun campuran, dan RTRW lainnya), permukiman, tubuh air serta kawasan yang tidak teridentifikasi. Penggunaan lahan pada tahun 2024 di masing-masing kecamatan berdasarkan RTRW, memiliki penggunaan lahan yang beragam dan dengan luasan yang berbeda-beda. Data penggunaan lahan di setiap kecamatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

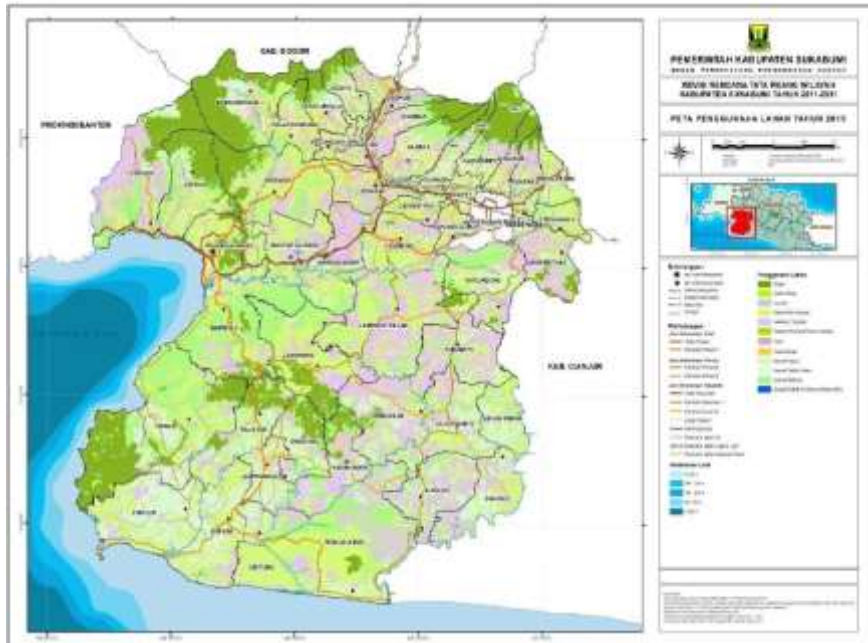
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
A.	Kawasan Lindung	52.964	12,72
1	Badan Air	1.916	0,46
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	1.965	0,47
3	Kawasan Perlindungan Setempat	299	0,07
4	Kawasan Konservasi	47.573	11,42
	a. Suaka Alam	8.602	2,06
	b. Pelestarian Alam	38.971	9,36
5	Kawasan Lindung Geologi (Kawasan Keunikan Bentang Alam)	1.211	0,29
B.	Kawasan Budi Daya	363.451	87,28
1	Badan Jalan	151	0,03
2	Kawasan Hutan Produksi	61.974	14,88
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	39.528	9,49
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap	22.146	5,32
	c. Zona Tunda (Holding Zone)	300	0,07
3	Kawasan Pertanian	266.336	63,96

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
	a. Kawasan Tanaman Pangan	64.119	15,39
	b. Kawasan Hortikultura	146.540	35,19
	c. Kawasan Perkebunan	55.301	13,28
	d. Kawasan Peternakan	377	0,09
4	Kawasan Perikanan	332	0,08
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	60	0,01
6	Kawasan Peruntukan Industri	2.085	0,50
7	Kawasan Pariwisata	470	0,11
8	Kawasan Permukiman Perkotaan	15.240	3,66
9	Kawasan Permukiman Pedesaan	16.665	4,00
10	Kawasan Transportasi	138	0,03
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	138	0,03
	Total Keseluruhan	416.415	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043

Pembangunan suatu daerah tidak dapat terpisahkan dari upaya pengintegrasian antara sumber daya yang dimiliki dengan rencana pengembangan yang akan dilakukan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan di tahun 2025-2029. Mengacu pada kondisi geografis Kabupaten Sukabumi sangat mendukung untuk pengembangan sektor primer seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Sebagai bagian dari cincin api pembentuk gunung berapi (*Ring of Fire*) di Indonesia, selain menjadi etalase bencana alam, Kabupaten Sukabumi juga memiliki lahan yang sangat subur. Terdapat 2 (dua) taman nasional yang beririsan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi menunjukkan potensi kesuburan lahan yang luar biasa.

Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Sukabumi juga sangat besar mengingat garis pantai Sukabumi yang terbentang sepanjang 112 Km. Kawasan sepanjang garis pantai tersebut menjadi bagian dari Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGG) dan juga bagian dari II – 24 *Integrated Coastal Management* (ICM) di Indonesia. Kekayaan potensi alam Sukabumi dirangkum dalam kata GURILAPS yang merupakan akronim dari Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai.



Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2020

Sebagai Kabupaten dengan luas wilayah Kabupaten terluas dengan lokasi yang diapit oleh 2 (dua) kota metropolitan Indonesia (Jabodetabek dan Bandung Raya), potensi pengembangan kawasan budidaya Sukabumi sangat terbuka. Kabupaten Sukabumi selama ini berperan sebagai salah satu daerah penunjang pangan utama untuk kedua kota metropolitan tersebut. Diharapkan pengembangan wilayah yang tepat dalam perencanaan pembangunan melalui pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sukabumi mampu meningkatkan peranan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu sentra sektor primer di Jawa Barat. Disamping potensi yang ada dari aspek geografis, administrasi, topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan tetap ada potensi bencana dan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut. Namun begitu melalui mitigasi risiko yang menyeluruh diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2026.

G. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat risiko bencana cukup tinggi. Tingkat risiko diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Sukabumi. Berbagai jenis bencana dengan kajian risikonya secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024-2028

No	Jenis Bencana	Tingkat Resiko	Bahaya	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Juta Rupiah)
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	451.116	46.330,20	5.250.906,72

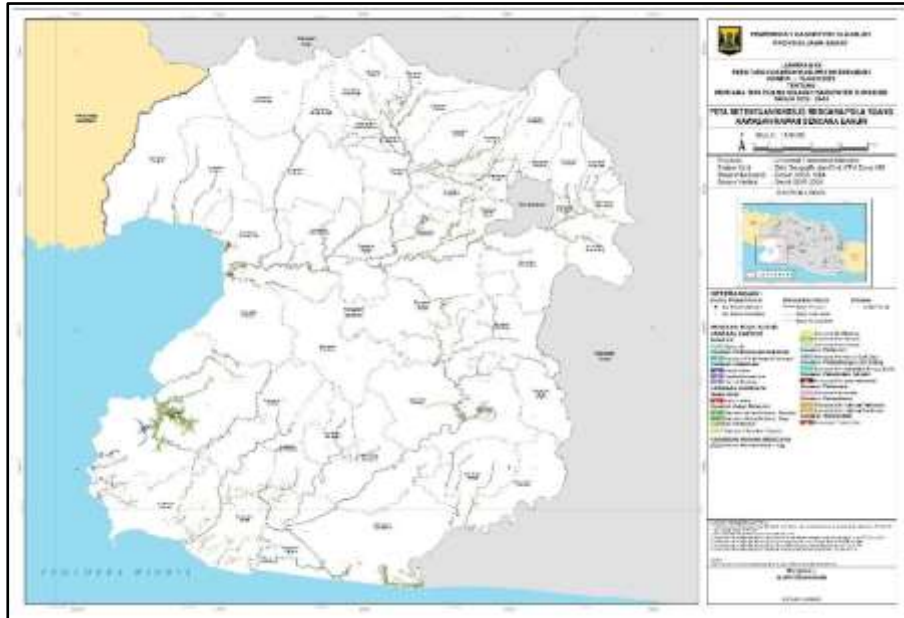
No	Jenis Bencana	Tingkat Resiko	Bahaya	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Juta Rupiah)
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	261.507	24.925,23	9.319.500,25
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	2.497.964	255.674,75	116.814.468,98
4	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	23.367	2.756,61	1.277.756,53
5	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	2.762.500	416.415,21	119.974.422,11
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	-	301.211,17	1.122.758,00
7	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	2.762.500	416.415,21	3.022.643,86
8	Letusan Gunung Api Gede	Sedang	Rendah	19.911	8.178,39	202.547,50
9	Letusan Gunung Api Salak	Sedang	Rendah	23.931	2.669,67	38.450,00
10	Likuifaksi	Tinggi	Tinggi	51.670	6.771,06	1.098.292,94
11	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	549.971	217.168,23	17.221.187,62
12	Tsunami	Tinggi	Tinggi	71.931	7.865,36	4.095.075,81
13	Multi	Tinggi	Tinggi	2.762.500	416.415,21	163.448.779,40

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan perhitungan dan analisa kelas bahaya, kerentanan dan kapasitas, didapatkan bahwa tingkat risiko di Kabupaten Sukabumi adalah tinggi untuk hampir semua jenis bencana kecuali letusan gunung api.

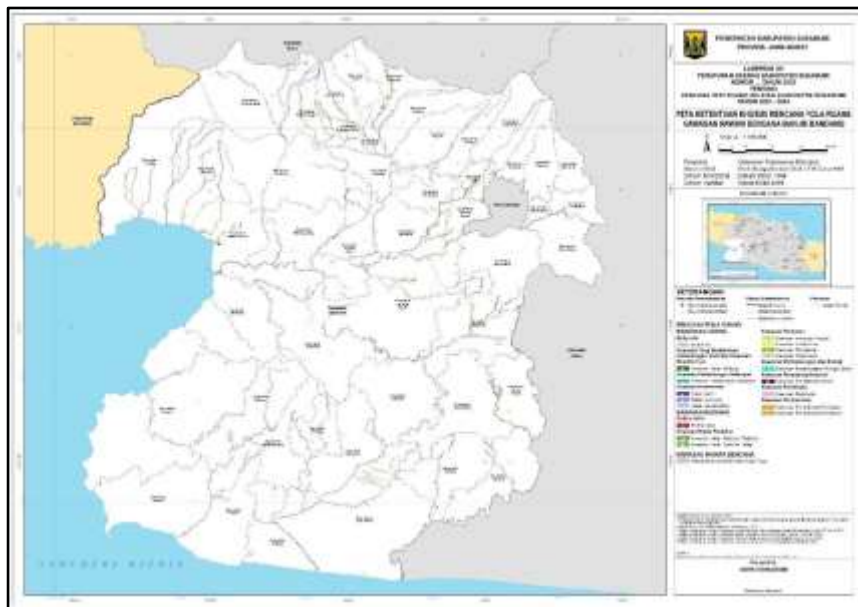
Jumlah penduduk terpapar bahaya terbanyak berpotensi terjadi pada bencana cuaca ekstrem, gempa bumi, dan multi. Hal tersebut terjadi karena bencana tersebut rentan terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi. Bencana kekeringan dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara bencana cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerugian rupiah. Hasil dari penilaian tingkat risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan daerah dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Hasil analisis tingkat risiko setiap jenis bencana dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Gambar dibawah ini secara rinci menunjukkan peta kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami.



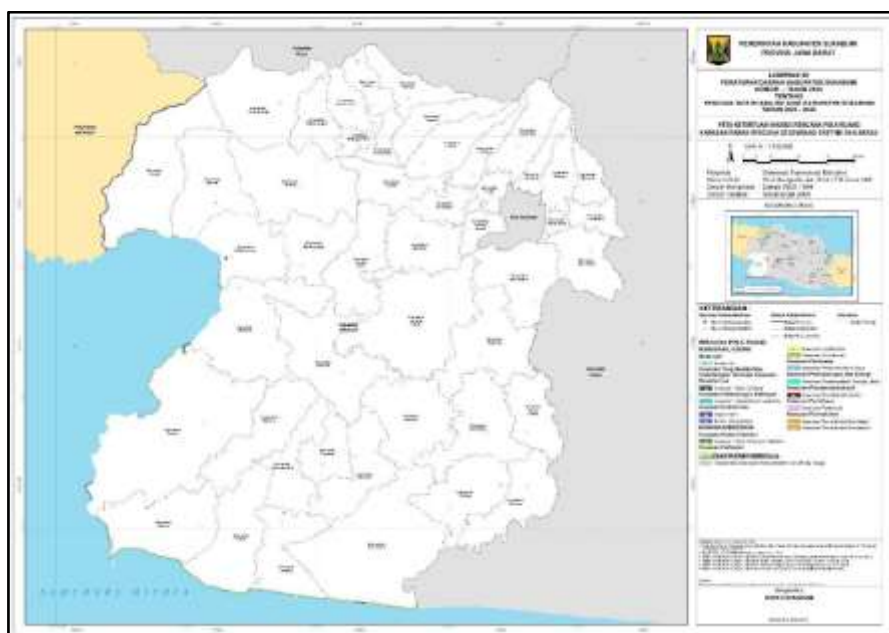
Gambar 2.9. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



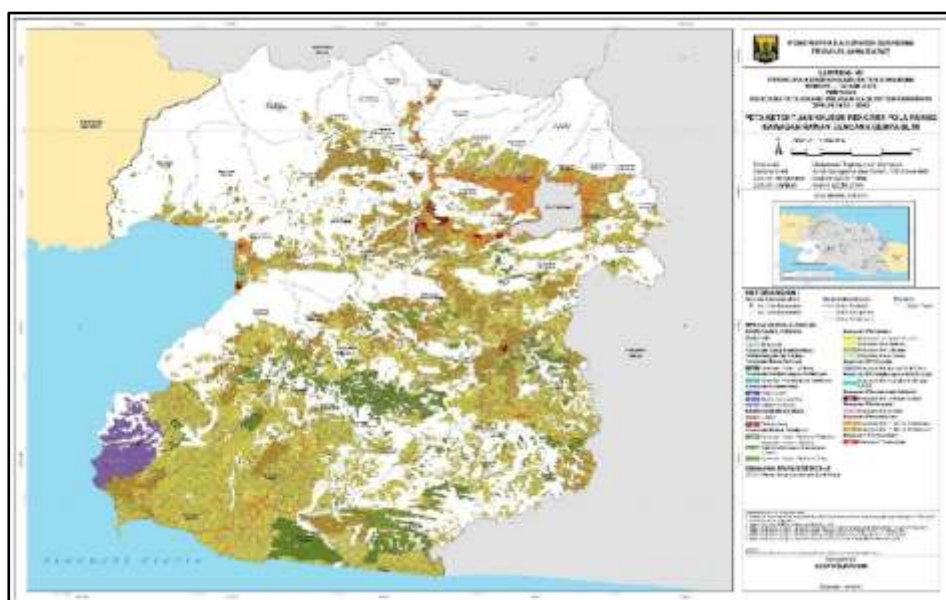
Gambar 2.10. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



Gambar 2.11. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



Gambar 2.12. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



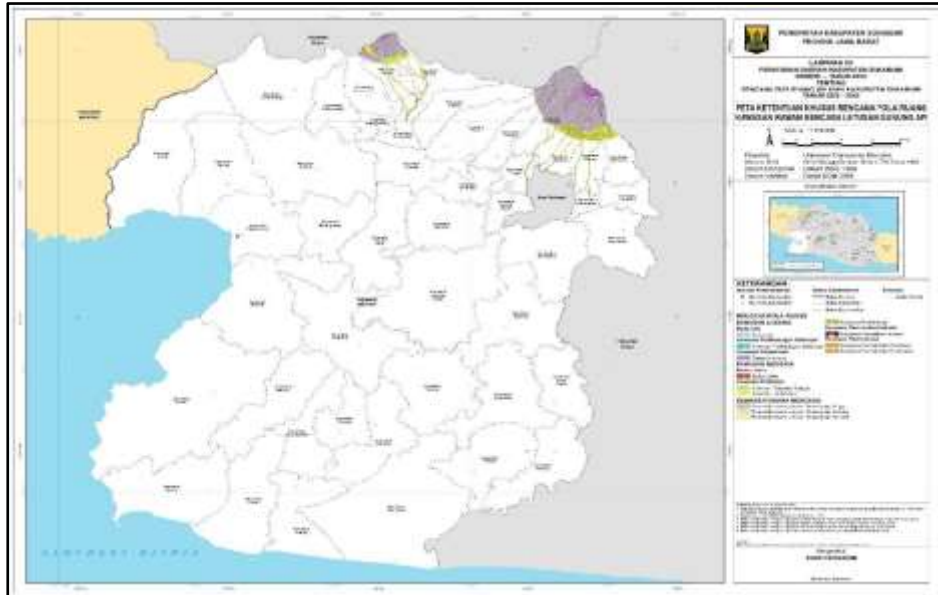
Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Sukabumi Tahun 2022-2023



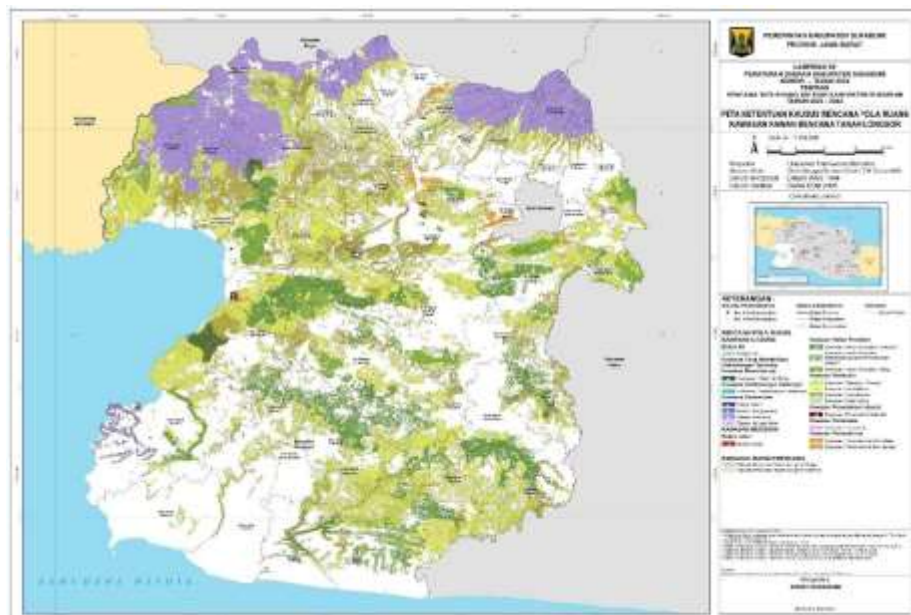
Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Sukabumi Tahun 2022-2023



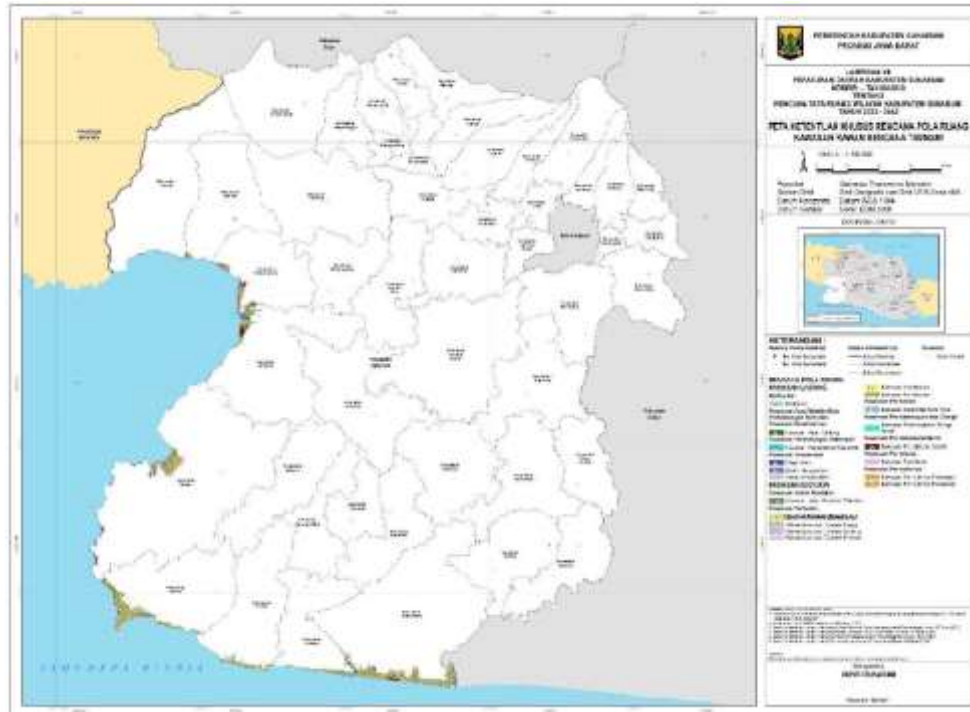
Gambar 2.15. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



Gambar 2.16. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api Salak di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



Gambar 2.17. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043

H. Peran Strategis Daerah

Peran strategis daerah dalam pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui sinergi antara perencanaan yang berbasis potensi lokal, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini adalah penjabarannya:

- **Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. **Kewenangan dan Kapasitas Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sah dan kemampuan teknis untuk merancang serta melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Kewenangan ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah.

2. **Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Daerah**

Setiap perencanaan pembangunan harus berangkat dari identifikasi dan analisis terhadap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah. Hal ini penting agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. **Penanganan Isu Strategis Daerah**

Isu strategis merupakan tantangan atau permasalahan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan harus menjadi fokus utama dalam perencanaan. Contoh isu strategis antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, degradasi lingkungan, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar.

- **Pengembangan Potensi Daerah**

- 1. Strategi Pembangunan Fisik/Lokalitas**

Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas publik lainnya yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

- 2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha**

Mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi lokal.

- 3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, peningkatan derajat kesehatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing.

- 4. Strategi Pengembangan Masyarakat**

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif, pelibatan kelompok rentan dan marjinal, serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat di tingkat lokal.

- **Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

- 1. Perlindungan Sosial terhadap Masyarakat**

Memberikan jaminan sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan, termasuk dalam bentuk bantuan langsung, subsidi, dan program pemberdayaan ekonomi, guna menjamin kehidupan yang layak.

- 2. Menjaga Persatuan, Kesatuan, dan Keutuhan NKRI**

Menumbuhkan semangat kebangsaan, toleransi, serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional yang mendukung stabilitas sosial dan politik di daerah.

- 3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**

Meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup agar masyarakat dapat hidup secara sehat, aman, dan sejahtera.

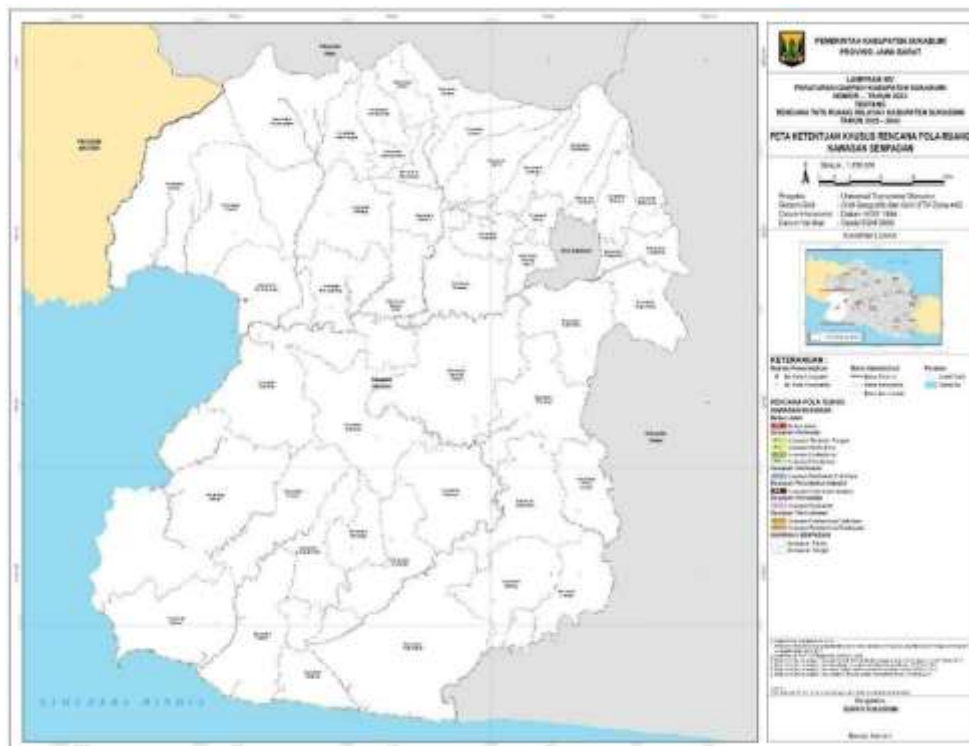
I. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala macam kekayaan alam yang tersedia di bumi dan dapat digunakan oleh manusia. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah segala macam benda atau bahan yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk menjalani kehidupan. Potensi sumber daya alam merujuk pada kekayaan atau keunggulan sumber daya alam yang terdapat dalam suatu wilayah dan dapat dikembangkan, dimanfaatkan, serta digunakan oleh manusia. Jenis sumber daya alam mencakup unsur-unsur seperti bumi, air, dan

dirgantara. Secara potensi sumber daya alam, Kabupaten Sukabumi kaya akan berbagai potensi diantaranya potensi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, energi panas bumi dan tambang. Potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah Potensi geologi pertambangan.

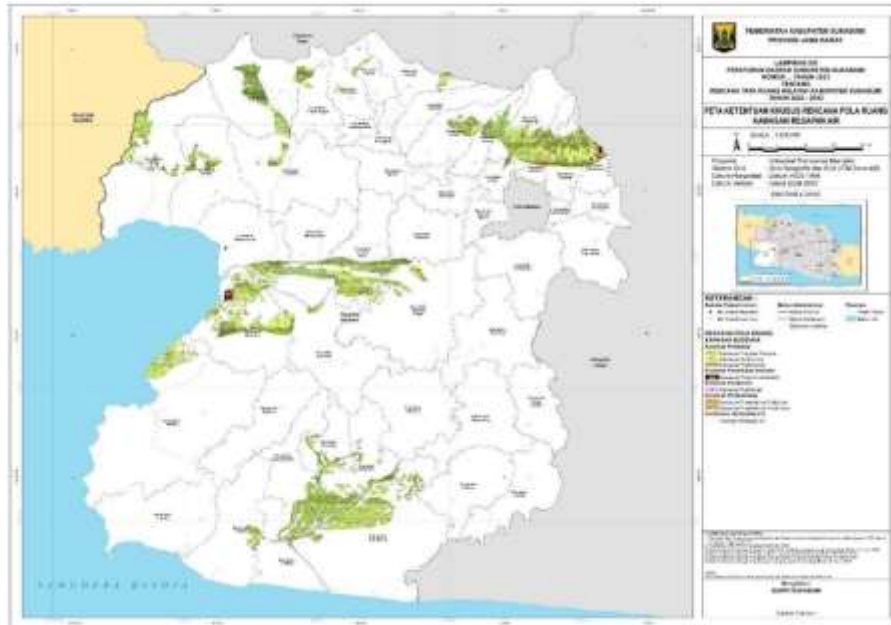
RTRW adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. RTRW adalah peta yang menggambarkan perencanaan tata ruang suatu wilayah. RTRW dibuat dengan mempertimbangkan aspek administratif, struktur, pola, sumber daya alam, dan aspek fungsional. RTRW memiliki fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RTRW juga bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di suatu lingkungan.

Secara khusus, penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing. Gambar dibawah berikut secara rinci menunjukkan peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan, resapan air, pertanian pangan berkelanjutan, dan peta rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air.



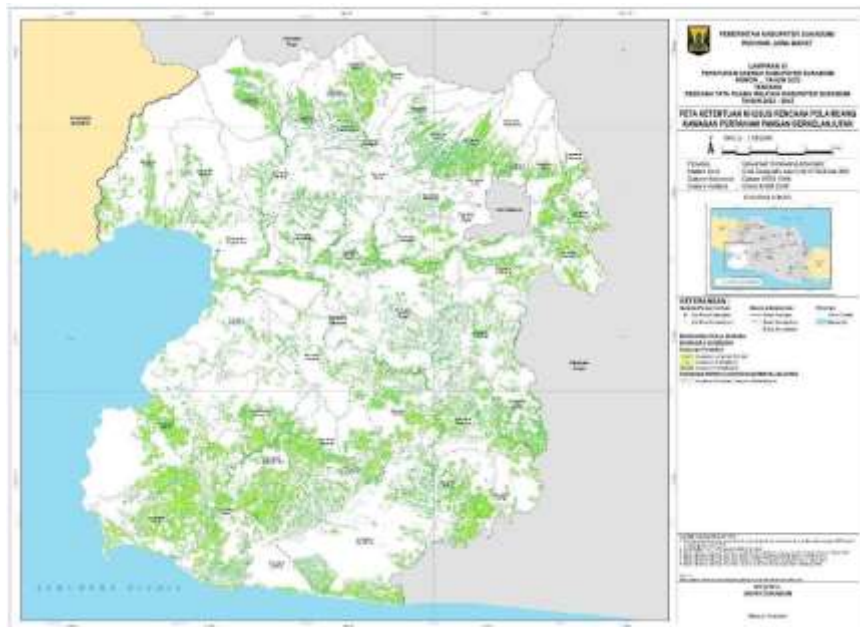
Gambar 2.18. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



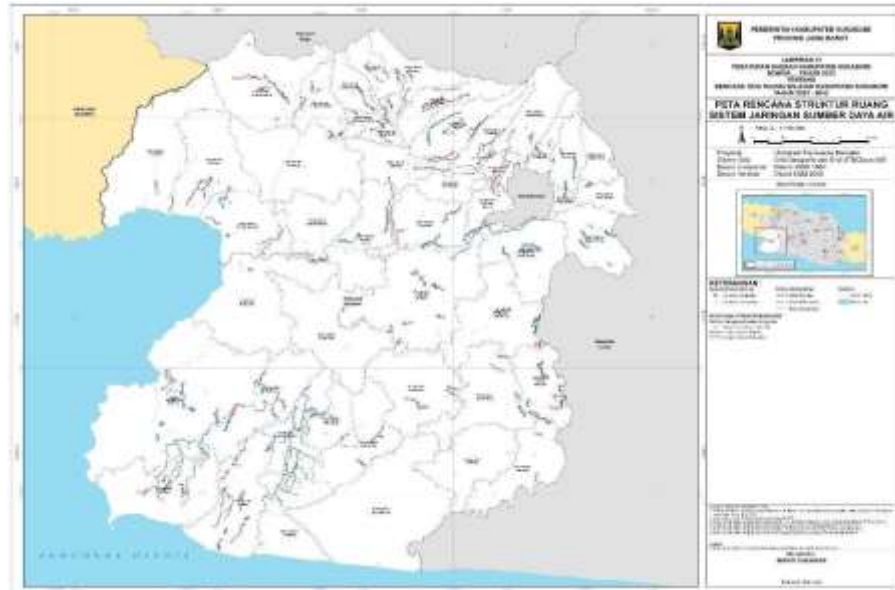
Gambar 2.19. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



Gambar 2.20. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043



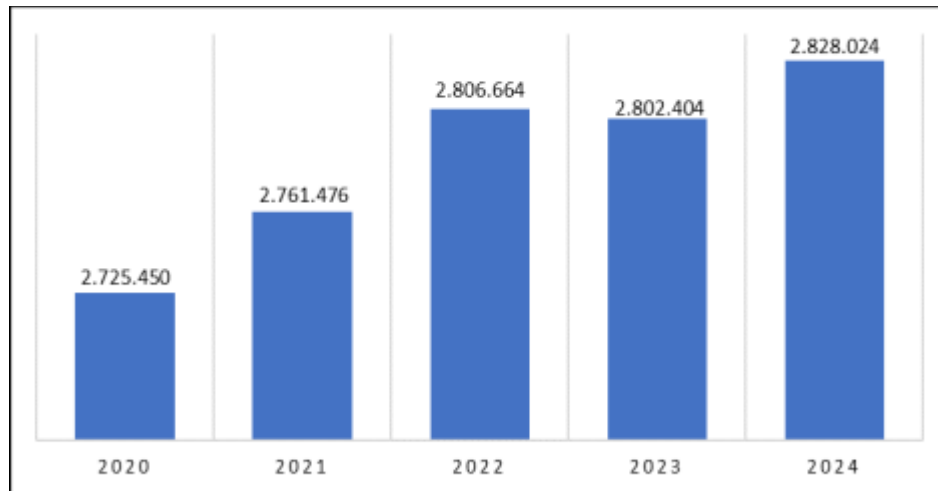
Gambar 2.21. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043

J. Demografi

Penduduk Kabupaten Sukabumi saat ini sebesar 2.828.024 jiwa (Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,99 persen pada tahun 2020 sampai tahun 2024 dan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi diharapkan tetap seimbang dan terkendali, sehingga dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa variabel yang perlu dilihat seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) dan angka reproduksi netto atau *Net Reproduction Rate* (NRR), angka beban ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR), kepadatan penduduk dan penduduk usia lanjut.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.725.450 jiwa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 2.761.476 jiwa dan 2.806.664 jiwa, menurun menjadi 2.802.404 jiwa pada tahun 2023, kemudian kembali naik pada tahun 2024 sebanyak 2.828.024 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.22. Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

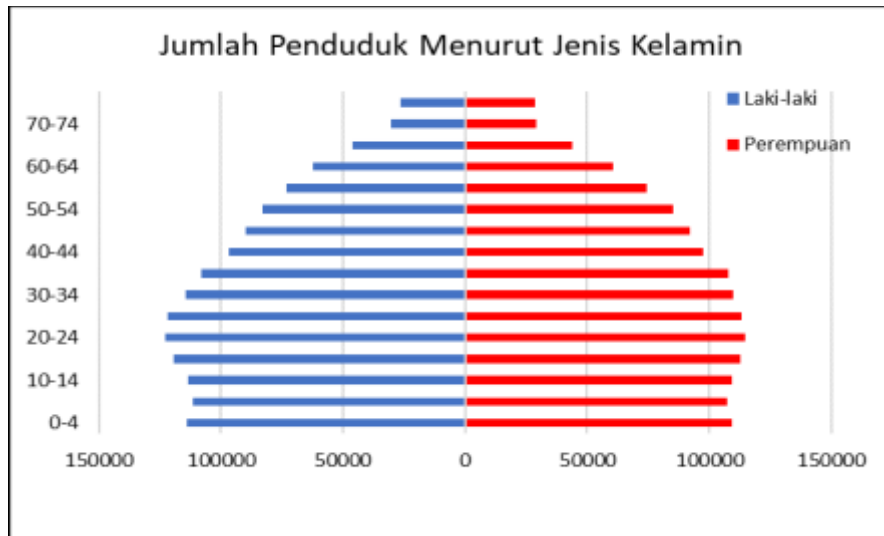
Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2024 secara proporsi jenis kelamin masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.433.378 jiwa atau sebesar 50,68 persen dari total penduduk, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.380.930 jiwa atau hanya sebesar 49,32 persen dari total penduduk. Berdasarkan kelompok usia penduduk Kabupaten Sukabumi didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 69 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah.

Tabel 2.5. Komposisi Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	113.736	109.208	222.944
5-9	111.564	107.229	218.793
10-14	113.613	109.042	222.655
15-19	119.433	112.675	232.108
20-24	122.890	114.805	237.695
25-29	121.622	113.040	234.662
30-34	114.263	109.768	224.031
35-39	107.832	107.872	215.704
40-44	96.829	97.666	194.495
45-49	90.023	91.955	181.978
50-54	83.131	85.331	168.462
55-59	73.009	74.146	147.155
60-64	62.354	60.414	122.768
65-69	46.304	43.679	89.983
70-74	30.568	29.131	59.699
>75	26.207	28.685	54.892
Jumlah	1.433.378	1.394.646	2.828.024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025



Gambar 2.23. Piramida Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

Gambar piramida di atas bentuk piramida penduduk yang mulai mengalami pergeseran dari piramida penduduk muda (ekspansif) ke piramida stationer (seimbang). Hal ini menunjukkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi berhasil menekan angka kelahiran. Disisi lain dapat dilihat bahwa jumlah terbesar yang digambarkan oleh piramida penduduk diatas berada pada usia 20 - 24 tahun. Hal ini akan berdampak pada penyediaan fasilitas pendidikan menengah dan penciptaan lapangan kerja di masa depan yang lebih banyak mengingat jumlah usia yang cukup besar pada rentang usia tersebut. Berikut adalah tabel jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024:

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
Ciemas	57.868
Ciracap	58.484
Waluran	32.173
Surade	84.552
Cibitung	31.116
Jampang Kulon	48.996
Cimanggu	27.389
Kali Bunder	32.993
Tegal Buleud	36.999
Cidolog	17.255
Sagaranten	54.449
Cidadap	19.921
Curugkembar	31.792
Pabuaran	45.711
Lengkong	34.453
Palabuhanratu	121.477
Simpenan	60.870
Warung Kiara	68.186
Bantargadung	42.984
Jampang Tengah	72.737
Purabaya	46.035
Cikembar	99.198
Nyalindung	53.765
Geger Bitung	43.917

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
Sukaraja	99.396
Kebonpedes	35.577
Cireunghas	37.372
Sukalarang	53.241
Sukabumi	52.518
Kadudampit	60.922
Cisaat	133.304
Gunungguruh	59.196
Cibadak	125.670
Cicantayan	63.116
Caringin	53.505
Nagrak	93.573
Ciambar	45.049
Cicurug	139.694
Cidahu	78.228
Parakan Salak	47.639
Parung Kuda	79.947
Bojong Genteng	42.008
Kalapa Nunggal	55.035
Cikidang	73.003
Cisolok	80.736
Cikakak	47.742
Kabandungan	48.233
Kabupaten Sukabumi	2.828.024

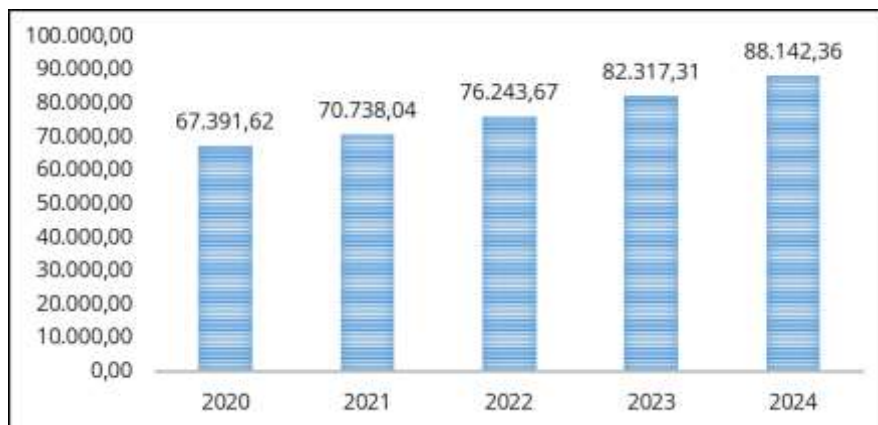
Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukabumi merupakan ukuran kinerja ekonomi wilayah tersebut. Berdasarkan data yang terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, PDRB Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Sukabumi mencapai Rp 88.142,36 miliar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. PDRB mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sukabumi dalam gambar berikut:

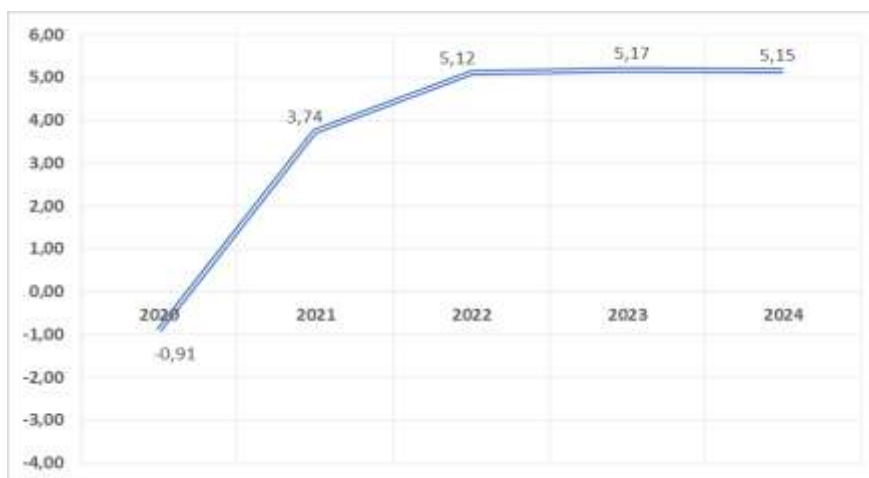


Gambar 2.24. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sukabumi (Miliar Rupiah), 2020– 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah yang berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat perkembangan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik Gambar tersebut, terlihat dinamika pertumbuhan yang mencerminkan pemulihan ekonomi, Pertumbuhan ini terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 5,17 persen, mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang cukup kuat, seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat, pemulihan sektor pariwisata, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, pada tahun 2024, laju pertumbuhan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,02 persen menjadi 5,15 persen. Meskipun penurunannya relatif kecil, hal ini menandakan adanya hambatan yang mulai muncul kembali, baik dari faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ini antara lain:

1. Stabilitas investasi daerah yang mendorong sektor konstruksi dan industri pengolahan.
2. Peran sektor pertanian dan pariwisata yang cukup besar di Kabupaten Sukabumi, terutama setelah pembukaan kembali akses wisata.
3. Dukungan belanja pemerintah melalui program infrastruktur dan bantuan sosial
4. Namun, pada tahun-tahun terakhir, faktor seperti kenaikan inflasi, ketidakpastian ekonomi global, atau perlambatan investasi swasta bisa menjadi penyebab turunnya pertumbuhan.

Oleh karena itu, meskipun tren pertumbuhan cukup positif, dibutuhkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekosistem investasi dan inovasi lokal.

C. Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi Kabupaten Sukabumi terdiri dari beberapa sektor utama yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Berikut adalah gambaran struktur ekonomi wilayah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Industri Pengolahan
- c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- d. Konstruksi
- e. Transportasi dan Pergudangan
- f. Jasa-jasa Lainnya

Struktur ekonomi yang beragam ini mencerminkan potensi besar Kabupaten Sukabumi untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Berikut ini adalah gambaran struktur ekonomi wilayah kabupaten sukabumi tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukabumi (persen) Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,96	22,3	22,61	22,69	22,58
Pertambangan dan Penggalian	4,92	5,12	4,80	4,37	4,18
Industri Pengolahan	16,25	16,66	16,78	16,57	17,13
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	11,74	12,22	11,92	11,89	11,95
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,91	16,89	16,89	16,88	16,25
Transportasi dan Pergudangan	7,33	7,02	7,23	7,84	8,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,47	2,40	2,56	2,61	2,66
Informasi dan Komunikasi	2,98	3,07	2,99	2,97	2,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,76	0,75	0,73	0,74
Real Estate	1,63	1,72	1,74	1,81	1,77
Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,14	2,96	2,73	2,57	2,56
Jasa Pendidikan	5,65	5,59	5,65	5,62	5,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,13	1,12	1,14	1,09
Jasa Lainnya	1,79	1,72	1,78	1,83	1,77
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Kontribusi sektor ini sedikit fluktuatif tetapi tetap tinggi, menandakan pentingnya sektor agraris di daerah ini
- b. Pertambangan dan Penggalan: ada penurunan kontribusi pada 2024 setelah peningkatan pada 2021
- c. Industri Pengolahan: Sektor ini menunjukkan sedikit penurunan dari 2022 ke 2023 dan kembali mengalami peningkatan sampai tahun 2024
- d. Pengadaan Listrik dan Gas: Kontribusi stabil tetapi sangat kecil dibandingkan sektor lainnya dari tahun 2020 sampai dengan 2023, tetapi turun sedikit pada tahun 2024
- e. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang: Stabil dan sangat kecil kontribusinya
- f. Konstruksi: Sektor konstruksi menunjukkan fluktuasi kecil, namun tetap merupakan sektor penting
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor: Kontribusi sektor ini relatif stabil sepanjang tahun
- h. Transportasi dan Pergudangan: terlihat peningkatan yang cukup signifikan pada 2024
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Ada sedikit peningkatan kontribusi pada 2022 sampai tahun 2024
- j. Real Estate: Kontribusi sektor ini terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2023, tetapi turun pada tahun 2024
- k. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Ada penurunan kontribusi dari sektor ini setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor utama yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Beberapa sektor seperti real estate dan jasa kesehatan menunjukkan tren peningkatan kontribusi yang konsisten. Sebaliknya, sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan menunjukkan penurunan kontribusi dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur ekonomi Kabupaten Sukabumi dengan pergeseran kontribusi antara berbagai sektor usaha.

D. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan proporsi pendapatan pajak daerah terhadap total nilai ekonomi daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah persentase dari total penerimaan pajak daerah (seperti PBB, retribusi, dan lainnya) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dibawah ini adalah Tabel Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024:

Tabel 2.8. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

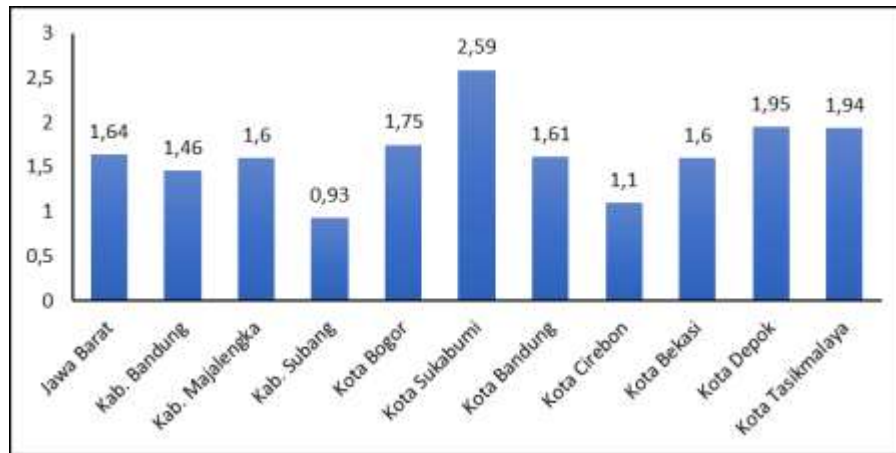
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak Daerah	271.144.191,978	285.482.201,27	296.141.722,91	296.621.618,66	312.517.498,55
PDRB	67.391.620.000	70.738.040.000	76.243.678.000	82.317.310.000	88.142.360.000
Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB	0,402	0,404	0,388	0,360	0,355

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Akan tetapi, apabila dilihat dari tahun 2020 ke 2024 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang turun berarti proporsi pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dikumpulkan terhadap keseluruhan pendapatan ekonomi daerah (PDRB) semakin kecil, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah yang relatif stagnan atau bahkan berkurang dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB.

E. Inflasi

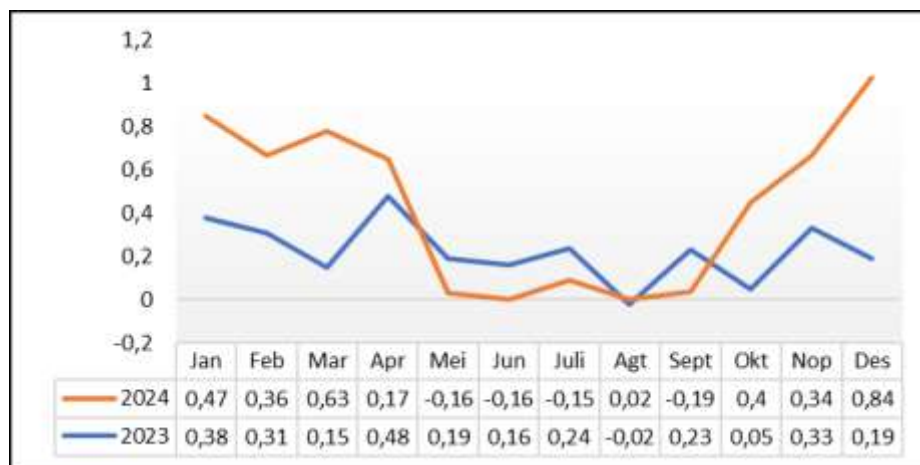
Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi dapat disebabkan oleh mekanisme pasar antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Laju inflasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan perbandingannya dengan Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.26. Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (%), 2024

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan gambar diatas, diantara kabupaten/kota lain, laju inflasi paling tinggi adalah Kota Sukabumi. Laju inflasi di Kabupaten Sukabumi yang diprosikan oleh laju inflasi Kota Sukabumi. Berikut ini adalah laju inflasi Kabupaten Sukabumi per bulan tahun 2023-2024:

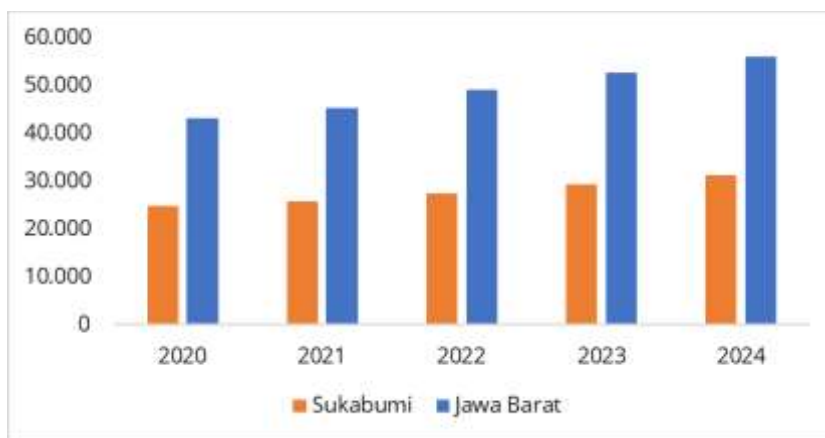


Gambar 2.27. Laju Inflasi Per Bulan di Kabupaten Sukabumi 2023 – 2024

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024

F. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB dapat dinikmati oleh penduduknya, hal ini karena terdapat sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah. Angka pendapatan per kapita (per kapita Income) diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2024 atas dasar harga berlaku:



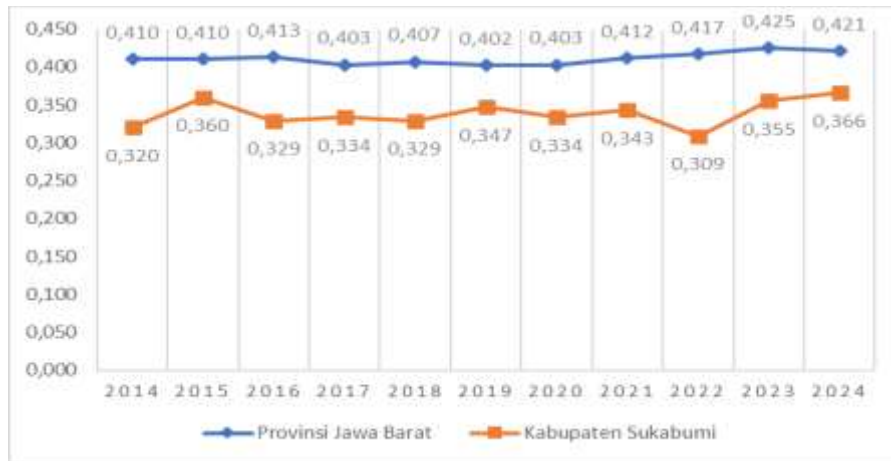
Gambar 2.28. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan tabel diatas, PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan, dari Rp 24.836 ribu pada tahun 2020, menjadi Rp 31.167.000 pada tahun 2024. Begitu pula untuk Provinsi Jawa Barat juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2024 yaitu sebesar Rp 42.237.000 menjadi Rp 56.080.000. Angka-angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu data PDRB digunakan untuk memahami kondisi ekonomi dan merencanakan kebijakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sukabumi.

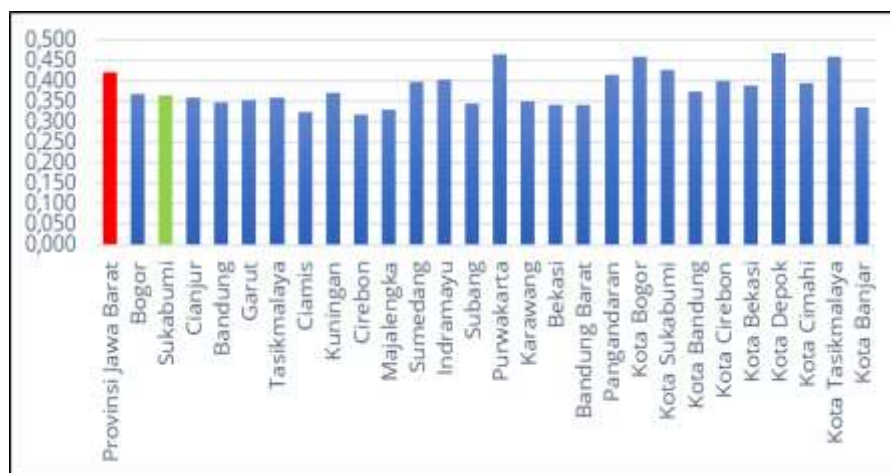
G. Indeks Gini

Indeks gini menunjukkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Indeks gini Kabupaten Sukabumi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan ketimpangan. Pada tahun 2020 indeks gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,334 poin dan meningkat menjadi 0,366 poin pada tahun 2024. Selama rentang waktu tersebut ketimpangan Kabupaten Sukabumi lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, pada tahun 2024 Kabupaten Sukabumi menempati urutan ke-13 dari kabupaten/kota yang memiliki indeks gini terendah. Berikut adalah indeks gini dari tahun 2014-2024 serta perbandingannya dengan rata-rata Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.29. Indeks Gini Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat 2014-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)



Gambar 2.30. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sukabumi yang diukur dengan Gini Ratio. Pada tahun 2023, indeks gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,425 poin dan turun menjadi 0,421 poin pada tahun 2024. Berdasarkan (Todaro, 2006) ketimpangan pendapatan penduduk sukabumi cenderung kurang merata karena menyentuh angka diatas 0,350 poin, namun dengan kondisi tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, maka pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata pada level pendapatan yang rendah atau menengah.

H. Kemiskinan

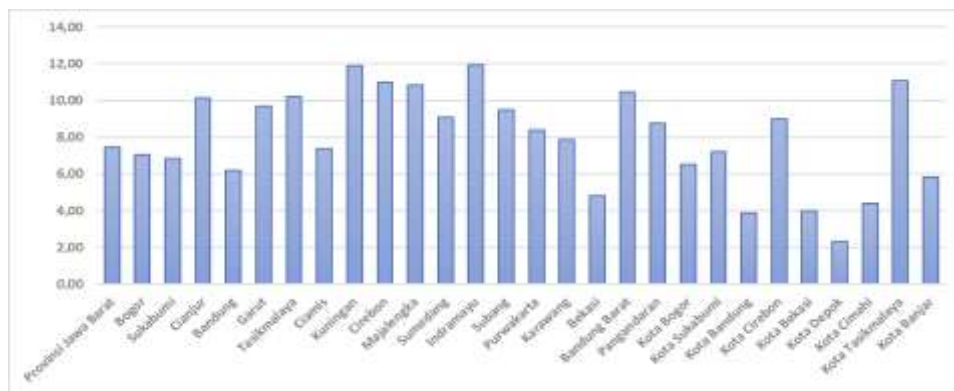
Salah satu aspek demografi yang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan adalah jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi idealnya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan. Ketika perekonomian tumbuh, daya beli masyarakat seharusnya meningkat, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan hidup lainnya secara layak. Berikut ini adalah Persentase Penduduk Miskin Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan data kemiskinan daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 2.9. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Ribu Jiwa) 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bogor	465,67	491,24	474,74	453,76	446,79
Kabupaten Sukabumi	175,10	194,35	186,28	178,71	175,93
Cianjur	234,47	260,02	246,81	240,06	239,30
Kota Sukabumi	25,42	27,19	26,59	23,10	24,10
Jawa Barat	3.920,23	4.195,34	4.070,89	3.883,79	3.848,67

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025



Gambar 2.31. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Data Kemiskinan Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Adapun gambaran umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi, 2020–2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	328.824	175,10	7,09
2021	342.094	194,35	7,70
2022	357.636	186,28	7,34
2023	392.705	178,71	7,01
2024	416.751	175,93	6,87

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dinamika jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah. Jumlah penduduk miskin menurun secara bertahap menjadi 175,93 ribu jiwa pada 2024, dan persentasenya turun menjadi 6,87 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara umum. Sementara itu, garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun, dari Rp 328.824 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp 416.751 pada 2024. Kenaikan ini

menunjukkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar hidup masyarakat, yang disebabkan oleh inflasi dan perubahan harga barang pokok.

Analisis data ini menunjukkan bahwa meskipun garis kemiskinan terus naik, jumlah dan persentase penduduk miskin justru menurun, menandakan adanya perbaikan distribusi kesejahteraan. Namun demikian, data juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat rentan masih mudah terdampak oleh guncangan ekonomi, sehingga pemerintah perlu terus menjaga kesinambungan kebijakan pro-poor dan memperkuat sistem perlindungan sosial. Upaya ini penting untuk menjaga tren penurunan kemiskinan tetap konsisten dalam jangka panjang.

Kemiskinan Kabupaten Sukabumi selain dilihat dari jumlah penduduk miskin dapat juga dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) mengukur rata-rata kesenjangan pendapatan dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan sedangkan Indeks Keparahannya mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa parah kondisi kemiskinan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin parah distribusi ketidakmerataan di antara penduduk miskin. Adapun data dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, 2020–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2020	0,80	0,12
2021	1,04	0,23
2022	0,93	0,19
2023	1,01	0,23
2024	0,88	0,20

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Data dalam Tabel diatas menggambarkan dinamika Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi selama periode 2020–2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan antara garis kemiskinan dan pengeluaran penduduk miskin, sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan mencerminkan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1.04, menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan masih relatif rendah.. Angka ini sempat membaik di tahun 2022 menjadi 0,93, namun kembali naik di tahun 2023 (1,01), dan mengalami sedikit perbaikan lagi pada 2024 (0,88).

Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan juga menunjukkan tren serupa. Pada 2020, nilainya berada di 0,12, kemudian melonjak ke 0,23 pada 2021 — menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah orang miskin yang bertambah, tetapi juga ketimpangan di antara mereka semakin tajam. Meskipun menurun menjadi 0,19 pada 2022, indeks ini kembali naik menjadi 0,23 di 2023, dan turun sedikit ke 0,20 pada 2024. fluktuasi yang masih terjadi mencerminkan

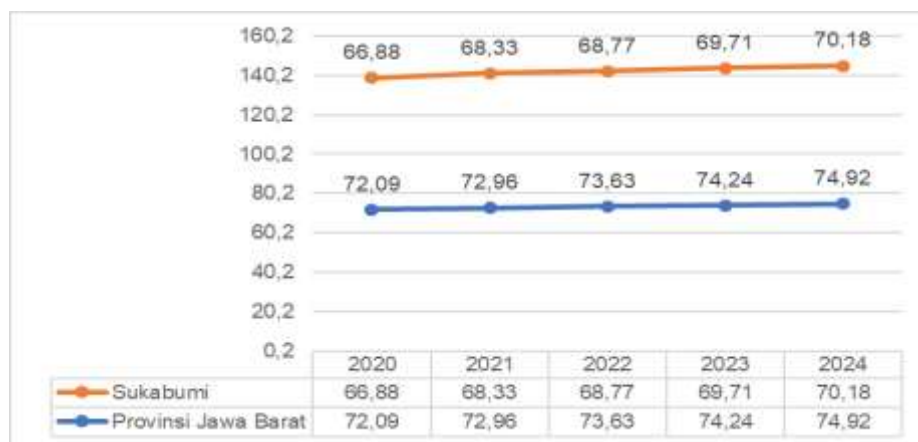
kerentanan struktural, baik dalam aspek distribusi bantuan sosial, akses terhadap peluang ekonomi, maupun efektivitas program pengentasan kemiskinan. Ini menjadi sinyal bahwa upaya penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu intervensi yang lebih terarah dan berpihak pada kelompok paling rentan, seperti penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi produktif, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan dasar.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga komponen dasar yaitu kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta ekonomi melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP). IPM sering dijadikan sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Menurut Todaro (2006), IPM digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif, dengan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu masa hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), serta standar kehidupan (*standard of living*).

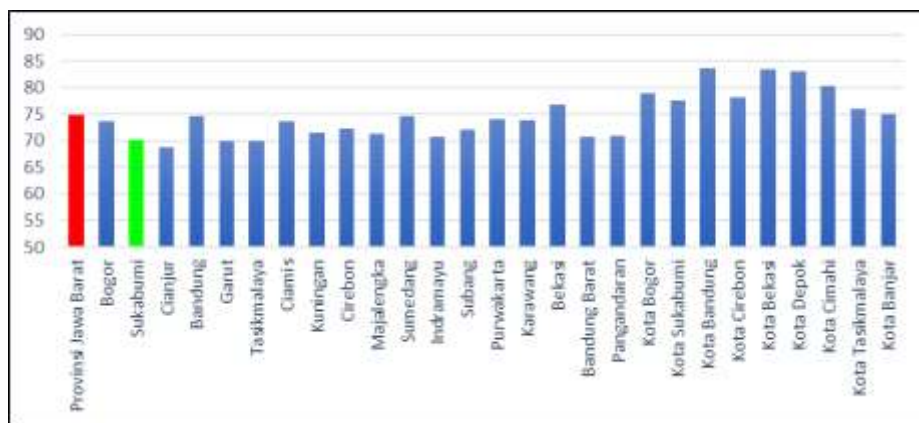
Gambar dibawah menunjukkan perbandingan capaian IPM Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat selama periode tahun 2020-2024. IPM Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Selaras dengan Kabupaten Sukabumi, capaian IPM Jawa Barat mengalami peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, IPM Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat. Selain itu, gap antara IPM Kabupaten Sukabumi dengan rata-rata IPM Jawa Barat cenderung bertambah besar setiap tahunnya. Berikut ini adalah gambar capaian IPM Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2020-2024.



Gambar 2.32. IPM Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar dibawah menunjukkan perbandingan capaian IPM Kabupaten Sukabumi dan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tahun 2024. IPM Kabupaten Sukabumi berada di posisi keempat terbawah dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Akan tetapi, Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan IPM yang positif. UNDP dalam Todaro (2006) mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi tiga kelompok, yaitu tingkat pembangunan manusia yang rendah, menengah, dan tinggi. Berdasarkan gambar diatas, IPM Kabupaten Sukabumi tergolong ke dalam tingkat pembangunan yang menengah berada dalam kisaran 50-79,99 poin. Di samping itu, BPS mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi empat kelompok, yaitu tingkat pembangunan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi sehingga Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam kelompok pembangunan manusia yang tinggi.

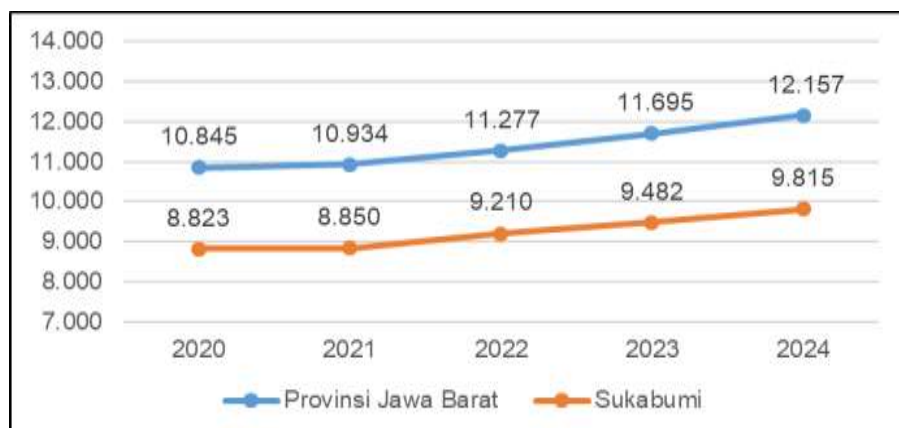


Gambar 2.33. IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

B. Pengeluaran Per Kapita (*Purchasing Power Parity/PPP*)

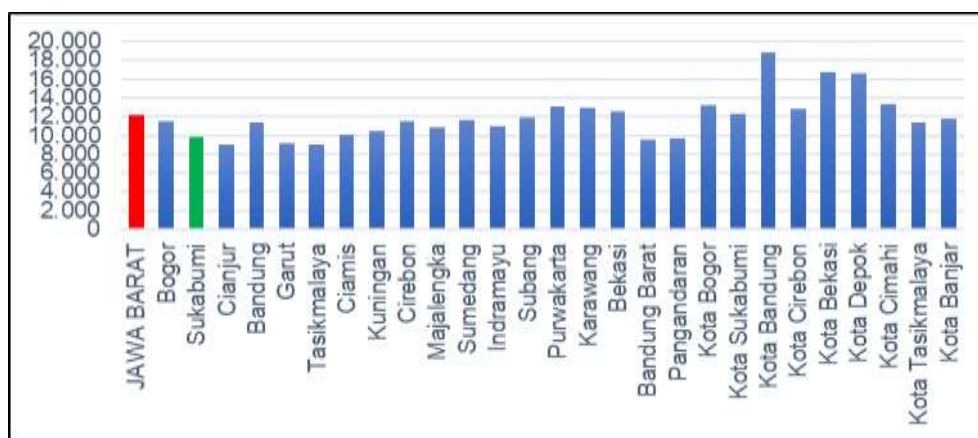
Pengeluaran per kapita disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan indikator ekonomi yang dapat menggambarkan standar hidup layak penduduk. PPP merupakan besaran daya beli masyarakat di suatu daerah. Upaya pembangunan di sektor ekonomi, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Tren perkembangan PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024, serta perbandingannya dengan rata-rata PPP Jawa Barat.



Gambar 2.34. Tren Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Ribu Rp)

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, PPP Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah Jawa Barat. PPP Kabupaten Sukabumi berada dibawah rata-rata kabupaten/kota lainnya dan berada di posisi keenam terbawah. Selain itu, jarak antara PPP Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat dan Nasional cenderung semakin besar setiap tahunnya. PPP Kabupaten/Kota di Provinsi jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.35. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2024 (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

C. Pendidikan

1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk suatu wilayah untuk menjalani pendidikan formal. RLS mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan secara keseluruhan dalam suatu populasi. Indikator ini penting karena memberikan gambaran tentang aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang telah diperoleh oleh masyarakat. RLS yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan cenderung memiliki tingkat pengetahuan serta keterampilan yang lebih tinggi. Data RLS dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menilai efektivitas program pendidikan yang ada dan merencanakan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi serta pencapaian pendidikan di masa depan.



Gambar 2.36. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat 2014-2024

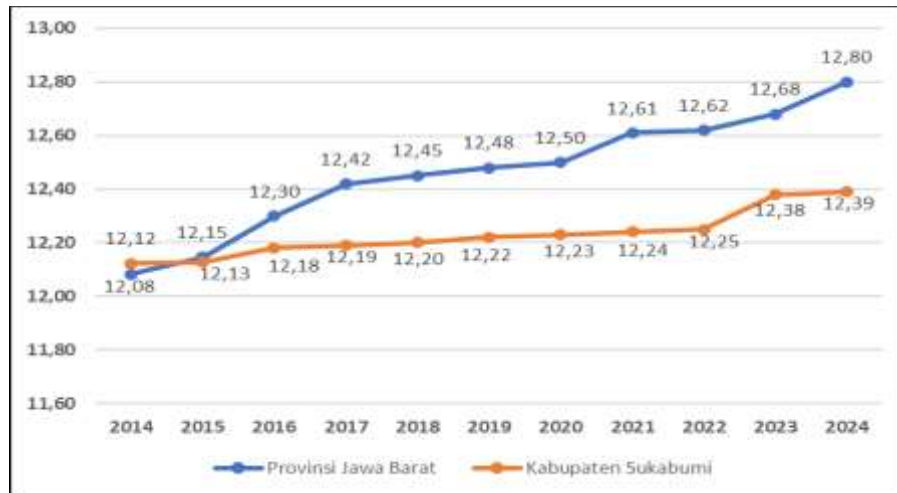
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Data rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, RLS di Kabupaten Sukabumi tercatat sebesar 7,07 tahun, sementara Jawa Barat mencatatkan RLS sebesar 8,55 tahun. Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dengan selisih 1,48 tahun. Pada tahun 2023, RLS di Kabupaten Sukabumi mencapai 7,33 tahun, sedangkan Jawa Barat mencapai 8,83 tahun, menjaga selisih tetap di 1,50 tahun. Dan pada tahun 2024, RLS di Kabupaten Sukabumi mencapai 7,34 tahun, sedangkan Jawa Barat mencapai 8,87 tahun, menjadi selisih 1,53 tahun.

Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dalam rata-rata lama sekolah, selisih dengan Jawa Barat tetap signifikan. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Sukabumi perlu terus ditingkatkan agar dapat mengejar ketertinggalan dari Jawa Barat. Peningkatan yang terjadi di kedua wilayah ini mencerminkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan yang ada mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih fokus dan terarah di Kabupaten Sukabumi untuk mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat diselesaikan oleh anak-anak pada usia tertentu di suatu wilayah. HLS mencerminkan akses dan kualitas pendidikan yang tersedia, serta harapan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka. Indikator ini penting karena pendidikan yang lebih lama biasanya berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi. Peningkatan HLS menunjukkan kemajuan dalam sektor pendidikan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan serta merencanakan program peningkatan pendidikan di masa depan. Berikut ini adalah HLS Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat:



Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat 2014-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

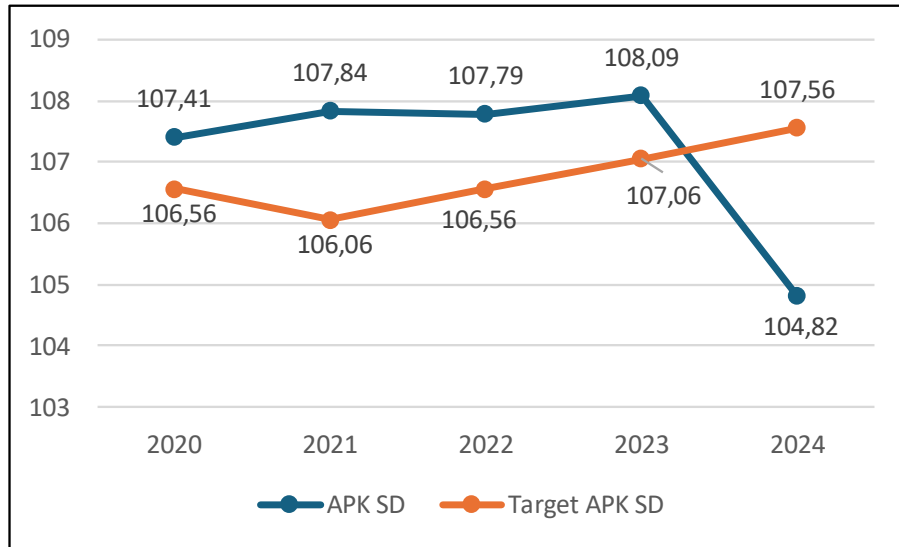
Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS di Kabupaten Sukabumi tercatat sebesar 12,23 tahun, sementara Jawa Barat memiliki HLS sebesar 12,50 tahun, menunjukkan selisih 0,27 tahun lebih tinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2023, HLS di Kabupaten Sukabumi meningkat mencapai 12,25 tahun dan Jawa Barat 12,68 tahun, dengan selisih yang semakin melebar menjadi 0,43 tahun. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, HLS di Kabupaten Sukabumi meningkat mencapai 12,39 dan Jawa Barat 12,80, dengan selisih 0,41.

Peningkatan HLS di kedua wilayah ini mengindikasikan perbaikan akses dan kualitas pendidikan. Namun, selisih HLS yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Sukabumi mengalami kemajuan, peningkatan tersebut belum secepat yang terjadi di Jawa Barat. Untuk mengejar ketertinggalan ini, Kabupaten Sukabumi perlu fokus pada kebijakan dan program yang lebih agresif dalam meningkatkan pendidikan, seperti peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan guru, serta program beasiswa. Dengan upaya yang konsisten dan terarah, diharapkan HLS di Kabupaten Sukabumi dapat terus meningkat dan mendekati angka HLS di Jawa Barat dalam beberapa tahun mendatang.

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

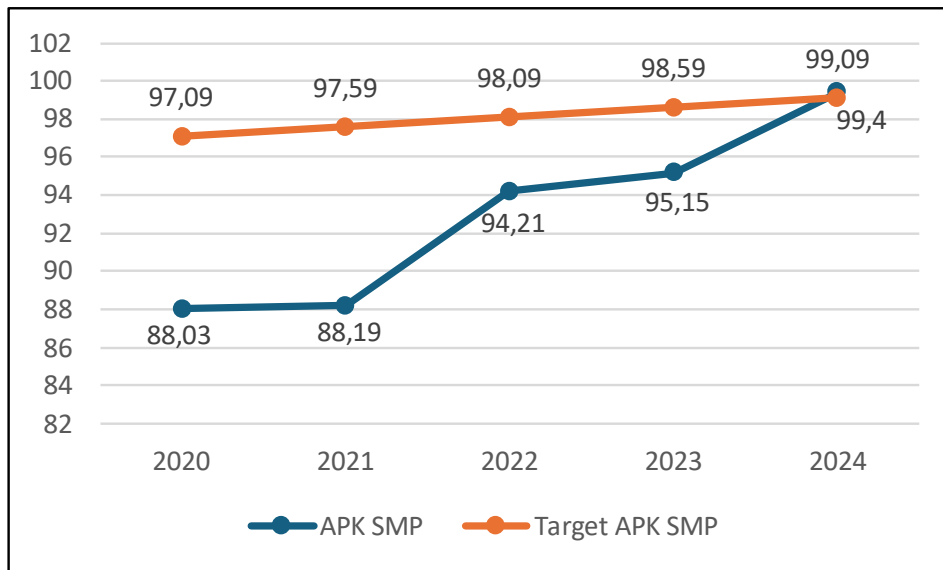
Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator pembangunan manusia pada bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi capaian APK di Kabupaten Sukabumi, maka tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tertentu semakin tinggi. APK merupakan rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang sedang bersekolah terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK SD/SMP didapatkan dari perbandingan jumlah siswa pada jenjang SD/SMP yang dibagi

dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun. APK dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur daya tampung atau kapasitas sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 2.38. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi, 2020-2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2025



Gambar 2.39. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi, 2020-2024 (Tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2025

Data dari gambar 2.38 dan gambar 2.39 menunjukkan tren yang berbeda antara Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari tahun 2020 hingga 2024. APK SD mengalami tren stabil dari tahun 2020 (107,41) hingga 2023 (108,09), namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi 104,82. Sementara itu, target APK SD meningkat secara konsisten dari 106,56 pada tahun 2020 menjadi 107,56 pada

2024. Penurunan drastis APK SD pada tahun 2024 ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti kendala aksesibilitas pendidikan atau masalah lain yang memengaruhi partisipasi siswa. Di sisi lain, APK SMP menunjukkan peningkatan signifikan dari 88,03 pada tahun 2020 menjadi 99,4 pada 2024, melampaui target yang meningkat dari 97,09 menjadi 99,09 pada periode yang sama. Tren positif di tingkat SMP ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan yang mendukung transisi siswa dari SD ke SMP, serta penguatan aksesibilitas pendidikan. Secara keseluruhan, diperlukan langkah strategis untuk mempertahankan keberhasilan di tingkat SMP dan mengatasi tantangan di tingkat SD, khususnya untuk mengurangi kesenjangan antara target dan pencapaian APK di tahun 2024.

4) Angka Literasi/Numerasi

Literasi numerasi adalah kemampuan dalam memahami angka, operasi hitung dan bilangan melalui berbagai konteks dalam permasalahan sehari-hari, baik menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Literasi numerasi erat kaitannya dengan matematika, dimana kemampuan numerasi memerlukan pengetahuan matematika, namun pembelajaran matematika belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi.

Menurut Han, dkk (2017), literasi numerasi adalah pengetahuan serta kecakapan untuk memahami bacaan dan memanfaatkan beraneka ragam angka dan juga berbagai simbol yang berguna untuk memecahkan permasalahan yang praktis dalam beraneka ragam konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Wahyuningsih (2021), tujuan pemahaman akan literasi numerasi bagi peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam menginterpretasikan angka, data, tabel, grafik, dan diagram.
- b. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan literasi numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pertimbangan yang logis.
- c. Membentuk dan menguatkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) hingga mampu bersaing serta berkolaborasi dengan bangsa lain untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Adapun manfaat dari literasi numerasi antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik.
- b. Peserta didik mampu melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Peserta didik mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap aspek kehidupannya.

Kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia masih rendah, berdasarkan berbagai penelitian dan survei, termasuk hasil dari *Program for International Student Assessment* (PISA). PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat rendah dalam kemampuan literasi (membaca), matematika, dan sains. Misalnya, dalam literasi numerasi, Indonesia berada di peringkat 73 dari 78 negara yang berpartisipasi, dengan skor 379 dibandingkan rata-rata internasional 489. Meski hasil PISA Indonesia 2022, naik 5-6 peringkat dibanding tahun 2018 dilihat dari berbagai aspek, namun siswa Indonesia masih mendapat nilai rata-rata kemampuan numerasi dan literasi di bawah rata-rata *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Hasil PISA 2023 masih menempatkan Indonesia di peringkat yang rendah. Rata-rata nilai PISA pada bidang literasi numerasi adalah 366 poin, berjarak 106 poin dari nilai rata-rata negara di dunia. Bahkan bidang literasi numerasi menjadi bidang dengan jumlah terbanyak dengan peserta didik yang masih memiliki kemampuan level rendah dibawah level dua. Jumlahnya sebesar 82 persen. Di tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor matematika (379), sains (398) dan membaca (371).

Secara spesifik, faktor rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia antara lain, sebagai berikut:

1. Kurangnya Minat dan Motivasi

Minat terhadap literasi dan numerasi seringkali rendah di kalangan masyarakat, baik karena kurangnya pemahaman dan kurangnya pengenalan tentang pentingnya keterampilan literasi dan numerasi.

2. Kualitas Kurikulum yang Kurang Optimal

Kurikulum pendidikan yang belum memadai dalam mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi juga dapat menjadi faktor penyebabnya.

3. Keterbatasan Sumber Daya Pendukung

Minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan yang memadai, buku bacaan yang variatif dan sumber daya pembelajaran matematika yang inovatif.

4. Kurangnya Pelatihan dan Dukungan untuk Pendidik

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan yang memadai, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat pendidikan literasi dan numerasi.

Oleh karena itu, solusi untuk meningkatkan Tingkat Literasi dan Numerasi di Indonesia yaitu dengan Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas, Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran, Pelatihan dan Pengembangan Guru, dan Kolaborasi dengan Pihak Terkait.

5) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina

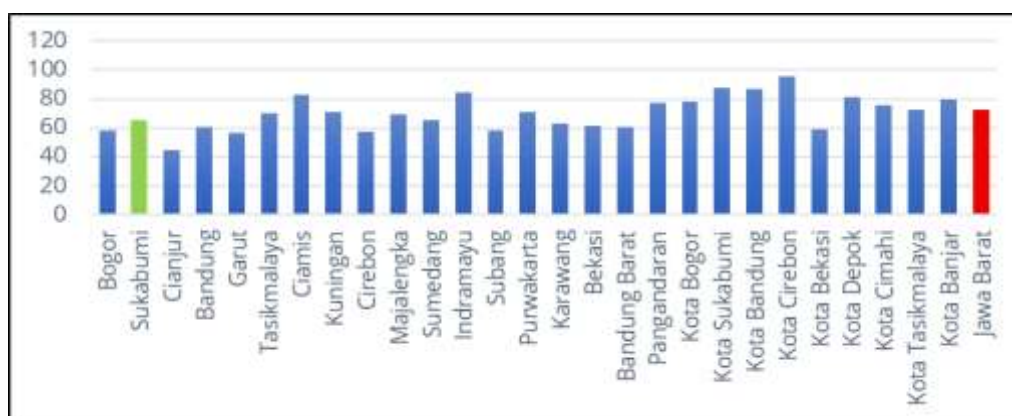
dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berikut ini adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.12. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024

Wilayah	Skor IPLM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sukabumi	-	-	50,29	55,60	65,14
Provinsi Jawa Barat	8,48	9,64	72,73	60,02	72,76
Nasional	12,93	13,54	64,48	69,42	73,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional termasuk dalam kategori “Sedang”. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sukabumi dan Nasional dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan 2022, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. IPLM Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 berada di posisi ke 16 kabupaten/kota seluruh Jawa Barat.



Gambar 2.40. IPLM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

6) Indeks Literasi Digital (ILDI)

Indeks Literasi Digital Indonesia (ILDI) adalah ukuran kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi digital. Metodologi ILDI diukur menggunakan empat pilar, yaitu:

- Kecakapan digital (*digital skills*)
- Etika digital (*digital ethics*)
- Keamanan digital (*digital safety*)
- Budaya digital (*digital culture*)

Berikut adalah skor ILDI tahun 2020-2022 Provinsi Jawa Barat dan Nasional:

Tabel 2.13. Indeks Literasi Digital Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022

Skor ILDI	Tahun		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	3,41	3,47	3,60
Nasional	3,47	3,49	3,54

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Berdasarkan tabel diatas, besarnya nilai ILDI baik Provinsi Jawa Barat maupun Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan ini mencerminkan perkembangan positif dalam pemanfaatan teknologi digital di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Penilaian ILDI terdiri dari empat pilar: *Digital Skills*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

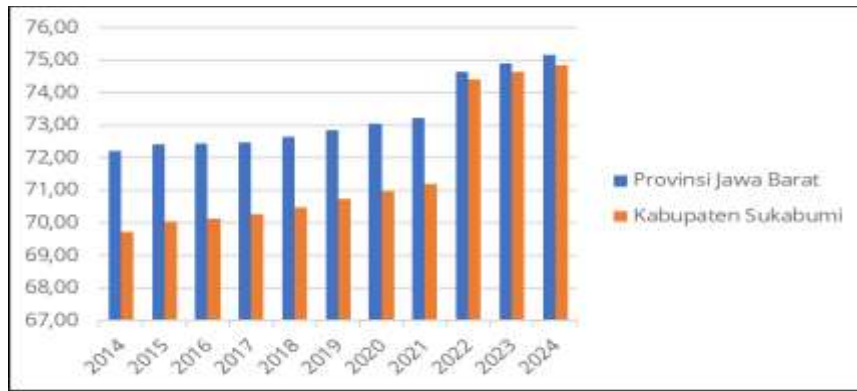
D. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pembangunan karena Kesehatan merupakan pondasi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kesehatan yang baik dapat menjadi modal manusia yang vital dalam pembangunan ekonomi karena masyarakat sehat cenderung lebih produktif, memiliki tingkat absensi yang rendah, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah yang berfokus pada Kesehatan mendukung peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, dimana mampu mengurangi kematian ibu dan anak, menanggulangi penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan harapan hidup penduduk.

Gambaran kondisi daerah terkait dengan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, aksesibilitas sarana kesehatan, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter umum per satuan penduduk, rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk, cakupan pelayanan puskesmas, serta cakupan pelayanan puskesmas pembantu.

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Umur Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mengukur rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir dengan mempertimbangkan tingkat mortalitas di berbagai kelompok usia. Adapun umur harapan hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2014-2024:



Gambar 2.41. Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi 2014-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa Umur Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2024 sebesar 74,85 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat hidup hingga usia 74,85 tahun. Peningkatan UHH dari 70,14 tahun pada 2014 menjadi 74,85 tahun pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam sistem kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Adapun peningkatan UHH di Kabupaten Sukabumi diantaranya Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan, Perbaikan dalam gizi dan sanitasi, Program kesehatan publik yang efektif, dan Peningkatan kesadaran akan kesehatan di kalangan masyarakat. Peningkatan UHH juga mencerminkan efektivitas kebijakan kesehatan dan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ini mencakup program imunisasi, pengendalian penyakit menular, serta inisiatif kesehatan ibu dan anak.

2) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. IKS dihitung dari akumulasi nilai 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah 12 indikator yang digunakan untuk menghitung IKS:

- a. Keluarga mengikuti program KB
- b. Ibu bersalin di fasilitas kesehatan
- c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
- d. Bayi mendapat ASI eksklusif
- e. Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
- f. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- j. Keluarga sudah menjadi anggota JKN

- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
- l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan nilai IKS, keluarga dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8
- b. Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8
- c. Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) secara nasional pada tahun 2021 dan 2022 adalah 0,18 dan 0,22, yang masuk kategori keluarga tidak sehat. IKS mengukur sejauh mana keluarga memenuhi berbagai indikator kesehatan, dan nilai 0,8 atau lebih menunjukkan keluarga sehat, sedangkan nilai kurang dari 0,5 menunjukkan keluarga tidak sehat (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

E. Ketenagakerjaan

1) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan dari jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Terdapat hubungan antara angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja (atau kemampuan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah). Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja, ataupun belum bekerja namun aktif dalam bursa kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia di atas 15 tahun, tetapi tidak aktif dalam bursa kerja seperti memiliki kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Penduduk yang tidak melakukan kegiatan dapat dimasukkan ke dalam kategori tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Tabel 2.14. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

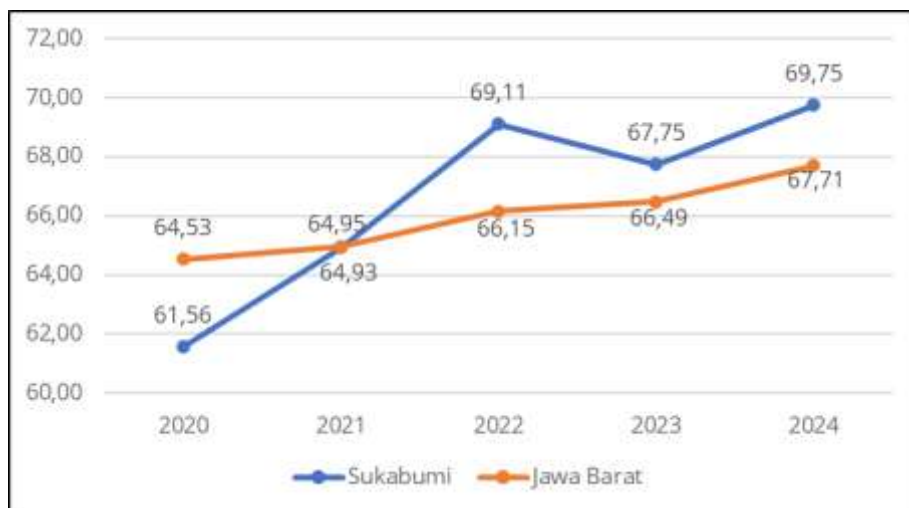
Kegiatan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (jiwa)	1.146.833	1.222.156	1.313.905	1.450.273	1.511.976
Bekerja	1.036.735	1.105.875	1.211.763	1.344.044	1.404.426
Pengangguran Terbuka	110.098	116.281	102.142	106.229	107.550
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	715.978	660.225	587.215	690.447	655.680
Sekolah	134.592	122.587	123.687	148.534	131.764
Mengurus RT	489.413	438.031	407.761	482.492	441.026
Lainnya	91.973	99.607	55.767	59.421	82.890
Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	90,40	90,49	92,23	92,68	92,89

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2025

Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah angkatan kerja meningkat dari 1.146.833 menjadi 1.511.976 jiwa, dengan penduduk bekerja naik dari 1.036.735 menjadi 1.404.426 jiwa. Rasio penduduk bekerja juga membaik dari 90,40 persen menjadi 92,89 persen, mencerminkan keberhasilan penyerapan tenaga kerja. Namun, jumlah pengangguran terbuka tetap tinggi, mencapai 107.550 jiwa pada 2024, meski sempat menurun pada 2022. Sementara itu, bukan angkatan kerja menurun dari 715.978 menjadi 655.680 jiwa, menunjukkan peningkatan partisipasi kerja. Secara keseluruhan, tren ketenagakerjaan positif, tetapi pengangguran terbuka tetap menjadi tantangan utama.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran sendiri merupakan (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPAK dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK digunakan untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Semakin tinggi nilai TPAK suatu daerah, semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia di daerah tersebut. Gambar dibawah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2020-2024:



Gambar 2.42. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

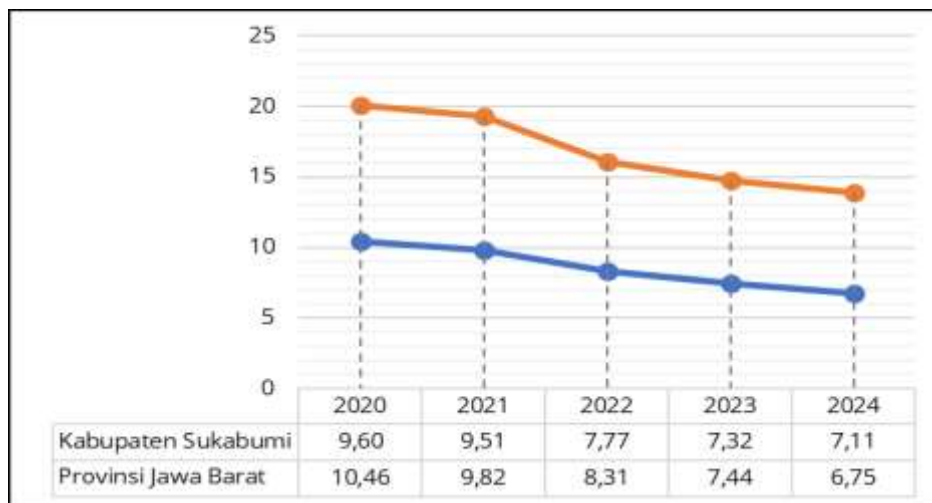
Gambar diatas menunjukkan TPAK Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2024. Capaian TPAK Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan kecuali dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian TPAK Provinsi Jawa Barat, TPAK Kabupaten Sukabumi cenderung menurun dan bergerak menjauh dari rata-rata TPAK Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi lebih rendah dan tertinggal dari kondisi rata-rata di Jawa Barat.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dihitung dengan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100 persen. TPT digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar kerja suatu daerah.

Gambar dibawah menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Nasional selama periode 2020-2024. TPT Kabupaten Sukabumi setiap tahun mengalami penurunan. Menurunnya TPT dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang sudah membaik atau membaiknya tingkat pendidikan di Kabupaten Sukabumi sehingga dapat memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan. Selaras dengan capaian TPT Provinsi Jawa Barat, TPT Kabupaten Sukabumi terus menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Sukabumi sebesar 9,60 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 sebesar 7,11 selaras dengan Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan nilai TPT dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut ini adalah gambar Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020-2024:



Gambar 2.43. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Tren positif seperti yang terlihat pada gambar, menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi berhasil mengikuti arah kebijakan dan pembangunan ketenagakerjaan provinsi. Penurunan angka TPT tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan kemampuan angkatan kerja dalam memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi selama lima tahun terakhir.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan suatu negara, Kualitas layanan umum Pendidikan yang baik dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun demikian, saat ini masih terdapat banyak tantangan dalam sistem Pendidikan, seperti layanan Pendidikan yang belum merata, berkualitas, dan relevan bagi seluruh rakyat. Di samping itu, dampak dari revolusi industri 4.0 dan globalisasi telah mengubah paradigma Pendidikan, mengharuskan adopsi teknologi dan peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan umum Pendidikan harus disertai dengan pendekatan teknokratis yang sistematis dan terukur. Pendekatan ini tidak hanya mencakup peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses Pendidikan, termasuk guru dan tenaga pendidik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah:

- a. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran
 - Implementasi platform pembelajaran digital untuk memfasilitasi akses Pendidikan yang merata
 - Pengembangan konten edukatif interaktif dan adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan
- b. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik
 - Program pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan pengetahuan kurikulum terbaru
 - Penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis data untuk meningkatkan mutu pengajaran
- c. Optimalisasi infrastruktur Pendidikan
 - Perencanaan dan pembangunan infrastruktur Pendidikan yang memadai, berstandar nasional, dan ramah lingkungan
 - Memperluas jaringan internet dan memperkenalkan teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah.
- d. Pengelolaan administrasi dan pengeluaran
 - Transparansi pengelolaan dana Pendidikan, ditandai dengan pengalokasian secara efisien dan transparan untuk mendukung kegiatan pembelajaran
 - Mengimplementasikan sistem manajemen informasi Pendidikan untuk memantau dan mengevaluasi capaian Pendidikan secara efektif
- e. Kolaborasi dengan pihak terkait

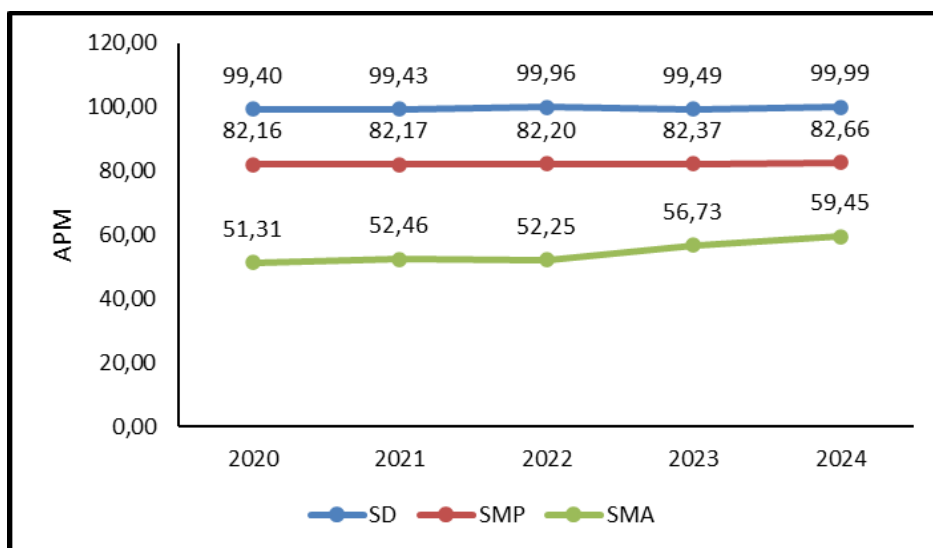
- Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan Lembaga non-pemerintah untuk mendukung pendidikan
 - Mendorong partisipasi aktif orang tua dalam Pendidikan anak-anak, seperti kegiatan sekolah orang tua dan mentoring
- f. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
- Melakukan pengukuran kinerja melalui evaluasi teratur terhadap pencapaian Pendidikan dengan menggunakan data yang dapat diandalkan dan dianalisis secara mendalam
 - Menggunakan temuan dari evaluasi untuk melakukan perbaikan sistematis dan kontinu dalam penyelenggaraan pendidikan
- g. Promosi dan advokasi Pendidikan
- Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan dan akses yang setara untuk semua anak
 - Menyesuaikan kurikulum Pendidikan dengan kebutuhan lokal dan nilai budaya daerah

Gambaran umum kondisi Kabupaten Sukabumi terkait dengan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan, Rasio Guru-Murid, Persentase Kondisi Ruang Kelas, serta Aksesibilitas Sarana Pendidikan.

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan persentase anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan usianya. APM merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Secara umum, peningkatan APM menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APM yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Di Kabupaten Sukabumi, APM masih menjadi tantangan terutama di daerah desa yang mungkin memiliki aksesibilitas Pendidikan yang terbatas. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan APM terus dilakukan. Berikut merupakan gambaran APM di Kabupaten Sukabumi periode 2020 – 2024.



Gambar 2.44. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

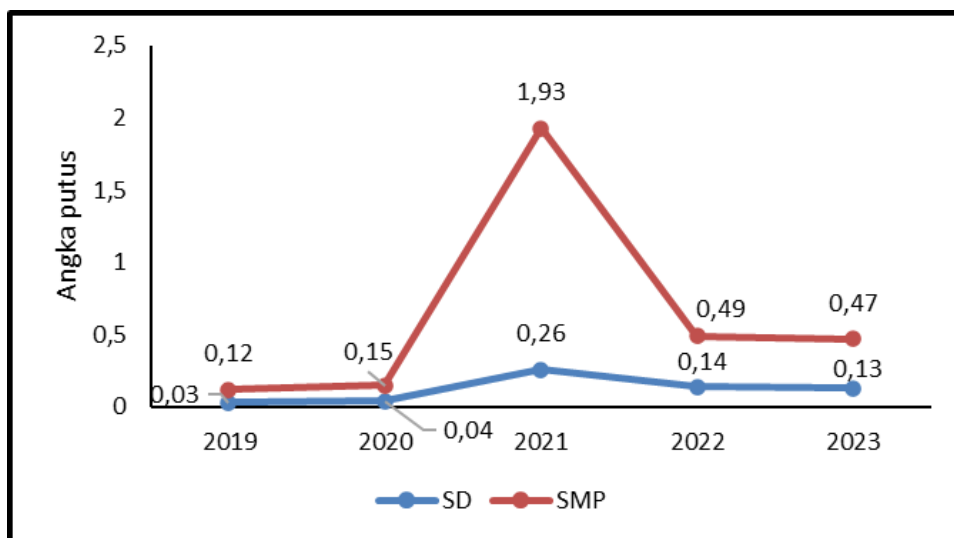
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2024 menunjukkan bahwa terdapat indikasi peningkatan APM menurut jenjang pendidikan, dimana pendidikan SD ditempuh oleh penduduk usia sekolah 7 – 12 tahun, SMP 13 – 15 tahun, dan 16 – 18 tahun. APM yang masih rendah ditemukan pada jenjang Pendidikan SMA.

b. Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan

Indikator lain yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah dengan menggunakan angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan. Angka putus sekolah menunjukkan persentase siswa yang tidak menyelesaikan jenjang Pendidikan tertentu sebelum mencapai tingkat kelulusan. Angka putus sekolah yang rendah menunjukkan bahwa lebih sedikit siswa yang mengalami kegagalan dalam menyelesaikan Pendidikan mereka, yang mengindikasikan akses dan dukungan yang baik dalam sistem Pendidikan. Sebaliknya, angka kelulusan mengukur persentase siswa yang berhasil menyelesaikan jenjang Pendidikan tertinggi di suatu jenjang Pendidikan, Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan bahwa banyak siswa yang berhasil menyelesaikan Pendidikan mereka, yang bisa mengindikasikan kualitas pengajaran, dukungan siswa, dan kesesuaian kurikulum. Adapun angka melanjutkan mengukur jumlah siswa baru yang mendaftar pada tingkat 1 di suatu jenjang Pendidikan, Angka melanjutkan yang tinggi menunjukkan bahwa ada banyak siswa yang melanjutkan Pendidikan mereka setelah menyelesaikan jenjang Pendidikan sebelumnya, yang menunjukkan kontinuitas dan kesempatan yang baik bagi Pendidikan lanjutan.

Angka putus sekolah di Kabupaten Sukabumi berkisar antara 0,03 – 1,97 dengan angka putus sekolah terjadi pada tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan oleh sulitnya akses dan

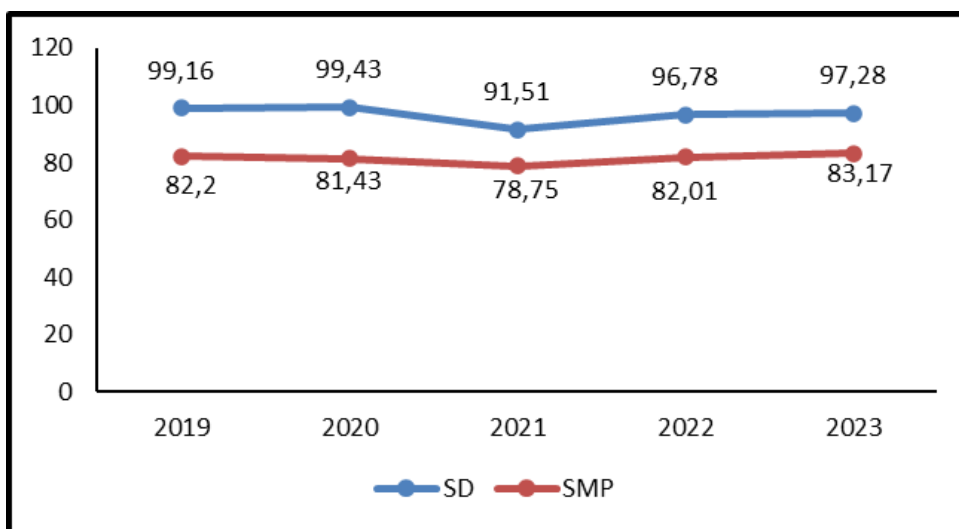
rendahnya motivasi atau dukungan dalam belajar. Selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi atau social..



Gambar 2.45. Angka Putus Sekolah Siswa Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (2024)

Meski demikian, jumlah kelulusan yang terjadi selama tahun 2019 – 2023 adalah 100 persen dengan angka yang melanjutkan berkisar antara 78 – 99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP/ sederajat dan SMP ke SMA/ sederajat relatif baik. Angka melanjutkan mengalami penurunan pada tahun 2021 sejalan dengan angka putus sekolah yang meningkat yang diduga karena adanya ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan aksesibilitas. Namun demikian, pada tahun 2022 – 2023 telah menunjukkan adanya peningkatan angka melanjutkan dari jenjang Pendidikan SD dan SMP. Angka melanjutkan Pendidikan dapat didorong dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, meningkatkan akses Pendidikan, adanya program bantuan, adanya pelibatan masyarakat, serta adanya dukungan berupa kebijakan Pendidikan yang berfokus pada inklusi.



Gambar 2.46. Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (2024)

c. Rasio Guru-Murid

Rasio guru-murid mengacu pada jumlah siswa yang diajar oleh satu guru pada waktu tertentu. Rasio guru-murid menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Permasalahan mendasar pada pendidikan di negara berkembang, termasuk Kabupaten Sukabumi adalah tingginya rasio guru dan murid yang mengindikasikan sejumlah besar siswa dalam kelas dihadapi oleh satu guru. Tantangan dari kondisi ini adalah tidak cukupnya perhatian yang diberikan terhadap setiap siswa sehingga sulit untuk memastikan Pendidikan yang berkualitas telah tercapai atau belum. Peningkatan rasio guru-murid bisa menjadi indikator masalah dalam sistem pendidikan, seperti kekurangan dana untuk merekrut lebih banyak guru, infrastruktur yang tidak memadai, atau kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru yang ada. Sebaliknya, penurunan rasio guru-murid merupakan Langkah proaktif untuk meningkatkan standar Pendidikan yang memungkinkan interaksi yang lebih intim antara guru dan siswa sehingga dapat mendukung pencapaian akademik yang lebih baik.

Berikut merupakan gambaran rasio guru-murid di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi memiliki 2.667 unit sekolah yang terdiri dari 1.214 SD, 352 MI, 384 SMP, Mts 314, 97 SMA, 166 SMK, dan MA 140. Adapun rasio guru-murid pada tahun tersebut adalah setiap 1 guru menangani 11 – 26 orang siswa. Rasio tertinggi ditemukan pada jenjang Pendidikan SD.

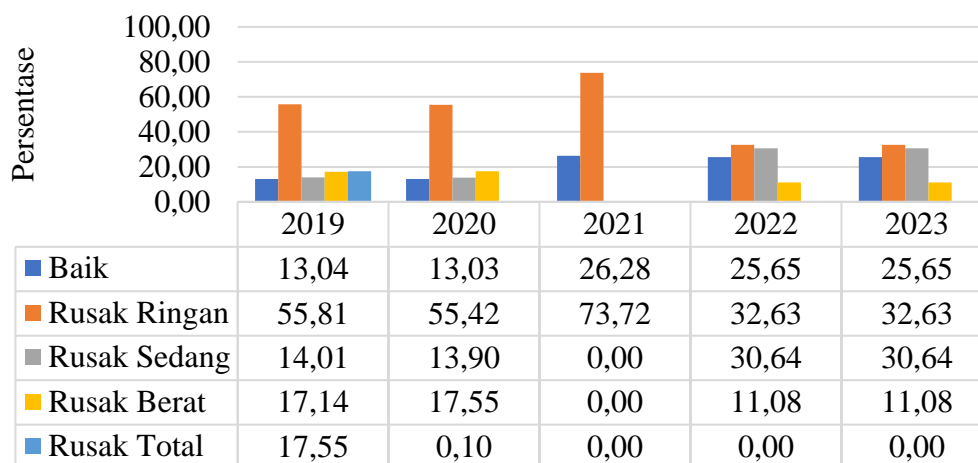


Gambar 2.47. Rasio Guru-Murid di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

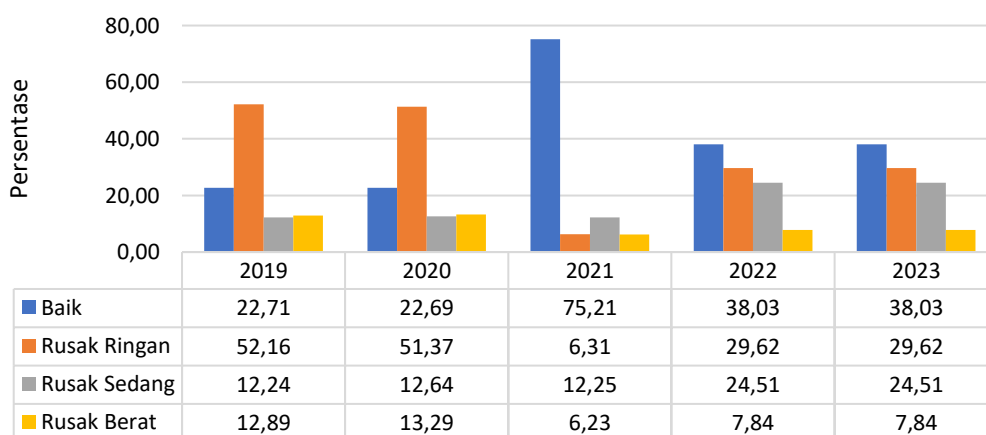
d. Persentase Kondisi Ruang Kelas

Ketersediaan ruang kelas merupakan salah satu pendukung dalam proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam mendukung proses belajar yang optimal, diperlukan ruang kelas dengan kondisi baik agar nyaman saat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada tahun 2023 kondisi ruang kelas SD dengan kategori baik mencapai 25,65 persen, sementara kondisi ruang kelas SMP dengan kategori baik mencapai 38,03 persen.



Gambar 2.48 Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024



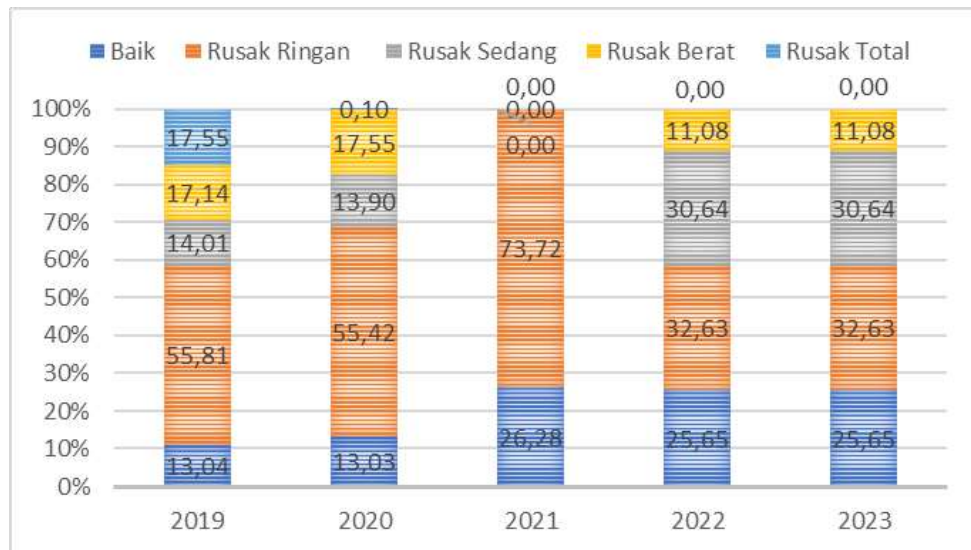
Gambar 2.49. Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah)

e. Aksesibilitas Sarana Pendidikan

Persentase kondisi ruang kelas adalah indikator yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas fisik dari fasilitas Pendidikan. Hal ini mengacu pada persentase ruang kelas di sebuah sekolah atau daerah tertentu yang memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk kelayakan dan kenyamanan. Kondisi ruang kelas akan berdampak terhadap pengalaman belajar siswa dan kualitas pengajaran yang disediakan oleh guru. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ruang kelas adalah infrastruktur fisik (atap, dinding, lantai, dan pintu), fasilitas Pendidikan (meja, kursi, papan, alat tulis, dan teknologi pendidikan), ketersediaan atau daya dukung ruang, keamanan dan kenyamanan, serta aksesibilitas termasuk untuk mereka yang

memiliki kebutuhan khusus. Berikut merupakan gambaran kondisi ruang kelas pada jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 – 2023.

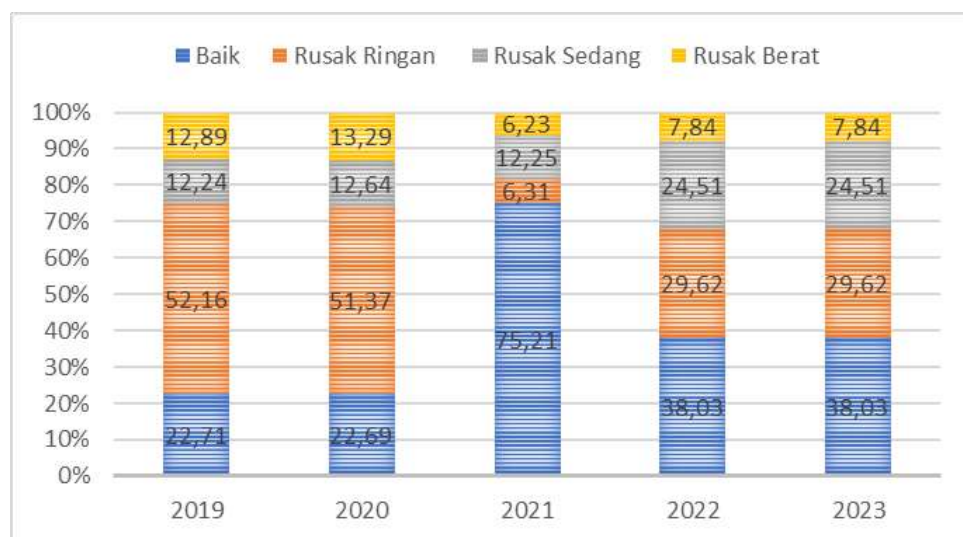


Gambar 2.50. Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 – 2023 masih terdapat ruang kelas yang rusak berat sebanyak 11,08 persen, rusak sedang 30,64 persen, dan rusak ringan 32,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ruang kelas untuk jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Sukabumi cukup memprihatinkan.

Selanjutnya, data ruang kelas jenjang Pendidikan SMP pada tahun 2022 – 2023 menunjukkan bahwa ruang kelas relatif dalam kondisi baik, namun >60 persen mengalami kerusakan mulai dari ringan (29,62 persen), sedang (24,51 persen), dan berat (7,84 persen). Hal ini mengindikasikan perlu adanya perhatian dalam bentuk perbaikan ruang kelas sehingga layak dan mampu mendukung proses belajar mengajar dengan baik.



Gambar 2.51. Kondisi Ruang Kelas Pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024

Aksesibilitas sarana Pendidikan merujuk pada kemudahan dan ketersediaan yang diberikan kepada semua individu yang mengakses Pendidikan secara menyeluruh dan setara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan aksesibilitas sarana Pendidikan adalah fisik dan geografis, ekonomi dan keuangan, teknologi dan infrastruktur, kultural dan linguistik, serta sosial dan psikologis. Secara keseluruhan, menciptakan aksesibilitas sarana Pendidikan yang baik memerlukan integrasi berbagai kebijakan, sumberdaya, dan upaya kolaboratif dari pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pendidikan tersedia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, fisik, dan kultural mereka.

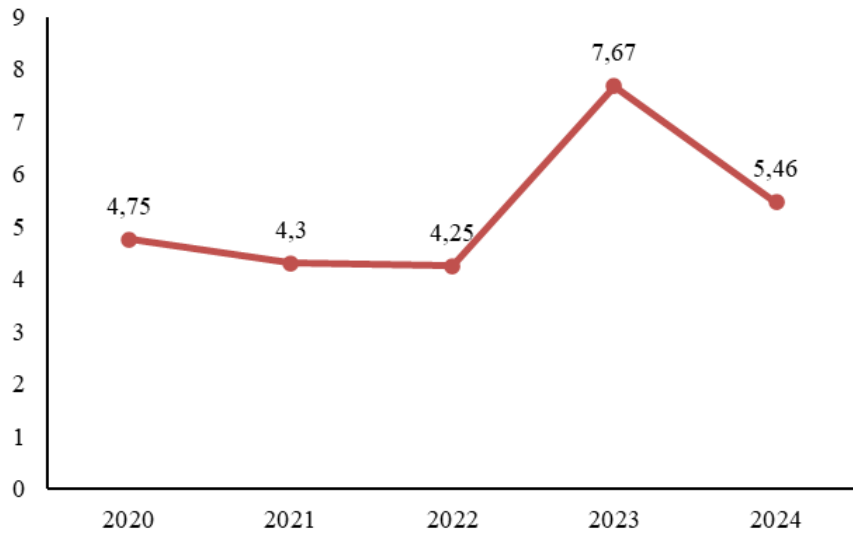
2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pembangunan karena Kesehatan merupakan pondasi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kesehatan yang baik dapat menjadi modal manusia yang vital dalam pembangunan ekonomi karena masyarakat sehat cenderung lebih produktif, memiliki tingkat absensi yang rendah, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah yang berfokus pada Kesehatan mendukung peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, dimana mampu mengurangi kematian ibu dan anak, menanggulangi penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan harapan hidup penduduk.

Gambaran kondisi daerah terkait dengan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, aksesibilitas sarana kesehatan, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter umum per satuan penduduk, rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk, cakupan pelayanan puskesmas, serta cakupan pelayanan puskesmas pembantu.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun (0-12 bulan) di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Angka kematian bayi yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam pelayanan Kesehatan maternal, neonatal, dan bayi pada daerah tersebut. Berikut merupakan angka kematian bayi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020–2024.



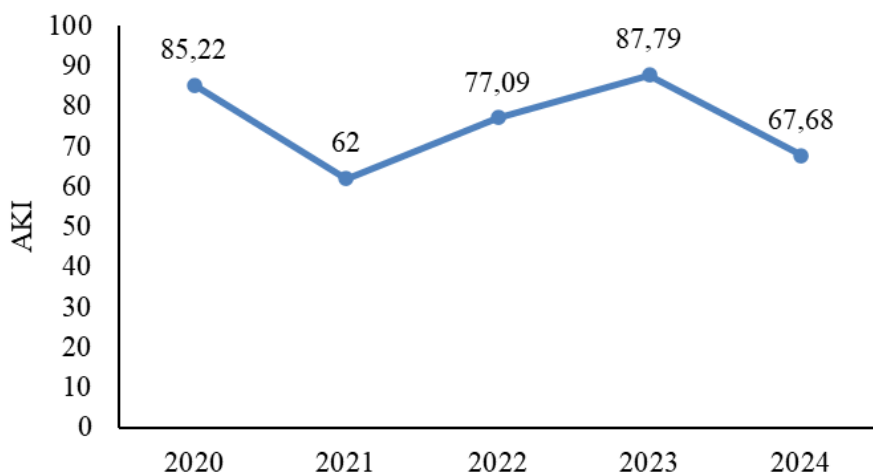
Gambar 2.52. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

Tren angka kematian bayi di Kabupaten Sukabumi menunjukkan variasi dari tahun ke tahun dengan kisaran 4,25 – 7,67 per 1.000 kelahiran hidup. Nilai ini relatif kecil karena menurut WHO, AKB < 10 per 1.000 kelahiran hidup dapat dikategorikan rendah. Namun perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dari 4,25 menjadi 7,67 per 1.000 kelahiran hidup. Akan tetapi pada tahun 2024, AKB turun menjadi 5,46. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya mengurangi risiko angka kematian bayi di masa mendatang.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian ibu akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan. AKI dapat dipergunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kualitas pelayanan Kesehatan maternal suatu negara atau wilayah. Menurut WHO, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian selama kehamilan atau selama periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Menurut Kementerian Kesehatan, AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, bersalin, dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup di suatu wilayah. WHO menetapkan bahwa AKI yang rendah adalah kurang dari 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Berikut merupakan AKI Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2024.



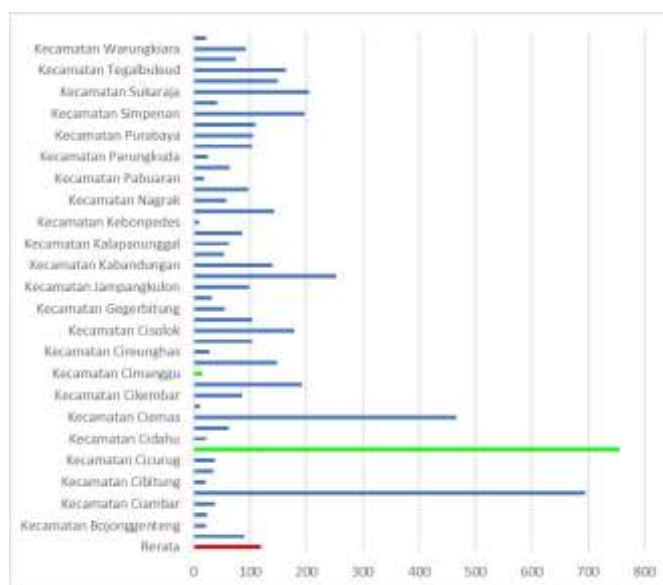
Gambar 2.53. Angka Kematian Ibu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

Berdasarkan data diketahui bahwa AKI di Kabupaten Sukabumi >70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa AKI di Kabupaten Sukabumi cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan serius dalam sistem Kesehatan maternal, seperti akses terbatas terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas, penanganan komplikasi kehamilan atau persalinan yang tidak memadai, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kesehatan ibu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan maternal, meningkatkan Pendidikan Kesehatan masyarakat, dan memperkuat sistem Kesehatan secara keseluruhan.

c. Aksesibilitas Sarana Kesehatan

Aksesibilitas sarana Kesehatan merujuk pada kemudahan dan ketersediaan masyarakat untuk mengakses layanan Kesehatan yang dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi aksesibilitas sarana Kesehatan meliputi lokasi fisik, jarak, biaya, ketersediaan transportasi, dan kebijakan pelayanan kesehatan.



Gambar 2.54. Aksesibilitas Sarana Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik diketahui bahwa rata-rata wilayah layanan sarana Kesehatan sekitar 21,03 km². Semakin luas wilayah layanan dan semakin rendahnya aksesibilitas sarana kesehatan, menunjukkan bahwa semakin besar upaya masyarakat untuk dapat mencapai sarana kesehatan. Beberapa kecamatan yang mengalami kesulitan untuk mengakses sarana Kesehatan adalah Kecamatan Waluran, Pabuaran, Simpenan, Tegalbuleud, Cimanggu, dan Sagaranten.

d. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu biasanya dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan atau tempat lainnya di sekitar pemukiman masyarakat yang bertujuan agar mampu menjangkau semua masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita adalah indikator yang menggambarkan seberapa banyak posyandu yang tersedia untuk melayani balita di suatu daerah, dihitung dengan membandingkan jumlah posyandu per 1.000 balita.

Tabel 2.15. Rasio Posyandu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu	3.510	3.164	3.678	3.680	3.568
Jumlah Balita (Proyeksi penduduk umur 0-4 tahun)	218.800	220.236	200.573	202.256	222.944
Rasio Posyandu per satuan balita	9,96	14,37	17,50	17,35	16,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita dari tahun 2020 sampai 2022 cenderung naik dan turun di tahun 2024. Pada tahun 2024, rasio posyandu per satuan balita adalah 16,04. Angka tersebut artinya terdapat 16,04 unit posyandu untuk melayani 1.000 balita di Kabupaten Sukabumi. Jumlah ini dinilai cukup baik dimana tersedia cukup banyak posyandu untuk populasi balita yang tersedia. Rasio posyandu per satuan balita yang baik menunjukkan bahwa setiap balita memiliki akses yang memadai terhadap layanan Kesehatan dasar di komunitasnya. Meskipun rasio ini cukup tinggi, perlu dipastikan bahwa Posyandu tersebar luas dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan cakupan imunisasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta penyuluhan Kesehatan kepada ibu dan keluarga.

e. Prevalensi Stunting pada Balita

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Data stunting di Kabupaten Sukabumi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, yang mencerminkan dinamika

permasalahan gizi kronis pada balita. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, status gizi ibu saat hamil, frekuensi kesakitan bayi, serta kecukupan asupan gizi anak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, persentase balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 6,91 persen pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 7,33 persen pada tahun 2021. Menariknya, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 5,30 persen yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi balita di tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan tajam menjadi 8,98 persen, dengan jumlah balita penderita stunting mencapai 17.463 jiwa dari total 194.465 balita yang diukur. Berikut data terkait persentase stunting di Kabupaten Sukabumi disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Persentase Stunting di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Balita Diukur (Jiwa)	204.946	195.730	193.770	196.041	194.465
Jumlah Penderita Stunting (Jiwa)	14.154	14.347	10.331	14.671	17.463
Persentase Stunting	6,91	7,33	5,30	7,60	8,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024; Open Data Jabar, 2025

Berdasarkan data diatas, fluktuasi persentase stunting ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya perbaikan gizi di tingkat daerah, tantangan penanggulangan stunting di Kabupaten Sukabumi masih signifikan dan membutuhkan intervensi yang lebih konsisten serta multisektoral. Kenaikan angka stunting pada tahun 2024 bisa jadi disebabkan rendahnya ketahanan pangan rumah tangga, atau menurunnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Data ini menegaskan pentingnya penguatan program intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama yang menysasar kelompok rentan, demi menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

f. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Rasio Puskesmas per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik akses penduduk terhadap fasilitas layanan Kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Sukabumi. Semakin tinggi rasio, semakin banyak puskesmas yang tersedia per jumlah penduduk, yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat setempat. Berikut merupakan rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.17. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	61	60	58	58	59
Jumlah Puskesmas Pembantu	187	179	188	188	173
Jumlah Penduduk	2.725.450	2.761.476	2.806.664	2.802.404	2.828.024
Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,0026	0,0025	0,0032	0,0032	0,0025
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,022	0,022	0,021	0,021	0,021
Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,07	0,06	0,07	0,07	0,06

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Jika dilihat dari data rasio puskesmas per satuan penduduk dapat dilihat bahwa rasio unit puskesmas pembantu tahun 2024 adalah 0,06 yang artinya 0,06 puskesmas pembantu melayani 1.000 penduduk.

g. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang lengkap. Rumah sakit yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah sakit umum dan tidak termasuk rumah sakit bersalin. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa rumah sakit melalui tenaga medis serta peralatan kesehatan yang tersedia dapat memberikan pelayanan kesehatan serta pengobatan yang berkualitas bagi masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah rumah sakit menjadi 9 unit, sehingga pada tahun 2024 rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 0,0025. Artinya, terdapat 0,0025 rumah sakit untuk melayani 1.000 penduduk. Secara umum, rasio ini bisa dikatakan rendah yang menunjukkan adanya potensi tantangan dalam aksesibilitas atau kapasitas layanan Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Target kinerja rasio rumah sakit per satuan penduduk termasuk indikator kinerja negatif, sehingga rasio rumah sakit per satuan penduduk yang rendah dapat mengindikasikan bahwa terbatasnya akses penduduk terhadap pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk, namun dengan memperhatikan aksesibilitas dan distribusi rumah sakit sehingga tidak menyebabkan kesenjangan akses penduduk terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, serta melakukan kajian efektivitas pemanfaatan sumberdaya finansial.

Tabel 2.18. Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit	7	7	9	9	7

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	2.725.450	2.761.476	2.806.664	2.802.404	2.828.024
Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,0026	0,0025	0,0032	0,0032	0,0025

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

h. Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan sangat diperlukan agar dapat melayani masyarakat dengan baik, sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio dokter umum per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah dokter umum per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum per satuan penduduk menunjukkan jumlah penduduk yang dilayani oleh seorang dokter umum. Rasio dokter umum per satuan penduduk termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah rasio dokter umum per satuan penduduk mengindikasikan adanya keterbatasan akses penduduk terhadap layanan Kesehatan.

Tabel 2.19. Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter Umum	148	174	314	625	634
Jumlah Penduduk	2.725.450	2.761.476	2.806.664	2.802.404	2.828.024
Rasio Dokter Umum per 1000 Penduduk	0,054	0,063	0,112	0,223	0,224

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Jumlah dokter umum di Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yaitu dari 148 orang menjadi 634 orang. Rasio dokter umum per satuan penduduk menjadi 0,224. Artinya, 0,224 dokter umum untuk melayani 1.000 penduduk. Rendahnya rasio dokter umum per satuan penduduk mengindikasikan bahwa akses layanan kesehatan mungkin menjadi lebih terbatas dan perawatan medis menjadi kurang optimal. Jumlah dokter umum yang sedikit akan menyebabkan penduduk sulit untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu dan berkualitas. Dokter juga akan menghadapi beban kerja yang sangat tinggi sehingga akan berdampak terhadap kualitas perawatan yang diberikan.

i. Rasio Tenaga Medis (Perawat dan Bidan) per Satuan Penduduk

Di Samping dokter umum, keberadaan tenaga medis seperti perawat dan bidan sangat diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah perawat dan bidan per 1.000 penduduk. Jumlah perawat dan bidan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 652 orang perawat dan 1.133 bidan menjadi 2.317 perawat dan 1.463 bidan pada tahun 2024. Rasio perawat dan bidan per satuan penduduk pun meningkat signifikan dari 0,24 dan 0,42 menjadi

0,82 dan 0,52. Rasio 0,82 perawat tersebut artinya terdapat 1 perawat untuk 1.000 penduduk. Rasio 0,52 bidan artinya terdapat 1 bidan untuk 1.000 penduduk. Perubahan yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa ada perubahan yang lebih baik dalam penyediaan perawat dan bidan yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan penduduk.

Tabel 2.20. Rasio Perawat Dan Bidan Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perawat	652	698	2.158	2.356	2.317
Jumlah Bidan	1.133	1.165	1.497	1.607	1.463
Jumlah Penduduk	2.725.450	2.761.476	2.806.664	2.802.404	2.828.024
Rasio Perawat per 1000 penduduk	0,24	0,25	0,77	0,84	0,82
Rasio Bidan per 1000 penduduk	0,42	0,42	0,53	0,57	0,52

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

j. Cakupan Pelayanan Puskesmas

Cakupan pelayanan puskesmas menunjukkan cakupan wilayah yang terlayani oleh puskesmas. Berdasarkan SNI, satu kecamatan minimal memiliki 1 puskesmas untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.21. Cakupan Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	61	60	58	58	59
Jumlah Kecamatan	47	47	47	47	47
Cakupan Pelayanan Puskesmas	1,30	1,28	1,23	1,23	1,26

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas cakupan pelayanan puskesmas tahun 2024 bernilai 1,26. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi telah memiliki setidaknya 1 puskesmas dan ada kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas sehingga nilai cakupan pelayanan puskesmas sudah baik. Namun perlu diperhatikan terkait dengan akses, jangkauan layanan, jumlah dan kesediaan tenaga medis, ketersediaan obat dan peralatan yang mumpuni, cakupan program kesehatan masyarakat, dan kualitas layanan yang diberikan.

k. Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu yang termasuk dalam perhitungan cakupan pelayanan puskesmas pembantu terdiri dari puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Puskesmas pembantu ini bertujuan untuk memberikan layanan Kesehatan dasar kepada masyarakat di tingkat yang lebih dekat dengan mereka. Berdasarkan SNI, satu desa/kelurahan minimal memiliki 1 puskesmas pembantu.

Tabel 2.22. Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas Pembantu	187	179	188	188	173
Jumlah Seluruh Desa dan Kelurahan	386	386	386	386	386
Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	0,484	0,464	0,487	0,487	0,448

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

Berdasarkan data diatas, cakupan pelayanan puskesmas pembantu pada tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi bernilai 0,48. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua atau hanya setengah dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki puskesmas pembantu untuk melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa puskesmas pembantu tersebar merata dan mampu memberikan pelayanan yang cukup dan berkualitas kepada masyarakat di setiap desa atau kelurahan. Pemerintah daerah juga perlu memperluas jaringan puskesmas pembantu untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan masyarakat secara lebih luas dan merata.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan bidang yang strategis dalam pembangunan daerah. Bidang ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat secara luas serta merancang tata ruang yang optimal untuk pertumbuhan dan keberlanjutan wilayah. Gambaran kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti persentase kondisi jalan kabupaten, rasio Panjang jalan per satuan penduduk, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, kondisi trotoar, serta luasan ruang terbuka hijau.

a) Persentase Kondisi Jalan Kabupaten

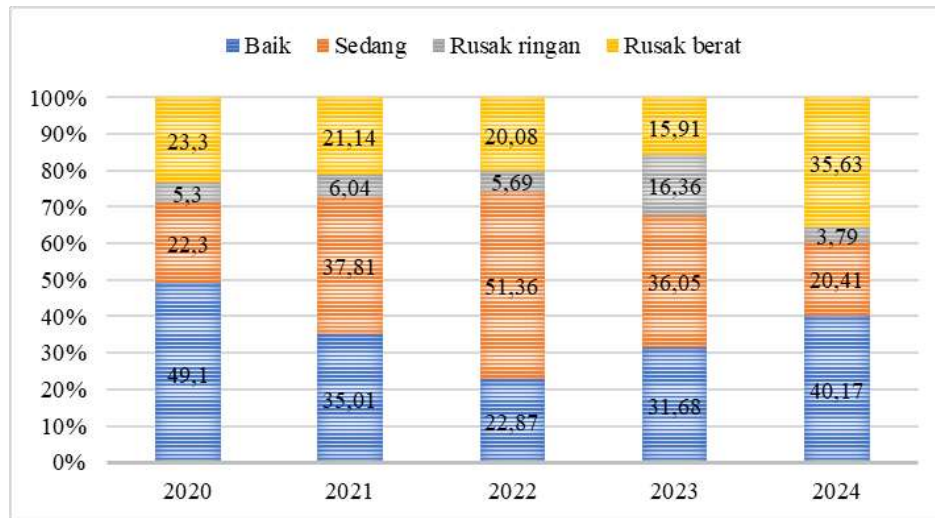
Persentase kondisi jalan kabupaten mengukur seberapa besar persentase jaringan jalan kabupaten yang dalam kondisi baik atau memadai untuk digunakan oleh masyarakat. Kondisi jalan yang baik tidak hanya mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah. Penilaian biasanya dilakukan melalui sistem penilaian standar yang mencakup kehalusan permukaan, ketebalan aspal, kualitas drainase, dan struktur jalan secara keseluruhan.

Tabel 2.23. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Kondisi	2020		2021		2022		2023		2024	
	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)
Baik	621,984	49,1	443,51	35,01	289,72	22,87	447,55	31,68	572,16	40,17
Sedang	282,736	22,3	478,92	37,81	650,57	51,36	509,19	36,05	290,67	20,41
Rusak Ringan	66,85	5,3	76,45	6,04	72,03	5,69	231,05	16,36	54,05	3,79

Kondisi	2020		2021		2022		2023		2024	
	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)	Panjang Jalan (km)	(%)
Rusak Berat	295,144	23,3	267,83	21,14	254,39	20,08	224,81	15,91	507,48	35,63
Total	1.266,71	100	1.266,71	100	1.266,71	100	1.412,60	100	1.424,36	100

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)



Gambar 2.55. Kondisi jalan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 - 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

Gambar menunjukkan bahwa kondisi jalan baik menunjukkan fluktuasi dengan persentase kondisi jalan baik pada tahun 2024 adalah 40,17 persen. Kondisi jalan rusak berat terlihat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten menjadi tantangan yang terus menerus, terutama dalam menjaga agar persentase kondisi jalan dalam kondisi baik tetap tinggi dan meminimalisir terjadinya kerusakan ringan hingga berat. Pemantauan yang kontinu dan perencanaan yang matang dalam pemeliharaan jalan sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

b) Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk

Rasio Panjang jalan per satuan penduduk adalah indikator yang mengukur ketersediaan jaringan jalan dalam satu wilayah terhadap jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa baik infrastruktur jalan dapat melayani mobilitas dan kebutuhan transportasi masyarakat. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah Panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 per 1.000 penduduk. Jumlah Panjang jalan yang digunakan adalah Panjang jalan kabupaten, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.24. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten (Km)	1.266,71	1.266,71	1.266,71	1.412,60	1.424,36
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.725.450	2.761.476	2.806.664	2.802.404	2.828.024
Rasio Panjang Jalan Per 1.000 Jumlah Penduduk (Km/Jiwa)	0,465	0,459	0,451	0,504	0,504

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, rasio panjang jalan per 1.000 penduduk adalah 0,504 km. Artinya, setiap 1.000 penduduk memiliki akses sepanjang 504 m jalan. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan adalah 0,6 km per 1.000 penduduk, sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Oleh karena itu, rasio Panjang jalan per 1.000 penduduk ini masih berada di bawah standar. Hal ini dapat mempengaruhi mobilitas penduduk, aksesibilitas terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan transportasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah perencanaan jangka panjang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan rasio ini, termasuk alokasi anggaran yang memadai, pemantauan terhadap kondisi jalan, dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah.

c) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Kabupaten Sukabumi memiliki saluran irigasi dengan panjang 562.648m untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Pada tahun 2020 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 59,28 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 61,05 persen pada tahun 2022. Akan tetapi kembali terjadi penurunan di tahun 2023 sebesar 53,47 persen. Dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 54,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya sekitar setengahnya dari seluruh luasan irigasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Irigasi dengan kondisi yang kurang baik tidak dapat mendukung pengairan lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan kualitas infrastruktur irigasi guna mendukung akses air yang lebih baik bagi petani, mengurangi resiko kekurangan air, serta meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.25. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)	16.676	16.965,81	17.175,81	556,00	15.294
Luas irigasi kabupaten (Ha)	28.131	28.131	28.131	297,31	28.131
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	59,28	60,31	61,05	53,43	54,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2025

d) Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu area terbuka yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk penghijauan tanaman secara alamiah maupun buatan. Fungsinya adalah membantu meningkatkan kesehatan lingkungan dengan membantu meningkatkan kualitas air dengan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Selain itu, RTH juga dimaksudnya dapat menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna sehingga membantu pelestarian biodiversitas, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi risiko banjir, dan menambah nilai estetika dan meningkatkan Kesehatan masyarakat. Standar luasan RTH publik di suatu wilayah sebesar 20 persen dari total luasan wilayah tersebut. Luas RTH Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.26. Luasan RTH Realisasi dan Target Berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Luas RTH realisasi	58,92	59,97	-	113.223,23	388.497,53
Rencana dalam RTRW	5.188,01	5.188,01	30,00	124.924,50	416.415,00
Capaian RTH (%)	1,14	1,16	-	90,63	93,30

Sumber: DPTR Kabupaten Sukabumi, 2024

Pada tahun 2022, telah terjadi lonjakan signifikan dimana capaian RTH mencapai 90,63 persen dibandingkan tahun 2019 – 2020 yang hanya 1,14 – 1,16 persen. Pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 93,30 persen yang artinya semakin mendekati target yang telah direncanakan. Kenaikan ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengimplementasikan program pengembangan RTH sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilihat berdasarkan indikator seperti rasio rumah layak huni, persentase kawasan kumuh, cakupan lingkungan yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas, serta sumber air minum layak dan sanitasi layak. Evaluasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi perumahan rakyat dan Kawasan permukiman untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan secara keseluruhan.

a) Rasio Rumah Layak Huni

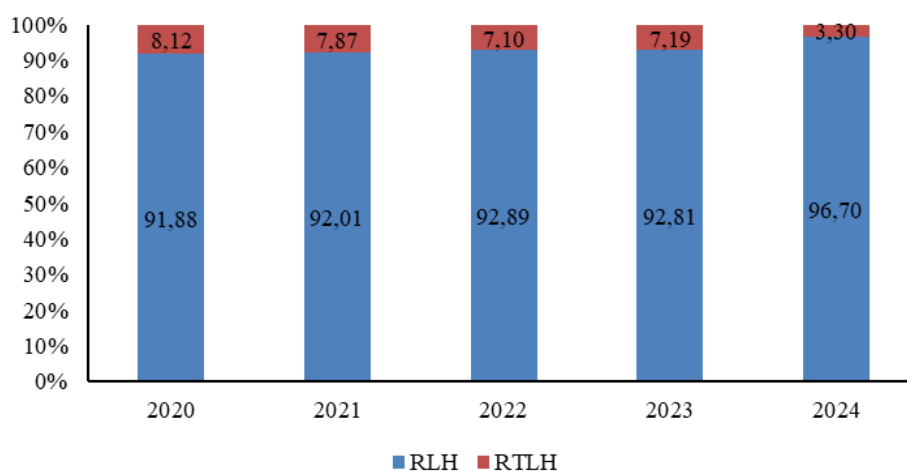
Rasio rumah layak huni mengukur jumlah rumah yang memenuhi standar sebagai rumah layak huni dibandingkan dengan total jumlah rumah di suatu daerah. Rumah layak huni dideskripsikan sebagai rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai untuk kehidupan manusia. Ketersediaan rumah layak seringkali terkendala dengan terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan tanah dan pembiayaan, serta bantuan bahan bangunan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Bantuan kredit mikro dari bank/Lembaga keuangan dan dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sangat diperlukan.

Rasio jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi terus meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah total di Kabupaten Sukabumi sebesar 91,88 persen dan mengalami peningkatan menjadi 96,70 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan yang ada. Meskipun demikian, masih terdapat rumah-rumah tidak layak huni sebesar 3,3 persen. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut agar hunian memenuhi standar layak huni. Walaupun persentase jumlah rumah layak huni semakin meningkat dan nilainya cukup tinggi, namun masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi. Persentase rumah tidak layak huni tersebut pada tahun 2020 sebesar 8,12 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 3,3 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.27. Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	679.125	649.015	651.208	665.464	978.512
Jumlah Rumah Layak Huni	623.964	597.213	604.947	617.630	946.228
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	55.161	51.082	46.261	47.834	32.284
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Total Rumah (%)	91,88	92,01	92,89	92,81	96,70
Rasio Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah (%)	8,12	7,87	7,1	7,19	3,30

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2025



Gambar 2.56. Rasio Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukabumi 2020 – 2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2025

b) Persentase Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak memenuhi syarat sebagai lingkungan yang layak huni, biasanya karena kurangnya akses terhadap prasarana dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Program dalam pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh di Indonesia sudah diinisiasi sejak tahun 1974 melalui program KIP (*Kampung Improvement Program*). Pada perjalanannya, program-program dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh terus berkembang. Saat ini program nasional dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dikenal dengan istilah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program KOTAKU menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Selain itu monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh.

Luas kawasan kumuh stagnan sejak 2021 sebesar 682,57 hektar, namun penanganannya terus meningkat dari 29,97 hektar pada 2021 menjadi 331,12 hektar pada 2024. Sisa kawasan kumuh berhasil ditekan dari 652,6 hektar pada 2021 menjadi 351,45 hektar pada 2024, dengan persentase penanganan naik dari 3,25 persen menjadi 48,51 persen. Data secara keseluruhan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.28. Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	77,65	682,57	682,57	682,57	682,57
Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani (Ha)	71,57	29,97	132,96	242,17	331,12
Sisa Luas Kawasan Kumuh (Ha)	6,08	652,6	519,64	440,4	351,45
Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani (%)	92,17	3,25	19,48	35,48	48,51
Persentase Sisa Kawasan Kumuh (%)	7,83	96,75	76,13	64,52	51,49

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data diatas, keberhasilan percepatan penanganan kawasan kumuh, terutama sejak 2022. Untuk mencapai eliminasi kawasan kumuh, program harus terus ditingkatkan dengan inovasi dan kolaborasi semua pihak.

c) Cakupan Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

Indikator ini mencerminkan seberapa luas daerah atau persentase penduduk yang memiliki akses terhadap prasarana dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, drainase, penampungan sampah, jaringan transportasi, layanan umum lainnya. Kelengkapan ini tentu akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Data lingkungan di Kabupaten Sukabumi yang didukung PSU tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29. Lingkungan yang didukung PSU di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019- 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa	386	386	386	386	386
Jumlah Desa PSU	254	259	31	93	267
Cakupan lingkungan yang Di dukung PSU (%)	65,8	67,1	8,03	24,09	69,17

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2024

Pada tahun 2019 – 2020, cakupan lingkungan yang didukung oleh PSU cukup baik, yakni 66 – 67 persen. Namun pada tahun 2021 menunjukkan penurunan yang cukup drastis menjadi 8,03 persen atau hanya 31 desa yang mendapatkan dukungan PSU. Pada tahun 2022 – 2023 telah mulai dilakukan peningkatan, sehingga pada saat ini cakupan lingkungan di Kabupaten Sukabumi yang telah didukung PSU adalah 69,17 persen.

d) Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak

Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Cakupan air minum layak dan sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2024, cakupan akses air minum layak mencapai 89,30 persen dan cakupan sanitasi layak mencapai 51,90 persen. Cakupan layanan akses sanitasi layak dilaksanakan dalam upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, yang meliputi pengelolaan limbah, air limbah, dan sampah, serta drainase. Cakupan kenaikan setiap tahun menunjukkan bahwa adanya upaya dalam

meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Sukabumi terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi dan upaya berkelanjutan untuk dapat mencapai target yang lebih tinggi dalam meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.30 Persentase Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Air Minum Layak	79,98	81,34	85,70	85,72	89,30
Cakupan Sanitasi Layak	49,66	62,88	64,35	53,21	51,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah aspek vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu daerah. Gambaran umum kondisi daerah mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti rasio petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran K3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, serta persentase penegakan peraturan daerah.

a) Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah lingkungannya. Rasio petugas perlindungan masyarakat mencerminkan jumlah petugas perlindungan masyarakat, seperti polisi, petugas keamanan, dll per satuan penduduk. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak petugas yang tersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Rasio petugas linmas di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kemudian stabil pada tahun 2022 – 2023 dengan jumlah 12.730 petugas. Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk menunjukkan nilai 43,65 pada tahun 2024. Artinya dibutuhkan 43,65 petugas untuk melayani 10.000 penduduk atau 1 petugas melayani hingga 229 penduduk. Data jumlah petugas linmas dan cakupannya pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.31. Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Petugas Linmas	15.034	12.930	12.730	12.730	12.310
Jumlah Penduduk	2.725.450	2.761.476	2.806.664	2.802.404	2.820.000
Rasio Petugas Linmas Per 10.000 Penduduk	55,16	46,82	45,36	45,43	43,65

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

b) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Ketertiban dan Ketenteraman Kehidupan Masyarakat (K3) merupakan aturan atau norma yang harus diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 akan mengukur sejauh mana aturan-aturan ini ditegakkan dan pelanggarannya diselesaikan. Berikut merupakan data mengenai jenis kejadian atau gangguan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 – 2024, meliputi tindakan kriminalitas, kecelakaan, bencana alam, dan lain-lain.

Tabel 2.32. Data K3 di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Jenis Kejadian / Gangguan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tindakan Kriminalitas	197	170	119	247	54
Kecelakaan	96	85	127	279	153
Bencana Alam	247	810	926	599	2.364
Lain-Lain	45	31	67	62	100
Jumlah	585	1.096	1.239	1.187	1.671

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah kejadian/gangguan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2024 mencatat total kejadian tertinggi sebanyak 1.671 kasus, didominasi oleh bencana alam sebanyak 2.364 kejadian, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kasus kriminalitas menurun drastis dari 247 kasus pada 2023 menjadi 54 kasus pada 2024. Jumlah kecelakaan juga menurun dari 279 kasus (2023) menjadi 153 kasus (2024). Kategori lain-lain mengalami peningkatan dari 62 menjadi 100 kasus. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan pada bencana alam, sementara gangguan lain cenderung menurun atau fluktuatif.

c) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Data menunjukkan bahwa jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Sukabumi cenderung meningkat, dengan lonjakan tajam pada tahun 2023 mencapai 579 kejadian. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor cuaca, iklim, atau kelalaian manusia, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dominan. Sementara itu, cakupan pelayanan bencana kebakaran juga meningkat dari 40,65 persen pada 2019 menjadi 60,98 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan dalam respons kebakaran, baik dari segi kesiapan petugas, peralatan, maupun kesadaran masyarakat.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mengacu pada sejauh mana suatu daerah mampu memberikan respons dan layanan dan cepat dan efektif terhadap kebakaran. Indikator yang relevan dalam mengevaluasi cakupan pelayanan bencana alam, di antaranya jumlah dan lokasi pos pemadam kebakaran, waktu response (daya tanggap petugas, jumlah dan kualitas peralatan pemadaman kebakaran, ketersediaan sumberdaya manusia, dan kesadaran masyarakat).

Tabel 2.33. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kejadian Kebakaran	194	126	137	163	579
Luas WMK (Km ²)	1.413	1.589,63	1.942,88	1.942,9	2.119,5
Luas Wilayah Kabupaten (Km ²)	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	40,65	45,74	55,9	55,9	60,98

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah kebakaran cenderung meningkat dan meningkat tajam pada tahun 2022. Hal ini dapat diduga karena faktor cuaca dan iklim atau kelalaian manusia, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor pemicu yang paling dominan. Hal ini penting dilakukan untuk merancang strategi mitigasi yang lebih efektif guna mengurangi risiko kebakaran di masa yang akan datang. Adapun cakupan pelayanan bencana kebakaran cenderung meningkat seiring waktu. Hal ini merupakan indikator adanya upaya peningkatan kemampuan dalam merespons kajian kebakaran.

d) Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda merupakan salah satu aktivitas yang penting karena memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek yang telah dituangkan dalam Perda sejak waktu berlakunya Perda tersebut. Data persentase penegakan Perda di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggaran Perda	33	40	13	31	42
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	33	40	13	31	42
Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase penegakan Perda di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020-2024 dapat memenuhi target mencapai angka 100 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua kasus pelanggaran Perda yang terjadi dapat terselesaikan secara keseluruhan dengan jumlah pelanggaran Perda mencapai 42 kasus pada tahun 2024.

e) Persentase Capain Aksi HAM

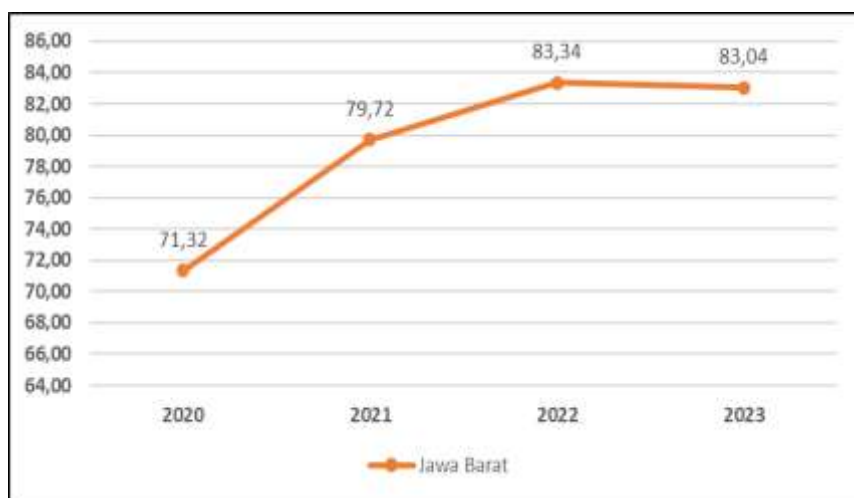
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan komitmen Negara dan Pemerintah Indonesia terhadap penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM baik ditingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, capaian aksi HAM pada catur wulan pertama tahun 2022 (B-04) dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (K/L/D) di seluruh Indonesia menunjukkan angka 74,81 dari nilai maksimum 100 yang ditentukan. Sedangkan nilai capaian aksi HAM tingkat Kabupaten/Kota sebesar 71,65 (Kementerian Hukum dan HAM, 2022).

f) Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi (ID) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Berikut ini adalah gambar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat Tahun 2020-2023:



Gambar 2.57. Indeks Demokrasi (ID) Jawa Barat Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data diatas, nilai Indeks Demokrasi (ID) Jawa Barat Tahun 2020-2023, mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tetapi mengalami penurunan di tahun 2023. hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan ancaman kebebasan berekspresi masyarakat.

g) Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman (IRA) adalah kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi, persepsi, dan kebutuhan masyarakat terkait rasa aman, serta mengukur Indeks Rasa Aman di suatu wilayah, melibatkan empat dimensi utama: keamanan dari bencana, pemenuhan

kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan, serta keamanan dari kekerasan. Pendefinisian “Rasa Aman“ disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Berikut data tabel indeks rasa aman yang dihitung dalam nilai skala 5 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.35. Nilai Indeks Rasa Aman Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks (Skala 5)
2020	4 (Baik)
2021	4,2 (Baik)
2022	3,8 (Baik)
2023	3,6 (Baik)
2024	4,4 (Baik)

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel di atas, data menunjukkan bahwa indeks rasa aman dari tahun 2020 hingga 2024 berada dalam kategori "**Baik**", dengan nilai yang berfluktuasi. Setelah peningkatan dari 4,0 pada 2020 ke 4,2 di 2021, terjadi penurunan selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 3,6 pada 2023. Namun, pada 2024, indeks kembali naik signifikan menjadi 4,4. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas atau kinerja pada tahun terakhir setelah penurunan sebelumnya, meskipun stabilitas dan konsistensi masih perlu ditingkatkan.

h) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Indeks Trantib) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di suatu wilayah. Berikut adalah nilai indeks ketentraman dan ketertiban Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024:

Tabel 2.36. Nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks (%)
2020	75,33 (Cukup Aman)
2021	72,5 (Cukup Aman)
2022	76,4 (Cukup Aman)
2023	77 (Cukup Aman)
2024	74,18 (Cukup Aman)

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel diatas, data menunjukkan Indeks dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan status "cukup aman" secara konsisten, dengan nilai yang berfluktuasi. Indeks sempat menurun pada 2021 (72,5 persen) dari 2020 (75,33 persen), lalu meningkat pada 2022 dan 2023, mencapai puncaknya di 77 persen. Namun, pada 2024 kembali menurun menjadi 74,18 persen. Secara keseluruhan, kondisi cukup stabil, namun masih diperlukan upaya peningkatan agar status keamanan dapat mencapai kategori yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

6) Sosial

Kesejahteraan sosial adalah upaya terencana meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial untuk mengatasi dan pencegahan masalah sosial, serta memenuhi kebutuhan manusia. Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Gambaran umum kondisi daerah mengenai sosial dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah PPKS, jumlah panti sosial, jumlah kejadian bencana alam dan jumlah korban bencana alam, serta permasalahan sosial masyarakat.

a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Jumlah PPKS merujuk pada upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dalam berbagai bentuk. Beberapa aspek yang mungkin menjadi fokus adalah penyediaan program kesejahteraan sosial (bantuan sosial tunai/BST, bantuan pangan non-tunai/BPNT, program keluarga harapan/PKH, dan program lain yang membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup), peningkatan akses layanan Kesehatan (pemeriksaan Kesehatan, vaksinasi, dll), pengembangan keterampilan dan Pendidikan, serta perlindungan dan keamanan sosial.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan- permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana sosial. Jumlah PPKS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.37. Jumlah PPKS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Jenis PPKS	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anak Balita Terlantar	752	5.791	1.545	1.545	1.625
Anak dengan Kedisabilitas	900	900	900	900	945
Anak Jalanan	108	45	45	45	47
Anak Terlantar	47.494	5.281	14.090	2.635	14.795
Anak Berhadapan dengan Hukum	185	72	72	72	42
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	44	44	44	46
Anak Yang Jadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah	51	45	45	45	42
Bekas Warga Binaan Lembaga	35	30	30	30	32

Jenis PPKS	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pemasyarakatan					
Fakir Miskin	1.502.130 / 441.059 Ruta	1.469.898 / 433.125 Ruta	1.424.651 / 433.125 Ruta	1,909,412/ 759,855 Ruta	1.854.397 JIWA / 747.994 KK
Gelandangan	17	25	25	127	75
Kelompok Minoritas	320	370	370	370	389
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	50	45	45	45	25
Komunitas Adat Terpencil	17.507	13.344	13.344	13.344	14.011
Korban Bencana Alam	2.432	2.415	2.415	2.653	2.480
Korban Penyalahgunaan Napza	301	74	74	74	78
Korban Tindak Kekerasan	54	10	10	10	11
Korban <i>Trafficking</i>	87	6	6	26	6
Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	-
Lanjut Usia Terlantar	14.999	4.631	15.035	2.750	2.750
Orang dengan HIV AIDs	103	118	118	118	298
Pekerja Migran Bermasalah	614	485	485	485	22
Pemulung	166	20	20	20	25
Pengemis	28	12	12	128	75
Penyandang Disabilitas	9.899	9.899	9.899	9.899	10.394
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7.731	585	585	585	614
Tuna Susila (TS)	-	-	115	115	121
Total	1.612.835	1.558.220	1.483.980	1.945.477	1.903.345

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, di Kabupaten Sukabumi terdapat 26 jenis PPKS. Jenis PPKS dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya adalah fakir miskin. Berdasarkan jumlah total PPKS di Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019 sebanyak 1.612.835 jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.903.345 jiwa pada tahun 2023.

b) Jumlah Panti Sosial

Penyediaan panti sosial bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Data jumlah panti sosial dan penghuninya di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38. Jumlah Panti dan Penghuninya di Kabupaten Sukabumi 2020-2024

Jenis Panti	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni	Jumlah Panti	Jumlah Penghuni
Panti Sosial Asuhan Anak	13	951	13	951	21	2207	22	1286	22	1286
Panti Sosial Tresna Werda	1	60	1	60	-	-	-	-	1	-
Panti Sosial Bina Netra	1	18	1	18	2	39	-	-	-	-
Panti Sosial Bina Laras	3	339	3	339	-	-	1	60	-	-
Panti Sosial Karya Wanita	1	30	1	30	1	90	1	30	1	-
Panti Sosial Korban Napza	1	90	1	90	7	53	2	45	2	20
Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV AIDS	-	70	-	70	2	88	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas, Panti Asuhan Asuhan Anak mengalami peningkatan panti dari 13 pada tahun 2020 menjadi 22 pada tahun 2024, namun jumlah penghuninya fluktuatif. Jenis panti lainnya yang terdapat di Kabupaten Sukabumi yaitu Panti Sosial Bina Napza juga menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Jumlah total penghuni pada seluruh panti pada tahun 2024 adalah 1.306 orang dengan 1.286 terdapat di Panti Sosial Asuhan Anak.

c) Jumlah Kejadian Bencana Alam dan Jumlah Korban Bencana Alam

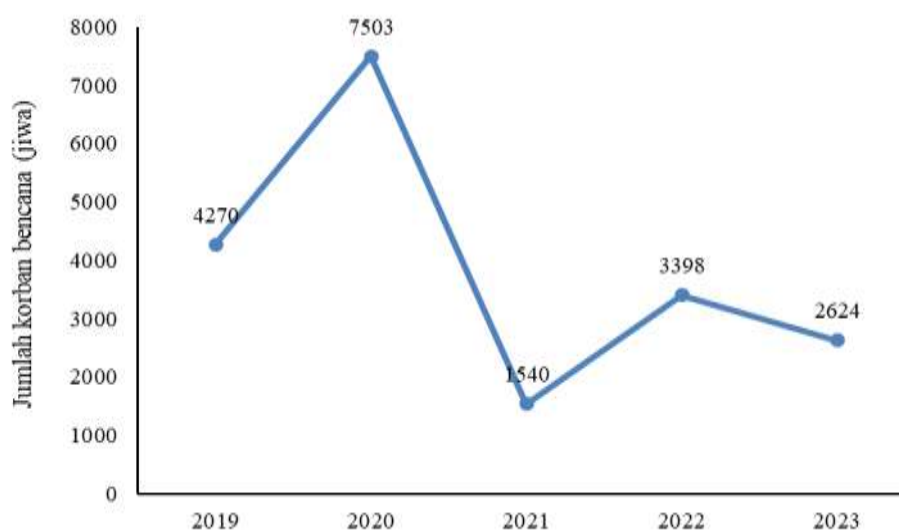
Kabupaten Sukabumi menghadapi berbagai bencana alam, dengan longsor sebagai kejadian paling dominan, mencapai 495 kasus pada 2022. Kejadian gempa bumi menunjukkan tren meningkat, meskipun data 2023 belum tersedia. Secara keseluruhan, jumlah korban bencana mengalami penurunan dari 7.503 jiwa pada 2020 menjadi 2.624 jiwa pada 2024, dengan longsor dan angin kencang sebagai penyebab utama. Data ini menekankan pentingnya perencanaan mitigasi bencana yang lebih baik.

Jenis kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi cukup beragam, mulai dari longsor, banjir, angin kencang, gempa bumi, pergerakan tanah, kebakaran, dll. Jenis bencana alam yang paling sering muncul adalah longsor dengan total kejadian 495 tahun 2022. Secara umum, total kejadian gempa cukup berfluktuatif dan cenderung meningkat, namun data tahun 2023 belum tersedia. Adapun korban bencana mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024 dengan total 2.624 jiwa. Bencana yang memakan korban terbanyak terjadi pada tahun 2020 dengan total korban 7.503 yang Sebagian besar disebabkan oleh longsor dan angin kencang. Korban bencana tersebut mencakup korban yang menderita, meninggal dunia, luka, dan mengungsi.

Tabel 2.39. Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Longsor	312	248	460	495	-
Banjir	30	27	59	90	-
Angin Kencang	105	104	148	164	-
Gempa Bumi	3	2	26	54	-
Pergerakan Tanah	24	16	15	50	-
Kebakaran	141	63	82	73	-
Tenggelam	0	0	-	-	-
Kekeringan	81	0	-	-	-
Lain-lain	2	10	-	-	-
Total	698	470	790	926	601

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi, 2024



Gambar 2.58. Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Sukabumi 2019 – 2023

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data ini dapat dilakukan perencanaan dan persiapan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Peningkatan kapasitas mitigasi dan respons bencana dapat membantu mengurangi jumlah korban dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap bencana. Selain itu, penting dilakukan pelibatan berbagai pihak, seperti Lembaga kemanusiaan, masyarakat sipil dan sektor swasta dalam membangun kapasitas dan merespons bencana untuk meningkatkan daya tanggap terhadap situasi bencana yang kompleks dan beragam.

d) Permasalahan Sosial Masyarakat

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan gangguan dan kerugian nyata maupun kerugian sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus perhatian di Kabupaten Sukabumi adalah penyandang cacat, anak jalanan, kasus bunuh diri, serta gelandangan dan PSK. Pada tahun 2022 tercatat setidaknya 375 orang penyandang cacat, 10 lokasi anak jalanan, 26 kasus bunuh diri, 3 lokasi gelandangan, dan 2 lokasi PSK. Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, kondisi ini mungkin lebih rendah namun beberapa permasalahan adalah masalah serius yang

memerlukan perhatian khusus, seperti penyediaan layanan Kesehatan mental dan dukungan psikososial untuk meminimalisir kasus bunuh diri, serta memberi perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap risiko pada anak jalanan, gelandangan, dan PSK.

Tabel 2.40. Permasalahan Sosial Masyarakat di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

Jenis Permasalahan Sosial	Kabupaten Sukabumi	Provinsi Jawa Barat	Rata-Rata Kab/Kota di Jawa Barat
Penyandang Cacat	375	5.824	216
Lokasi Anak Jalanan	10	250	9
Bunuh Diri	26	366	14
Lokasi Gelandangan	3	123	5
Lokasi PSK	2	130	5

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2023 (diolah)

Selain permasalahan sosial tersebut, terdapat permasalahan lain berupa kriminalitas (kejahatan) yang cukup mengganggu, seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan/penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan kesusilaan, pembakaran dan pembunuhan, serta perdagangan orang dan korupsi.

Tabel 2.41. Permasalahan Sosial Masyarakat Berdasarkan Jumlah Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

Kejahatan Paling Sering	Kabupaten Sukabumi		Provinsi Jawa Barat	
	Jumlah Desa	Kejadian (%)	Jumlah Desa	Kejadian (%)
Pencurian	315	81,6	4.194	70,4
Pencurian dengan kekerasan	3	0,8	23	0,4
Penipuan/penggelapan	6	1,6	76	1,3
Penganiayaan			37	0,6
Pembakaran	1	0,3	7	0,1
Kejahatan kesusilaan	1	0,3	16	0,3
Narkoba	1	0,3	99	1,7
Perjudian	3	0,8	93	1,6
Pembunuhan	1	0,3	10	0,2
Perdagangan orang				0,0
Korupsi			4	0,1
Total	386	100,0	4.559	76,5

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2023 (diolah)

Kejahatan yang paling sering terjadi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 adalah pencurian yang terjadi di 315 dari 386 desa (81,6 persen). Kasus pencurian ini lebih tinggi jika dibanding dengan rata-rata pencurian di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kasus pencurian dengan kekerasan, penipuan, pembelajaran, kejahatan sosial, dan pembunuhan juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Oleh karena itu, permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi cukup memprihatinkan. Upaya mengatasi permasalahan sosial masyarakat sangat penting diantaranya dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat.

2.1.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non

Dasar

1) Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia di atas 15 tahun, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Gambaran umum kondisi daerah terkait tenaga kerja dapat dilihat dari berbagai indikator seperti besaran pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan, serta jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan.

a) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan

Peningkatan efektivitas penempatan kerja merupakan salah satu fokus utama dalam pengelolaan sumberdaya manusia dan pengemabngan ekonomi suatu wilayah. Data persentase pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja program penempatan tenaga kerja. Nilai besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total pencari kerja yang ditempatkan	4.464	6.600	4.302	2.690	3.697
Total pencari kerja yang terdaftar	17.549	27.163	20.337	15.062	27.397
Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	25,44	24,30	21,15	17,86	13,49

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar mengalami fluktuasi dengan penurunan terjadi dari tahun 2020 – 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang

semakin besar dengan penempatan tenaga kerja. Faktor seperti ketidakcocokan keterampilan, berkurangnya peluang kerja, masalah ekonomi makro, perubahan kebijakan, dan masalah dalam sistem penempatan sering kali menjadi penyebab. Meskipun pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan, namun tahun 2022-2024 kembali menurun, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Beberapa Langkah yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi program pelatihan dan pengembangan keterampilan
 - Mengidentifikasi kebutuhan industri dan memfasilitasi kegiatan pelatihan yang relevan
 - Melakukan pelatihan pengembangan *soft skills* yang mendukung, seperti komunikasi, Manajemen waktu, dan kerja tim
- 2) Kerjasama dengan sektor swasta
 - Menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk kegiatan magang, pelatihan kerja, dan penempatan langsung
 - Membentuk forum atau platform untuk dialog antara pemerintah, perusahaan, dan Lembaga pelatihan
- 3) Peningkatan sistem informasi dan layanan penempatan
 - Mengembangkan portal online yang memudahkan pencari kerja untuk mencari informasi tentang lowongan kerja dan melakukan pendaftaran
 - Menyediakan layanan konseling untuk membantu pencari kerja memahami peluang karir dan membuat keputusan yang tepat
- 4) Pemantauan dan evaluasi berkala
 - Membuat sistem untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program penempatan kerja secara berkala
 - Menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan yang ada

b) Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan

Pelatihan bagi calon tenaga kerja adalah aspek krusial dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelatihan bertujuan untuk memastikan calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Data tentang jumlah calon tenaga kerja yang mendapat pelatihan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Kegiatan pelatihan dilakukan oleh Balai latihan Kerja (BLK) yang merupakan UPTD dan berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. BLK memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja Data berikut menunjukkan jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat/kompetensi dan pelatihan berbasis kewirausahaan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.43. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Kompetensi	2.316	475	352	352	320
Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	80	120	80	20	220

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2024

Jenis pelatihan yang diminati adalah pelatihan berbasis masyarakat/kompetensi jika dibandingkan dengan pelatihan berbasis kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi cenderung menurun seiring waktu. Pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi hanya 320 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan calon tenaga kerja mendaftar atau ditempatkan. Beberapa Langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan:

- 1) Melakukan evaluasi dan pembaharuan program pelatihan sehingga lebih relevan dengan kebutuhan industri dan tren pasar kerja baru
- 2) Mengembangkan program pelatihan online untuk mengatasi kendala akses ke lokasi pelatihan
- 3) Menyediakan subsidi atau beasiswa untuk calon tenaga kerja yang kesulitan untuk membayar biaya pelatihan
- 4) Melakukan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat pelatihan dan cara mendaftar
- 5) Melakukan kolaborasi dengan sektor swasta dan Lembaga Pendidikan serta sekolah dan universitas untuk mengintegrasikan pelatihan dengan kebutuhan dan kurikulum
- 6) Mengembangkan program inkubasi bisnis untuk mendukung peserta pelatihan kewirausahaan

c) Jumlah Pencari Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Mengetahui jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat Pendidikan adalah penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja. Data ini membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan menyesuaikan program pelatihan serta kebijakan penempatan kerja sesuai dengan tingkat Pendidikan pencari kerja. Berikut merupakan sebaran tenaga kerja berdasarkan tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.44. Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD	344	511	641	967	610

Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SLTP	1.102	4.361	2.510	1.866	3.305
SLTA	15.023	20.785	15.723	11.290	21.978
Sarjana Muda	530	473	505	292	369
S1	508	1.028	950	624	1.075
S2	42	5	8	23	60
Total	17.549	27.163	20.337	15.062	27.397

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa tenaga kerja yang paling dominan merupakan tenaga kerja berpendidikan SLTA dengan total 21.978 orang pada tahun 2024. Adapun tenaga kerja berpendidikan SD cenderung turun, meskipun cukup banyak jika dibandingkan dengan Pendidikan Diploma, Sarjana, dan Magister. Rendahnya tenaga kerja berpendidikan minimal Sarjana (S1) perlu diperhatikan mengingat pentingnya tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja total di Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi tapi pada akhirnya mengalami kenaikan dari 17.549 pada tahun 2020 menjadi 27.397 pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga kerja adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar, mendorong tenaga kerja berwirausaha sebagai alternatif menciptakan lapangan kerja, dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penurunan jumlah tenaga kerja di berbagai tingkat Pendidikan untuk merancang strategi yang efektif untuk mengatasi hal tersebut.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Di Kabupaten Sukabumi, tantangan kedua aspek ini memerlukan perhatian khusus dan Tindakan strategis untuk memastikan hak dan kesejahteraan semua individu. Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk melindungi hak-hak anak. Gambaran umum mengenai pemberdayaan perempuan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti persentase perempuan yang menjadi PNS, persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD, persentase penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, indeks pembangunan gender, serta indeks pemberdayaan gender.

a) Persentase Perempuan yang Menjadi PNS

Pemerintah mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai posisi, termasuk PNS merupakan implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam pemerintahan. Data persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Persentase Pekerja Perempuan yang Menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja perempuan yang menjadi PNS	4.748	4.578	4.367	4.383	3.793
Jumlah total PNS	10.918	10.389	9.712	9.745	8.231
Persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS (%)	43,49	44,07	44,97	44,98	46,08

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 selalu mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan pada 2024. Pada tahun 2024, persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 46,08 persen.

b) Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengindikasikan eksistensi perempuan dalam kancah politik daerah. Oleh karena itu, perlu upaya bersama baik dari partai politik, pemerintah maupun masyarakat untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman perempuan terhadap politik, sehingga kuota perempuan di parlemen sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Data persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.46. Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD (Unit)	8	8	8	8	9
Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD (Unit)	50	50	50	50	50
Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD (%)	16	16	16	16	18

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa selama empat tahun terakhir, persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi stabil pada angka 16 persen dan naik pada tahun 2024 menjadi 18 persen. Meskipun naik, angka ini menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili dalam pengambilan keputusan di DPRD. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan persentase ini melalui berbagai kegiatan, seperti penerapan kebijakan afirmasi, pengadaan program pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik bagi perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi Wanita dalam politik melalui kampanye, mendorong partai politik mendukung penuh kandidat

perempuan, berkolaborasi dengan LSM, dan melakukan monitoring evaluasi secara kontinu.

c) Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Data persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.47. Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

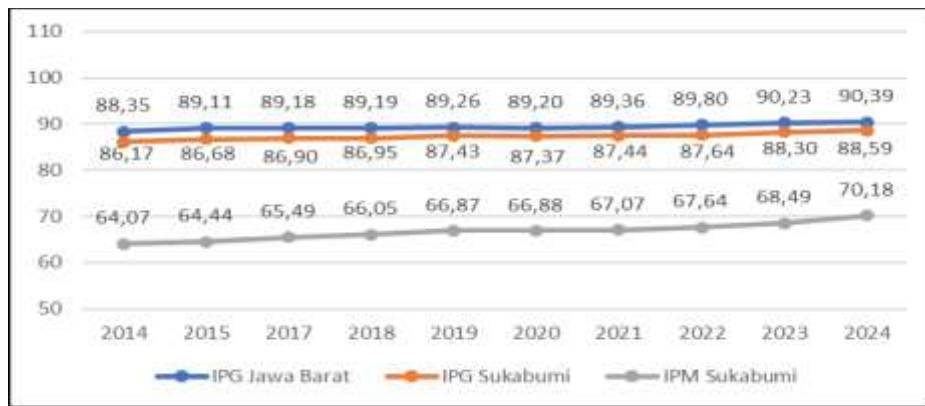
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	180	207	158	258	236
Jumlah Korban Perempuan dan Anak yang Ditangani	180	207	158	258	236
Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100

Sumber: DP3A Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2020 sampai tahun 2024 jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami fluktuasi. Namun demikian, penanganan terhadap korban kekerasan tersebut telah berhasil ditangani seluruhnya, sehingga selalu mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.

d) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. IPG mengukur perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan utama IPG adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan mendorong kebijakan yang meningkatkan kesetaraan gender. IPG dapat pula dikatakan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Data IPG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat serta perbandingannya dengan IPM Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.59. IPG, IPM Kabupaten Sukabumi, dan IPG Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dapat tergambar dengan menganalisis perbandingan antara IPM dan IPG. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi *gap* antara IPM dan IPG. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG maka tidak terjadi ketimpangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar *gap* antara IPG dan IPM maka menunjukkan semakin besar pula ketimpangan gender di suatu wilayah. Data IPG dari tahun 2014 dianalisis menggunakan hasil indeks yang paling mendekati angka 100. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan dalam penyusunan IPM dan IPG pada tahun 2014.

Data menunjukkan IPG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 IPG berada pada angka 86,17 poin, dan meningkat menjadi 88,59 poin hingga tahun 2024. Kondisi IPG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2024 berada di bawah rata-rata Kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi masih lebih unggul dibanding beberapa kabupaten lainnya.

e) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender dimanfaatkan untuk mengukur partisipasi dan peranan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG dapat digunakan pula sebagai salah satu alat monitoring hasil pembangunan gender. IDG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.60. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

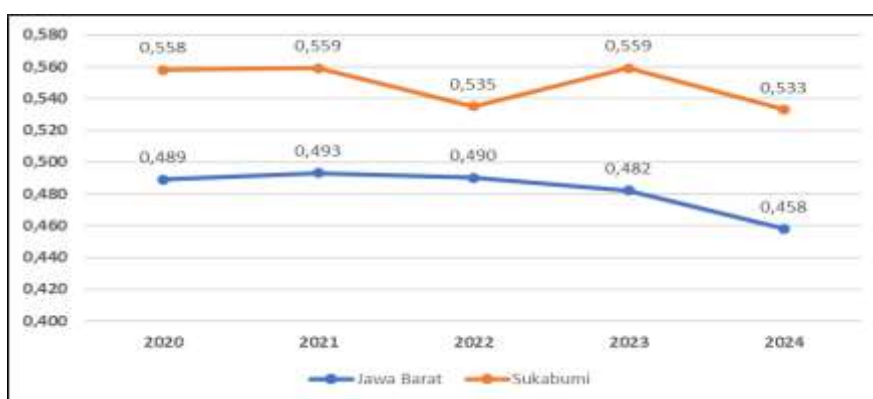
IDG terdiri dari tiga komponen penyusun yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; pengambilan keputusan dengan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan distribusi pendapatan dari sumbangan pendapatan. IDG menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG yang mendekati angka seratus mengindikasikan semakin kecil kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan.

IDG Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Kondisi IDG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga tahun 2023 berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2023, IDG di Kabupaten Sukabumi mencapai 62,28 poin. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi, sedangkan, pada tahun 2018 menunjukkan angka IDG terendah sebesar 53,07 poin. Salah satu komponen IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen. Komponen tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang meningkat, meskipun relatif lambat. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi ketimpangan aksesibilitas antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi.

UNDP menyusun dua indeks turunan dari IPM yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengadopsi persoalan mengenai gender. IDG cenderung menurun. Maka, diperlukan usaha yang lebih keras dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas peran perempuan di berbagai bidang. Selain harus meningkatkan pembangunan manusia secara umum, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan peranan perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial.

f) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat mengakses haknya secara penuh sebagai manusia. Adanya ketimpangan pembangunan antara penduduk perempuan dan laki-laki menyebabkan proses pembangunan daerah tidak dapat mencapai potensi yang optimal. Kondisi yang diharapkan dalam pembangunan manusia yaitu dimana penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai ukuran ketimpangan gender. Kemudian, BPS mengadopsi pengukuran tersebut, dengan melakukan perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menggambarkan ketidakefektifan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Adapun IKG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

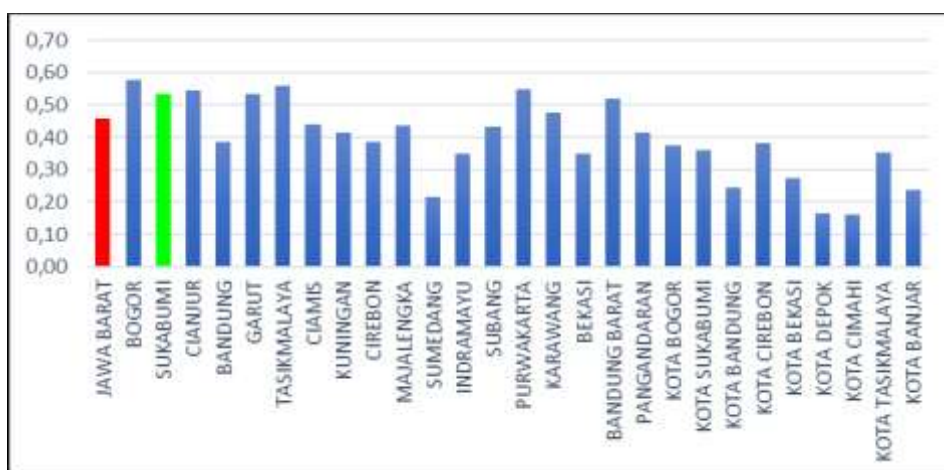


Gambar 2.61. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Pengukuran IKG mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi, menggunakan lima indikator yang tersedia. Indikator tersebut diantaranya faktor risiko kematian ibu menggunakan proporsi persalinan tidak pada fasilitas kesehatan, fertilitas remaja menggunakan proporsi perempuan umur kurang dari 20 tahun saat melahirkan hidup pertama, proporsi penduduk 25 tahun keatas berpendidikan minimal SMA, persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen, dan persentase angkatan kerja terhadap usia kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai 1. Nilai sebesar nol mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna, sedangkan angka satu mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna.

Dari tahun 2020 sampai tahun 2024, IKG Kabupaten Sukabumi capaiannya lebih dari 0,450 poin. Walaupun mengalami tren yang fluktuatif, IKG Kabupaten Sukabumi masih berada pada level yang tinggi. Semakin kecil nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan peran pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Perbandingan kondisi IKG Kabupaten Sukabumi dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.62. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu kabupaten dengan ketimpangan gender yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Sukabumi yang semakin besar.

g) Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan lima klaster hak anak. Komponen Indeks Perlindungan Anak (IPA) Klaster I: Hak sipil dan kebebasan, Klaster II: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster III: Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster IV: Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, Klaster V: Perlindungan khusus. Berikut ini adalah tabel Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.48. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023

Tahun	Nasional	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi
2020	66,89	68,32	-
2021	61,38	63,50	-
2022	63,30	65,74	59,78
2023	63,83	65,61	61,50

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & BPS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan Indeks Perlindungan Anak dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, begitu pula dari tahun 2022 ke tahun 2023, walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 begitu pula untuk nasional.

h) Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indek Kualitas Keluarga adalah ukuran yang digunakan untuk merencanakan dan menilai keberhasilan dalam Pembangunan Keluarga, terutama dalam mencapai kesetaraan

gender dan pemenuhan hak anak. Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Berikut ini adalah tabel Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.49. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023

Tahun	Nasional	Jawa Barat
2020	70,93	70,11
2021	73,84	72,54
2022	76,73	75,57
2023	77,64	77,09

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & BPS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai IKK Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, begitu pula dengan nasional. Hal ini menunjukkan tren positif pada perencanaan dan keberhasilan dalam Pembangunan Keluarga. Berikut adalah tabel Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024:

Tabel 2.50. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

No	Wilayah	IPBK	Status
1	Bogor	52,5	2
2	Sukabumi	56,2	2
3	Cianjur	57,9	2
4	Bandung	62,9	3
5	Garut	51,1	2
6	Tasikmalaya	59,9	2
7	Ciamis	63,4	3
8	Kuningan	66,6	3
9	Cirebon	59,2	2
10	Majalengka	62,4	3
11	Sumedang	65,4	3
12	Indramayu	67,1	3
13	Subang	69,5	4
14	Purwakarta	60,1	3
15	Karawang	64,7	3
16	Bekasi	65,8	3
17	Bandung Barat	62,7	3
18	Pangandaran	69,4	4
19	Kota Bogor	58,2	2
20	Kota Sukabumi	56,5	2
21	Kota Bandung	56,3	2
22	Kota Cirebon	65,7	3
23	Kota Bekasi	67,1	3
24	Kota Depok	65,3	3
25	Kota Cimahi	66,7	3
26	Kota Tasikmalaya	57,5	2
27	Kota Banjar	70,3	4
	Jawa Barat	59,3	2

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Sukabumi memiliki nilai IPBK 56,2 dengan status “2” yaitu menengah bawah. Nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan bahwa kondisi

pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik. Klasifikasi nilai IPBK >80 dengan status “sangat tinggi” penunjuk angka “5”, IPBK 69-80 dengan status “tinggi” penunjuk angka “4”, IPBK 60-68 dengan status “menengah atas” penunjuk angka “3”, IPBK 50-59 dengan status “menengah bawah” penunjuk angka “2”, dan IPBK <50 dengan status “rendah” penunjuk angka “1”. Kabupaten Sukabumi masuk ke dalam kelompok menengah bawah yang artinya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Sukabumi masih harus ditingkatkan.

i) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur untuk menilai perkembangan pemuda di Indonesia. IPP merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah tabel Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.51. Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023

Tahun	Nasional	Jawa Barat
2020	51,00	48,83
2021	53,33	47,00
2022	55,33	49,67
2023	56,33	51,17

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat dan Nasional mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal ini menunjukkan tren positif terhadap perkembangan pemuda di Indonesia.

3) Pangan

Kabupaten Sukabumi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Dengan luas wilayah yang mencapai 4.161 km², kabupaten ini diberkahi dengan beragam sumber daya alam yang mendukung pertanian, perikanan, dan peternakan. Pertanian merupakan sektor utama yang menggerakkan perekonomian lokal, dengan komoditas andalan seperti padi, jagung, dan sayuran. Selain itu, Sukabumi juga dikenal sebagai penghasil buah-buahan tropis seperti pisang, durian, dan manggis. Keberagaman geografis Sukabumi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, menciptakan berbagai zona agroekologi yang ideal untuk budidaya tanaman. Di dataran tinggi, tanaman hortikultura seperti teh dan kopi tumbuh subur, sementara di dataran rendah, padi dan palawija menjadi komoditas utama. Selain pertanian, perikanan darat juga berkembang pesat, dengan budidaya ikan air tawar seperti nila dan lele yang menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat setempat.

Namun, meski memiliki potensi besar, sektor pangan di Kabupaten Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur pertanian yang belum memadai, akses pasar yang terbatas, dan perubahan iklim menjadi beberapa kendala yang harus diatasi. Untuk itu,

diperlukan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pangan. Salah satu inisiatif yang dapat diimplementasikan adalah Program Rumah Pangan Lestari, yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal guna menambah ketersediaan pangan rumah tangga. Dengan dukungan berbagai pihak, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi untuk menjadi salah satu lumbung pangan utama di Jawa Barat. Keberhasilan ini akan berdampak positif tidak hanya bagi kesejahteraan petani, tetapi juga bagi ketahanan pangan daerah secara keseluruhan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Gambaran umum kondisi pangan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

a) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan di Kabupaten Sukabumi mencerminkan keragaman dan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Kabupaten ini menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Barat, dengan berbagai komoditas utama yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan regional. Padi, jagung, dan palawija adalah beberapa produk pertanian unggulan yang banyak ditanam di lahan-lahan subur Sukabumi. Padi merupakan komoditas utama yang dihasilkan, dengan lahan sawah yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk daerah dataran rendah yang memiliki sistem irigasi cukup baik. Selain itu, jagung dan palawija seperti kacang-kacangan dan ubi kayu juga menjadi komoditas penting, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berpotensi untuk diekspor ke daerah lain.

Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Data ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.52. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg)	542.983.318	555.719.255	550.196.478	473.525.138	339.891.790
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.571.890	2.725.450	2.761.476	2.762.500	2.851.890

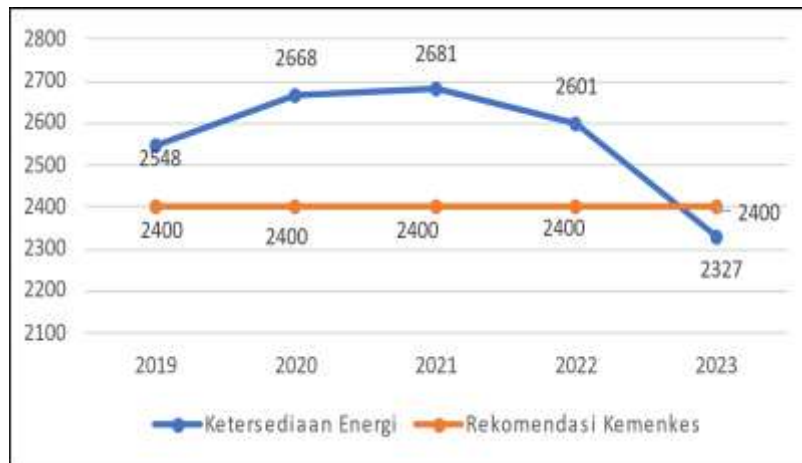
Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Pangan Utama Per Kapita (Kg/Jiwa)	211,12	203,9	199,24	171,41	119,18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel di atas ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi sebesar 119,18 kg/jiwa.

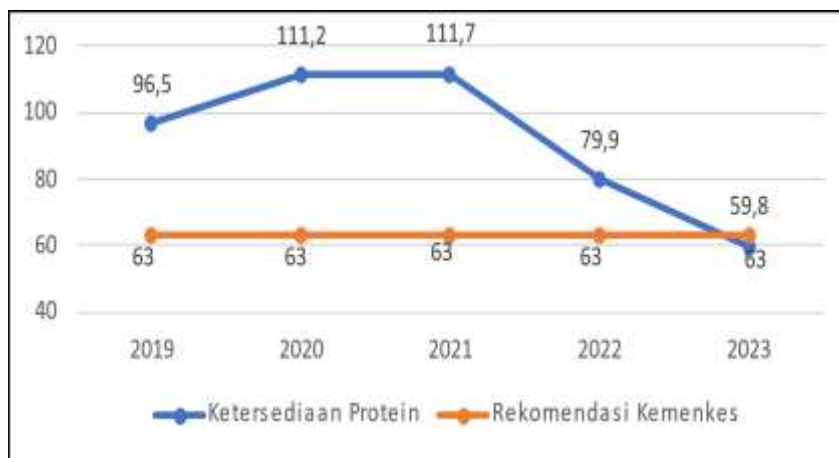
b) Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan energi dan protein merupakan salah satu indikator dalam ketahanan pangan. Data ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 2.63. Ketersediaan Energi Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024



Gambar 2.64. Ketersediaan Protein Perkapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data pada gambar di atas, ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 2.548 kkal/kap/hari dan mengalami penurunan menjadi 2.327 kkal/kap/hari sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019, ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi sebesar 96,5 gram/kap/hari dan menurun pada tahun 2023 menjadi 59,8 gram/kap/hari.

c) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan keamanan pangan dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi bahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Beberapa langkah pengawasan yang dapat dilakukan di Kabupaten Sukabumi antara lain:

- 1. Inspeksi Rutin:** Pemerintah daerah perlu melakukan inspeksi rutin terhadap lahan pertanian, peternakan, dan perikanan untuk memastikan penggunaan pestisida, obat hewan, dan pakan ternak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2. Pengujian Laboratorium:** Produk pangan harus diuji di laboratorium untuk mendeteksi keberadaan residu kimia berbahaya, patogen, atau kontaminan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di pasar aman untuk dikonsumsi.
- 3. Pengawasan Distribusi:** Pengawasan terhadap rantai distribusi pangan, mulai dari petani hingga konsumen, harus dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan disimpan dan diangkut dengan cara yang higienis dan aman.
- 4. Pelabelan dan Informasi:** Pemerintah harus memastikan bahwa semua produk pangan yang dijual di pasar memiliki label yang jelas mengenai kandungan gizi, tanggal kadaluarsa, dan informasi penting lainnya. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang tepat tentang apa yang mereka beli dan konsumsi.

Pembinaan keamanan pangan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas petani, peternak, pengusaha makanan, dan konsumen dalam menjaga dan meningkatkan standar keamanan pangan. Beberapa langkah pembinaan yang dapat dilakukan meliputi:

- 1. Edukasi dan Pelatihan:** Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi petani, peternak, dan pengusaha makanan tentang praktik pertanian dan pengolahan pangan yang baik (Good Agricultural Practices dan Good Manufacturing Practices).
- 2. Sosialisasi Standar Keamanan Pangan:** Mendiseminasikan informasi mengenai peraturan dan standar keamanan pangan nasional dan internasional kepada semua pemangku kepentingan di sektor pangan.
- 3. Bantuan Teknis:** Memberikan bantuan teknis kepada petani dan pengusaha makanan dalam bentuk teknologi, peralatan, dan metode terbaru yang dapat meningkatkan keamanan dan kualitas produk pangan.
- 4. Program Kemitraan:** Mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program-program yang mendukung

keamanan pangan, seperti penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam teknologi pangan.

Ketersediaan pangan, selain harus terjamin dari sisi jumlah, namun perlu dipastikan pula keamanannya. Hal tersebut dilakukan agar pangan yang tersedia sesuai standar dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengawasi dan juga membina produsen/penyedia pangan untuk menjamin keamanan pangan. Data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.53. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	0,00	9,00	50,00	100,00
Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	100,00	100,00	75,00	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2025

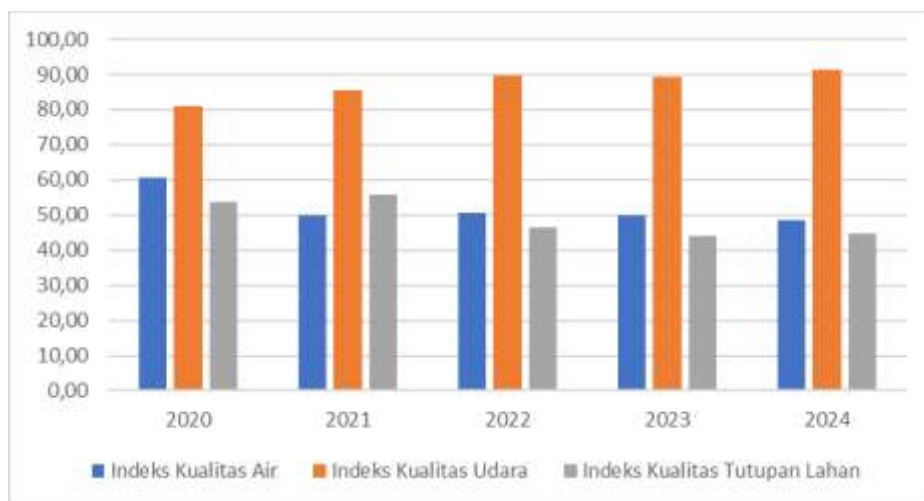
4) Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat penting untuk mengukur dan mengevaluasi kondisi lingkungan hidup di suatu daerah. Adapun komponen untuk memantau dan meningkatkan IKLH adalah kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.



Gambar 2.65. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Target IKLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar 2.66. Capaian Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2024

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan dan stagnan. Kondisi ini mencerminkan masih belum optimalnya sarana, sumber daya manusia, serta alokasi anggaran dalam pengelolaan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan menjadi persoalan krusial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bencana alam, aktivitas manusia yang kurang ramah lingkungan, serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan kualitas air secara menyeluruh, dengan mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber pencemaran, serta menerapkan program pengelolaan air yang lebih ketat, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun indeks kualitas udara menunjukkan nilai yang cukup baik dan cenderung meningkat yang menandakan kualitas udara baik di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, kualitas tutupan lahan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan yang lebih intensif untuk meningkatkan kembali kualitas tutupan lahan.

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, dan kepemilikan akta pernikahan.

a) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas seseorang untuk menyatakan status identitas jati diri kependudukan dalam sebuah negara atau wilayah bagi penduduk yang sudah menginjak usia 17 tahun. Setiap masyarakat sangat penting untuk memiliki KTP. Data persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.54. Persentase kepemilikan KTP Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk wajib KTP	1.877.435	1.990.350	2.019.713	2.043.704
Cetak KTP	1.792.165	1.940.650	1.983.545	2.024.129
Persentase kepemilikan KTP-elektronik (%)	96,16	99,65	98,21	99,04

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah persentase kepemilikan KTP pada tahun 2021 sebesar 96,16 persen kemudian naik pada tahun 2024 menjadi 99,04 persen.

b) Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran menunjukkan status hukum seorang anak yang lahir dan sebagai bukti bahwa seorang anak yang lahir dari orang tua yang berkebangsaan Indonesia serta untuk kepentingan administrasi lainnya. Data persentase anak berakte kelahiran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.55. Persentase Anak Berakta Kelahiran Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak 0-18 tahun (Jiwa)	-	796.703	824.356	809.797	844,085
Anak memiliki akta (Jiwa)	-	1.352.634	775.263	793.100	813,304
Anak belum memiliki akta (jiwa)	-	1.274.128	49.093	16.697	30,781
Persentase anak berakta kelahiran (%)	99,08	51,49	94,04	98	96,35
Persentase anak belum berakta kelahiran (%)	0,92	48,51	5,96	2	3,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data di atas, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun, dengan proporsi anak tanpa akta kelahiran yang terus berkurang. Namun, penurunan drastis persentase anak berakta pada tahun 2022 (51,49 persen) mengindikasikan adanya kendala administrasi atau kurang optimalnya program pelayanan saat itu. Upaya untuk mempertahankan tren positif ini harus terus diperkuat dengan memastikan layanan pencatatan sipil yang mudah diakses, terutama di daerah terpencil, serta kampanye kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru, namun hingga saat ini masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti

pentingnya keluarga berencana. Gambaran umum kondisi daerah terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio akseptor keluarga berencana, angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), cakupan pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*), cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB, cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB, cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB, pusat pelayanan keluarga sejahtera di setiap kecamatan, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja, cakupan penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, jumlah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, rasio petugas pembantu pembina keluarga berencana desa di setiap desa, persentase faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS, cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa, persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, serta cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

a) Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)

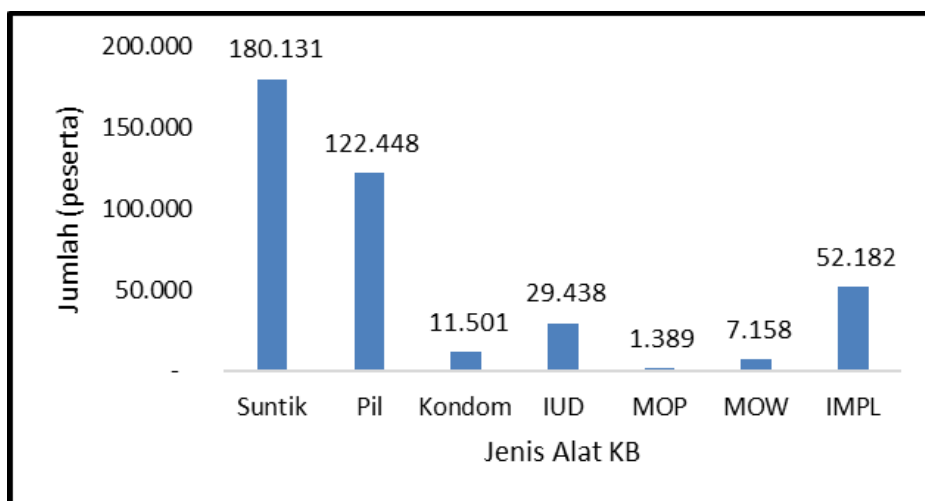
Akseptor Keluarga Berencana (KB) merupakan anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Data rasio akseptor KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56. Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Peserta KB	PUS	Rasio Akseptor KB (%)
	(Jiwa)	(Jiwa)	
2020	412.204	580.867	70,96
2021	407.072	580.513	70,12
2022	302.472	434.599	69,60
2023	397.801	552.859	71,95
2024	404.247	561.610	71,98

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah peserta KB, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), dan rasio akseptor KB cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase akseptor KB sebesar 70,96 persen, naik di tahun 2024 sebesar 71,98 persen. Akseptor KB yang aktif menggunakan alat kontrasepsi beragam, mulai dari Pil KB, KB suntik, hingga metode operasi terhadap pria maupun wanita. Beberapa metode KB lainnya yaitu IUD, MOP, MOW, IMPL dan kondom. Data peserta KB menurut jenis alat KB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.67. Jumlah Peserta KB Menurut Jenis Alat KB di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, sebagian besar akseptor KB pada tahun 2024 menggunakan alat kontrasepsi suntik KB yang mencapai 180.131 pengguna, dan diikuti oleh pil KB sebanyak 122.448 peserta. Jenis alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 1.389 peserta dan MOW sebanyak 7.158 peserta.

b) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)

Angka kelahiran remaja menunjukkan jumlah kelahiran remaja per 1000 remaja atau perempuan berusia 15-19 tahun. Data angka kelahiran remaja di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.57. Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelahiran remaja	5.583	n.a	4.275	4.155	3.161
Jumlah total remaja	139.459	n.a	108.393	111.654	116.306
Angka kelahiran remaja per 1.000 remaja	40	n.a	39	37	27

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, angka kelahiran remaja di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, angka kelahiran remaja sebesar 40 kelahiran remaja setiap 1.000 remaja perempuan. Angka kelahiran tersebut cenderung menurun setiap tahunnya sampai 2023 menjadi 27 kelahiran remaja setiap 1.000 remaja perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya terus menerus untuk menekan agar angka kelahiran remaja terus bisa berkurang. Hal ini dikarenakan kelahiran pada usia remaja sangat beresiko.

c) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Usia Istrinya Kurang Dari 20 Tahun

Cakupan PUS yang istrinya <20 tahun digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pendewasaan usia perkawinan. Data cakupan PUS istri <20 tahun di Kabupaten Sukabumi dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.58. Cakupan PUS yang Istrinya <20 Tahun Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PUS istri <20 tahun	13.406	N/A	6.978	10.795	116.306
Jumlah PUS	554.268	N/A	580.513	434.599	552.859
Cakupan PUS istri <20 tahun (%)	2,42	N/A	1,17	2,48	21,04

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data diatas, cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia <20 tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, cakupan PUS istri <20 tahun sebesar 2,42 persen dan naik menjadi 21,04 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan PUS yang istrinya <20 tahun jika semakin menurun maka akan semakin baik karena dapat mengurangi resiko kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia <20 tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menekan kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia < 20 tahun agar tidak terjadinya resiko kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia <20 tahun.

d) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) menunjukkan adanya pasangan usia subur yang belum terpenuhi keinginannya untuk ber-KB. Data cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.59. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani	66.807	N/A	61.759	57.271	55.157
Jumlah PUS	554.268	N/A	580.513	434.599	552.859
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	12,05	N/A	10,64	13,18	9,98

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi mengalami penurunan setiap tahunnya. Cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi pada tahun 2019 sebesar 12,05 persen dan menurun menjadi 9,98 persen pada tahun 2023. Angka persentase tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber-KB dan telah terpenuhi.

e) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina keluarga Balita (BKB) adalah program penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Data cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.60. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Anggota BKB Ber-KB	52.348	N/A	62.211	69.314	65.093
Jumlah Anggota BKB	61.077	N/A	71.075	78.153	92.231
Cakupan Anggota BKB Ber-KB (%)	85,71	86,86	87,53	88,69	70,58

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, tetapi turun di tahun 2023. Pada tahun 2019, cakupan anggota BKB ber-KB sebesar 85,71 persen dan menurun menjadi 70,58 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit anggota BKB yang telah terlayani KB.

f) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah program untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak. Data cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.61. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Anggota BKR Ber-KB	28.501	N/A	32.892	43.965	43.665
Jumlah Anggota BKR	34.072	N/A	38.340	50.449	51.958
Cakupan Anggota BKR Ber-KB (%)	83,65	N/A	85,79	87,15	84,04

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 83,65 persen dan meningkat menjadi 84,04 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa cakupan anggota BKR ber-KB sebagian besar telah mendapat pelayanan KB meskipun belum secara menyeluruh.

g) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Data cakupan anggota BKL ber-KB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.62. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Anggota BKL Ber-KB	13.329	N/A	20.070	25.071	24.553
Jumlah Anggota BKL	16.039	N/A	23.523	28.837	28.856
Cakupan Anggota BKL Ber-KB (%)	83,1	N/A	85,32	86,94	85,09

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, cakupan anggota BKL ber-KB cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun tahun 2019 cakupan anggota BKL ber-KB sebesar 83,1 persen menjadi 85,09 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa cakupan anggota BKL ber-KB sebagian besar telah mendapat pelayanan KB meskipun belum secara menyeluruh.

h) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan, dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas. Data PPKS di setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.63. PPKS Setiap Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PPKS	402	N/A	1	1	402
Jumlah kecamatan	47	N/A	47	47	47
PPKS di setiap kecamatan	8,55	N/A	1	1	8,55

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data diatas, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Sukabumi cenderung meningkat. Jumlah PPKS di setiap kecamatan pada tahun 2019 sebanyak 8 persen PPKS dan terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah PPKS lebih dari 8 karena nilai perbandingannya selalu lebih dari 8,0 persen. Namun pada tahun 2021 jumlah PPKS di setiap kecamatan menurun menjadi 1 persen dan kembali naik di tahun 2023 sebesar 8 persen. Semakin banyak jumlah PPKS disetiap kecamatan maka semakin banyak masyarakat yang terlayani oleh PPKS.

i) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) adalah wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Data cakupan remaja dalam PIK R di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.64. Cakupan Remaja Dalam PIK R Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah remaja dalam PIK R	19.397	N/A	1	90.692	19.853
Jumlah kecamatan	47	N/A	47	47	47
Cakupan remaja dalam PIK R (rasio orang/kecamatan)	412,7	N/A	2,47	1929,62	422,40

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 cakupan remaja dalam PIK R sebesar 412,7 dan meningkat menjadi 422,40 pada tahun 2023. Angka cakupan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 422 orang remaja di setiap kecamatan telah tercakup dalam PIK R. Di samping itu, data tersebut mengindikasikan pula bahwa setiap tahunnya semakin banyak remaja di setiap kecamatan yang telah tercakup PIK R.

j) Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan

PKB adalah petugas penyuluh KB sedangkan PLKB adalah petugas lapangan KB. Cakupan PKB maupun PLKB non PNS yang didayagunakan di Kabupaten Sukabumi selalu tetap setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, cakupan PKB maupun PLKB non PNS yang didayagunakan mencapai 100 persen. Data PKB dan PLKB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.65. Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PKB yang didayagunakan	84	83	73	97	67
Jumlah PKB	84	83	73	97	67
Cakupan PKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah PLKB Non PNS yang didayagunakan	308	393	359	330	317
Jumlah PLKB Non PNS	308	393	359	330	317
Cakupan PLKB Non PNS yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

k) Jumlah UPPKS ber-KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah UPPKS ber-KB mandiri cenderung *fluktuatif* setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah UPPKS ber-KB mandiri sebanyak 3.474 keluarga. Jumlah tersebut menurun menjadi 1.075 keluarga pada tahun 2021. Namun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 3.830. Data jumlah UPPKS yang ber-KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.66. Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri	3.474	3.651	1.075	3.878	3.830

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

l) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di setiap Desa

Petugas PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan dan kompetensi aktif melaksanakan atau mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Data rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.67. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB di setiap Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2021	2022	2023
Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	386	386	386	386
Jumlah desa	386	386	386	386
Rasio petugas pembantu pembina KB setiap desa (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, rasio petugas pembantu pembina KB setiap desa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 bernilai 100 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap desa memiliki satu orang petugas pembantu pembina desa. Petugas tersebut dapat melayani masyarakat di setiap desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Semakin banyak petugas pembina di KB di setiap desa, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani terkait dengan pembinaan KB.

m) Persentase Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama dengan BPJS

BPJS merupakan bentuk implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Implementasi program ini tentu tidak lepas dari peran fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 100 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa semua faskes dan jejaring bekerjasama dengan BPJS. Data jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.68. Jumlah Faskes Dan Jejaring Yang Bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	76	74	67	177	250
Jumlah faskes dan jejaring	151	151	202	752	250
Persentase Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama dengan BPJS (%)	50,33	49,01	33,17	23,54	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

n) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Informasi data mikro keluarga merupakan salah satu hal yang penting untuk membantu dalam pelaksanaan program maupun penyusunan kebijakan terkait dengan kependudukan, pembangunan keluarga, KB, dan lainnya. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa mencapai 100 persen sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa tersebut tetap dan diharapkan semakin banyak jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia untuk tahun-tahun selanjutnya. Data cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.69. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	40	40	386	386	386
Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	40	40	386	386	386
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

o) Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) atau penyakit kelamin adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Berdasarkan data sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase remaja yang terkena IMS sebesar 0 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada remaja yang terjangkit atau terinfeksi penyakit kelamin. Kondisi ini tentunya sangat baik dan perlu untuk dipertahankan agar remaja di Kabupaten Sukabumi dapat terbebas dari IMS. Data persentase remaja yang terkena IMS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.70. Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah remaja yang terkena IMS	0	0	0	0	0
Jumlah total remaja	139.459	68.910	480.492	481.833	116.306
Persentase remaja yang terkena IMS (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

p) Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Data jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Sukabumi dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.71. Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	61.106	64.682	187	1.648	84.086

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Menurut BKKBN, 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cita dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga tersebut diharapkan keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga sejahtera secara ekonomi dan menjadi keluarga yang berkualitas, sehingga terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadikan Indonesia lebih maju. Selain itu, implementasi 8 fungsi keluarga bertujuan untuk menghindari pernikahan usia dini, pencegahan HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lainnya.

Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga sebanyak 61.106 kelompok. Jumlah tersebut meningkat menjadi 84.086 kelompok pada tahun 2023. Diharapkan jumlahnya akan terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

q) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Data cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.72. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami, Melaksanakan Pengasuhan, dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	75.193	77.296	72.378	94.933	84.086
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak	101.771	93.435	83.050	109.510	92.231
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (%)	73,88	82,73	87,15	86,69	91,17

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024

Anak merupakan calon generasi penerus suatu bangsa, maka dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk membentuk anak dengan kualitas yang baik dibutuhkan pengasuhan dan pembinaan yang baik khususnya dari keluarga.

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak cenderung meningkat mendekati akhir tahun analisis. Pada tahun 2019, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 73,88 persen dan meningkat menjadi 91,17 persen pada tahun 2023. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang mempunyai balita dan anak telah memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

7) Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah terminal, jumlah kendaraan umum, trayek angkutan umum, dan jumlah uji KIR angkutan umum.

a) Jumlah Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2024, jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh sepeda motor/*scooter* sebanyak 486.781 unit. Jenis kendaraan bermotor yang paling sedikit yaitu bus sebanyak 498 unit. Data Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.73. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Unit)

Jumlah Kendaraan	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	9.303	37.934	40.188	42.610	46.152
Bus	467	466	454	468	498
Truk	20.912	19.915	19.983	20.506	20.496
Sepeda Motor	551.245	472.247	467.256	470.842	486.781
Jumlah Total	581.927	530.562	527.881	534.426	553.927

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025

b) Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan Umum dan Trayek Angkutan Umum

Di Kabupaten Sukabumi terdapat 18 terminal bus, namun 5 terminal bus memiliki status tidak aktif sehingga terminal bus yang aktif hanya 13 terminal. Kendaraan umum yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 jenis yaitu angkot, L300/minibus dan bus $\frac{3}{4}$ masing-masing sebanyak 3.221, 309 dan 12 kendaraan. Jumlah trayek angkot sebanyak 35 trayek, L300/minibus sebanyak 31 trayek dan bus $\frac{3}{4}$ sebanyak 3 trayek. Data jumlah terminal, jumlah kendaraan dan trayek angkutan umum di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah.

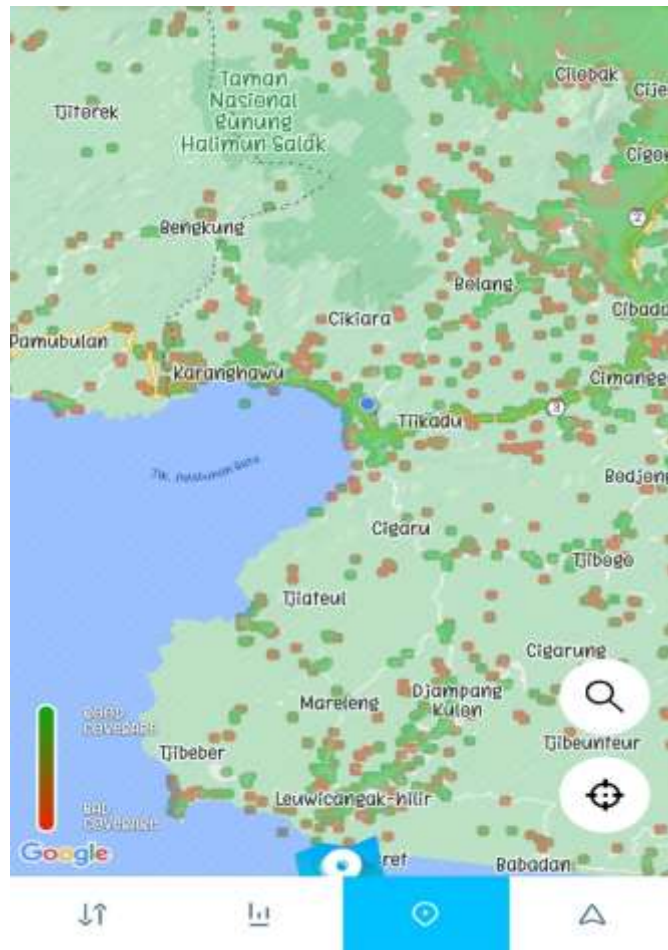
Tabel 2.74. Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan dan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

No.	Status Terminal	Jumlah	
1	Jumlah terminal aktif	13	
2	Jumlah terminal tidak aktif	5	
3	Total	18	
	Jenis Kendaraan Umum	Jumlah Kendaraan	Jumlah Trayek
1	Angkot	3.221	35
2	L300/minibus	309	31
3	Bus $\frac{3}{4}$	12	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 2025

8) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan hal yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan sangat membantu dalam menjalankan sistem pemerintahan. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah cakupan layanan komunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan area di Kabupaten Sukabumi yang sudah terlayani jaringan telekomunikasi. Sebaran data cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber: Aplikasi Open Signal, Diakses pada 5 April 2024

Gambar 2.68. Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan gambar diatas, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi belum mencakup seluruh wilayah. Wilayah yang tercakup dalam layanan telekomunikasi secara umum telah dilayani oleh semua operator dalam jaringan 2G, 3G maupun 4G. Kualitas cakupan layanan telekomunikasi tersebut beragam disetiap wilayahnya. Mulai dari wilayah dengan kualitas layanan baik yaitu ditandai dengan warna hijau dan wilayah dengan kualitas layanan yang rendah ditandai dengan warna merah.

9) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

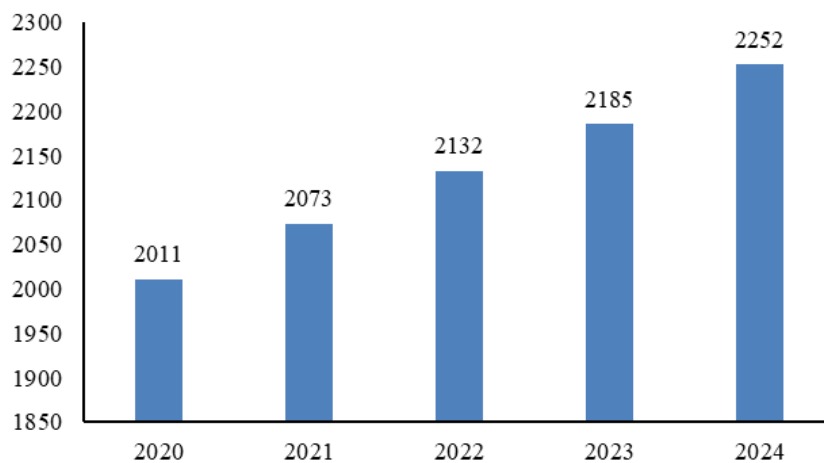
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital dalam perekonomian Kabupaten Sukabumi. Sebagai pilar utama penggerak ekonomi lokal, koperasi dan UMKM berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di daerah yang kaya akan potensi alam dan sumber daya manusia seperti Sukabumi, pengembangan koperasi dan UMKM menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal. Koperasi, dengan prinsip-prinsip gotong royong dan solidaritas, mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam usaha ekonomi bersama. Melalui koperasi, para anggotanya dapat mengakses modal, teknologi, serta

pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha mereka. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan.

UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian lokal, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. UMKM di Sukabumi, yang banyak bergerak di sektor pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata, memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menggerakkan roda ekonomi secara lebih dinamis dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukabumi adalah langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

a) Jumlah Koperasi

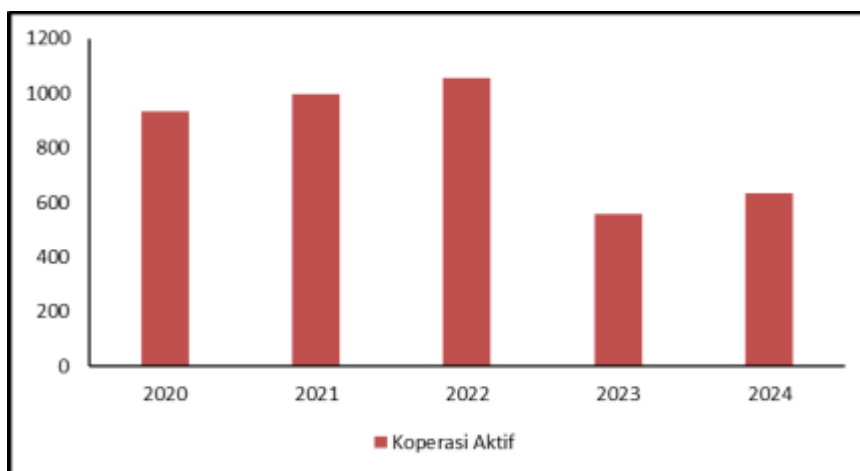
Koperasi adalah salah satu wadah perekonomian yang menunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Data jumlah, anggota dan simpanan pada koperasi di Kabupaten Sukabumi dapat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.69. Jumlah Koperasi di Kabupaten Sukabumi

Sumber: DKUKM Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan Gambar di atas jumlah koperasi di Kabupaten Sukabumi tiap tahun meningkat yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi. Sedangkan jumlah koperasi aktif di kabupaten sukabumi disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.70. Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Sukabumi

Sumber: DKUKM Kab Sukabumi, 2025

Berdasarkan gambar di atas jumlah koperasi di Kabupaten Sukabumi yang aktif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi. Koperasi dinyatakan aktif apabila masih melakukan operasional dan Rapat Anggota Tahunan (RAT), selain itu koperasi aktif yang belum dilakukan rekonsiliasi dan sudah melakukan rekonsiliasi terjadi jumlah yang berbeda lebih sedikit.

10) Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan yang potensial di suatu wilayah. Adanya penanaman modal berskala nasional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diharapkan mampu memaksimalkan potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal dapat dilihat beberapa indikator seperti jumlah investor berkala nasional, jumlah nilai investasi, serta realisasi investasi PMD yang dibagi berdasarkan sektor.

a) Jumlah Nilai Investasi

Nilai investasi sektor dominan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.75. Investasi Kabupaten Sukabumi dalam Sektor Dominan

No	Tahun		Nilai Investasi	Sektor Dominan
1	2021	PMDN	1.435.803.400.000	Industri Makan dan Minuman
		PMA	38.345.439.983	Industri Makan dan Minuman
2	2022	PMDN	5.114.622.900.000	Transportasi, Gudang & Komunikasi
		PMA	520.900.477.546	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
3	2023	PMDN	748.243.000.000	Transportasi, Gudang & Komunikasi
		PMA	2.300.477.209.838	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
4	2024	PMDN	2.034.603.425.415	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki
		PMA	2.033.821.704.192	Industri Kimia dan Farmasi

Sumber: DKUKM Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan investasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan khususnya dalam penanaman modal dalam negeri, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan untuk PMDN, tetapi di tahun 2024 mengalami kenaikan. Selain itu untuk investasi asing mengalami penurunan di tahun 2024.

11) Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi secara kontinu mempublikasikan buku publikasi “Kabupaten Sukabumi Dalam Angka” dan “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi” sebagai bagian dari partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah. Publikasi statistik tersebut digunakan sebagai landasan bagi perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan Kabupaten Sukabumi oleh *stakeholders* terkait. Berdasarkan publikasi tersebut, BPS sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 konsisten selalu menerbitkan setiap tahunnya. Adapun data publikasi buku statistik di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.76. Publikasi Buku Statistik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Kabupaten Sukabumi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten Sukabumi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2025

12) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan referensi pendidikan baik formal maupun informal. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan di suatu daerah sangatlah penting. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan jumlah koleksi buku.

a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lokasi, jenis perpustakaan, serta jenis layanan yang digunakan. Pengunjung perpustakaan Kabupaten Sukabumi cukup beragam, terdiri dari siswa TK/PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan umum. Pengunjung yang tercatat paling sering berkunjung ke perpustakaan adalah siswa SD. Berikut merupakan gambaran jumlah kunjungan perpustakaan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.77. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Sukabumi Periode 2020 – 2024

Status Pengunjung	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
TK/PAUD	773	24	2.291	3.211	2.304	8.603
SD	2.352	982	6.250	3.303	9.864	22.751
SMP	1.678	284	1.773	1.555	4.507	9.797
SMA	1.838	504	2.837	1.399	2.478	9.056

Status Pengunjung	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Mahasiswa	2.225	841	3.503	2.332	3.214	12.115
Umum	2.238	892	4.136	4.322	291	11.879
Karyawan	-	-	1.368	-	866	2.234
Perpustakaan Keliling	-	-	-	11.260	68.884	80.144
Total Pengunjung	11.104	3.527	22.158	27.382	92.408	156.579

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

b) **Jumlah Koleksi Buku**

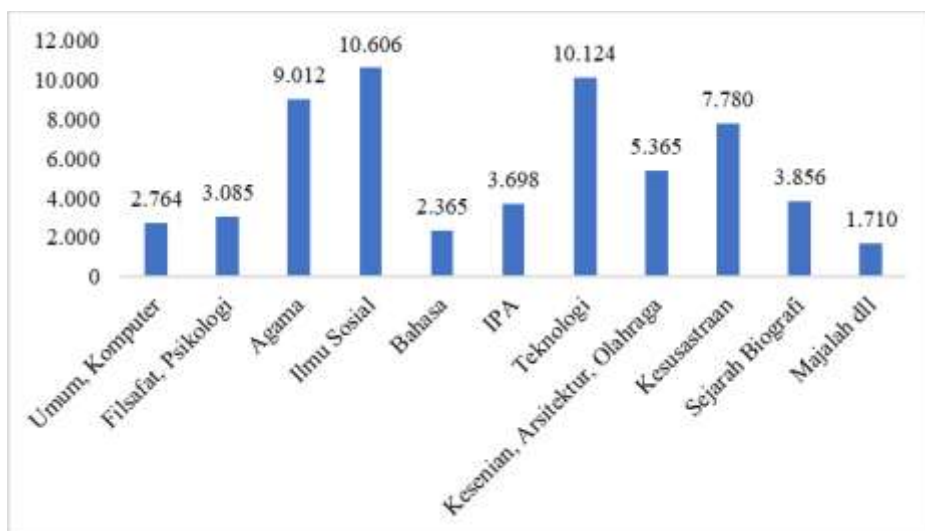
Tersedianya berbagai jenis buku di perpustakaan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari berbagai macam jenis buku, seperti buku pengetahuan umum, komputer, filsafat, psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), teknologi, kesenian, arsitektur, olahraga, kesusastaan, sejarah biografi, referensi, serta majalah, dll. Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.78. Jumlah Koleksi Buku di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024

Jenis Buku	2020	2021	2022	2023	2024
Umum, Komputer	2.455	2.237	2.235	2.282	2.764
Filsafat, Psikologi	2.613	2.616	2.663	2.666	3.085
Agama	8.733	8.642	8.812	8.595	9.012
Ilmu Sosial	10.396	10.274	10.504	10.299	10.606
Bahasa	2.042	1.988	2.038	2.004	2.365
IPA	3.522	3.452	3.454	3.508	3.698
Teknologi	9.858	9.677	9.745	9.732	10.124
Kesenian, Arsitektur, Olahraga	4.527	4.163	4.210	4.268	5.365
Kesusastaan	7.394	7.097	7.488	7.291	7.780
Sejarah Biografi	3.380	3.348	3.742	3.371	3.856
Majalah dll	0	1.725	1.790	1.110	1.710
Total	54.920	55.219	56.681	55.126	60.365

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah buku paling banyak tersedia tahun 2024 adalah ilmu sosial dengan total 10.606 eksemplar dan teknologi dengan jumlah 10.124 eksemplar. Jumlah koleksi yang paling sedikit adalah majalah dengan total 1.710 eksemplar. Jumlah buku yang tersedia relatif stabil per tahun dengan total berkisar antara 55.000 – 56.000 eksemplar.



Gambar 2.71. Jumlah Koleksi Buku di Kabupate Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

13) Keagamaan

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sukabumi yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Penduduk Kabupaten Sukabumi sebagian besar menganut agama islam, dimana pada tahun 2024 penduduk yang beragama islam sebanyak 2.812.768 jiwa, penduduk yang beragama kristen protestan sebanyak 6.185 jiwa, penduduk yang beragama katolik sebanyak 1.833 jiwa, penduduk yang beragama budha sebanyak 754 jiwa dan penduduk yang beragama hindu sebanyak 58 jiwa. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama maka pembangunan yang akan datang perlu kebijakan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Jumlah penganut agama di Kabupaten Sukabumi tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Jiwa)

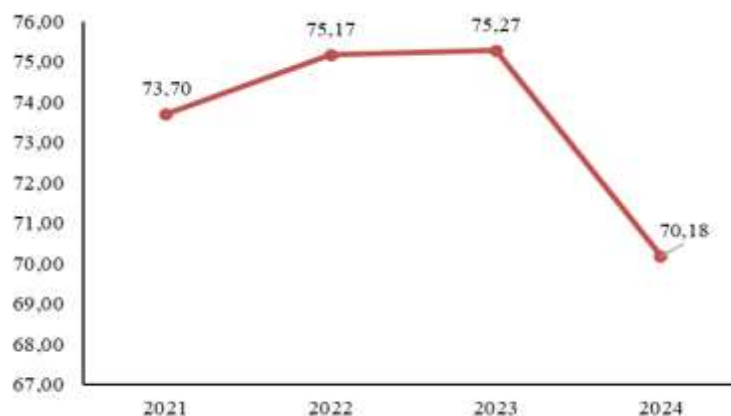
Agama	2020	2021	2022	2023	2024
Islam	2.388.237	2.618.381	2.724.721	2.764.772	2.812.768
Kristen Protestan	40.608	5.742	6.007	6.094	6.185
Katolik	6.806	1.842	1.875	1.870	1.833
Hindu	15	49	49	60	58
Budha	8,192	724	730	737	754
Konghucu	-	-	11	12	11
Lainnya	24	24	9	9	10

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2025

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan yang memetakan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Riset ini mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama dengan tiga dimensi yang disorot: toleransi,

kesetaraan, dan kerja sama. Berikut ini adalah gambar indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2024:



Gambar 2.72. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan gambar diatas, nilai indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun 2020-2023, sedangkan di tahun 2024 mengalami lonjakan penurunan yang lumayan tajam di 70,18. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap adanya indikasi bahwa hubungan antar umat beragama menjadi kurang harmonis, dan potensi konflik atau gesekan antar agama menjadi lebih besar.

b) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah. IPK disusun oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memantau kinerja program dan merumuskan kebijakan kebudayaan. Tujuan IPK Memantau kinerja program pembangunan kebudayaan, Merumuskan kebijakan kebudayaan, Memberikan acuan dalam koordinasi lintas sektor, Memantau sejauh mana kebijakan kebudayaan menjawab kebutuhan masyarakat.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Berikut ini adalah Tabel Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2023.

Tabel 2.80. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2023

Tahun	Nasional	Jawa Barat
2020	54,65	52,04
2021	51,90	50,78
2022	55,13	53,67
2023	57,13	55,50

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, sedangkan Nasional mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 2023.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Besarnya potensi kewilayahan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi menjadikan setiap fokus layanan pilihan memiliki integrasi yang cukup signifikan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

1) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi sangat tinggi di Kabupaten Sukabumi. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan jumlah hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya.

Kunjungan Wisata

Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai jenis obyek wisata seperti wisata alam, buatan, maupun minat khusus. Data jumlah obyek wisata berdasarkan jenisnya yang terdapat di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81. Jumlah Obyek Wisata Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Jenis Wisata	2020	2021	2022	2023	2024
Alam	47	n.a	n.a	88	61
Buatan	7	n.a	n.a	5	9
Minat Khusus	6	n.a	n.a	12	19
Total	60	n.a	n.a	101	89

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data di atas jumlah terbanyak setiap tahunnya adalah jenis wisata alam. Jenis wisata alam ini didominasi oleh obyek wisata pantai karena Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu, obyek wisata alam lainnya yang

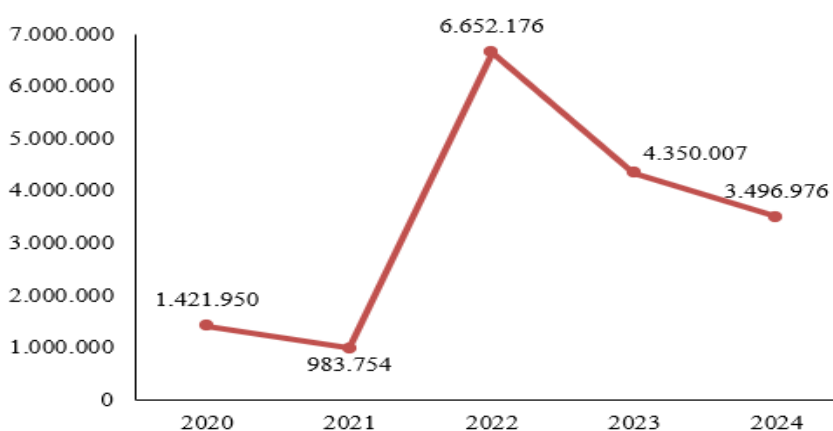
cukup banyak di Kabupaten Sukabumi adalah obyek wisata air terjun. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sukabumi dalam rentang 2020-2024 cenderung fluktuatif. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada tahun 2022, namun terjadi kembali penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2023 dan 2024. Data jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.82. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nusantara	1.419.724	983.477	6.823.379	4.349.451	3.492.190
Mancanegara	2.226	277	552	556	6.786
Total	1.421.950	983.754	6.652.176	4.350.007	3.496.976

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2025



Gambar 2.73. Jumlah Total Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2025 (diolah)

2) Pertanian

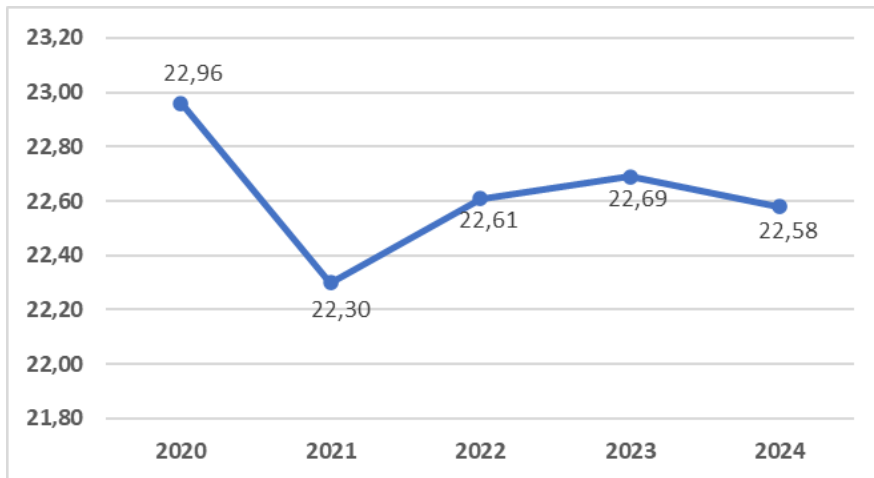
Pertanian merupakan sektor yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pertanian dapat dilihat beberapa indikator seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas padi per hektar, produktivitas bahan pangan lainnya per hektar, serta rumah tangga usaha pertanian.

a) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang muncul dari sektor perekonomian pada suatu daerah. Fungsi PDRB adalah untuk membuat kebijakan daerah yang memberikan efek berantai baik dari mulai perencanaan, evaluasi dan informasi yang menggambarkan perekonomian wilayah yang dimaksud. PDRB menjadi salah satu indikator yang cukup penting untuk menjelaskan keadaan ekonomi daerah pada waktu tertentu yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pertanian menjadi salah satu penyumbang sektor perekonomian kabupaten sukabumi sehingga sektor pertanian menjadi

penting untuk diketahui kontribusinya pada PDRB daerah. Sektor pertanian dalam PDRB kabupaten sukabumi terdiri dari tiga sub sektor lainnya yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sektor ini memiliki kenaikan dan penurunan angka yang tidak signifikan, sehingga selalu stabil di angka di 22 persen - 23 persen dari tahun 2020 – 2024 sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 2.74. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

b) Rumah Tangga Usaha Pertanian

Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) adalah unit dasar dalam sektor pertanian yang berfungsi sebagai pengelola lahan pertanian dan sumber daya terkait untuk menghasilkan produk pertanian. RTUP mencakup semua aktivitas produksi yang dilakukan oleh rumah tangga yang memiliki dan mengelola lahan pertanian, termasuk budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. RTUP memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, terutama di kawasan pedesaan, di mana mereka seringkali menjadi sumber utama pendapatan dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Berikut ini adalah jumlah RTUP di Kabupaten Sukabumi:

Tabel 2.83. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Usaha Pertanian		
		Rumah Tangga Usaha Pertanian	Perusahaan Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya
1	Ciomas	15,062	2	-
2	Ciracap	13,671	3	-
3	Waluran	8,938	-	-
4	Surade	17,773	4	-
5	Cibitung	7,043	-	-
6	Jampang Kulon	8,695	-	-
7	Cimanggu	5,696	-	-
8	Kali Bunder	9,148	-	-
9	TegalBuleud	9,438	1	-
10	Cidolog	5,415	1	-
11	Sagaranten	11,047	2	-

No	Kecamatan	Jenis Usaha Pertanian		
		Rumah Tangga Usaha Pertanian	Perusahaan Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya
12	Cidadap	5,788	1	-
13	Curugkembar	7,951	1	-
14	Pabuaran	11,224	1	-
15	Lengkong	7,902	4	-
16	Pelabuhan Ratu	9,060	3	-
17	Simpenan	9,841	4	-
18	Warung Kiara	6,736	4	-
19	Bantargadung	6,240	5	-
20	Jampang Tengah	16,099	11	-
21	Purabaya	7,627	10	-
22	Cikembar	8,626	23	-
23	Nyalindung	9,176	2	-
24	GegerBitung	8,480	1	-
25	Sukaraja	6,129	4	-
26	Kebonpedes	2,497	3	1
27	Cireunghas	4,601	-	-
28	Sukalarang	3,988	4	-
29	Sukabumi	1,879	1	-
30	Kadudampit	5,231	-	-
31	Cisaat	4,599	-	-
32	Gunungguruh	3,300	2	2
33	Cibadak	4,821	5	2
34	Cicantayan	4,879	-	-
35	Caringin	5,568	-	-
36	Nagrak	6,700	8	-
37	Ciambar	5,119	3	-
38	Cicurug	6,001	6	-
39	Cidahu	3,751	-	-
40	Parakan Salak	3,470	2	-
41	Parung Kuda	4,252	5	-
42	Bojong Genteng	3,332	1	-
43	Kalapa Nunggal	6,678	3	-
44	Cikidang	8,932	2	-
45	Cisolok	12,527	-	-
46	Cikakak	7,798	2	-
47	Kabandungan	11,231	1	-
Jumlah		353,959	135	5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah)

3) Kehutanan

Sektor kehutanan di Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem, ekonomi, dan kehidupan masyarakat setempat. Kabupaten ini memiliki kawasan hutan yang luas dan beragam, meliputi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi yang semuanya memberikan kontribusi signifikan terhadap lingkungan dan perekonomian daerah.

a) Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah dapat tetap berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Rasio hutan kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi dari

tahun 2020 hanya sebesar 1,14 persen dan naik menjadi 3,42 persen di tahun 2024. Keberadaan hutan lindung ini harus dijaga agar luasannya tidak berkurang, sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Data luas kawasan hutan KPH di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.84. Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Ha)

Jenis Hutan	2020	2021	2022	2023	2024
Lindung (Ha)	667,43	1.609,97	2.111,84	2.111,84	2.111,84
Produksi (Ha)	57.828,10	57.889,09	59.623,91	59.623,91	59.623,91
Jumlah Total Kawasan Hutan (Ha)	58.495,53	59.499,06	61.735,75	61.735,75	61.735,75
Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan (%)	1,14	2,71	3,42	3,42	3,42

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020, total luas kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi adalah 58.495,53 hektar. Dalam empat tahun berikutnya, terjadi peningkatan signifikan dalam luas kawasan hutan yang mencapai 61.735,75 hektar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan penambahan luas sebesar 3.240,22 hektar, yang merupakan hasil dari berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

b) Luas Lahan Hutan Rakyat

Kehutanan memiliki peran secara ekonomi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Hutan rakyat apabila dikelola secara benar dan dalam skala besar dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kayu. Luas lahan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan pada tahun 2014 hingga tahun 2024, yaitu dari 22.270,09 ha menjadi 61.735,75 ha. Data luas hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2014 hingga tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.85. Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi

Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
2014	22.270,09
2015	40.257,81
2016	58.495,53
2017	58.495,53
2018	58.495,53
2019	58.495,53
2020	58.495,53
2021	59.499,06
2022	61.735,75
2023	61.735,75
2024	61.735,75

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rumah tangga pengguna listrik, rasio ketersediaan daya listrik, serta pertambangan tanpa izin.

a) Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik

Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Semakin besar daya listrik pada suatu rangkaian, semakin besar pula energi yang akan diserap. Distribusi tenaga listrik adalah tahap akhir dalam penyaluran tenaga listrik. Tahap ini membawa listrik dari sistem transmisi ke konsumen individual. Data Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Distribusi Listrik Terjual (KWh)
2020	872.113.180	1.188.567.896.631	95.265.723.160
2021	872.113.180	1.188.567.896.631	95.265.723.160
2023	1.248.932,22	2.014.143.565,29	1.867.857.555,36
2024	1.040.026,030	1.756.892.240,00	1.617.521.530,57

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

b) Jumlah Pelanggan Listrik

Listrik merupakan energi yang dibutuhkan mendukung berbagai kegiatan manusia. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sukabumi cenderung naik. Data pelanggan listrik di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.87 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggan Listrik	684.372	717.540	742.790	767.224	820.979

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

5) Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah sarana perdagangan, serta luas lahan dan luas bangunan pasar.

a) Jumlah Sarana Perdagangan

Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.88. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi, 2020–2024

Jenis Sarana Perdagangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar	12	12	12	12	12
Kios dan Toko	4.574	4.574	4.659	4.555	4.555
Mini market	63	403	408	430	432
Mall	3	3	3	2	2
Jumlah	4.652	4.992	5.082	4.999	5.001

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa kabupaten sukabumi untuk menunjang perdagangan didukung oleh sarana prasarana, Adapun sarana yang dimiliki oleh kabupaten sukabumi sebagian besar adalah dalam bentuk kios dan toko.

6) Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perindustrian dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah industri kecil menengah dan jumlah pelaku usaha mikro kecil.

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sukabumi disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.89. Jumlah Industri Kecil Menengah Berdasarkan Bidang Usaha Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023

Bidang Usaha	2020	2021	2022	2023
Agro	10.822	10.678	10.979	10.678
Non-Agro	10.259	10.848	11.241	10.848
Total	21.081	21.526	22.220	21.526

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Secara umum, industri kecil menengah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan adanya dinamika yang beragam dan beberapa yang mengalami fluktuasi. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, jumlah total IKM kembali meningkat pada tahun 2023.

7) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan transmigrasi dapat dari beberapa indikator seperti jumlah transmigran yang ditempatkan di UPT lokal kabupaten sukabumi dan jumlah transmigran yang ditempatkan di UPT luar pulau jawa.

a) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi

Jumlah transmigran yang ditempatkan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lokal mengalami fluktuasi dalam 5 tahun. Jumlah tertinggi terdapat pada tahun 2020, yakni 3.842 jiwa. Jumlah transmigran mengalami penurunan menjadi 1.441 jiwa pada tahun 2024. Data

jumlah transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT lokal di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.90. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPS	3.842	3.484	3.450	3.195	1.163
Eksodan	n.a	n.a	n.a	59	278
Total Transmigran	3.842	3.484	3.450	3.254	1.441

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

b) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa

Selain ditempatkan di UPT lokal di Kabupaten Sukabumi, transmigran asal Kabupaten Sukabumi ada yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa. Data jumlah transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91. Jumlah Transmigran yang ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa Tahun 2024

No	UPT	Kabupaten, Provinsi	Target		Realisasi	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Tanjung Cina	Pasangkayu, Sulawesi Barat	5	21	5	21
2	Sigulai	Simeuleu, Aceh	1	4	1	4
3	Eumatopa	Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	2	9	2	9
Jumlah			8	34	8	34

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah total transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa pada tahun 2024 sebanyak 8 KK atau 34 jiwa. Jumlah realisasi transmigran yang ditempatkan di UPT di luar Pulau Jawa tersebut sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditargetkan, sehingga persentasenya 100 persen.

8) Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan sebuah kajian yang melibatkan berbagai aspek geografis, sumber daya alam, infrastruktur pendukung, dan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat lokal. Terletak di bagian selatan Jawa Barat dengan akses langsung ke Laut Selatan, Kabupaten Sukabumi memiliki keuntungan geografis yang besar untuk pengembangan sektor perikanan laut. Perairan laut yang kaya akan sumber daya seperti ikan, udang, dan komoditas laut lainnya, menjadi basis utama bagi penangkapan dan kegiatan perikanan komersial. Secara umum gambaran kondisi perikanan disajikan pada tabel dibawah ini:

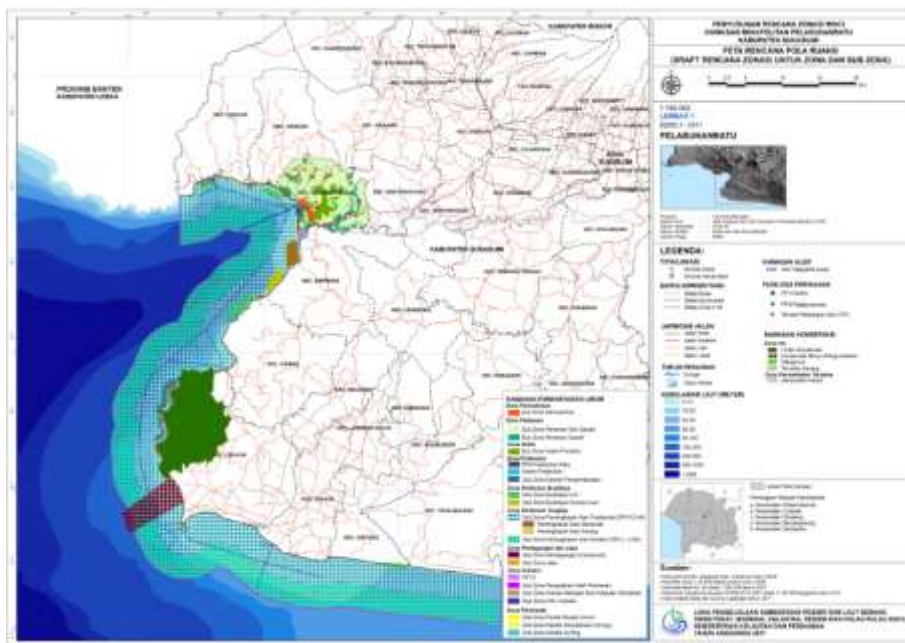
Tabel 2.92. Gambaran Umum Perikanan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Deskripsi	Total Kabupaten	Area Pesisir
Luas Wilayah (Ha)	± 412,799.54 Ha	± 10.455,45 Ha
Fishing Ground	702 km ²	
Panjang Pantai	117 km (0,14 % Indonesian Coastline)	

Deskripsi	Total Kabupaten	Area Pesisir
Jumlah Kecamatan & Desa	47 Kecamatan, 381 Desa, 5 Kelurahan	9 Kecamatan, 66 Desa dan 1 Kelurahan
Jumlah Nelayan	9.619 RTP	
Jumlah Pembudidaya	27.765 RTP	
Jumlah Pengolah Pemasar	1.672 RTP	
Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> · Utara: Kabupaten Bogor · Selatan: Samudera Indonesia · Barat: Kabupaten Lebak, Provinsi Banten · Timur: Kabupaten Cianjur 	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi 2024

Selain itu, keberadaan sungai-sungai seperti Sungai Cimanjiri dan Sungai Cikaso yang melintasi wilayah ini, serta adanya danau dan situ, memberikan potensi yang signifikan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan di keramba jaring apung juga semakin berkembang di beberapa lokasi, memberikan kontribusi tambahan dalam diversifikasi komoditas perikanan di Kabupaten Sukabumi.



Gambar 2.75. Struktur dan Pola Ruang untuk Kegiatan Perikanan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi 2024

Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan ikan juga telah tersedia, meskipun perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan secara berkelanjutan. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi hasil perikanan dari daerah ini ke pasar-pasar regional maupun nasional.

Secara ekonomi, perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat setempat. Banyaknya nelayan dan pengusaha perikanan kecil menengah yang menggantungkan hidup dari sektor ini menunjukkan potensi besar untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. Namun demikian, tantangan yang dihadapi

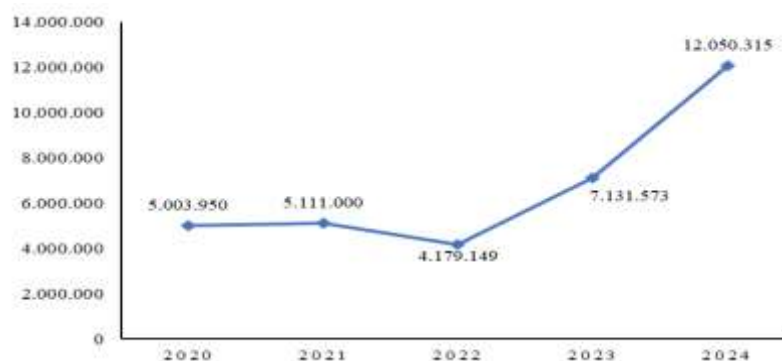
termasuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk mencegah penurunan stok ikan, serta perlindungan lingkungan dari dampak negatif kegiatan perikanan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perikanan juga menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi perikanan di Kabupaten Sukabumi. Pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi para nelayan dan pengusaha perikanan lokal akan membantu meningkatkan teknik penangkapan yang berkelanjutan serta pengelolaan usaha perikanan yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, Kabupaten Sukabumi memiliki prospek yang cerah dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Pengelolaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan yang ketat, dan pemanfaatan infrastruktur yang efektif akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa perikanan di Kabupaten Sukabumi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

a) Produksi Ikan yang Didaratkan per Bulan (data PPN Palabuhanratu)

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu memiliki dampak signifikan terhadap produksi perikanan dan pendukung perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi. Sebagai pusat kegiatan perikanan yang strategis, PPN Palabuhanratu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan dari perikanan tangkap, tetapi juga sebagai pusat distribusi dan pengolahan hasil perikanan untuk dijual ke pasar lokal maupun regional. Secara spesifik, PPN Palabuhanratu memfasilitasi aktivitas ekonomi sektor perikanan dengan memberikan akses yang lebih baik bagi nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapan mereka dengan aman dan efisien. Ini membantu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap, yang merupakan salah satu sumber daya ekonomi utama bagi masyarakat lokal.

Selain sebagai pusat ekonomi, PPN Palabuhanratu juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap proses penangkapan dan pengelolaan hasil perikanan. Dengan demikian, PPN Palabuhanratu tidak hanya berperan sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.



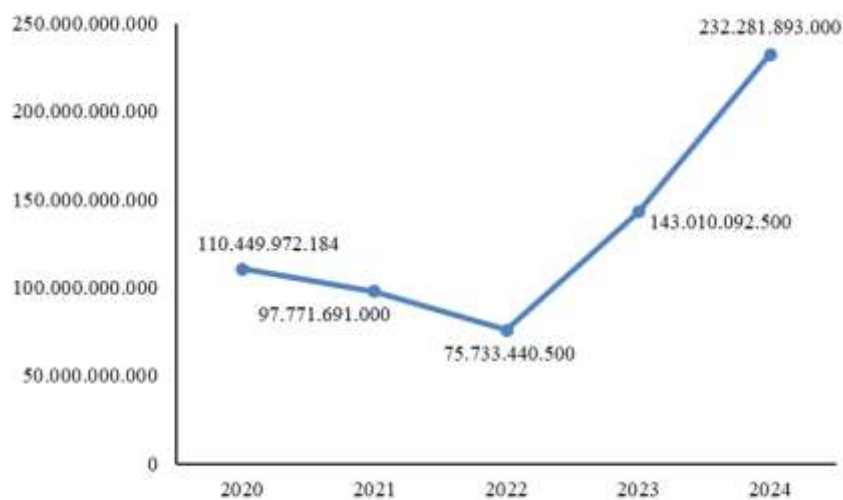
Gambar 2.76. Jumlah Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Palabuhanratu

Sumber: Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2025

Dalam kurun waktu lima tahun, volume tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhan Ratu menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, jumlah tangkapan mencapai 5.111.000 kg, yang kemudian menurun tajam pada tahun 2022 menjadi 4.179.149 kg, mencerminkan penurunan sekitar 18,2 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi laut, penangkapan ikan yang berlebihan pada tahun sebelumnya, atau kebijakan perikanan yang lebih ketat. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan tajam dengan jumlah tangkapan mencapai 12.050.315 kg. Lonjakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemulihan populasi ikan berkat regulasi yang lebih baik, penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien, atau kondisi laut yang lebih menguntungkan. Selain itu, faktor eksternal seperti peningkatan permintaan pasar atau investasi dalam infrastruktur perikanan juga bisa berkontribusi pada peningkatan ini. Fluktuasi yang signifikan ini menekankan pentingnya manajemen perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan stabilitas ekosistem laut dan ekonomi perikanan di Pelabuhan Ratu. Pemantauan dan penelitian yang berkelanjutan diperlukan untuk memahami dinamika populasi ikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan dan permintaan pasar.

b) Nilai Produksi Ikan yang Didaratkan per Bulan di Pelabuhan Palabuhanratu

Nilai produksi ikan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu disajikan pada tabel sebagai berikut:



Gambar 2.77. Nilai Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Palabuhanratu

Sumber: Kabupaten Sukabumi dalam Angka, 2025

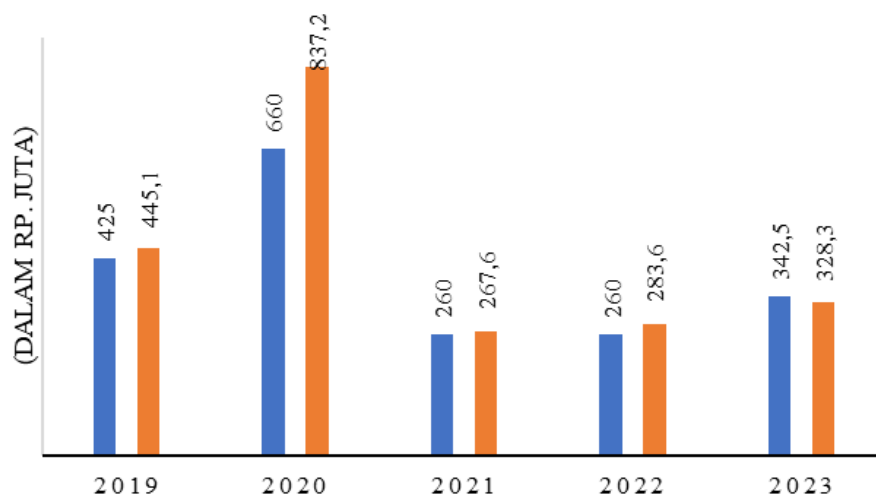
Nilai produksi ikan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode lima tahun. Pada tahun 2021, nilai produksi mencapai Rp 97,771 miliar, kemudian turun tajam pada tahun 2022 menjadi Rp 75,773 miliar, yang menunjukkan penurunan sekitar 22,5 persen. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya jumlah tangkapan ikan, perubahan harga pasar, atau kualitas ikan yang lebih

rendah. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dengan nilai produksi mencapai Rp 232,281 miliar.

Peningkatan ini dapat disebabkan pada beberapa faktor seperti peningkatan volume tangkapan ikan yang cukup besar pada tahun tersebut, kenaikan harga ikan di pasar, atau perbaikan dalam kualitas dan jenis ikan yang ditangkap. Selain itu, investasi dalam teknologi perikanan, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung industri perikanan juga berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan nilai produksi. Fluktuasi dalam nilai produksi ini menggarisbawahi pentingnya manajemen perikanan yang efektif dan kebijakan yang mendukung agar industri perikanan dapat tetap berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional.

c) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Perikanan

Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan di Kabupaten Sukabumi untuk periode 2019 hingga 2023 menunjukkan kinerja yang beragam dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, target PAD sebesar Rp 425 juta terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 445,1 juta, menunjukkan kinerja yang baik di atas target sebesar 4,7 persen. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam target PAD menjadi Rp 660 juta, dan realisasi jauh melampaui target dengan angka Rp 837,2 juta, mencatat kelebihan sebesar 26,8 persen. Peningkatan besar ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbaikan dalam manajemen perikanan, peningkatan volume tangkapan, atau harga pasar yang lebih tinggi.



Gambar 2.78. PAD Sektor Perikanan Kabupaten Sukabumi 2019-2023

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2024

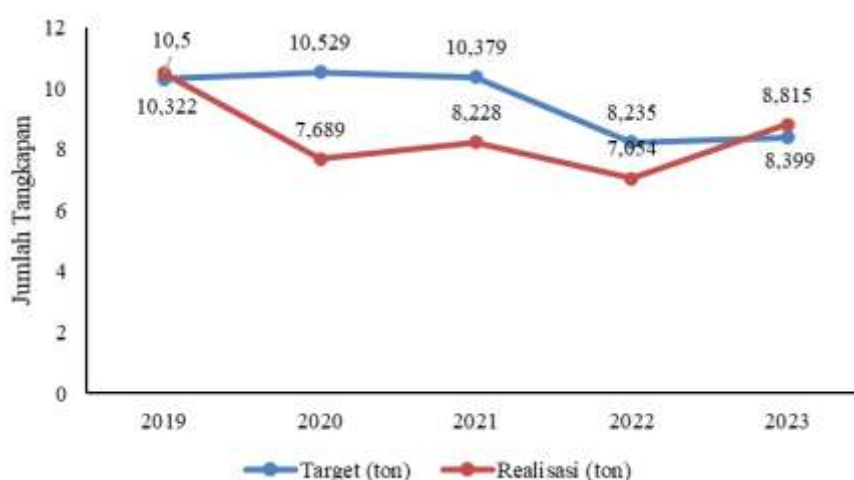
Pada tahun 2021, target PAD diturunkan menjadi Rp 260 juta, dan realisasinya mencapai Rp 267,6 juta, sedikit melebihi target sebesar 2,9 persen. Tahun berikutnya, 2022, target PAD tetap sama di angka Rp 260 juta, tetapi realisasi meningkat lebih tinggi menjadi Rp 283,6 juta, kelebihan 9,1 persen. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi operasional dan kondisi pasar yang menguntungkan. Namun,

pada tahun 2023, target PAD meningkat menjadi Rp 342,5 juta, sementara realisasi hanya mencapai Rp 328,3 juta, sedikit di bawah target sebesar 4,1 persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, penurunan hasil tangkapan ikan, atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi sektor perikanan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi berhasil melampaui target PAD dari sektor perikanan pada sebagian besar tahun, kecuali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adaptasi yang baik terhadap kondisi pasar dan kemampuan untuk mengelola sektor perikanan dengan efektif, meskipun tetap ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target yang lebih tinggi di masa depan.

d) Jumlah Tangkapan Ikan

Jumlah target dan realisasi tangkapan ikan di Kabupaten Sukabumi disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.79. Grafik Target dan Realisasi Tangkapan Ikan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2024

Data target dan realisasi perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan. Pada tahun 2019, target tangkapan sebesar 10.322 Ton hampir tercapai dengan realisasi sebesar 10,050 ton, mencerminkan pencapaian sekitar 97,4 persen dari target. Ini menunjukkan bahwa upaya penangkapan ikan hampir memenuhi ekspektasi, meskipun sedikit di bawah target.

Secara keseluruhan, data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam pencapaian target perikanan tangkap. Meski ada tahun-tahun di mana target tidak tercapai, tahun 2023 menunjukkan keberhasilan yang dapat menjadi dasar untuk strategi perikanan yang lebih baik di masa mendatang. Upaya berkelanjutan dalam manajemen perikanan dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan operasional sangat penting untuk mencapai dan melampaui target di masa depan.

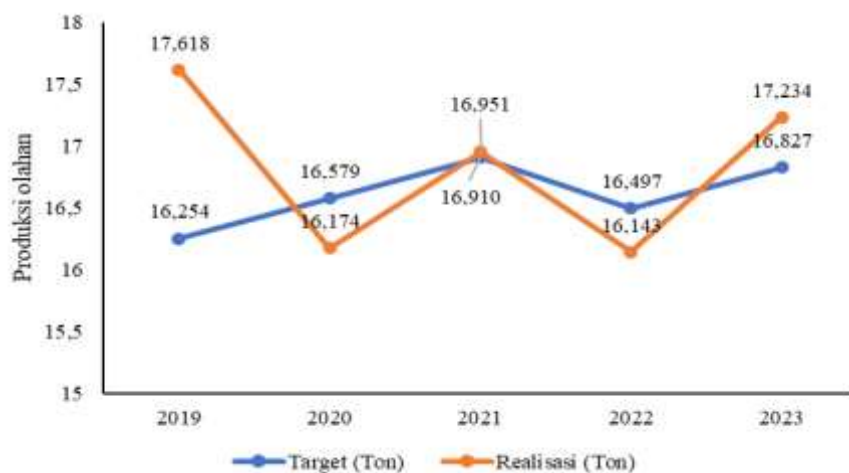
e) Hilirisasi Produk Perikanan

Hilirisasi perikanan merupakan strategi penting dalam mengembangkan industri perikanan dengan cara mengolah hasil tangkapan menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di Kabupaten Sukabumi, upaya ini sangat relevan mengingat potensi perikanan yang besar, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Melalui hilirisasi, produk perikanan yang biasanya dijual dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti fillet ikan, nugget, bakso ikan, sarden kalengan, hingga produk siap saji lainnya.

Proses hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dari hasil perikanan, tetapi juga memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, hilirisasi juga membantu dalam mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong kemandirian ekonomi daerah. Dengan mengolah produk perikanan secara lokal, Kabupaten Sukabumi dapat menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari tenaga kerja di sektor pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk olahan. Ini berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pengembangan hilirisasi juga mendorong inovasi dan peningkatan keterampilan teknologi di bidang perikanan. Melalui pelatihan dan pendampingan teknis, para pelaku usaha perikanan dapat mengadopsi teknologi pengolahan terbaru yang efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait juga dapat memberikan dukungan berupa fasilitas pengolahan, akses ke pembiayaan, serta pemasaran produk olahan perikanan.

Dengan hilirisasi, Kabupaten Sukabumi dapat memaksimalkan potensi sumber daya perikanan dan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Upaya ini tidak hanya memberikan nilai tambah dari segi ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi perikanan adalah langkah strategis untuk menciptakan industri perikanan yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan. Produksi olahan produk perikanan kabupaten sukabumi disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.80. Target dan Realisasi Produksi Olahan Produk Perikanan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2024

Data produksi olahan produk perikanan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, target produksi sebesar 16.254 Ton berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 17.618 Ton, mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam produksi. Tahun berikutnya, 2020, target meningkat menjadi 16.579 Ton namun realisasi produksi sedikit di bawah target, hanya mencapai 16.174 Ton. Meskipun demikian, tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang positif, di mana target produksi sebesar 16.910 Ton berhasil dicapai dan sedikit terlampaui dengan realisasi sebesar 16.951 ton. Pada tahun 2022, target produksi ditetapkan sebesar 16.497 Ton. Namun, realisasi produksi kembali mengalami sedikit penurunan di bawah target, dengan angka realisasi mencapai 16.143 Ton. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang baik, di mana target produksi sebesar 16.827 Ton berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 17.234 Ton. Data ini menggambarkan adanya variasi dalam pencapaian target produksi setiap tahunnya, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca, efisiensi produksi, perubahan permintaan pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi dan distribusi produk perikanan. Keberhasilan melampaui target produksi pada tahun 2019 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan dalam kapasitas dan efisiensi produksi, sementara penurunan realisasi di bawah target pada tahun 2020 dan 2022 mengindikasikan adanya tantangan yang mungkin dihadapi oleh industri perikanan. Tahun 2021 menjadi contoh positif di mana target produksi dapat tercapai dengan baik, menunjukkan stabilitas dalam proses produksi. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang dinamika produksi olahan produk perikanan dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan kebutuhan untuk terus meningkatkan efisiensi dan adaptabilitas dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai target produksi yang diinginkan.

8) **Peternakan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan peternakan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti produksi daging menurut jenis ternak, dan produksi telur unggas dan susu sapi.

a) **Produksi Daging Menurut Jenis Ternak**

Subsektor peternakan yang dijadikan usaha ternak dengan serius hanya dilakukan oleh perusahaan ternak yang mengusahakan unggas. Produksi unggas berdasarkan data mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan konsumsi daging unggas lebih diminati karena dianggap lebih murah dan mudah untuk dikonsumsi namun dengan kandungan gizi yang hampir setara. Berikut data produksi daging menurut jenis ternak tahun 2021 sampai tahun 2024.

Tabel 2.93. Produksi Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sukabumi (Kg), 2021-2024

Jenis Ternak	Produksi Daging			
	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	1.881.543	1.987.454	3.074.962	3.512.980

Jenis Ternak	Produksi Daging			
	2021	2022	2023	2024
Kerbau	94.095	3.445	54.079	66.161
Domba	1.844.333	1.616.400	1.958.416	2.017.179
Kambing	27.828	321.599	386.291	397.871
Ayam Ras Pedaging	42.257.490	49.228.663	58.754.978	59.604.584
Ayam Ras Petelur	1.766.564	1.844.380	4.576.012	4.713.292
Ayam Ras Bibit	1.624.604	1.630.518	1.597.908	-
Ayam Buras	970.526	1.009.176	1.729.903	1.781.800
Itik	64.510	18.183	34.748	35.790
Manila	72.882	14.698	14.846	-
Puyuh	7.896	16.963	17.609	-

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

b) Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi

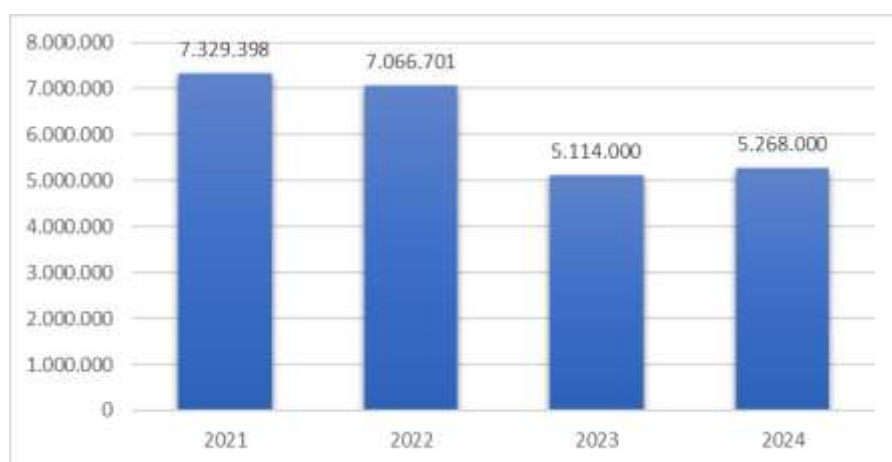
Unggas merupakan jenis ternak yang sangat mudah pemeliharaannya dan waktu pemeliharaan yang singkat. Siklus pemeliharaan yang sebentar sangat memudahkan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk berinvestasi dalam ternak unggas. Produksi telur bagi ayam ras petelur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024.

Tabel 2.94. Produksi Telur Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Sukabumi (Kg), 2021-2024

Jenis Unggas	2021	2022	2023	2024
Ayam Ras Petelur	40.906.561	36.168.752	116.994.000	125.694.000
Ayam Buras	740.209	3.458.216	3.613.000	3.721.000
Itik	225.717	167.571	280.000	288.000
Manila	-	113.014	111.911	-
Puyuh	440.377	144.986	149.425	-

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Kebutuhan protein hewani tidak hanya dapat dipenuhi oleh daging baik ruminansia maupun unggas. Pemenuhan protein hewani juga dapat dipenuhi oleh susu yang dihasilkan dari ternak ruminansia besar ataupun ternak ruminansia kecil. Berikut data grafik produksi susu sapi di Kabupaten Sukabumi:



Gambar 2.81. Produksi Susu Sapi di Kabupaten Sukabumi (Kg), 2021-2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Penurunan produksi susu terjadi pada hasil susu sapi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2021 terdapat produksi sebanyak 7.329.398 kg susu yang dihasilkan sapi di Kabupaten Sukabumi turun pada tahun 2023 sebesar 5.114.000 kg. Tahun 2024 terjadi kenaikan produksi susu sapi sebesar 5.268.000 kg.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan komponen vital dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan. Proses ini bertujuan untuk merumuskan rencana strategis yang akan memandu pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang efektif perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan masyarakat, Potensi daerah, dan tantangan yang ada. Tahapan pembangun diawali dengan adanya proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Salah satu indikator yang dapat mengetahui gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perencanaan pembangunan adalah tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan lengkap. Dokumen ini merupakan pedoman dalam pembangunan secara periodik. Data kesediaan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.95. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Dokumen RTRW	√	√	√	√	√
Dokumen RPJPD	√	√	√	√	√
Dokumen RPJMD	√	√	√	√	√
Dokumen RKPD	√	√	√	√	√
Dokumen Renstra	√	√	√	√	√

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, 2025

Berdasarkan data di atas, dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi;

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menekankan tentang pentingnya arahan kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang daerah. RTRW tersebut berlaku selama 20 tahun. RTRW Periode 2012-2032 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) menekankan tentang pentingnya penggunaan perencanaan strategis berbasis skenario (*scenario planning*), keterlibatan *stakeholders* yang relevan dan kompeten, terutama lembaga penelitian untuk merumuskan skenario perkembangan faktor-faktor eksternal pendorong pembangunan daerah (sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan hidup) dan implikasinya pada pembangunan daerah selama 20 tahun;
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menekankan tentang

pentingnya menerjemahkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun;

- 4) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) menekankan tentang pentingnya setiap PD memiliki tolak ukur kinerja pelayanan yang jelas berdasarkan tupoksi dan dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan PD dan rencana pencapaian program PD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menekankan tentang pentingnya penyusunan perencanaan berdasarkan kerangka penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah; perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah, dan RPJMD; memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pembangunan daerah yang prioritas dan mendesak selama satu tahun.

2) Keuangan

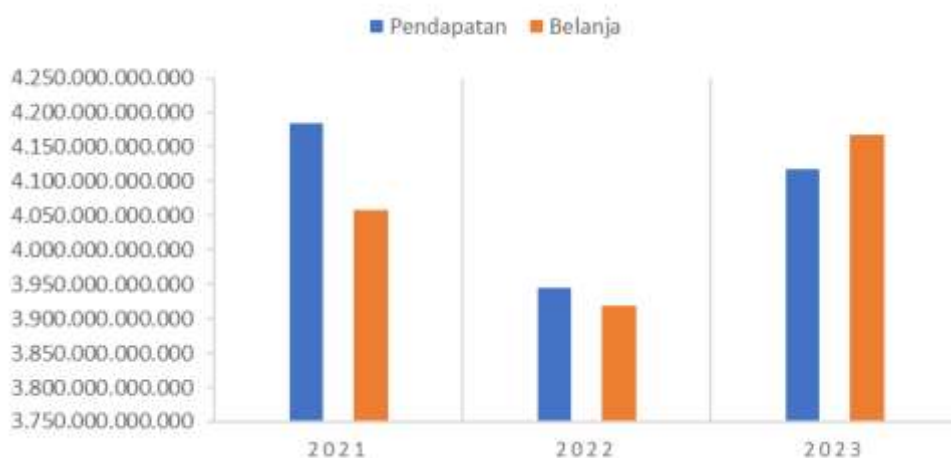
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti opini BPK terhadap laporan keuangan dan perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

a) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Berikut adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu Kabupaten Sukabumi secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mencerminkan laporan keuangan yang berkualitas, wajar, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP yang diterima Kabupaten Sukabumi secara konsisten menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan.

b) Pendapatan dan Belanja



Gambar 2.82. Perbandingan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sukabumi, 2021-2023

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi, 2024

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan tahun 2021 dan 2022 lebih besar dibandingkan jumlah belanja, sedangkan di tahun 2023 jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah belanja. Ini mungkin mencerminkan prioritas pemerintah dalam merespons kebutuhan langsung dan mendesak, serta perubahan strategi dalam pengelolaan anggaran.

c) Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Tingkat kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Proporsi PAD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.96, dan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 82.

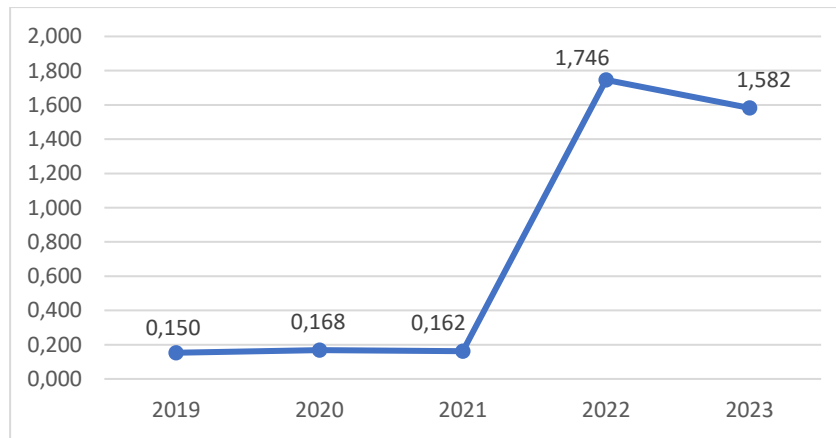
Tabel 2.96. Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023*)
Proporsi Pendapatan Asli Daerah	15,25	16,83	16,17	16,12	15,75
Proporsi Dana Perimbangan	60,69	54,43	76,53	82,43	83,18
Penerimaan Lainnya yang Sah	24,06	28,74	7,30	1,45	1,07
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi/BPKAD, 2024 (diolah)

Berdasarkan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 termasuk kedalam kategori tingkat kemandirian sangat rendah. Hal ini tentu tidak lepas dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi masih kurang.



Gambar 2.83. Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

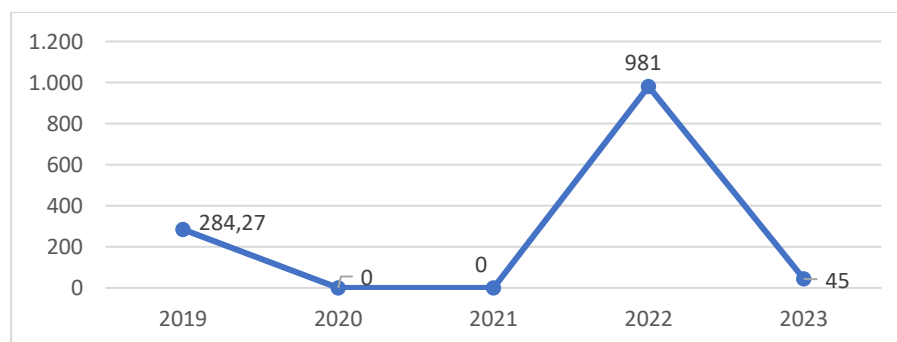
Sumber: PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (DJPb)

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, serta jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan.

a) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pegawai yang lebih terampil, produktif dan bertanggung jawab dalam bekerja. Data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Gambar 2.84. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023

Sumber: BKPSDM Kab.Sukabumi, 2024

Berdasarkan data di atas, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan cenderung *fluktuatif* setiap tahunnya. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 981 jam. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terendah yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 0 jam. Semakin tinggi rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai.

b) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan (diklat) formal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian penting dari pengembangan kapasitas pegawai pemerintah. Diklat formal bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Persentase ASN yang mengikuti diklat formal cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Persentase tertinggi ASN yang mengikuti diklat formal yaitu sebesar 17,60 persen pada tahun 2022. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pada tahun 2024 meningkat, yang mengindikasikan adanya komitmen yang berkelanjutan untuk pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, persentase yang masih rendah menjadi tantangan untuk dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Penguatan program dengan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dapat dijadikan sebagai Langkah yang perlu diambil agar program diklat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kompetensi dan kinerja ASN. Data persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Formal (Jiwa)	0	0	1.709	2.477	1.065
Jumlah Total ASN (Jiwa)	10.918	10.389	9.712	11.976	8.231
Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Formal (%)	0,00	0,00	17,60	4,83	12,94

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukabumi, 2025

c) Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

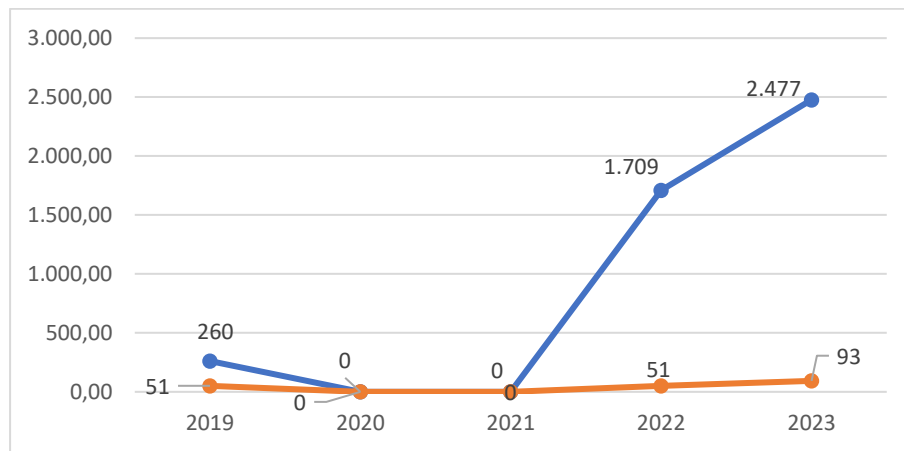
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural cenderung fluktuatif. Persentase tertinggi pejabat ASN mengikuti diklat struktural yaitu pada tahun 2022 sebesar 5,531 persen. Persentase terendah pejabat ASN mengikuti diklat struktural yaitu pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 0 persen. Semakin banyak pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural maka semakin baik untuk peningkatan kinerja pejabat ASN sesuai jabatan yang dimilikinya.

Data persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.98 dan Gambar 2.85.

Tabel 2.98. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	51	0	0	51	93
Jumlah total jabatan	1.403	1.349	1.244	922	1.199
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	3,64	0	0	5,531	12,89

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukabumi, 2024



Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukabumi, 2024

Gambar 2.85. Persentase ASN Diklat Formal dan Pejabat ASN Diklat Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

d) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan

Jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis dari 41 jabatan menjadi 1.203 jabatan di 2021 dan kembali turun menjadi 31 jabatan pada tahun 2022. Jumlah jabatan administrasi juga menunjukkan pola yang sama. Jumlah jabatan administrasi tahun 2021 mencapai 2.680 jabatan. Perubahan ini diduga karena adanya penyesuaian dalam struktur organisasi (restrukturisasi) dan alokasi tugas administratif.

Pemangku jabatan fungsional tertentu cenderung lebih stabil dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dari 7.035 menjadi 10.106 jabatan. Data jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel tersebut.

Tabel 2.99. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi	41	1.203	31	39	42
Jumlah Jabatan Administrasi	264	2.680	252	214	239
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional	7.035	7.035	10.106	9.492	7.950

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa program Pendidikan dan pelatihan struktural bagi pengembangan profesional pejabat ASN di Kabupaten Sukabumi. Persentase yang relatif rendah dalam beberapa tahun pertama mengindikasikan perlunya perbaikan dan peningkatan dalam implementasi program tersebut.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan daerah dalam membangkitkan atau menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Menurut Porter (1990), pentingnya daya saing yaitu untuk: (1) mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri; (2) meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun pelaku ekonomi level mikro, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Aspek daya saing meliputi kemampuan ekonomi daerah dan penduduk, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dengan cara membandingkan dua indeks yaitu Indeks Harga Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Dibayar Petani (IB). Angka Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kemampuan tukar (term of trade) komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya keperluan proses produksi. Jika NTP lebih dari 100, artinya kondisi ekonomi petani relatif baik karena pendapatan yang mereka terima lebih besar dari pengeluaran mereka. Semakin tinggi angka NTP maka ini berarti semakin kuat kemampuan daya beli petani. Adapun nilai tukar petani di Jawa Barat bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 sebagai gambaran untuk Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.86. Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Barat Bulan Januari-Desember Tahun 2024

Sumber: *Provinsi Jawa Barat dalam Angka, 2025*

Berdasarkan gambar diatas, Nilai Tukar Petani Jawa Barat dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024 memiliki nilai NTP lebih dari 100, artinya kondisi ekonomi petani Jawa Barat relatif baik karena pendapatan yang mereka terima lebih besar dari pengeluaran. Semakin tinggi angka NTP maka ini berarti semakin kuat kemampuan daya beli petani.

B. Ketahanan pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, diolah maupun tidak diolah, yang digunakan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang terpenting dan harus dipenuhi setiap hari. Pangan dikelompokkan menurut neraca bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kelompok pangan terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Konsumsi terhadap kelompok pangan tersebut setelah dihitung dengan formula tertentu akan didapatkan skor pola pangan harapan, yang menggambarkan ketahanan pangan suatu daerah.

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), ketahanan pangan merupakan kondisi dimana seluruh rumah tangga memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan rumah tangga tersebut tidak memiliki resiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga dan seluruh penduduk di suatu wilayah dapat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Terpenuhinya energi dari berbagai kelompok pangan merupakan terwujudnya kebutuhan zat gizi, sehingga skor pola pangan harapan menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan penduduk. Skor pola pangan harapan dan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2010 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.100. Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Tahun	Jawa Barat	Sukabumi
2020	84,80	85,40
2021	84,10	87,30
2022	92,50	85,80
2023	93,80	93,60
2024	93,28	90,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2025

Data Pola Pangan Harapan (PPH) pada tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup positif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, skor PPH Kabupaten Sukabumi tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat, yakni 85,40 dan 87,30, sementara Jawa Barat masing-masing mencatat 84,80 dan 84,10. Hal ini mencerminkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Sukabumi cenderung lebih beragam dan seimbang. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan posisi Sukabumi dibanding Jawa Barat, di mana skor PPH Jawa Barat melonjak signifikan menjadi 92,50, sedangkan Sukabumi hanya mencapai 85,80. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh intervensi kebijakan pangan di tingkat provinsi yang lebih kuat, serta perbaikan distribusi dan akses pangan di wilayah lain Jawa Barat. Meski demikian, Kabupaten Sukabumi berhasil mengejar ketertinggalannya pada tahun 2023 dengan peningkatan tajam menjadi 93,60, hampir menyamai skor Jawa Barat yang mencapai 93,80.

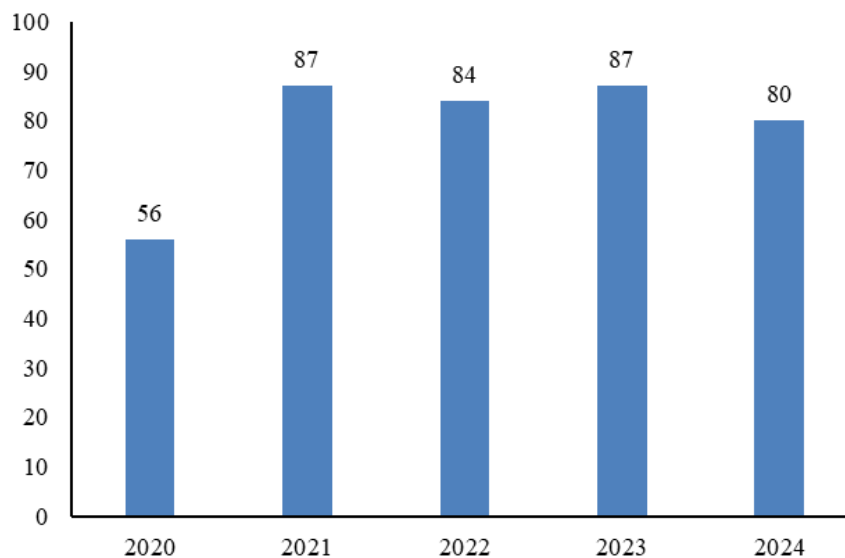
Di tahun 2024, Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan ekstrem dengan skor PPH 90,44. Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan pangan, edukasi gizi, dan akses terhadap sumber pangan yang beragam di Sukabumi yang kembali menunjukkan hasil negatif. Kabupaten Sukabumi memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga konsistensi dalam menjaga keberagaman konsumsi dan distribusi pangan sehat yang menjadi kunci penting untuk mempertahankan dan meningkatkan skor PPH ke depan, sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan daerah.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Jumlah Restoran

Restoran atau rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Restoran memiliki peran dalam mendukung sektor pariwisata dengan membantu dalam penyediaan makan dan minum bagi para wisatawan. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Sukabumi, terjadi fluktuasi pada jumlah restoran yang ada disekitar area obyek wisata di Kabupaten Sukabumi dari jumlah 56 restoran pada tahun 2020, menjadi 80 restoran pada tahun

2024. Data jumlah restoran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

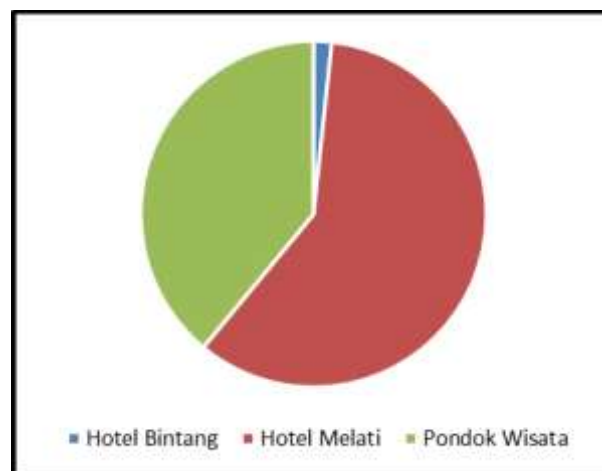


Gambar 2.87. Jumlah Restoran di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

B. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel

Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai macam jenis pariwisata yang menjadi potensi untuk terus dikembangkan. Pariwisata diharapkan menjadi pendorong utama pembangunan perekonomian Kabupaten Sukabumi. Kegiatan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan atraksi atau obyek wisata, tetapi juga berkaitan dengan faktor pendukung lainnya seperti ketersediaan tempat penginapan/hotel. Pertumbuhan hotel di Kabupaten Sukabumi cenderung stagnan. Data jumlah hotel di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.88. Jumlah Hotel di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025 (diolah)

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dalam suatu wilayah menunjukkan adanya perbandingan jumlah penduduk usia non produktif terhadap jumlah penduduk yang produktif. Penduduk yang non produktif terdiri dari jumlah penduduk dibawah usia 15 tahun dan penduduk diatas 64 tahun. Sedangkan jumlah penduduk yang produktif adalah diatas 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dengan kata lain hasil perbandingan tersebut menggambarkan adanya ketergantungan penduduk yang tidak bekerja karena ditanggung penduduk yang bekerja.

Angka perbandingan tersebut apabila semakin tinggi memperlihatkan semakin tinggi beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif. Demikian pula jika terjadi sebaliknya, angka perbandingan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban penduduk yang bekerja untuk membiayai penduduk yang tidak bekerja. Kabupaten Sukabumi memiliki rasio ketergantungan yang sedang, artinya perbandingan antara penduduk yang produktif dengan penduduk yang tidak produktif masih seimbang. Namun demikian rasio tersebut berada diatas rata rata rasio ketergantungan Jawa Barat. Dengan kata lain penduduk Kabupaten Sukabumi masih cukup banyak menanggung beban hidup penduduk yang tidak bekerja sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan yang diperoleh masyarakat. Data terkait dengan rasio ketergantungan Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.101. Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Sukabumi	51,90	44,27	44,28	44,23	44,36
Provinsi Jawa Barat	46,57	42,87	42,84	42,99	43,36

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

B. Indeks Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia yang meningkatkan produktivitas dapat dilihat dari indeks pendidikan. Indeks pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam proses pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah tabel Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022:

Tabel 2.102. Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	2022
1	Bogor	62,52
2	Sukabumi	57,73
3	Cianjur	57,36
4	Bandung	65,57
5	Garut	59,85
6	Tasikmalaya	60,74
7	Ciamis	66,33
8	Kuningan	60,27
9	Cirebon	58,78
10	Majalengka	58,97
11	Sumedang	65,15

No	Kabupaten/Kota	2022
12	Indramayu	56,85
13	Subang	56,72
14	Purwakarta	60,73
15	Karawang	60,39
16	Bekasi	68,18
17	Bandung Barat	60,43
18	Pangandaran	60,41
19	Kota Bogor	72,74
20	Kota Sukabumi	71,55
21	Kota Bandung	76,19
22	Kota Cirebon	70,93
23	Kota Bekasi	77,33
24	Kota Depok	76,96
25	Kota Cimahi	75,76
26	Kota Tasikmalaya	69,18
27	Kota Banjar	66,07
28	Provinsi Jawa Barat	64,32

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2025

C. Indeks Reformasi Birokrasi

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Penilaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.103. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023

IRB	Bobot	Nilai
Indeks Reformasi Birokrasi 2020	100,00	61,11
Indeks Reformasi Birokrasi 2021	100,00	62,45
Indeks Reformasi Birokrasi 2022	100,00	63,00
Indeks Reformasi Birokrasi 2023	100,00	78,08

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sukabumi diantaranya yaitu: pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemerintah Daerah dan PD, namun kondisi pelaksanaan reformasi Birokrasi pada tingkat PD belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Daerah; penerapan e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya perencanaan yang komprehensif terkait pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan beberapa aplikasi yang sudah ada belum terintegrasi secara menyeluruh; dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada PD yang terkait dalam hal pelayanan masyarakat belum optimal, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Serta Realisasi RPJMD

2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2024

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Pada subbab ini disajikan sandingan capaian indikator makro Kabupaten Sukabumi dengan indikator makro Jawa Barat mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Berdasarkan data tabel di bawah ini, diperoleh informasi bahwa:

- a. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan tren positif, IPM Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan selama periode tahun 2021 sampai 2024 yakni 68,33 menjadi 70,18. Dan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026, IPM tahun 2024 ditargetkan sebesar 68,39 poin, dan terealisasi sebesar 70,18 poin atau tercapai 102,62 persen melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu tren IPM Jawa Barat juga meningkat selama periode 2021 sampai 2024 yakni dari 72,96 menjadi 74,92.
- b. Pada tahun 2022-2023 LPP Kabupaten Sukabumi turun masing-masing menjadi 1,04 dan 1,02 persen. Dan Tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi turun menjadi 0,99 persen atau tercapai sebesar 115,38 persen dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 tertinggi adalah Kecamatan Kebonpedes dengan Laju pertumbuhan penduduk 1,61 persen, dan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Cidolog yaitu sebesar minus 0,54 persen.

Berdasarkan Kabupaten Sukabumi Dalam Angka (KSDA) Tahun 2025, penduduk Kabupaten Sukabumi berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2024 sebanyak 2,828.024 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Sukabumi tahun 2024 adalah Kecamatan Cisaat dengan kepadatan penduduk mencapai 6.203 jiwa/Km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Tegalbuleud yaitu sebesar 145 jiwa/Km².

Sementara laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama periode tahun 2021 sampai 2024 menurun yakni dari 1,29 persen menjadi 1,13 persen.

- c. Angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebesar 6,87 persen dengan penduduk miskin sebanyak 175,93 ribu orang. Pada kurun waktu 2020-2021 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari 7,09 persen menjadi 7,70 persen. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan 2024 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi turun yakni dari 7,34 persen menjadi 6,87. Namun angka kemiskinan tahun

2024 belum mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi sebesar 6,60 persen. Sementara angka kemiskinan di Jawa Barat menurun selama tahun 2021 sampai dengan 2024 yakni dari 8,4 persen menjadi 7,46 persen.

- d. Berdasarkan data di bawah, TPT Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami tren menurun, dari angka 9,51 persen pada tahun 2023 menjadi 7,11 persen pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Sementara TPT Jawa Barat menunjukkan tren menurun selama periode Tahun 2021 sampai 2024 yakni dari 9,82 persen menjadi 6,75 persen.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 0,91 persen. Kemudian di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,74 persen, dan tahun 2022 kembali tumbuh sebesar 5,12 persen dan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,17 persen, namun sedikit melambat pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,15 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode tahun 2021 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 mencapai 3,74 persen dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 5,45 persen. Namun dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami perlambatan dari 5,00 persen menjadi 4,95 persen.
- f. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di Kabupaten Sukabumi. PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada periode tahun 2021-2024, dari Rp25,75 juta pada tahun 2021 menjadi Rp31,17 juta pada tahun 2024. Artinya satu orang penduduk Kabupaten Sukabumi selama setahun pada tahun 2024 dapat memproduksi barang dan jasa atau memiliki pendapatan senilai Rp31,17 juta rupiah. Sementara pendapatan per kapita Jawa Barat mengalami tren positif dari tahun 2021 sampai 2024 yakni dari Rp45,23 juta menjadi 56,08 juta.
- g. Ketimpangan pendapatan antar penduduk Kabupaten Sukabumi diukur menggunakan indeks gini. Pada tahun 2024, indeks gini Kabupaten Sukabumi berada di 0,342 poin, ini termasuk kategori ketimpangan sedang. Angka tersebut turun 0,013 poin dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,355 poin atau minus 3,66 persen. Lebih lanjut, berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, pada tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Sukabumi ditargetkan berada pada rentang 0,332 poin. Pada tahun 2024, realisasi rasio gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,342 poin atau baru tercapai 96,99 persen dari target yang ditetapkan. Sementara indeks gini Jawa Barat pada periode 2021-2023 mengalami peningkatan yakni dari 0,412 menjadi 0,425. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Barat cenderung meningkat. Pada Tahun 2024 indeks gini Jawa Barat menurun menjadi 0,421.

Secara rinci target dan realisasi masing-masing indikator makro Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sampai dengan 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.104. Perkembangan Indikator Makro Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

NO.	WILAYAH JAWA BARAT	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)				TINGKAT KEMISKINAN (%)				TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Jawa Barat	72,96	73,63	74,24	74,92	1,29	1,22	1,18	1,13	8,4	8,06	7,62	7,46	9,82	8,31	7,44	6,75
2	Bogor	71,83	72,45	73,02	73,63	1,4	1,35	1,32	1,23	8,13	7,73	7,27	7,05	12,22	10,64	8,47	7,34
3	Sukabumi	68,33	68,87	69,71	70,18	1,08	1,04	1,02	0,99	7,7	7,34	7,01	6,87	9,51	7,77	7,32	7,11
4	Cianjur	67,16	67,55	68,18	68,89	1,24	1,2	1,17	1,14	11,18	10,55	10,22	10,14	9,32	8,41	7,71	5,99
5	Bandung	73,03	73,46	74,03	74,59	1,05	1	0,97	0,94	7,15	6,8	6,4	6,19	8,32	6,98	6,52	6,36
6	Garut	67,53	68,51	69,22	69,91	1,44	1,39	1,36	1,33	10,65	10,42	9,77	9,68	8,68	7,6	7,33	6,96
7	Tasikmalaya	67,43	68,45	69,38	69,98	0,84	0,82	0,81	0,79	11,15	10,73	10,28	10,23	6,16	4,17	3,89	3,74
8	Ciamis	72	72,52	73,12	73,64	0,63	0,66	0,66	0,65	7,97	7,72	7,42	7,39	5,06	3,75	3,52	3,37
9	Kuningan	69,99	70,44	70,99	71,56	0,94	1,04	1,05	1,04	13,1	12,76	12,12	11,88	11,68	9,81	9,49	7,78
10	Cirebon	69,99	70,92	71,81	72,3	1,81	1,52	1,42	1,35	12,3	12,01	11,2	11	10,38	8,11	7,65	6,74
11	Majalengka	69,42	70,18	70,76	71,37	0,97	0,98	0,97	0,95	12,33	11,94	11,21	10,82	5,71	4,16	4,12	4,01
12	Sumedang	72,64	73,53	74,02	74,57	0,78	0,81	0,81	0,79	10,71	10,14	9,36	9,1	9,18	7,72	6,94	6,16
13	Indramayu	68,6	69,52	70,19	70,72	1,26	1,21	1,18	1,14	13,04	12,77	12,13	11,93	8,3	6,49	6,46	6,25
14	Subang	69,84	70,54	71,42	72,05	2,13	1,43	1,23	1,12	10,03	9,75	9,52	9,49	9,77	7,77	7,65	6,73
15	Purwakarta	72,31	72,89	73,43	73,99	1,48	1,44	1,41	1,38	8,83	8,7	8,46	8,41	10,7	8,75	7,72	7,34
16	Karawang	71,84	72,64	73,25	73,82	1,45	1,33	1,28	1,24	8,95	8,44	7,87	7,86	11,83	9,87	8,95	8,04
17	Bekasi	74,84	75,6	76,13	76,8	1,53	1,48	1,44	1,35	5,21	5,01	4,93	4,8	10,09	10,31	8,87	8,82
18	Bandung Barat	69,03	69,82	70,33	70,77	1,5	1,46	1,43	1,4	11,3	10,82	10,52	10,49	11,65	9,63	8,11	6,7
19	Pangandaran	69,46	70,21	70,57	71,03	0,6	0,66	0,67	0,65	9,65	9,32	8,98	8,75	3,25	1,56	1,52	1,58
20	Kota Bogor	77,11	77,68	78,36	79,03	1	0,98	0,96	0,89	7,24	7,1	6,67	6,53	11,79	10,78	9,39	8,13
21	Kota Sukabumi	75,44	76,24	77,16	77,69	1,48	1,49	1,48	1,46	8,25	8,02	7,5	7,2	10,78	8,83	8,53	8,34
22	Kota Bandung	82,23	82,75	83,29	83,75	0,94	0,93	0,92	0,91	4,37	4,25	3,96	3,87	11,46	9,55	8,83	7,4
23	Kota Cirebon	76,26	76,89	77,45	78,09	1	0,96	0,94	0,91	10,03	9,82	9,16	9,02	10,53	8,42	7,66	6,29
24	Kota Bekasi	81,99	82,52	83,06	83,55	1,28	1,22	1,18	1,04	4,74	4,43	4,1	4,01	10,88	8,81	7,9	7,82
25	Kota Depok	81,54	82,02	82,53	83,05	1,61	1,58	1,55	1,37	2,58	2,53	2,38	2,34	9,76	7,82	6,97	6,27
26	Kota Cimahi	78,31	79,01	79,69	80,3	1,42	1,42	1,41	1,39	5,35	5,11	4,66	4,39	13,07	10,77	10,52	8,97
27	Kota Tasikmalaya	74,31	74,84	75,47	76,03	1,29	1,3	1,29	1,27	13,13	12,72	11,53	11,1	7,66	6,62	6,55	6,49
28	Kota Banjar	73,3	73,93	74,45	75,01	1,16	1,18	1,17	1,15	7,11	6,73	6,14	5,85	6,09	5,53	5,43	5,44

NO.	WILAYAH JAWA BARAT	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)				PENDAPATAN PER KAPITA (Ribu Rupiah)				GINI RASIO			
		2021	2022*	2023**	2024	2021,00	2022,00	2023,00	2024,00	2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Jawa Barat	3,74	5,45	5,00	4,95	45234,18	49136,90	52651,59	56079,61	0,412	0,417	0,425	0,421
2	Bogor	3,55	5,25	5,19	5,21	45383,97	48187,34	51378,19	54856,84	0,396	0,400	0,369	0,398
3	Sukabumi	3,74	5,12	5,17	5,15	25746,84	27472,11	29373,82	31167,47	0,343	0,309	0,355	0,342
4	Cianjur	3,48	5,04	5,16	5,14	20049,94	21341,08	22825,64	24914,37	0,372	0,313	0,319	0,338
5	Bandung	3,56	5,35	4,97	5,04	35723,61	38782,84	41372,25	44125,83	0,386	0,370	0,348	0,364
6	Garut	3,58	5,08	4,94	4,95	23277,49	25138,48	26914,40	29012,36	0,322	0,302	0,361	0,324
7	Tasikmalaya	3,43	4,70	4,69	4,64	20931,26	22544,74	24172,45	25916,29	0,378	0,378	0,404	0,363
8	Ciamis	3,66	5,02	4,99	4,97	27281,60	29577,03	31833,51	34336,05	0,342	0,337	0,341	0,326
9	Kuningan	3,56	5,53	5,25	5,61	22891,43	24827,21	27080,93	29273,40	0,349	0,345	0,351	0,369
10	Cirebon	2,47	4,09	4,85	5,83	22730,30	24300,64	25973,86	28139,50	0,339	0,355	0,361	0,374
11	Majalengka	4,75	6,63	6,15	6,38	25974,81	28446,66	31137,60	34233,99	0,354	0,367	0,342	0,354
12	Sumedang	3,17	5,03	5,01	4,05	31970,31	34243,31	36772,93	39699,13	0,359	0,394	0,366	0,337
13	Indramayu	0,58	2,88	9,76	2,18	44064,05	48453,72	54668,52	55165,55	0,321	0,300	0,344	0,306
14	Subang	2,18	4,29	4,64	4,81	26095,41	28223,04	30119,77	33037,26	0,329	0,360	0,331	0,32
15	Purwakarta	3,42	5,24	4,97	4,64	70151,72	74745,25	79193,71	84024,43	0,388	0,367	0,372	0,398
16	Karawang	5,85	6,31	5,40	4,2	98846,48	107455,23	115168,68	121298,46	0,374	0,353	0,389	0,376
17	Bekasi	3,62	5,30	5,32	5,17	108103,60	115084,75	121647,17	128692,89	0,340	0,373	0,397	0,367
18	Bandung Barat	3,46	5,34	5,00	4,94	26965,21	28852,11	30621,68	32500,07	0,356	0,368	0,374	0,4
19	Pangandaran	3,67	5,03	5,26	5,12	28501,08	30713,53	33041,97	35647,16	0,320	0,294	0,323	0,286
20	Kota Bogor	3,76	5,65	5,10	5,15	45984,13	49875,44	53238,77	56615,77	0,441	0,430	0,464	0,477
21	Kota Sukabumi	3,71	5,35	5,12	5,11	37278,01	39931,28	42561,94	44760,23	0,436	0,482	0,458	0,436
22	Kota Bandung	3,76	5,41	5,07	4,99	120709,70	132098,19	140143,63	147081,35	0,427	0,459	0,459	0,44
23	Kota Cirebon	3,05	5,10	5,01	5,02	72978,21	78532,14	84135,31	88560,48	0,489	0,468	0,468	0,424
24	Kota Bekasi	3,22	4,96	5,43	5,19	39479,16	42293,45	45281,17	48921,73	0,401	0,441	0,414	0,435
25	Kota Depok	3,76	5,24	5,05	5,47	35741,34	38401,81	40816,92	43514,52	0,367	0,394	0,402	0,398
26	Kota Cimahi	4,19	5,92	5,19	5,26	59612,31	64427,13	68552,17	72528,37	0,415	0,408	0,394	0,402
27	Kota Tasikmalaya	3,57	5,01	5,96	5,22	31592,01	34095,87	36954,58	39445,45	0,414	0,405	0,428	0,359
28	Kota Banjar	3,49	4,29	4,71	5,48	22992,94	24022,85	25277,80	26451,36	0,341	0,362	0,337	0,318

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025, diolah

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 telah memasuki tahun ke empat. Berdasarkan capaian IKU tahun 2024, diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki predikat Sangat Tinggi (ST) sebesar 88,46 persen, predikat Tinggi (T) sebesar 3,85 persen, dan predikat Sedang (S) sebesar 7,69 persen, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat tiga IKU yang belum mencapai target di tahun 2024, yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB), Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten.

Indikator Kinerja Utama yang mencapai target sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi. IKU yang mencapai target dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 13 indikator. Sedangkan untuk IKU yang tingkat capaiannya menurun dari 2022 sampai dengan 2024 terdapat 8 indikator, yaitu: (1) angka kematian bayi (AKI); (2) laju pertumbuhan pdrb sektor pertanian, kelautan dan perikanan; (3) Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata; (4) Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata; (5) indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); (6) Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten; (7) persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten, dan: (8) nilai akuntabilitas kinerja daerah. Adapun IKU yang capaiannya fluktuatif dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebanyak 5 indikator, yaitu: (1) rata-rata lama sekolah (RLS); (2) harapan lama sekolah (HLS); (3) tingkat kemiskinan; (4) indeks profesionalitas ASN, dan; (5) indeks inovasi daerah. Informasi lebih rinci mengenai capaian IKU disajikan pada Tabel 2.105.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari misi RPJMD. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator dan target per tahun untuk mengukur kinerja Pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, target dan realisasi serta tingkat capaian dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran RPJMD mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024

No.	IKU	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,50	75,17	100,90	75,20	75,27	100,09	76,00	78,01	102,64
2	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	71,26	71,54	100,39	71,45	71,83	100,53	71,63	74,85	104,50
3	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	84,00	77,09	108,23	83,00	81,77	101,48	82,00	67,68	117,46
4	Angka kematian bayi	Per 1000 KH	4,25	3,45	118,82	4,20	3,97	105,48	4,15	5,46	68,47
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,64	87,64	100,00	87,78	88,30	100,59	87,92	89,38	101,66
6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,32	7,11	97,13	7,43	7,33	98,65	7,55	7,34	97,22
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,38	12,25	98,95	12,42	12,38	99,68	12,47	12,39	99,36
8	Tingkat Kemiskinan	%	6,91	7,34	93,78	6,75	7,01	96,15	6,60	6,87	95,91
9	Persentase pemajuan kebudayaan	%	20,48	22,1	107,91	21,55	24,14	112,02	22,61	24,38	107,83
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9 – 11	7,77	129,36	8,75 - 10,75	7,32	116,34	8,5 -10,5	7,11	116,35
11	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kelautan dan Perikanan	%	2,33	5,4	231,76	2,73	4,24	155,31	3,13	2,08	66,45
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	85,10	85,8	100,82	85,60	95,60	111,68	86,1	90,44	105,04
13	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	(-1) – 0,5	10,1	1010,00	0,5 - 1	5,85	585,00	1-2	6,8	340,00
14	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	%	2,5	1242,9	49716,00	3,00	549,75	18325,00	3,5	93,26	2664,57
15	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	%	2,50	2,50	100,00	2,50	2,50	100,00	2,5	3,01	120,40
16	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	66,85	65,47	97,94	67,41	64,68	95,95	68,11	65,15	95,65
17	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	76,17	76,17	100,00	82,12	82,12	100,00	88,08	88,08	100,00
18	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	63,53	74,23	116,84	67,53	67,73	100,30	71,53	60,58	84,69
19	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	50,80	61,05	120,18	52,80	53,47	101,27	54,8	54,37	99,22
20	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	%	17,49	19,48	111,38	21,83	35,48	162,53	26,17	48,51	185,36
21	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	43	43	100,00	51,00	51,00	100,00	60	60	100,00

No.	IKU	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
22	indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	86,50	86,64	100,16	87,00	87,36	100,41	87,5	90,3	103,20
23	Indeks profesionalitas ASN	Poin	60,20	66,13	109,85	66,40	66,13	99,59	71,4	78,54	110,00
24	Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100
25	Nilai akuntabilitas kinerja daerah	Poin	68,00	65,95	96,99	70,00	66,21	94,59	72	66,84	92,83
26	Indeks inovasi daerah	Poin (Predikat)	57,50 (Inovatif)	57,02 (Inovatif)	99,17	58,50 (Inovatif)	44,76 (Inovatif)	76,51	59,00 (Inovatif)	64,82 (Sangat Inovatif)	109,86

Sumber:

- BPS Provinsi Jawa Barat, 2025
- Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2024

Tabel 2.106. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2024

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing									
TI: Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,60	67,64	67,99	69,71	68,39	70,18	102,62
SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	IK1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,50	75,17	75,20	75,27	76,00	78,01	102,64
SS2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	IK2. Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	71,26	71,54	71,45	71,83	71,63	74,85	104,50
	IK3. Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	84,00	77,09	83,00	81,77	82,00	67,68	117,46
	IK4. Angka kematian bayi	Per 1000 KH	4,25	3,45	4,20	3,97	4,15	5,46	68,47
SS3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	IK5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,64	87,64	87,78	88,30	87,92	89,38	101,66
SS4. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	IK6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,32	7,11	7,43	7,33	7,55	7,34	97,22
	IK7. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,38	12,25	12,42	12,38	12,47	12,39	99,36

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
SS5. Menurunnya tingkat kemiskinan	IK8. Tingkat Kemiskinan	%	6,91	7,34	6,75	7,01	6,60	6,87	95,91
SS6. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	IK9. Persentase pemajuan kebudayaan	%	20,48	22,1	21,55	24,14	22,61	24,38	107,83
SS7. Menurunnya tingkat pengangguran	IK10. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9 – 11	7,77	8,75 - 10,75	7,32	8,5 -10,5	7,11	116,35
Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan									
T2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)		2,30-3,30	5,12	3,61-4,36	5,17	4,75-5,42	5,15	100
SS8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan	IK11. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kelautan dan Perikanan	%	2,33	5,4	2,73	4,24	3,13	2,08	66,45
	IK12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	85,10	85,8	85,60	95,60	86,1	90,44	105,04
SS9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	IK13. Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	(-1) – 0,5	10,1	0,5 - 1	5,85	1-2	6,8	340,00
SS10. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	IK14. Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata	%	2,5	1242,9	3,00	549,75	3,5	93,26	2664,57
SS11. Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	IK15. Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas	%	2,50	2,50	2,50	2,50	2,5	3,01	120,40
SS12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IK16. Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	66,85	65,47	67,41	64,68	68,11	65,15	95,65
Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah									
T3: Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		2,60	3,087	2,70	3,10	2,8	3,137	112,04
SS13. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	IK17. Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah	%	76,17	76,17	82,12	82,12	88,08	88,08	100,00
SS14. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IK18. Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	63,53	74,23	67,53	67,73	71,53	60,58	84,69

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	IK19. Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	50,80	61,05	52,80	53,47	54,8	54,37	99,22
SS15. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	IK20. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata	%	17,49	19,48	21,83	35,48	26,17	48,51	185,36
SS16. Meningkatnya kinerja layanan transportasi	IK21. Rasio Konektivitas Kabupaten	%	43	43	51,00	51,00	60	60	100,00
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel									
T4: Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	63,00	63,00	64,00	78,08	65	85,52	131,57
SS17. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	IK22. indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	86,50	86,64	87,00	87,36	87,5	90,3	103,20
	IK23. Indeks profesionalitas ASN	Poin	60,20	66,13	66,40	66,13	71,4	78,54	110,00
	IK24. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A
	IK25. Nilai akuntabilitas kinerja daerah	Poin	68,00	65,95	70,00	66,21	72	66,84	92,83
SS18. Meningkatnya inovasi daerah	IK26. Indeks inovasi daerah	Poin (Predikat)	57,50 (Inovatif)	57,02 (Inovatif)	58,50 (Inovatif)	44,76 (Inovatif)	59,00 (Inovatif)	64,82 (Sangat Inovatif)	109,86

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; LKPJ Kabupaten Sukabumi Tahun 2025; dan BPS Jawa Barat, diolah

Tabel 2.107. Capaian Indikator Kinerja Program Kabupaten Sukabumi sampai dengan Tahun 2024

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
1	DINAS PENDIDIKAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					99,75	Sangat Tinggi
01:0 1:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK Sekolah Dasar	%	103,20	99,62	96,53	Sangat Tinggi
		Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	%	100,63	96,47	95,87	Sangat Tinggi
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	52,74	55,31	104,87	Sangat Tinggi
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	85,30	93,51	109,62	Sangat Tinggi
01:0 1:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	57,76	57,76	100,00	Sangat Tinggi
01:0 1:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTKnya	%	51,05	48,81	95,61	Sangat Tinggi
01:0 1:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional menjadi memiliki izin operasional	%	75,24	72,02	95,72	Sangat Tinggi
01:0 1:06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran bahasa sunda	%	7,41	7,24	97,71	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	DINAS KESEHATAN						

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					102,23	Sangat Tinggi
01:0 2:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	66,00	71,22	107,91	Sangat Tinggi
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	18,00	25,83	143,50	Sangat Tinggi
		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
01:0 2:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	41,00	36,05	87,93	Tinggi
01:0 2:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
01:0 2:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	37,00	34,00	91,89	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	DINAS PEKERJAAN UMUM						
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					98,38	Sangat Tinggi
01:0 3:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	54,80	54,37	99,22	Sangat Tinggi
01:0 3:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,53	60,57	84,68	Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	100,00	98,25	98,25	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					91,17	Sangat Tinggi
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88,78	87,10	98,11	Sangat Tinggi
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	82,33	79,35	96,38	Sangat Tinggi
01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	47,12	32,85	69,72	Sedang
01:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	%	60,00	N/A	N/A	Sangat Tinggi
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang kondisi baik	Unit	12,00	11,00	91,67	Sangat Tinggi
01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Unit	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					109,39	Sangat Tinggi
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana dan relokasi pembangunan yang tertangani.	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	26,17	48,51	185,36	Sangat Tinggi
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	94,21	92,25	97,92	Sangat Tinggi
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU kualitas baik	unit	15,00	18,00	120,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100			Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTARAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					95,76	Sangat Tinggi
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	50,00	26,66	53,32	Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTARAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					98,48	Sangat Tinggi
01:0 5:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	1,00	1,57	157,00	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5,00	6,24	124,80	Sangat Tinggi
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase capaian upaya pendukung terhadap Penataan Sistem dasar penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0,00	0,00	Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTARAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					221,13	Sangat Tinggi
01:0 5:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	Menit	13,00	11,23	115,76	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran	%	4,50	52,85	1174,44	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0,00	0,00		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0,00	0,00		Sangat Rendah
8	DINAS SOSIAL						
	URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG SOSIAL					76,35	Tinggi
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	18,91	9,92	52,46	Rendah
01:06:03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	15,67	1,57	10,02	Sangat Rendah
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS/PMKS yang tertangani dan berfungsi sosial di luar panti.	%	18,29	14,65	80,10	Tinggi
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	16,54	15,20	91,90	Sangat Tinggi
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%	16,68	1,79	10,73	Sangat Rendah
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					95,53	Sangat Tinggi
02:07:02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	96,00	64,28	66,96	Sedang
02:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,70	3,24	120,00	Sangat Tinggi
02:07:04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	30,00	17,81	59,37	Rendah
02:07:05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					80,00	Tinggi
03:3 2:03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20,00	12,00	60,00	Rendah
03:3 2:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	20,40	20,40	100,00	Sangat Tinggi
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-1211,29	Sangat Rendah
02:0 8:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	90,00	91,38	101,53	Sangat Tinggi
02:0 8:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0032	0,59	-18237,50	Sangat Rendah
02:0 8:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	89,09	100,00	112,25	Sangat Tinggi
02:0 8:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat akurasi data gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:0 8:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	100,00	51,06	51,06	Rendah
02:0 8:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,02	0,02	114,57	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	DINAS KETAHANAN PANGAN						

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					102,07	Sangat Tinggi
02:0 9:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi
02:0 9:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	38,24	46,93	122,72	Sangat Tinggi
02:0 9:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	17,11	17,11	100,00	Sangat Tinggi
02:0 9:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
12	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					100,00	Sangat Tinggi
01:0 3:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaran pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	%	85,80	85,80	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					88,05	Tinggi
02:1 0:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan permasalahan pertanahan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 0:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Bidang Tanah / Tahun	9,00	4,00	44,44	Sangat Rendah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
02:1 0:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 0:07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 0:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	Bidang Tanah / Tahun	100386,00	143,00	0,14	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					0,00	Sangat Rendah
01:0 3:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Pengelolaan Persampahan	%	12,90	0,00	0,00	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					92,14	Sangat Tinggi
02:1 1:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun per tahun	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 1:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	65,00	66,67	102,57	Sangat Tinggi
02:1 1:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10,00	12,34	123,40	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
02:1 1:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	%	1,73	2,17	125,43	Sangat Tinggi
02:1 1:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	2,48	57,27	Rendah
02:1 1:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	100,00	33,33	33,33	Sangat Rendah
02:1 1:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5,00	4,20	84,00	Tinggi
02:1 1:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,20	0,38	31,67	Sangat Rendah
02:1 1:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	%	90,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi
02:1 1:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	62,40	55,35	88,70	Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100,00	101,00	101,00	Sangat Tinggi
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					92,18	Sangat Tinggi
02:1 2:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	91,00	88,01	96,71	Sangat Tinggi
02:1 2:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,00	96,35	97,32	Sangat Tinggi
02:1 2:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi/Badan Hukum Indonesia yang bekerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	65,00	5,71	8,78	Sangat Rendah
02:1 2:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan	%	90,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					126,54	Sangat Tinggi
02:1 3:02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase status desa mandiri	%	20,73	41,21	198,79	Sangat Tinggi
02:1 3:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	%	13,12	17,06	130,03	Sangat Tinggi
02:1 3:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan Baik	%	28,08	79,27	282,30	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
02:1 3:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	%	1,84	1,84	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0,00	0,00		Sangat Rendah
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					101,34	Sangat Tinggi
02:1 4:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	%	2,43	2,40	101,23	Sangat Tinggi
02:1 4:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan pemakaian kontrasepsi	%	68,36	71,98	105,30	Sangat Tinggi
02:1 4:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	82,76	88,47	106,90	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
17	DINAS PERHUBUNGAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					100,00	Sangat Tinggi
02:1 5:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,23	0,23	100,00	Sangat Tinggi
02:1 5:03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio	0,75	0,75	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					106,39	Sangat Tinggi
02:1 6:02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	60,00	97,74	162,90	Sangat Tinggi
02:1 6:03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	65,00	65,66	101,02	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100,00	Sangat Tinggi
02:2 0:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	66,00	66,00	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					150,57	Sangat Tinggi
02:2 1:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	65,00	97,87	150,57	Sangat Tinggi
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					192,40	Sangat Tinggi
02:1 7:02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 7:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 7:04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 7:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1,00	14,72	1472,00	Sangat Tinggi
02:1 7:06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	3,00	5,70	190,00	Sangat Tinggi
02:1 7:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	7,50	7,58	101,07	Sangat Tinggi
02:1 7:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,60	2,94	113,08	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	90,9	90,90	Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	94	94,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	25	25,00	Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					101,04	Sangat Tinggi
02:1 8:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Peta Potensi Investasi Daerah Berbasis Digital	Kecamatan	8,00	8,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 8:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	9,74	5,01	51,44	Rendah
02:1 8:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 8:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Penanaman Modal	%	16,23	24,61	151,63	Sangat Tinggi
02:1 8:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Investasi yang memenuhi Standar Persyaratan OSS	%	55,00	60,75	110,45	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
21	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					100,00	Sangat Tinggi
02:1 9:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penyeragaman, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	16,00	16,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 9:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:1 9:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100,00	Sangat Tinggi
02:2 2:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
02:2 2:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
02:2 2:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi
02:2 2:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi
02:2 2:06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					115,70	Sangat Tinggi
02:2 3:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	60,00	76,93	128,22	Sangat Tinggi
02:2 3:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara dan naskah kuno yang diinventarisasi dan dilestarikan	Eksemplar	630,00	650,00	103,17	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					101,93	Sangat Tinggi
02:2 4:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	70,00	86,82	124,03	Sangat Tinggi
02:2 4:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	%	70,00	66,67	95,24	Sangat Tinggi
02:2 4:04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	70,00	0,00		Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
23	DINAS PERIKANAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIKANAN					106,27	Sangat Tinggi
03:2 5:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	2,00	3,20	160,00	Sangat Tinggi
03:2 5:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2,00	2,04	102,00	Sangat Tinggi
03:2 5:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	2,00	2,10	105,00	Sangat Tinggi
03:2 5:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2,00	2,04	102,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
24	DINAS PARIWISATA						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					207,58	Sangat Tinggi
03:2 6:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dibangun	%	4,00	-33,33	-833,25	Sangat Rendah
03:2 6:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Daya Tarik Wisata	%	5,00	94,44	1888,80	Sangat Tinggi
03:2 6:04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan prasarana dan ekosistem ekonomi kreatif	%	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
03:2 6:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	10,00	42,78	427,80	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
25	DINAS PERTANIAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
26	DINAS PETERNAKAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					80,00	Tinggi
03:2 7:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	5,00	12,00	-40,00	Sangat Rendah
03:2 7:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
03:2 7:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:2 7:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					100,00	Sangat Tinggi
03:2 9:05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase layanan fasilitasi izin pemanfaatan panas bumi daerah	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					99,15	Sangat Tinggi
03:3 0:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran perusahaan yang Difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:3 0:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:3 0:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
03:3 0:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Produk daerah Siap Ekspor	%	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi
03:3 0:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	39,00	35,00	89,74	Tinggi
03:3 0:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk unggulan Lokal yang masuk pusat sarana distribusi perdagangan	Produk	18,00	18,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					100,00	Sangat Tinggi
03:3 1:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah IKM Mandiri	%	9,81	9,81	100,00	Sangat Tinggi
03:3 1:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha	%	1,96	1,96	100,00	Sangat Tinggi
03:3 1:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang melaporkan data industry melalui akun SIINAS	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
28	SEKRETARIAT DAERAH						
	SEKRETARIAT DAERAH					102,15	Sangat Tinggi
04:0 1:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	13,00	11,46	88,15	Tinggi
		Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana	%	100,00	157,00	157,00	Sangat Tinggi
		Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	%	89,50	90,30	100,89	Sangat Tinggi
04:0 1:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skoring LPPD Kabupaten	Poin	3,70	3,39	91,62	Sangat Tinggi
		Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100,00	94,44	94,44	Sangat Tinggi
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	%	75,00	90,48	120,64	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
04:01:03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian yang terlaksana	%	100,00	90,91	90,91	Tinggi
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi	%	97,00	96,38	99,36	Sangat Tinggi
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Predikat	Startegis	Strategis	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan	%	27,00	27,00	100,00	Sangat Tinggi
29	SEKRETARIAT DPRD						
	SEKRETARIAT DPRD					100,00	Sangat Tinggi
04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	%	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Umum	%	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran	%	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	0	0		Sangat Rendah
		terlaksannya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					Sangat Rendah
		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD					Sangat Rendah
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
	PERENCANAAN					96,75	Sangat Tinggi
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
05:01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	25,76	23,02	89,36	Tinggi
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	26,57	23,93	90,06	Tinggi
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	26,84	21,90	81,59	Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					160,00	Sangat Tinggi
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	%	62,50	100,00	160,00	Sangat Tinggi
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	KEUANGAN					100,26	Sangat Tinggi
05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah	%	93,50	96,38	103,08	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Aset daerah	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	KEUANGAN					99,84	Sangat Tinggi
05:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	4,73	4,66	98,52	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						
	KEPEGAWAIAN					104,30	Sangat Tinggi
05:0 3:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi kualifikasi	Nilai	13,40	21,04	157,01	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Pegawai Akibat Pemberhentian	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Ketersuaian Jabatan dengan Kualifikasi dan Kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Nilai Dimensi Disiplin dan Kinerja	Nilai	28,00	30,30	108,21	Sangat Tinggi
05:0 4:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	30,00	27,19	90,63	Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
34	INSPEKTORAT						
	INSPEKTORAT DAERAH					100,00	Sangat Tinggi
06:0 1:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,30	3,30	100,00	Sangat Tinggi
06:0 1:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
35	KECAMATAN						
	UNSUR KEWILAYAH					99,52	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	%	92,13	90,57	98,31	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	99,99	99,99	Sangat Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	%	20	20,6	97,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	%	92,13	90,67	98,42	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
08:01:02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	indeks	82,50	85,70	103,88	Sangat Tinggi
08:01:03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	77,00	72,00	93,51	Sangat Tinggi
08:01:04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Profesionalisme Ormas	Indeks	71,50	73,00	102,10	Sangat Tinggi
08:01:05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Indeks	70,50	71,31	101,15	Sangat Tinggi
08:01:06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	%	25,00	27,78	111,12	Sangat Tinggi
	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

2.2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut. faktor-faktor pendukung pencapaian target-target kinerja tersebut, antara lain yaitu:

- a. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- b. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan;
- c. Adanya dukungan pendanaan dari APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan sumber dana lainnya seperti Corporate Social Responsibility (SCR);
- b. Tingginya komitmen perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kinerja;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi;
- d. Penerapan teknologi dan inovasi pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja;
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di RKPD maupun APBD Tahun 2024.

Adapun beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Penyimpanan Anggaran kas/Cash Budget rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran
- b. Terjadinya keterlambatan pencairan karena penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan, dimana kondisi aplikasi tersebut belum bisa digunakan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah yang ada di seluruh Indonesia.
- c. Kegiatan yang bersumber dari DAK fisik belum dapat terserap, secara administrasi dan reviu sudah dilakukan, menunggu salur tahap ke-2 dari RKUN ke RKUD
- d. Kegiatan yang bersumber dari Bankeu Kompetitif baru salur ke RKUD pada hari selasa tanggal 1 oktober 2024
- e. Kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang belum sampai tahap SPH Tanah
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri: Untuk DAK non Fisik sesuai aturan/Pedoman DAK harus dipindahkan ke Sub Kegiatan Penguatan, Kegiatan Kajian di dalam RKPD baru masuk bulan Agustus/RKPD Perubahan, oleh karenanya Kegiatan Kajian mulai akan dilaksanakan pada bulan oktober.
- g. Beberapa kegiatan tidak akan dilaksanakan pada Dinas Pariwisata seperti kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, karena terjadi banjir rob di lokasi kegiatan dan

- kegiatan Event Surfing kegiatannya berbarengan dengan pilkada, ada isu megathrust, ketidaksiapan panitia lokal serta kondisi cuaca yang tidak memungkinkan
- h. Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, yaitu aktivitas penyusunan FS Pengembangan Wisata di Kawasan Geopark Ciletuh sebesar Rp. 1.465.000.000 tidak akan diserap karena tidak ada di RKPD dan dialihkan pada Rancangan Perubahan RKA 2024 oleh TAPD
 - i. Terjadinya bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi mengakibatkan beberapa objek wisata yang biasa dikunjungi di hari libur sekolah maupun tahun baru tidak dapat dikunjungi.
 - j. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait;
 - k. Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/provinsi.
 - l. Rendahnya kapasitas fiskal APBD Kabupaten Sukabumi.

2.2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa perhitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu: (1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia), dan ;(2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar. Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Dan untuk indeks pencapaian SPM dikelompokkan menjadi beberapa kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.108. Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Terhadap Capaian Mutu Minimal Dan Penerima Layanan Dasar

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
6	<60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Secara umum, penerapan SPM Kabupaten Sukabumi berdasarkan bidang sampai dengan tahun 2024, yakni: (1) Kategori Tuntas Utama pada Bidang Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Pekerjaan Umum; (2) Kategori tuntas utama pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Penerapan SPM per bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109. Penerapan SPM per Bidang Pada Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

No	SPM	Target (%)	IP SPM	%
1	Bidang Pendidikan	100,00	99,36	99,36
2	Bidang Kesehatan	100,00	99,10	99,10
3	Bidang Perumahan Rakyat	100,00	100,00	100,00
4	Bidang Trantibumlinmas	100,00	100,00	100,00
5	Bidang Sosial	100,00	98,01	98,01
6	Bidang Pekerjaan Umum	93,31	100,00	107,17



Gambar 2.89. Penerapan SPM per Bidang Pada Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Tabel 2.110. Capaian Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2024

Bidang Urusan	No	Jenis Pelayanan SPM	2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	99,13	99,13
	2	Pendidikan Dasar	100	99,29	99,29
	3	Pendidikan Kesetaraan	100	99,67	99,67
Trantibumlinmas	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100,00	100,00
	5	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100	100,00	100,00
	6	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100,00	100,00

Bidang Urusan	No	Jenis Pelayanan SPM	2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	7	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100,00	100,00
	8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100,00	100,00
Sosial	9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	98,46	98,46
	10	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	98,15	98,15
	11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	98,46	98,46
	12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	95,00	95,00
	13	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100	100,00	100,00
Pekerjaan Umum	14	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	94,04	100,00	106,34
	15	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	92,58	100,00	108,01
Perumahan Rakyat	16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	100	100,00	100,00
	17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	100	100,00	100,00
Kesehatan	18	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	97,69	97,69
	19	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	97,80	97,80
	20	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	99,64	99,64
	21	Pelayanan Kesehatan Balita	100	99,18	99,18
	22	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100,00	100,00

Bidang Urusan	No	Jenis Pelayanan SPM	2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	23	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	94,84	94,84
	24	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	100,00	100,00
	25	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100,00	100,00
	26	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100,00	100,00
	27	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100,00	100,00
	28	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100,00	100,00
	29	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	100,00	100,00

Capaian penerapan SPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 urusan pendidikan yakni untuk SPM Pendidikan Anak Usia Dini tercapai 99,13 persen, untuk Pendidikan Dasar sebesar 99,29 persen, dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 99,67 persen. Sedangkan Bidang Urusan Kesehatan yakni untuk SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tercapai sebesar 97,69 persen, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 97,80 persen, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 99,64 persen, Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 99,18 persen, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar 94,84 persen, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar 100 persen.

Untuk penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat, dengan jenis pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota tercapai sebesar 100 persen, dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota tercapai sebesar 100 persen. Sedangkan Bidang Pekerjaan Umum, untuk jenis pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari terealisasi sebesar 100 persen, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik terealisasi sebesar 100 persen.

Terkait capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Masyarakat pada tahun 2024, untuk jenia pelayanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai sebesar 100 persen, Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100 persen, Pelayanan informasi rawan bencana sebesar 100 persen, Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 100 persen, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100 persen.

Capaian SPM Kabupaten Sukabumi Urusan Sosial pada Tahun 2024, untuk Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar 98,46 persen, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sebesar 98,15 persen, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sebesar 98,46 persen, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 95 persen, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota sebesar 100 persen.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merujuk pada berbagai tantangan atau hambatan yang mengganggu atau memperlambat pencapaian tujuan pembangunan di suatu wilayah. Masalah-masalah ini dapat bersifat kompleks yang meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah mencerminkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan yaitu target pembangunan dan realitas yang ada di lapangan. Masalah pembangunan tidak hanya terkait dengan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah, tetapi juga dengan ketimpangan antar kelompok masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukabumi meliputi:

- a. Permasalahan ekonomi, yaitu:
 - Rendahnya produktivitas perekonomian daerah
 - Terbatasnya pertumbuhan investasi
 - Perdagangan daerah, dan ketahanan pangan yang belum merata.
- b. Permasalahan sosial, yaitu:
 - Ketimpangan kesejahteraan sosial daerah dan akurasi data kemiskinan
 - Belum optimalnya perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi maupun lingkungan

- Masih tingginya angka kekurangan gizi pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan keluarga miskin
 - Ketidakmerataan akses, kualitas dan koordinasi layanan kesehatan di seluruh wilayah, akibat keterbatasan infrastruktur, teknologi, tenaga kesehatan, serta sistem data yang terfragmentasi
 - Belum optimalnya ketahanan keluarga, perlindungan terhadap anak, kualitas sumberdaya pemuda, serta kesetaraan gender, yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan peluang ekonomi yang memadai
 - Ketimpangan akses dan mutu perlindungan antar wilayah serta kelompok sosial, menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pendidikan berkualitas yang merata
- c. Permasalahan infrastruktur, yaitu:
- Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar belum optimal dan merata
 - Masih rendahnya kualitas infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- d. Permasalahan lingkungan, yaitu:
- Kualitas lingkungan hidup masih rendah, dengan tingkat resiko bencana yang masih tinggi, minimnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan persampahan, sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan (sektoral) belum optimal, penanganan permasalahan pertanahan belum optimal, dan kualitas lingkungan relatif rendah
 - Tekanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal
- e. Permasalahan pemerintahan, yaitu:
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif
 - Belum meratanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil serta pemanfaatan teknologi digital

Secara lebih rinci uraian mengenai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111. Pemetaan Masalah Berdasarkan Kondisi Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Permasalahan	Urusan
Insentif yang menarik bagi investasi di bidang industri masih terbatas	Penanaman Modal
Daya saing produk lokal masih rendah	Perindustrian dan Perdagangan
Masih rendahnya kapasitas SDM Pelaku IKM	Perindustrian
Digitalisasi Industri kecil dan menengah belum berjalan optimal	Perindustrian
Terbatasnya penggunaan teknologi hilirisasi pada pelaku IKM	Perindustrian
Kemitraan antara IKM dengan Industri besar belum berjalan optimal	Perdagangan
Pembangunan IKM masih parsial karena belum berbasis sentra	Perindustrian
Masih lemahnya tata kelola pariwisata berkelanjutan terutama dalam perencanaan dan pengelolaan	Pariwisata
Belum optimalnya pengembangan wisata minat khusus berbasis sumber daya alam	Pariwisata
Pengembangan atraksi wisata masih didominasi skala lokal	Pariwisata
Sarana prasarana destinasi wisata masih terbatas	Pariwisata
Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih lemah	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif masih lemah	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kerjasama dengan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Ruang Kreatif masih terbatas	Ekonomi Kreatif
Daya saing produk ekraf masih rendah	Ekonomi Kreatif
Promosi produk ekonomi kreatif masih terbatas	Ekonomi Kreatif
Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan	Pertanian, Peternakan, Perikanan
Masih rendahnya adopsi teknologi dan pemahaman manajemen modern	Pertanian, Peternakan, Perikanan
Rantai pasok usaha pertanian dan perikanan belum optimal.	Pertanian, Peternakan, Perikanan
Masih rendahnya kapasitas SDM petani, peternak dan pelaku usaha perikanan	Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Terbatasnya ketenagaan Penyuluh	Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Masih lemahnya kemitraan agribisnis	Pertanian, Peternakan dan Perikanan
SDM UMKM masih lemah	UMKM
Pemasaran produk UMKM masih terbatas serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan pengelolaan UMKM	UMKM
Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk UMKM	UMKM
Lemahnya SDM Pengurus Koperasi	Koperasi
Tidak terserapnya angkatan kerja dengan kategori tenaga kerja rentan akibat keterbatasan yang dimiliki	Tenaga Kerja
Lapangan kerja yang tidakseimbang dengan jumlah penduduk pencari kerja.	Tenaga Kerja
Persaingan kerja yang kompetitif.	Tenaga Kerja
Terbatasnya peluang dan pelatihan pendidikan dan keterampilan kerja.	Tenaga Kerja
Adanya krisis global dan kesempatan kerja yang sedikit/terbatas	Tenaga Kerja

Permasalahan	Urusan
Belum optimalnya promosi investasi daerah, baik skala nasional maupun global	Penanaman Modal
Insentif yang menarik bagi investasi di bidang industri masih terbatas	Penanaman Modal
Belum optimalnya pemetaan potensi investasi daerah	Penanaman Modal
Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan ekspor	Perdagangan
Daya saing produk lokal masih rendah	Perdagangan
Belum optimalnya Kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil dengan toko modern dan perusahaan ekspor	Perdagangan
Minimnya ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh masyarakat dengan fungsi ganda sebagai ruang publik	Lingkungan Hidup
Aktivitas masyarakat yang berlebihan mengganggu kualitas dari perairan umum daratan (PUD)	Lingkungan Hidup
Tantangan Perubahan Iklim, Degradasi Lahan, dan Keterbatasan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup
Penurunan Sumber Air dan Tutupan Lahan yang Mengecil, Mempengaruhi Ketersediaan Air Tanah untuk Sawah	Lingkungan Hidup
Penurunan Sumber Air dan Tutupan Lahan yang Mengecil, Mempengaruhi Ketersediaan Air Tanah untuk Sawah	Lingkungan Hidup
Masih rendahnya aktivitas reduce, reuse, dan recycle akibat tidak terasanya insentif bagi masyarakat	Lingkungan Hidup
Tidak seimbangnya jumlah sampah yang masuk dengan sampah yang diolah di tempat pembuangan akhir	Lingkungan Hidup dan Sosial
Perubahan dan perbedaan data serta kepastian penerima bantuan sosial sering menimbulkan masalah	Sosial
Pengelolaan data PPKS dan DTKS penerima Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin belum optimal.	Sosial
Kurangnya implementasi dalam pembangunan kawasan sebagai trigger untuk pembangunan daerah	Pangan
Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana ketersediaan pangan (lumbung pangan)	Pangan
Belum optimalnya diversifikasi Pangan Lokal	Pangan
Kerentanan Terhadap Fluktuasi Harga Pangan	
Belum meratanya pemahaman masyarakat akan prioritas pemenuhan pangan bagi keluarga	Pangan
Masih rendahnya pemahaman Keamanan dan Kualitas Pangan	Pangan
Banyaknya jumlah PMKS/ PPKS.	Sosial
Pengelolaan data PPKS dan DTKS penerima Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin belum optimal.	Sosial
Perubahan dan perbedaan data serta kepastian penerima bantuan sosial sering menimbulkan masalah	Sosial
Belum optimalnya peran serta PSKS dalam penanganan PPKS/PMKS.	Sosial
Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak.	Sosial
Calon transmigran yang biasanya dari warga miskin belum memiliki keterampilan.	Sosial
Lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk pencari kerja, khususnya untuk warga miskin	sosial
Masyarakat miskin sering tidak memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan atau peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan.	Sosial
Ketergantungan pada bantuan sosial dan masalah kesehatan mental.	Sosial dan kesehatan
Tingginya beban ekonomi masyarakat miskin akibat terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar yang terjangkau dan program bantuan sosial yang belum optimal.	Sosial
Kurangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengelola pengeluaran dan memanfaatkan sumber daya secara efisien.	Sosial
Beban pengeluaran untuk akses layanan kesehatan dan pendidikan sering kali menjadi kendala utama bagi keluarga miskin.	Sosial dan pendidikan

Permasalahan	Urusan
Keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok yang terjangkau	Sosial
Akses terhadap air bersih, listrik, transportasi, dan fasilitas publik lainnya sering kali tidak memadai di kantong-kantong kemiskinan.	Sosial
Adanya perubahan pola pikir masyarakat mengenai transmigrasi.	Transmigrasi
Program transmigrasi belum tersosialisasi ke semua lapisan masyarakat.	Transmigrasi
Konsentrasi kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu akibat keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang berkelanjutan	Sosial
Kurangnya optimalisasi potensi sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi lokal, yang mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.	Pertanian
Keterbatasan perencanaan kawasan yang terfokus pada tema tertentu	Pertanian
kurangnya pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi lokal yang terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan	Perekonomian
Pembangunan kawasan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan pola ruang yang ditetapkan	Infrastruktur
Kurangnya fasilitas penyimpanan hasil panen	Pangan
Minimnya cadangan pangan pemerintah	Pangan
Ketergantungan yang berlebihan pada satu jenis bahan pangan, seperti beras, dapat meningkatkan risiko ketahanan pangan saat terjadi gangguan pasokan atau produksi	Pangan
Banyak masyarakat masih menghadapi risiko kelangkaan atau kesenjangan akses terhadap bahan makanan, baik karena distribusi yang tidak merata maupun karena ketergantungan pada bahan pokok tertentu.	Pangan
Potensi lokal seringkali kurang dimanfaatkan akibat kebijakan yang lebih berfokus pada sumber daya dari luar daerah.	Pangan
Produk lokal sering kali terbatas pada bentuk mentah dan kurang dieksplorasi untuk pengembangan produk olahan yang bernilai tambah.	Pangan
Banyak kebijakan belum secara efektif melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga mereka tidak sepenuhnya diberdayakan.	Pangan
Banyak keluarga yang belum memahami bagaimana ketahanan pangan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka.	Pangan
Kurangnya edukasi mengenai pentingnya pola makan yang beragam dan seimbang sering kali menyebabkan asupan gizi yang tidak mencukupi.	Pangan dan Kesehatan
Tidak semua masyarakat memiliki akses atau keinginan untuk mengikuti program-program pemberdayaan terkait ketahanan pangan akibat minimnya informasi atau kepercayaan diri.	Pangan dan Kesehatan
Tingginya prevalensi kekurangan gizi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu	Pangan dan Kesehatan
Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi rendah tidak mampu membeli makanan bergizi yang cukup, sehingga memerlukan intervensi berupa pemberian makanan tambahan	Pangan dan Kesehatan
Kampanye pola makan sehat yang ada belum menjangkau masyarakat secara luas atau belum dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.	Pangan dan Kesehatan

Permasalahan	Urusan
Banyak calon pengantin (Catin), ibu hamil, dan keluarga tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pentingnya nutrisi dalam pola makan sehari-hari.	Pangan dan Kesehatan
Banyak individu, seperti keluarga miskin, lansia, dan anak-anak, berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengakses bahan pangan bergizi secara cukup.	Pangan dan Kesehatan
Daerah terpencil atau dengan infrastruktur yang kurang memadai sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan distribusi pangan yang memadai.	Pangan dan Kesehatan
Angka malnutrisi, termasuk stunting dan wasting, tetap tinggi di berbagai kelompok masyarakat, menghambat kesehatan dan produktivitas.	Pangan dan Kesehatan
Air Minum Layak belum menjangkau seluruh wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelayanan Air Minum Layak Belum Optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Belum Optimal (Kewenangan ? Propinsi)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
diperlukan pemenuhan kebutuhan air minum aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terdapat perilaku masyarakat dalam membuang sampah/limbah domestik yang belum sesuai	Lingkungan Hidup
Belum adanya IPLT di Kabupaten Sukabumi	Lingkungan Hidup
Cakupan pelayanan sanitasi masih jauh dibawah target nasional dan belum merata di seluruh wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penataan kawasan permukiman dan perumahan belum optimal	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Belum tersedia masterplan Kawasan Perkim dan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Masih terdapat kawasan kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Belum optimalnya PSU perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Akses jalan sebagai konektivitas antar wilayah belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
belum optimalnya penatausahaan aset infrastruktur jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
belum optimalnya infrastruktur jalan dalam mendukung pertumbuhan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tingkat kemantapan jalan masih rendah dan di bawah rata-rata jalan kabupaten/kota di Jawa Barat, Provinsi dan Nasional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
prasarana bangunan pelengkap jalan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kualitas dan daya tahan jalan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
belum optimalnya alokasi anggaran untuk kemantapan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
belum adanya pendayagunaan alternatif bahan material lainnya dalam pembangunan jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
keterpaduan lintas sektor dalam pembangunan jalan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tingkat kemantapan jaringan jalan penghubung menuju pusat kegiatan/kota masih rendah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masih terdapat jembatan yang rusak;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masih terdapat jalan yang tidak sesuai standar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
kondisi kemantapan jalan untuk mendukung kawasan agribisnis belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aksesibilitas menuju kawasan wisata rendah dikarenakan belum optimalnya penanganan jalan yang mendukung sektor pariwisata serta pembangunan jalan jalur pariwisata belum menjadi prioritas	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan	Urusan
Penanganan Akses Jalan Mendukung Pariwisata belum memadai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Infrastruktur penunjang pariwisata belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masih rendahnya kondisi Jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Infrastruktur jaringan irigasi belum optimal untuk mendukung sektor pertanian	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rekayasa lalu lintas kurang optimal	Perhubungan
Masih terdapat daerah rawan kecelakaan	Perhubungan
Sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal	Perhubungan
Perencanaan dan sistem jaringan transportasi belum optimal	Perhubungan
Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas di Kabupaten Sukabumi	Perhubungan
Belum optimalnya penataan transportasi di jalur utama	Perhubungan
Belum optimalnya rekayasa lalu lintas karena keterbatasan jalur jalan	Perhubungan
Minimnya Penataan jalur arteri wilayah utara dalam mengatasi kemacetan.	Perhubungan
Keterpaduan lintas sektor dalam pembangunan jalan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar jalan arteri belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mixed traffic lalu lintas lokal	Perhubungan
Kinerja layanan transportasi umum belum optimal	Perhubungan
Simpul transportasi perairan belum optimal	Perhubungan
Pengawasan dan pengendalian perairan belum optimal	Perhubungan
Belum adanya moda transportasi umum terintegrasi di kawasan wisata	Perhubungan
Belum optimalnya integrasi dan penggunaan moda transportasi umum	Perhubungan
Adanya pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang	Perhubungan
Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek dan tidak dalam trayek	Perhubungan
Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Perhubungan
Masih tingginya pelanggaran ODOL	Perhubungan
Belum optimalnya pemanfaatan Transportasi laut dan sungai	Perhubungan
Navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran belum optimal	Perhubungan
SDM ASDP kurang memadai	Perhubungan
Fasilitas sarana dan infrastruktur ASDP kurang memadai di kawasan CPUGGp	Perhubungan
Prasarana jalan untuk lalu lintas terusan belum optimal pada kawasan strategis pariwisata	Perhubungan
Perlengkapan jalan yang memadai	Perhubungan
Minimnya rambu-rambu lalu lintas	Perhubungan
Belum optimalnya terminal dalam mendukung pelayanan transportasi	Perhubungan
terminal wisata perlu pemeliharaan	Perhubungan
Ketersediaan PJU pada jalan akses menuju objek wisata belum optimal	Perhubungan

Permasalahan	Urusan
Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
belum adanya mekanisme tersistem dan terstruktur dalam pengaturan, pengelolaan, penguasaan tanah atau ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Data spasial di setiap sektor/PD belum sesuai bidang tugasnya dan belum terstandarisasi;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber daya manusia di bidang pengelolaan data spasial masih kurang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Basis data di bidang pertanahan belum detail dan lengkap	Pertanahan
skala prioritas pengadaan tanah bagi kepentingan umum belum ada	Pertanahan
Legalitas aset tanah pemda belum tertib	Pertanahan
data spasial pertanahan yang terintegrasi dengan sektor/bidang lain belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
inventarisasi pertanahan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penggunaan data spasial untuk mendukung pembangunan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsistensi RTRW dan RDTR dalam penataan ruang belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penataan ruang dalam mendukung investasi masih rendah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perencanaan ruang wilayah belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
pengawasan pemanfaatan lahan dan/atau penertiban bangunan belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemanfaatan lahan belum sesuai peruntukan rencana tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana program belum sejalan dengan rencana tata ruang.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Minimnya penyediaan data spasial dalam menunjang penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan hirarki sistem pusat-pusat permukiman belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan infrastruktur belum sejalan dengan sistem pusat – pusat permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerataan pusat kegiatan ekonomi belum optimal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Adanya perubahan dan alih fungsi tutupan lahan	Lingkungan Hidup
Pengelolaan kawasan lindung atau konservasi. belum optimal	Lingkungan Hidup
Realisasi luasan ruang terbuka hijau belum memenuhi target	Lingkungan Hidup
alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya.	Lingkungan Hidup
Pemulihan lahan bekas tambang belum optimal.	Lingkungan Hidup
Penegakan hukum atas degradasi lahan belum optimal.	Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan belum optimal.	Lingkungan Hidup
Masih terdapat pencemaran lingkungan.	Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan relatif rendah.	Lingkungan Hidup
Terdapat pencemaran lingkungan (air, udara, tanah)	Lingkungan Hidup
Kurangnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Lingkungan hidup
Tingkat risiko bencana tinggi di wilayah Kabupaten Sukabumi	Lingkungan hidup

Permasalahan	Urusan
Kurangnya penguatan kelembagaan pengelolaan sampah.	Lingkungan Hidup
Terdapat peningkatan sampah plastik per-tahun.	Lingkungan Hidup
Kurangnya armada pengangkutan sampah.	Lingkungan Hidup
Terdapat wilayah yang belum terlayani armada pengangkutan sampah	Lingkungan Hidup
Ketersediaan TPS yang belum merata	Lingkungan Hidup
belum optimalnya pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup
Pemilahan dan pemanfaatan sampah oleh masyarakat mulai rumah tangga belum optimal	Lingkungan Hidup
tingginya angka masyarakat yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena kendala ekonomi	Kesehatan
Pengeluaran kesehatan menjadi salah satu beban terbesar bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Kesehatan
Kurangnya akses kesehatan bagi kelompok rentan memperburuk indikator kesehatan	Kesehatan
terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.	Kesehatan
Kurangnya tenaga medis yang tersedia di daerah karena distribusi dokter yang belum merata	Kesehatan
fragmentasi data dan kurangnya koordinasi antar fasilitas kesehatan dalam pengelolaan informasi pasien dan pelayanan.	Kesehatan
Data pasien yang tidak terintegrasi menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi kurang efisien.	Kesehatan
Sistem informasi yang tidak terintegrasi menyulitkan pengawasan epidemiologi dan pengendalian penyakit.	Kesehatan
Ketersediaan obat kurang.	Kesehatan
Kasus TB dan MDR TB Meningkat	Kesehatan
kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis pariwisata	Kesehatan
rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di berbagai wilayah	Kesehatan
Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata mengakibatkan kualitas pelayanan yang berbeda-beda.	Kesehatan
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang resiko penyakit menular dan pencemaran lingkungan.	Kesehatan
Angka kematian bayi meningkat	Kesehatan
Angka kematian Ibu meningkat.	Kesehatan
Masih Banyak kasus yang berkaitan dengan balita gizi kurang	Kesehatan
Kurangnya edukasi yang memadai tentang pentingnya kebutuhan gizi pada setiap tahap kehidupan, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil.	Kesehatan
Fasilitas kesehatan di beberapa wilayah masih kurang layak untuk menangani kebutuhan masyarakat.	Kesehatan
Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan yang memadai.	Kesehatan
Peningkatan resiko terjadi gangguan kesehatan mental.	Kesehatan
kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan akses masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan mandiri.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rendahnya edukasi kesehatan menyebabkan prevalensi penyakit yang dapat dicegah.	Kesehatan
rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi seimbang	Kesehatan
Lemahnya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kurangnya peran lembaga kesehatan	Kesehatan
Minimnya keterlibatan lembaga kesehatan dalam program berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran kesehatan.	Kesehatan

Permasalahan	Urusan
Belum tersedia pusat pendidikan modern yang menjadi percontohan dari berbagai aspek sehingga bisa menjadi ikon pendidikan Kabupaten Sukabumi.	Pendidikan
Masih banyak sekolah dengan akreditasi di bawah B	Pendidikan
Masih terdapat guru khususnya pada jenjang PAUD dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1/D.IV.	Pendidikan
Masih terdapat guru yang belum bersertifikasi	Pendidikan
Guru berprestasi belum memiliki kesempatan untuk melakukan Pendidikan singkat dan praktik mengajar di luar negeri	Pendidikan
Masih banyak sarana prasarana pendidikan dengan kondisi rusak berat atau rusak total	Pendidikan
Daya tampung SMP masih rendah	Pendidikan
Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini, SD, dan SMP	Pendidikan
Rata-rata lama sekolah masih rendah	Pendidikan
Capaian Nilai Karakter saat ini berada pada posisi "Berkembang"	Pendidikan
Capaian Iklim Kebhinekaan saat ini berada pada posisi "Merintis".	Pendidikan
Metode pembelajaran yang kurang inovatif dan interaktif mengurangi minat belajar peserta didik dan efektivitas proses pendidikan.	Pendidikan
Minimnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dan karakter dalam kurikulum serta metode pembelajaran, mengakibatkan kurangnya pembentukan kepribadian yang kuat pada peserta didik	Pendidikan
Rendahnya dukungan dan apresiasi terhadap siswa yang berprestasi	Pendidikan
Minimnya edukasi formal maupun non-formal tentang literasi digital.	Pendidikan
Materi pembelajaran masih bersifat tekstual dan monoton	Pendidikan
Literasi diajarkan hanya sebagai tugas wajib, bukan sebagai keterampilan hidup	Pendidikan
Metode pembelajaran monoton (misalnya hanya lewat buku teks).	Pendidikan
Siswa lebih tertarik pada gadget daripada buku atau bahan bacaan edukatif	Pendidikan
Kurangnya kebiasaan membaca sejak dini di keluarga dan lingkungan sekolah	Pendidikan
Tidak ada program terstruktur untuk penguatan literasi di luar kelas	Pendidikan
Program literasi (seperti klub baca) jarang ada atau kurang diminati	Pendidikan
Konten literasi digital tersebar di berbagai sumber tanpa kurasi yang baik	Pendidikan
Kurangnya penggunaan multimedia (video, animasi, kuis interaktif).	Pendidikan
Tidak ada personalisasi konten berdasarkan kebutuhan pengguna	Pendidikan
Tidak ada ruang diskusi atau forum tanya jawab yang aktif.	Pendidikan
Kemampuan literasi dan numerasi masih di bawah kompetensi minimum	Pendidikan
Perpustakaan digital belum optimal.	Pendidikan
kapasitas penyimpanan masih kurang dan Keterbatasan kualitas metadata.	Pendidikan
Pengamanan data dan privasi pengguna masih rendah.	Pendidikan
kurangnya koleksi literasi yang memuat tema budaya lokal dan potensi wisata daerah	Pendidikan
Rendahnya minat baca masyarakat.	Pendidikan

Permasalahan	Urusan
Keterbatasan aksesibilitas terhadap fasilitas literasi	Pendidikan
Adanya kesenjangan pengetahuan antara generasi muda dan lanjut usia.	Pendidikan
Belum optimalnya sinergitas kelembagaan	Kebudayaan
Rendahnya kualitas dan daya saing SDM di bidang kebudayaan	Kebudayaan
Masih rendahnya upaya memajukan kebudayaan daerah terhadap objek memajukan kebudayaan dan pelestarian.	Kebudayaan
Belum optimalnya upaya pelestarian budaya.	Kebudayaan
Belum adanya pengakuan masyarakat adat	Kebudayaan
Masih rendahnya sinergitas antar bidang.	Kebudayaan
Masih rendahnya anggaran dalam pemajuan kebudayaan daerah dan pelestarian peninggalan sejarah serta cagar budaya.	Kebudayaan
Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang belum memadai dalam pengembangan kebudayaan	Kebudayaan
Kurangnya pemahaman mengenai arti penting nilai kebudayaan yang ada pada warisan budaya.	Kebudayaan
Pengembangan sekolah berbasis pariwisata di wilayah Geopark untuk menjadi sekolah budaya belum terlaksana secara maksimal	Kebudayaan
Belum memadainya sarana dan prasarana kebudayaan dalam mendukung aktivitas kebudayaan.	Kebudayaan
masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan tindak pidana orang	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belum optimalnya pemenuhan hak anak terlihat dari pencapaian Kabupaten layak anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap kasus kekerasan bagi anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
masih adanya variasi dalam menggunakan kontrasepsi.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih tingginya dan bervariasinya unmet need	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih rendahnya pengetahuan kesadaran remaja dan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih terdapat diskriminasi gender dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, di mana anak perempuan sering kali menghadapi lebih banyak hambatan dibandingkan anak laki-laki, seperti norma budaya, keterbatasan ekonomi, atau tanggung jawab domestik	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus anak didik berdasarkan gender, sehingga membatasi peluang untuk mengembangkan potensi individu	Pendidikan
Masih rendahnya persentase Perempuan di lembaga legislatif, sebagai manager, profesional, administrasi, dan teknisi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih belum optimalnya tata kelola kelembagaan gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rendahnya akses dan pemahaman terhadap program keluarga berencana menyebabkan tingginya angka kelahiran yang tidak terencana, yang berpengaruh langsung pada kemampuan keluarga untuk menjaga stabilitas.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan	Urusan
Tingginya Dinamika masyarakat dalam hal kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, judi online, tawuran dan berbagai bentuk negatif lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan saat ini	Pemuda dan Olahraga
Masih rendahnya dukungan dalam membangun sarana dan prasarana serta pembinaan prestasi olahraga.	Pemuda dan Olahraga
Masih rendahnya prestasi olahraga baik di kancan provinsi, nasional, maupun internasional.	Pemuda dan Olahraga
Masih rendahnya anggaran yang memadai dalam membangun sarana dan prasarana serta pembinaan prestasi olahraga.	Pemuda dan Olahraga
Masih rendahnya dukungan dalam kemajuan kapasitas pemuda di Kabupaten Sukabumi.	Pemuda dan Olahraga
Belum optimalnya penerapan intervensi sensitif dan spesifik pada keluarga rentan stunting	Keluarga Berencana
Masih rendahnya pemahaman terhadap keseimbangan gizi	Kesehatan
Sanitasi dan kebiasaan pola hidup yang bersih dan sehat yang belum dipahami dan diterapkan secara optimal	Kesehatan
Kurang optimalnya keikutsertaan Pejabat yang mengikuti Diklat Struktural (rata-rata 13,26% dalam 5 tahun terakhir)	Kepegawaian
Rendahnya proporsi ASN yang mengikuti Diklat Formal (hanya rata-rata 2,67% dalam 5 tahun terakhir)	Kepegawaian
Penempatan SDM aparatur tidak sesuai kompetensi.	Kepegawaian
Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip <i>good governance</i> .	Sekretariat Daerah
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal mendorong terwujudnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Sekretariat Daerah
Proporsi belanja operasi (termasuk belanja pegawai di dalamnya) terhadap keseluruhan belanja pada APBD relatif tinggi (rata-rata 70,11% dalam 4 tahun terakhir)	Keuangan
Relatif rendahnya PAD	Keuangan
Relatif rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	Keuangan
Penyusunan perumusan kebijakan belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data/bukti yang handal.	Sekretariat Daerah
Masih lemahnya atau kurangnya kesadaran/pengetahuan aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Trantibumlinmas
Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.	Sekretariat Daerah
Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.	Sekretariat Daerah
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum optimal.	Sekretariat Daerah
Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas, dan dapat tersusun tepat waktu	Sekretariat Daerah
fasilitasi dan pembinaan mental spiritual masyarakat masih belum optimal	Sekretariat Daerah
belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan	Pengawasan
Proses birokrasi yang manual dan tidak terintegrasi sering kali menyulitkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, proyek, dan kebijakan	Keuangan
Proses administrasi yang panjang dan tidak efisien menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya gratifikasi atau penyimpangan.	Pengawasan
Kurangnya integrasi data dan sistem antara lembaga pemerintah membuat koordinasi dan pengawasan menjadi tidak efektif.	Pengawasan
Belum jelasnya tolak ukur layanan berdasarkan tupoksi pada Renstra OPD	Perencanaan

Permasalahan	Urusan
Belum optimalnya penyusunan perencanaan berdasarkan kerangka penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis sesuai RPJMD	Perencanaan
Belum optimalnya penggunaan Renstra berbasis skenario, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan dan kompeten	Perencanaan
Pemekaran Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sarana dan Prasarana desa kurang memadai	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa dalam mendukung percepatan pembangunan desa menuju desa Mandiri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kurang optimalnya potensi ekonomi desa dan kawasan perdesaan karena belum tersedianya data yang terintegrasi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya Implementasi identifikasi potensi dan permasalahan desa dalam rencana pembangunan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Masih rendahnya jumlah Desa Mandiri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya Kinerja kelembagaan dalam Pengembangan kemandirian usaha ekonomi antar desa dan perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurunnya budaya gotong royong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya peningkatan kualitas hasil dan diseminasi kelitbangan dan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan
Kualitas pelayanan publik belum optimal.	Sekretariat Daerah
Kurangnya standarisasi proses layanan kependudukan.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Birokrasi masih terkesan rumit.	Sekretariat Daerah
Terbatasnya akses pelayanan online.	Komunikasi dan Informasi
Belum optimalnya e-Government.	Komunikasi dan Informasi
Belum optimalnya layanan sistem informasi kependudukan.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terbatasnya informasi publik aktivitas anggota DPRD.	Sekretariat DPRD
Koordinasi antar alat kelengkapan DPRD serta OPD mitra masih belum optimal.	Sekretariat DPRD
Belum optimalnya pencapaian target waktu pembahasan dan penetapan Perda.	Sekretariat DPRD
Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.	Sekretariat DPRD
Tata Kelola (Governance) administrasi dan pelaporan masih belum optimal.	Sekretariat Daerah
belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang pendidikan	Pendidikan
belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang kesehatan	Kesehatan
belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang sosial	Sosial
Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda	Trantibumlinmas
Masih kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda	Trantibumlinmas
Masih kurangnya koordinasi antar SKPD maupun lembaga terkait lainnya dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda.	Trantibumlinmas

Permasalahan	Urusan
Masih minimnya pola pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana serta pemenuhan kesejahteraan anggota Satlinmas desa	Trantibumlinmas
Tidak sepadannya Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang ada dengan luas wilayah dan jumlah penduduk	Trantibumlinmas
Kurangnya rambu-rambu peringatan bencana.	Trantibumlinmas
Kurangnya kerjasama dalam penanggulangan bencana.	Trantibumlinmas
Keterbatasan Sumber Daya penanggulangan bencana	Trantibumlinmas
Kurangnya Sistem Peringatan Dini yang Efektif.	Trantibumlinmas
Kurangnya Infrastruktur yang Tahan Bencana.	Trantibumlinmas
Isu pemekaran masih menjadi tuntutan masyarakat	Kewilayahan
Jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan sering menyebabkan keterlambatan atau ketidakefektifan pelayanan kepada masyarakat.	Kewilayahan
Layanan publik digital masih kurang	Komunikasi dan Informasi
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat	Komunikasi dan Informasi
Keterbatasan jaringan dan infrastruktur pendukung SPBE	Komunikasi dan Informasi
Integrasi sistem dan platform belum optimal	Komunikasi dan Informasi
Belum tersedianya penyimpanan data yang terintegrasi	Statistik
Belum optimalnya sistem aplikasi yang ada di Kabupaten Sukabumi	Komunikasi dan Informasi
Penyelenggaraan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum optimal	Komunikasi dan Informasi
Layanan publik digital masih kurang	Komunikasi dan Informasi
Keamanan data masih rentan	Komunikasi dan Informasi
Kurangnya pengelolaan penyimpanan data	Komunikasi dan Informasi
Kurangnya koordinasi dalam penyediaan layanan IT	Komunikasi dan Informasi

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, 2025

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2026 tidak terlepas dari gambaran kondisi perekonomian daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Gambaran kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu landasan dalam mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan masalah agar pembangunan daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun kondisi perekonomian pada bab ini terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, PDRB pengeluaran, inflasi, analisis sektor basis daerah, perkembangan dan tantangan daerah, serta target ekonomi makro daerah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.

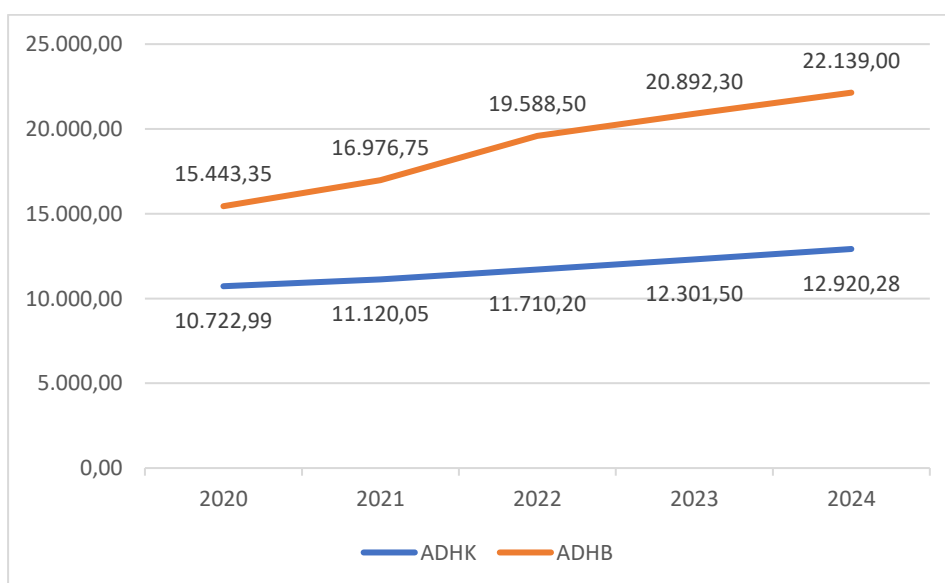
3.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Pada tingkat nasional, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Lebih lanjut dalam metode perhitungannya, PDB dibedakan menjadi PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Ditinjau dalam aspek yang lebih detail pada tingkat regional (Provinsi dan Kabupaten) terdapat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dalam periode tertentu, baik melalui pendekatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Struktur perekonomian Nasional tahun 2024 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya industri pengolahan sebesar 18,52 persen; pedagang besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,99 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,78 persen; pertambangan dan penggalian sebesar 8,78 persen; dan konstruksi sebesar 9,63 persen. Pada tahun 2024, sektor pertambangan Indonesia mengalami penurunan harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan dari pasar

internasional, tingginya curah hujan di Sumatera dan Kalimantan serta moderasi harga komoditas.

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, PDB Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten baik berdasarkan ADHK maupun ADHB. Pada pendekatan ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terpengaruh oleh inflasi, PDB meningkat dari Rp 10.722,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 12.920,28 triliun pada tahun 2024. Ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang stabil dan keberlanjutan pertumbuhan sektor-sektor utama. Sementara itu, berdasarkan pendekatan ADHB, yang mencerminkan nilai nominal ekonomi termasuk pengaruh inflasi, PDB tumbuh lebih tajam dari Rp 15.443,35 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 22.139,00 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Perkembangan PDB ADHK dan ADHB Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.1.



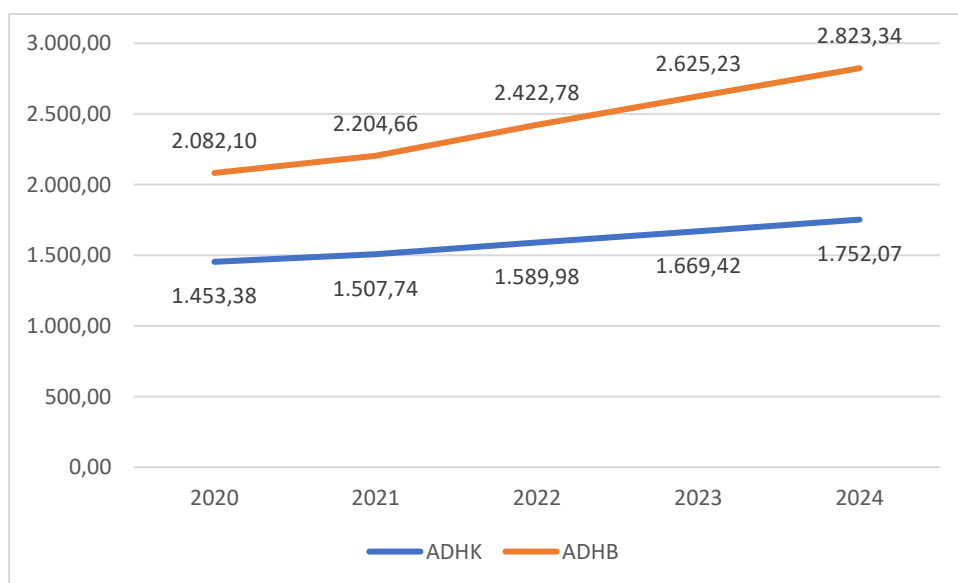
Gambar 3.1 Produk Domestik Bruto (PDB) C 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Beranjak pada PDRB Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ADHK dan ADHB menunjukkan pergerakan yang serupa dengan nasional. Pada tahun 2024, PDRB Provinsi Jawa Barat atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 1.752,07 triliun, sementara atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.823,34 triliun. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 4,95 persen secara kumulatif, ekonomi Provinsi Jawa Barat tetap menunjukkan performa yang positif.

Menguatnya ekonomi Provinsi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor ekonomi. Perekonomian di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dapat tumbuh baik sebesar 4,95 persen (*c-to-c*), hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata pada beberapa sektor ekonomi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,34 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dengan momen libur Natal dan Tahun Baru. Diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,73 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,20 persen; dan Jasa lainnya sebesar 7,93 persen.

Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu lapangan usaha yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,52 persen dan 4,85 persen. Produk Domestik Regional Bruto, ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

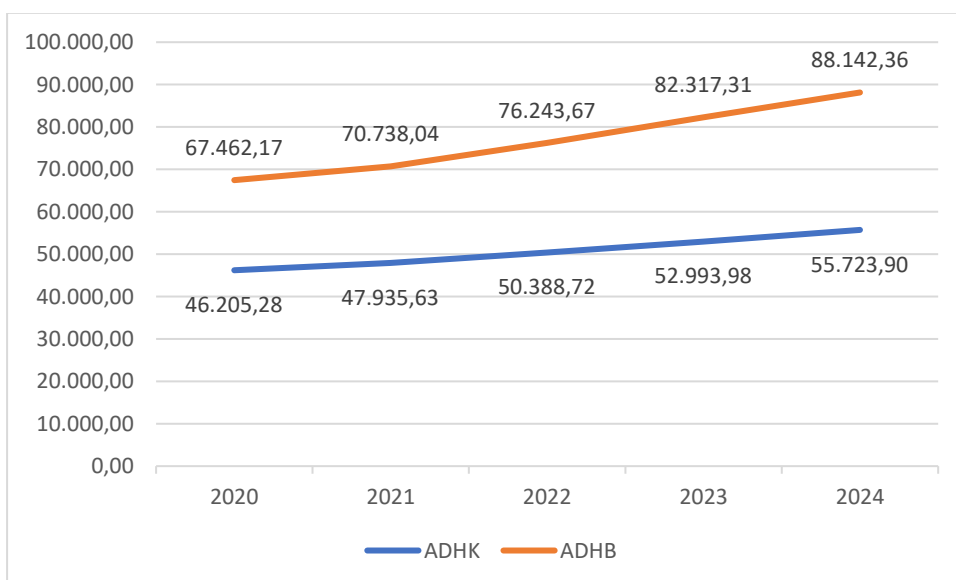


Gambar 3.2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sukabumi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai sebesar 22,58 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,14 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,25 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,95 persen serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,32 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 6 (enam) persen.

PDRB Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terpengaruh oleh inflasi, PDRB meningkat dari Rp 46.205,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp55.723,90 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan data ADHB, yang mencerminkan nilai nominal ekonomi termasuk pengaruh inflasi, PDRB tumbuh dari Rp67.462,17 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp88.142,36 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan dalam suatu negara dari waktu ke waktu. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing nasional, Indonesia berhasil mencatatkan pemulihan yang cukup kuat, ditunjukkan oleh peningkatan PDB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta didukung oleh berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Indonesia merupakan salah satu anggota G-20 karena dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang cukup baik selama ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejak mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian nasional terus bangkit, ditandai dengan meningkatnya nilai PDB baik secara riil maupun nominal. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan ekonominya, Indonesia perlu menelaah kondisi perekonomian global khususnya negara maju, negara berkembang dan negara lainnya di ASEAN.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang relatif moderat. Berdasarkan laporan World Economic Outlook dari International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai 3,2% pada tahun 2024, meningkat tipis dari capaian tahun 2023 sebesar 3,1%. Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 2,6% pada tahun yang sama, dengan sedikit peningkatan menuju 2,7% pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara tersebut dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2020-2024

Negara	2020	2021	2022	2023	2024
Amerika	-2.8	5.9	2.1	2.1	2,8
Arab Saudi	-5	4.4	7.9	3.4	1,7
Australia	-1.8	5.2	3.7	1.8	1,2
Filipina	-9.5	5.7	7.6	5.3	5,8
Indonesia	-2.1	3.7	5.3	5	5,0
Inggris	-11	7.6	4.1	0.5	0,9
Jepang	-4.2	2.2	1	2	-0,2
Kamboja	-3.1	3	5.2	5.6	5,5
Korea Selatan	-0.7	4.3	2.6	1.4	2,2
Malaysia	-5.5	3.3	8.7	4	4,8
Perancis	-7.7	6.4	2.5	1	1,1
Swiss	-2.3	5.4	2.7	0.9	0,9
Thailand	-6.1	1.5	2.6	2.7	2,7
Tiongkok	2.2	8.4	3	5	5,0
Vietnam	2.9	2.6	8	4.7	6,1

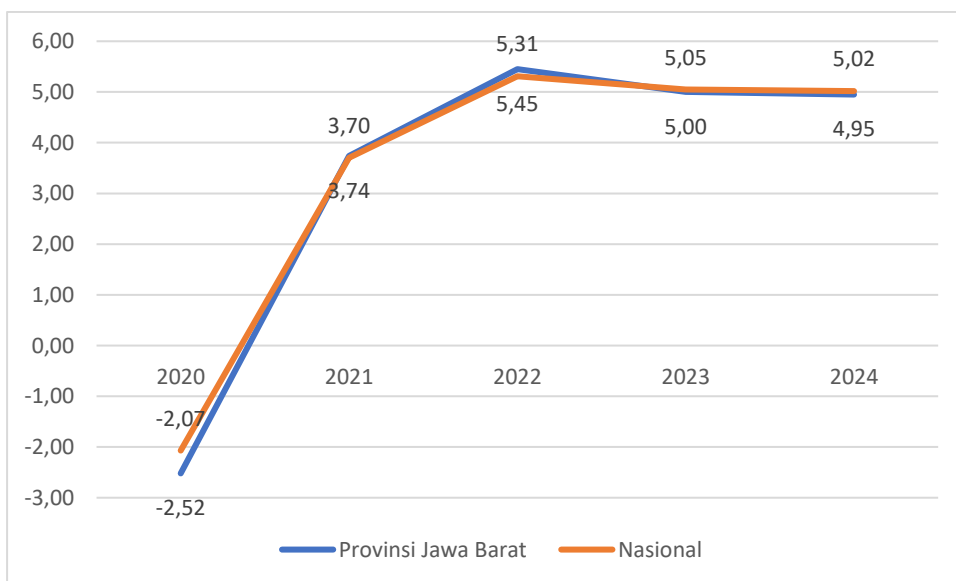
Sumber: *International Monetary Fund, 2025*

Berdasarkan data diatas, Perkembangan ekonomi global selama periode 2020 hingga 2024 mengalami dinamika yang signifikan, pemulihan yang cepat, serta perlambatan pertumbuhan yang terjadi secara bertahap di banyak negara. Pada tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, dengan mayoritas negara mengalami kontraksi tajam. Menurut Badan Kebijakan Fiskal pada tinjauan ekonomi, keuangan dan fiskal tahun 2024 menyebutkan kondisi ekonomi global tahun 2024 masih dibayangi oleh sejumlah tantangan struktural seperti ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, dan ketidakpastian pasar keuangan. Meskipun demikian, peluang pemulihan tetap terbuka, terutama bagi negara-negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan global melalui transformasi digital, diversifikasi ekonomi, serta penguatan kerja sama internasional.

Setiap negara di dunia telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam merancang kembali sistem perekonomian nasional pasca terjadinya krisis global, disrupsi rantai pasok, krisis energi, serta ketegangan geopolitik internasional. Upaya tersebut pada umumnya mencakup kebijakan pemulihan ekonomi jangka pendek melalui stimulus fiskal dan moneter, antara lain pemberian bantuan sosial, subsidi, serta insentif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Disamping itu, banyak negara juga mulai mengarahkan perhatian pada reformasi struktural jangka panjang, termasuk digitalisasi sektor ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan kesehatan, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan.

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil di tengah tantangan global yang masih berlangsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,02 persen, sedikit melambat dibandingkan

tahun sebelumnya yang mencapai 5,05 persen. Meskipun terjadi perlambatan, angka ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal, seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, serta fluktuasi harga komoditas global. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (YoY) (Persen) dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (YoY) (%)

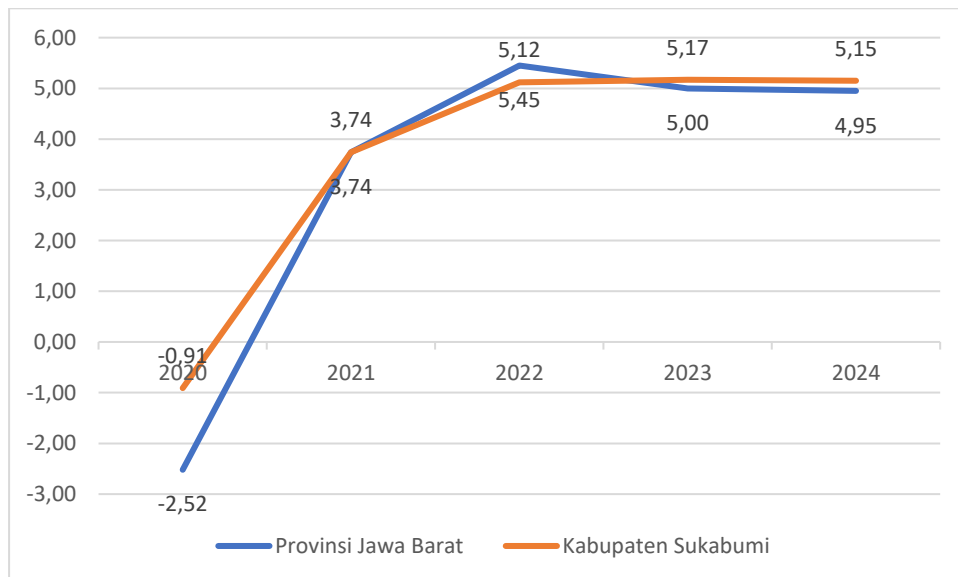
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Barat yang positif sebagaimana tergambar di atas merupakan hasil dari penanganan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, termasuk kemampuan berinovasi dan bertahan dari masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal yang terarah dan reformasi struktural, termasuk percepatan transformasi digital, penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Dengan landasan kebijakan yang adaptif dan responsif, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh secara positif dan inklusif dalam jangka menengah.

Bila meninjau laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif meskipun terdapat fluktuasi tahunan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat mengalami kontraksi ekonomi. Namun, sejak tahun 2021, perekonomian Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan pemulihan yang signifikan. Kabupaten Sukabumi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi tumbuh sebesar 5,15 persen, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat yang tumbuh 4,95 persen. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi tetap menunjukkan tren positif. Kondisi ini mencerminkan ketahanan ekonomi yang baik di tengah tantangan global dan domestik.

Secara sektoral dengan pertumbuhan yang paling tinggi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 berasal dari sektor transportasi dan pergudangan. Sektor tersebut apabila ditelaah

mengindikasikan aktivitas jasa (tersier) yang tumbuh menguat di Kabupaten Sukabumi dibandingkan sektor primer khususnya pertanian. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3.1.3 Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran

Produk Domestik Bruto (PDB) / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak hanya dilihat dari lapangan usaha tetapi juga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran. Pendekat ini melihat besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani Rumah Tangga, dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor).

Pertumbuhan terjadi pada semua komponen PDB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-LNPRT sebesar 12,48 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 6,61 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,51 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 7,95 persen. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Indonesia didominasi oleh Komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 54,04 persen. Komponen PMTB memiliki kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 29,15 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,18 persen; Komponen PK-P sebesar 7,73 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama dan terus meningkat dari Rp 5.780,2 triliun pada 2020 menjadi Rp 6.806,4 triliun pada 2024, mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat. Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) juga tumbuh stabil, mencapai Rp 4.001,7 triliun pada 2024. Konsumsi pemerintah, ekspor, dan perubahan inventori turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan, meskipun dibayangi oleh peningkatan impor.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB ADHB Provinsi Jawa Barat menunjukkan arah yang positif, dengan konsumsi rumah tangga dan PMTDB sebagai penggerak utama. Namun, peningkatan impor dan perlambatan laju pertumbuhan di beberapa sektor menandakan pentingnya diversifikasi dan penguatan ekonomi domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran berdasarkan harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Produk Domestik Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah	5.780,2	5.896,6	6.187,9	6.486,3	6.806,4
Konsumsi LNPRRT	130,3	132,4	139,9	153,7	173,1
Konsumsi Pemerintah	874,1	911,3	870,5	896,2	956,6
Pembentukan Modal Tetap Tangga Domestik Bruto	3.419,1	3.549,2	3.686,5	3.848,7	4.001,7
Perubahan Inventori	51,3	62,7	70,7	127,7	246,7
Ekspor Barang dan Jasa	2.083,9	2.458,8	2.858,0	2.895,8	3.085,1
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.686,0	2.105,1	2.420,7	2.380,9	2.571,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perekonomian Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan yang bertahap berdasarkan pendekatan pengeluaran atas dasar harga konstan. Komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, yang terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan pulihnya daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi domestik. Peningkatan juga terlihat pada pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) dan pengeluaran konsumsi pemerintah, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan angka yang positif, menandakan adanya peningkatan investasi dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, net ekspor antar daerah mengalami peningkatan, menggambarkan semakin baiknya konektivitas dan perdagangan antarwilayah di dalam provinsi. Sementara itu, perubahan inventori mengalami fluktuasi, namun pada 2024 kembali menunjukkan angka positif, mencerminkan adanya perbaikan dalam manajemen

persediaan dan rantai pasok barang. Adapun Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	894,1	905,9	948,3	998,9	1.048,9
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,9	9,1	9,4	10,7	11,6
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	71,4	73,1	71,8	75,6	77,1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	336,2	357,9	359,0	386,7	413,6
Perubahan Inventori	16,1	8,4	1,3	1,1	7
Net Ekspor Antar Daerah	126,4	169,9	199,9	196,1	199,9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan nilai. Sebagaimana nasional dan provinsi, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikoreksi dengan aktivitas pada tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan mencapai 0,04 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	28,768.02	29,253.68	30,630.38	32,140.49	33,7070.46
Konsumsi LNPRT	231.89	236.47	246.75	282.65	303.73
Konsumsi Pemerintah	2,341.29	2,395.87	2,361.75	2,477.96	2,402.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,590.38	13,471.70	13,561.34	14,366.01	15,335.09
Perubahan Inventori	816.59	- 416.35	69.87	57.36	35.92
Net Ekspor	1,457.11	2,994.26	3,518.63	3,669.50	3,939.20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data tersebut, perekonomian mengalami dinamika serta pemulihan setelahnya. Sebagai komponen utama pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan pada tahun 2020, namun secara konsisten menunjukkan pemulihan hingga 2024, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Konsumsi LNPRT tetap menunjukkan kontribusi yang stabil dengan pertumbuhan yang moderat. Di sisi lain, konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi, yang mencerminkan perubahan prioritas kebijakan anggaran. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang sempat mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 akibat ketidakpastian ekonomi, mulai pulih secara bertahap seiring meningkatnya kepercayaan investor. Perubahan inventori mencatat volatilitas tinggi, termasuk penurunan signifikan pada tahun 2021, yang menunjukkan dampak penyesuaian pada rantai pasokan. Sementara itu, net ekspor menunjukkan perbaikan substansial tahun 2020 hingga tahun 2024, mencerminkan peningkatan daya saing produk domestik dan keberhasilan diversifikasi pasar ekspor. Dengan kombinasi pemulihan konsumsi domestik, peningkatan investasi, dan

penguatan sektor ekspor, perekonomian berhasil membangun fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

3.1.4 Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan inflasi Kota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik. 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh BPS diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Tabel 3.5 memberikan gambaran mengenai tingkat inflasi daerah di Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 3.5. Perbandingan Tingkat Inflasi Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Kota di Jawa Barat	Inflasi Tahunan (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	2,18	1,93	5,82	3,36	1,75
2	Sukabumi	1,84	1,71	5,45	2,72	2,59
3	Bandung	1,75	1,65	7,45	0,63	1,61
4	Cirebon	1,16	1,81	4,86	3,22	1,1
5	Bekasi	2,81	1,61	5,37	3,14	1,6
6	Depok	1,78	1,81	6,06	2,49	1,95
7	Tasikmalaya	1,61	1,17	6,65	2,84	1,94
	Jawa Barat	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan data diatas, kota-kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti distribusi barang, kebijakan daerah, dan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan inflasi yang signifikan pada beberapa kota pada 2022 menunjukkan dampak dari berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk gangguan pasokan barang dan lonjakan harga energi. Gejolak tertinggi inflasi yang terjadi pada tahun 2022 tidak terlepas dari tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat. Tantangan ini perlu menjadi pencermatan bagi Pemkab Sukabumi agar volatilitas dapat terjaga sehingga seluruh aspek makro lainnya dapat terkendali.

3.1.5 Analisis Sektor Basis pada Perekonomian di Kabupaten Sukabumi

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan pengembangan Kawasan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga berlaku, untuk mengetahui suatu sektor basis atau non basis digunakan analisis LQ (*Location Quotient*).

Sektor basis merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan

mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Apabila nilai LQ kurang dari satu maka termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan analisis LQ dapat diketahui sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga berlaku untuk periode 202--2024. Pada analisis ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor perekonomian di tingkat Kabupaten Sukabumi (wilayah bawah) terhadap Jawa Barat (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kabupaten Sukabumi dengan peran sektor-sektor tersebut di Jawa Barat. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Nilai LQ Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,65	2,67	2,70	2,76	2,78	B
B	Pertambangan dan Penggalian	3,69	3,78	3,94	3,92	4,00	B
C	Industri Pengolahan	0,41	0,42	0,42	0,41	0,43	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,28	0,28	0,29	0,31	NB
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,40	0,40	0,41	0,42	0,44	NB
F	Konstruksi	1,53	1,54	1,57	1,53	1,53	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,24	1,24	1,25	1,23	1,21	B
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,47	1,41	1,38	1,39	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,97	0,97	0,96	0,92	0,93	NB
J	Informasi dan Komunikasi	0,76	0,77	0,77	0,76	0,73	NB
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30	NB
L	Real Estate	1,60	1,58	1,64	1,66	1,61	B
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,78	0,76	0,79	NB
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,42	1,44	1,39	1,38	B
P	Jasa Pendidikan	1,63	1,65	1,70	1,69	1,67	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,25	1,26	1,22	B
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,83	0,83	0,82	0,81	0,76	NB

Sumber : BPS Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah)

Keterangan : B = Sektor Basis; NB = Sektor Non Basis

Berdasarkan hasil analisis sektor basis Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2024 terdapat sembilan sektor yang termasuk ke dalam sektor basis daerah. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis dengan nilai diatas 1 di Kabupaten Sukabumi, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling stabil untuk

dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Sukabumi. Apabila diidentifikasi dari kontribusinya, sektor tersebut penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah. Dengan nilai LQ dan kontribusi yang tinggi, menjadikan sektor pertanian tetap menjadi kegiatan basis yang baik dan sangat berpotensi untuk dikembangkan di dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat bahkan skala nasional sejak tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya melalui sektor pertanian yang tumbuh, upaya hilirisasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan geliat ekonomi di Kabupaten Sukabumi.

3.1.6 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Merujuk pada kondisi perekonomian saat ini, pemulihan global berlangsung dengan stabilitas yang konsisten namun lambat, menunjukkan variasi dalam kecepatan pemulihan di setiap negara. Proyeksi dasar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global diharapkan akan tetap sekitar 3,2 persen pada tahun 2024 dan 2025, ini mencerminkan tingkat yang serupa dengan tahun sebelumnya. Walaupun serupa, terdapat sedikit percepatan pertumbuhan di negara-negara maju yang diperkirakan akan meningkat dari 1,6 persen pada tahun 2023 menjadi 1,7 persen pada tahun 2024 dan 1,8 persen pada tahun 2025. Namun demikian, ada sedikit perlambatan yang diantisipasi di negara-negara berkembang (*emerging market*) dan berkembang, dengan pertumbuhan yang diharapkan turun dari 4,3 persen pada tahun 2023 menjadi 4,2 persen pada tahun 2024 dan 2025. Proyeksi pertumbuhan global lima tahun ke depan, diproyeksi sebesar 3,1 persen, diprediksi mencapai level terendah dalam beberapa dekade.

Prediksi juga menunjukkan penurunan inflasi global dari 6,8 persen pada tahun 2023 menjadi 5,9 persen pada tahun 2024 dan 4,5 persen pada tahun 2025, dengan negara-negara maju kembali ke target inflasi mereka lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara pasar emerging dan berkembang. Selain itu, inflasi inti diperkirakan akan secara bertahap menurun. Meskipun bank sentral telah meningkatkan suku bunga secara signifikan untuk menjaga stabilitas harga, perekonomian global tetap menunjukkan ketahanan yang cukup.

Fokus pada prospek jangka menengah menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan output per kapita yang lebih rendah terutama disebabkan oleh hambatan struktural yang berkelanjutan, yang menghambat aliran modal dan tenaga kerja ke sektor-sektor yang produktif. Selain itu, prospek pertumbuhan yang kurang menggembirakan dari Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya dapat memberikan beban tambahan bagi mitra dagang akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.7. Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022-2024

No	Negara	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Amerika Serikat	2.1	2.1	1.5
2	Jepang	1	2	1
3	Perancis	2.5	1	1.3
4	Tiongkok	3	5	4.2
5	Arab Saudi	7.9	3.4	4
6	Korea	2.6	1.4	2.2

No	Negara	Tahun		
		2022	2023	2024
7	Thailand	2.6	2.7	3.2
8	Filipina	7.6	5.3	5.9
9	Malaysia	8.7	4	4.3
10	Indonesia	5.3	5	5

Sumber: IMF (2025)

Tabel 3.8. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2025-2026

No	Negara	Proyeksi	
		2025	2026
1	Amerika Serikat	1.8	2.1
2	Jepang	0.6	0.5
3	Perancis	1.8	1.7
4	Tiongkok	4.1	4.1
5	Arab Saudi	4.2	4.3
6	Korea	2.3	2.2
7	Thailand	3.1	3
8	Filipina	6.1	6.2
9	Malaysia	4.4	4.4
10	Indonesia	5	5

Sumber: IMF (2024)

3.1.7 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Nasional

Saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang nyata terjadi. Hal ini diiringi juga dengan cuaca ekstrem yang terus terjadi. Secara langsung hal ini berkaitan erat dengan daya dukung untuk pengembangan pertanian dan sektor lainnya yang berkaitan erat dengan aspek sumber daya alam. Tidak hanya dari sisi lingkungan, saat ini pembangunan Indonesia juga dihadapkan dengan masalah *aging population* dimana penduduk usia produktif menurun di negara maju sehingga potensial bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor terkait. Selain itu tantangan transisi energi mulai terasa namun ada peluang pemerataan didalamnya. Diperlukan national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau. Selain itu perlunya pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya, dampak hilirisasi yang terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu hilirisasi yang akan dilanjutkan diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Pada aspek hilir, penerapan standar sustainability yang tinggi mengharuskan Indonesia dengan produknya untuk mampu berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global. Serta untuk memastikan seluruh tantangan tersebut berjalan lancar, tantangan sinkronisasi kebijakan makro dan sektor perlu senantiasa didorong.

Tantangan pembangunan tidak dapat lepas dari kerangka ekonomi makro dimana produk domestik bruto (PDB Indonesia menggambarkan kuatnya sektor industri dan primer (pertanian dan pertambangan). Gambaran PDB Tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.115.494,5	2.254.541,3	2.428.900,5	2.617.670	2.791.428,00
B	Pertambangan dan Penggalian	993.541,9	1.523.650,1	2.393.390,9	2.198.018,1	2.026.589,20
C	Industri Pengolahan	3.068.041,7	3.266.905,5	3.591.774,7	3.900.061,7	4.202.866,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	179.741,6	190.047,2	204.673,7	218.250,9	227.527,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.305,4	12.026,4	12.536,9	13.285,3	14.258,80
F	Konstruksi	1.652.659,6	1.771.726,7	1.912.978,7	2.072.384,8	2.233.463,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.993.988,7	2.199.934,9	2.516.696,7	2.702.445,6	2.892.694,60
H	Transportasi dan Pergudangan	689.552,4	719.610,3	983.519,5	1.231.241,9	1.358.116,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394.055	412.233,8	471.938,7	526.263,5	584.447,10
J	Informasi dan Komunikasi	695.963,3	748.802,9	812.737,3	883.637	960.021,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	696.072,9	736.187,2	809.370,7	869.167,8	922.810,90
L	Real Estate	453.780,9	468.221,7	488.311,2	505.457,4	520.728,10
M,N	Jasa Perusahaan	294.255,5	301.085,2	341.427,3	383.091,9	424.169,80
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585.960,1	586.757	604.938,5	616.444,4	673.717,50
P	Jasa Pendidikan	201.480,4	227.235,1	236.171,6	251.998,5	621.417,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.480,4	227.235,1	236.171,6	251.998,5	278.216,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	302.588,1	312.189	354.181,2	405.191,5	454.309,20
Produk Domestik Regional Bruto		15.443.353,2	16.976.751,4	19.588.089,9	20.892.348,50	22.138.964,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Mengacu pada data tersebut, 17 subsektor di Indonesia pada tahun 2024 dapat tumbuh positif dengan berbagai faktor didalamnya. Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang cukup tinggi menjadi *highlight* untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang juga sangat bergantung pada sektor tersebut. Sektor pertanian sebagai sektor hulu juga berkaitan dengan aktivitas perindustrian yang terjadi didalamnya hingga praktik sektor tersier yang berkaitan dengan jasa. Selanjutnya melihat aktivitas aktor perekonomian maka diketahui bahwa kegiatan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama perekonomian melalui pengeluaran yang disusul oleh aktivitas investasi. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	8.899,9	9.236,0	10.161,7	11.109,5	11.964,9
Konsumsi LNPRT	201,4	207,9	228,9	260,7	300,1
Konsumsi Pemerintah	1.491,1	1.569,8	1.505,0	1.555,5	1.711,6
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.897,0	5.227,8	5.697,2	6.127,7	6.452,5
Perubahan Inventori	97,8	111,1	129,3	248,6	498,3
Ekspor Barang dan Jasa	2.676,5	3.635,8	4.799,8	4.543,3	4.911,2
(Dikurangi) Impor Barang dan Jasa	2.415,4	3.189,6	4.106,0	4.088,4	4.514,0
Produk Domestik Bruto	15.443.353,2	16.976.751,4	19.588.089,9	20.892.376,7	22.139,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Internasional Monetary Fund (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2025-2026 akan stabil pada angka 5 persen. Proyeksi tersebut dapat menjadi

motivasi bahwa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya akselerasi disertai dengan pemerataan perekonomian didalamnya. Kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Pusat juga berpengaruh pada kecepatan ketercapaian tujuan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkecil *execution lag* melalui program-program strategis sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2026. Adapun target indikator makro nasional pada tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Target Indikator Makro Nasional Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target RPJMN 2026
1	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,57
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5 – 7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,44 – 4,96
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,8 – 6,3

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2026

3.1.8 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026. Adapun target indikator makro Jawa Barat pada Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,57	0,58
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 -6,46	5,51-6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,75	6,42 – 6,99	6,31-6,66
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,95	4,98 – 5,37	5,15-6,20
5	Indeks Gini	Poin	0,428	0,383 – 0,390	0,381-0,420
6	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/ Kapita	56,08	57,41 – 59,60	63,65 – 66,0
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	6.61	7,20

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

3.1.9 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Kabupaten Sukabumi

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi ke depan tidak terlepas dari tantangan kondisi perekonomian global dan nasional yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dari sisi investasi dan daya beli masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah serta kebijakan lainnya

seperti halnya kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan penggajiannya, pembagian dana transfer umum yang sudah di batasi ketentuan penggunaannya dan kebijakan pemberian dana alakosi khusus (DAK) yang sudah ditentukan lokasi prioritasnya, sehingga memepengaruhi kapasitas atau kemampuan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut juga bertambah dengan adanya transisi kepemimpinan baik pemilihan presiden, anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan transisi kebijakan dalam penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mengurai tantangan yang ada maka pembangunan akan menagcu pada target yang telah ditetapkan. Adapun target indikator makro daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026*)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,18	70,60	71,24
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,87	6,42-6,90	6,43
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,11	6,15 - 7,05	6,60
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,15	5,08 - 5,63	5,68
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	31,16747	31,81 - 31,45	36,63
6	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	N/A	3,10	3,11
7	Indeks Gini	Poin	0,342	0,345 - 0,358	0,340
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2Eq/Miliar	N/A	5,32	5,71
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,15	65,89	66,15
10	Prevalensi Stunting	Persen	20,5	18,47	16,73

Sumber: *) Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029;

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian menjadi *leading sector* dalam pembangunan perekonomian daerah menjadikan adanya pergeseran pertumbuhan sektor yang berdampak pada banyak hal khususnya pada perdagangan dan perindustrian. Kondisi tersebut mendorong upaya pemulihan ekonomi perlu berorientasi pada pengembangan sektor unggulan. Optimalisasi sektor pertanian dapat menjadi solusi pengembangan ekonomi yang inklusif dimana sektor tersebut dapat menjangkau berbagai pelaku ekonomi dari hulu hingga hilir dan tercatat memiliki *share* terbesar pada perekonomian di Kabupaten Sukabumi.

3.1.10 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income

country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi :

- a. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
- b. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
- c. penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- d. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- f. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g. penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen
- h. penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
- i. penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand;

- j. pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global
- k. penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
- l. penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
- m. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
- n. penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
- o. penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
- p. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
- q. peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
- r. penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
- s. industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
- t. penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);
- u. pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
- v. Penataan dan restrukturisasi BUMD.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sukabumi

Arah Kebijakan Ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang didorong oleh pertumbuhan investasi dan perdagangan, kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlindungan sosial yang adaptif, serta perbaikan kondisi gizi masyarakat sebagai fondasi pembangunan inklusif dan berkeadilan

1. Industri dan Investasi
 - a. Meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
 - b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) industri
 - c. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan inovasi.
 - d. Memperkuat rantai pasok industri pengolahan agar lebih efisien dan berdaya saing.
 - e. Meningkatkan investasi daerah melalui penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)
 - f. Meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis sumber daya lokal.
 - g. Memperluas akses pasar internasional melalui promosi dan diplomasi dagang.
2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a. Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan
 - b. Mendorong ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing
 - c. Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis.
3. Pertanian dan Perikanan
 - a. Intensifikasi pertanian berbasis teknologi
 - b. Menjaga ketersediaan lahan pertanian
 - c. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian dan perikanan
 - d. Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
 - e. Penguatan Akses, Keterjangkauan dan Ketahanan Pangan bagi Kelompok Rentan
4. Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
 - a. Pengembangan kewirausahaan daerah
 - b. Meningkatkan peluang kerja melalui investasi dan sektor ekonomi produktif
 - c. Memperkuat program vokasi dan link-and-match dunia industri.
 - d. Memberikan dukungan kepada pengembangan wirausaha mandiri sebagai salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim
 - a. Peningkatan Perlindungan dan Konservasi di Kawasan Lindung dan Budidaya untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem
 - b. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - c. Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan

- d. Peningkatan Pengelolaan Persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan
- 6. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
 - a. Verifikasi dan validasi data tunggal kemiskinan Kabupaten Sukabumi
 - b. Mendorong pengurangan kemiskinan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
 - c. Mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan, terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
- 2) Pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Komponen Belanja, terdiri dari:

- 1) Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya;

- 3) Belanja tidak terduga;
- 4) Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

C. Komponen Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah (investasi), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah salah satunya dicirikan oleh perkembangan PAD. Besaran PAD menjadi salah satu acuan dalam menilai kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan kemampuan kemandirian fiskal yang belum mandiri, ditunjukkan dengan lebih tingginya proporsi pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan daerah dibandingkan dari komponen PAD. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sumber pendanaannya berasal dari kolaborasi antara APBN, APBD Provinsi, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), APBD Kabupaten/kota, Dana Umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kolaborasi pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi 2024 (Diolah)

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kondisi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan memuat realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2023 hingga tahun 2025, serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2026. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi		Target/ Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026
1.1	Pendapatan Asli Daerah	668.360.859.768	698.619.461.122	842.296.862.064	897.230.311.487
1.1.1	Pajak Daerah	289.197.000.000	299.197.000.000	443.656.072.547	501.044.680.933
1.1.2	Retribusi Daerah	17.155.360.000	356.883.422.846	374.145.814.583	246.747.588.988
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000	11.557.300.000	11.202.474.953	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	350.842.349.768	30.981.738.276	13.295.499.981	149.438.041.566
1.2	Pendapatan Transfer	3.409.151.835.615	3.667.576.357.662	3.699.002.773.262	3.904.872.585.828
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.114.732.040.000	3.331.534.987.000	3.465.734.116.000	3.671.603.926.566
1.2.2	Pendapatan Transfer Antardaerah	294.419.795.615	336.041.370.662	233.268.657.262	233.268.659.262
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.349.453.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
1.3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang	40.349.453.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Total Pendapatan Daerah		4.117.862.148.383	4.374.195.818.784	4.549.299.635.326	4.810.102.897.315

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029;

Pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 4.810102.897.315. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 897.230.311.487, pendapatan transfer sebesar Rp 3.904.872.585.828 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 8.000.000.000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penyumbang terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi bersumber dari pajak daerah Rp 501.044.680.933. Proyeksi pendapatan menjadi acuan dalam penyusunan pendanaan program kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2026.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah merupakan kewajiban seluruh

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data belanja daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi		Target	
		2023	2024	2025	2026
2.1	Belanja Operasi	2.977.297.445.154	3.300.663.209.665	3.364.996.500.084	3.272.140.238.602
2.1.1	Belanja Pegawai	1.399.011.930.535	1.481.670.957.370	1.615.610.051.541	1.687.355.887.852
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.403.827.588.619	1.519.502.164.295	1.333.117.593.142	1.509.266.414.250
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.5	Belanja Hibah	157.182.926.000	285.635.088.000	400.048.855.401	74.102.736.500
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.275.000.000	13.855.000.000	16.220.000.000	1.415.200.000
2.2	Belanja Modal	493.352.279.317	456.250.372.963	374.395.396.480	792.458.049.185
2.2.1	Belanja Modal Tanah	26.984.944.650	9.766.510.000	5.454.146.460	5.492.184.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.716.757.194	131.492.468.923	87.307.964.227	212.092.622.290
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.457.834.190	207.685.431.884	110.200.483.199	276.326.524.672
2.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	72.428.121.333	88.014.106.637	152.240.564.735	298.306.718.223
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.429.421.950	18.710.605.519	18.792.237.859	-
2.2.6	Belanja Mosal Aset Lainnya	335200000	581250000	400.000.000	240.000.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	56.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	672.631.182.334	681.331.749.068	733.819.896.523	718.088.767.289
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	35.291.878.600	31.655.407.100	49.800.701.755	75.500.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	637.339.303.734	649.676.341.968	684.019.194.768	642.588.767.289
Total Belanja Daerah		4.168.280.906.805	4.458.245.331.696	4.523.211.793.087	4.838.687.055.076

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029

Berdasarkan proyeksi tahun 2026 Total belanja daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 4.838.687.055.076, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 3.272.140.238.602, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja modal sebesar Rp 792.458.049.185, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga sebesar Rp 56.000.000.000, merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belanja transfer sebesar Rp 718.088.767.289.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Sukabumi diarahkan pada SILPA yang diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi data pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi		Target	
		2023	2024	2025	2026
3.1	Penerimaan Pembiayaan	126.653.758.422,00	181.271.354.862	88.584.157.761	88.584.157.761
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	126.653.758.422	181.271.354.862	88.584.157.761	88.584.157.761
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah				-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	76.235.000.000	97.221.841.950	114.672.000.000	60.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000	-	-	40.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000	97.221.841.950	114.672.000.000	20.000.000.000
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				-
Jumlah Pembiayaan Netto		50.418.758.422,00	84.049.512.912,00	-26.087.842.239	28.584.157.761

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis realisasi dan target pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2026. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama dinas penghasil.
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.

5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
7. Melaksanakan akurasi data atas objek pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.
8. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan agar terlaksananya pola pembelanjaan yang akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.
3. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lainnya yang terdapat dalam program-program perangkat daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Apabila terjadi defisit anggaran, maka dapat diantisipasi dengan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan apabila terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. Kondisi pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi mengalami defisit, atau jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan daerah dirumuskan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sehingga dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2026 adalah tahun kedua untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia

Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sasaran pembangunan nasional menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Reprasentasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju
- 2) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
- 3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
- 4) Daya saing Sumber Daya Manusia Meningkat

5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025 – 2029, yaitu “Jawa Barat Istimewa, Lembur diurus, Kota ditata” dengan tema pembangunan tahun 2026 yang yaitu “pemerataan distribusi akses layanan dasar” melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran pada tahun 2026 yang selaras dengan rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer*, dengan sasaran yaitu: Meningkatnya derajat kesehatan individu; Terbentuknya individu beretika dan berbudaya; Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum; Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran: Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri; Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan; Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa; dan Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif
3. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran: Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja; Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; dan Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
4. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran: Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; dan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.
5. Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran: Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.
6. Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi

4.1.3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 Tujuan dan sasaran pembangunan menyesuaikan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sukabumi dan tema pembangunan tahun 2026 adalah “Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”. Visi Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah “**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)**”. Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Maju

Kabupaten Sukabumi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Kemajuan ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang prima.

2. Unggul

Kabupaten Sukabumi yang memiliki daya saing tinggi di berbagai sektor, terutama dalam bidang agribisnis, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Keunggulan ini juga mencerminkan peningkatan kualitas SDM yang berkompeten, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

3. Berbudaya

Kabupaten Sukabumi yang tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal serta kearifan tradisional dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup pelestarian adat, seni, bahasa daerah, dan penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan budaya luhur serta nilai-nilai keislaman.

4. Berkah (Mubarakah)

Kabupaten Sukabumi yang menjalankan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan dan keberkahan, sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Keberkahan ini tercermin dalam kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang lestari, serta pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029 diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata

Tujuan

- 1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
- 1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat,

pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan

Sasaran Strategis

- 1.1.1 Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah
- 1.1.2 Meningkatkan pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah
- 1.2.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- 1.2.2 Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)
- 1.2.3 Menurunnya tingkat kekurangan gizi

Misi 2 : Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata Dan Inklusif

Tujuan

- 2.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah

Sasaran Strategis

- 2.1.1. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif
- 2.1.2. Meningkatkan infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata

Misi 3 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq

Tujuan

- 3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)
- 3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)

Sasaran Strategis

- 3.1.1 Meningkatkan integrasi layanan kesehatan secara merata
- 3.1.2 Meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata
- 3.2.1 Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal
- 3.2.2 Meningkatkan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender

Misi 4 : Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional, dan Akuntabel

Tujuan

- 4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel

4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis

Sasaran Strategis

4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif

4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan, serta tujuan dan sasaran Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target	
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026	
Visi	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah)					
Misi 1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata					
1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,08-5,63	55,68	
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (poin)	64,10	64,13	65,42	
	1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,13	16,79	16,91
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,66	2,67	2,68
			Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	22,58	22,80	22,81
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,73	2,46	2,57
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,11	6,52 – 7,03	6,60
		1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah		Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,12	28,34
			Pertumbuhan Nilai Ekspor (%)	496 Juta USD	5	5
	1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,15	65,89	66,15
			Penurunan emisi GRK Kumulatif	N/A	780.547,74	780.547,74

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026
	mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan				
1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan		Tingkat Kemiskinan (Persen)	6,87	6,42 - 6,90	6,43
		Indeks Gini (Poin)	0,366	0,345 - 0,358	0,340
	1.2.1 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)	Persentase Pencapaian Tingkat Kemiskinan (Persen)	96	100	100
		Indeks Gini (Poin)	0,366	0,345 - 0,358	0,340
	1.2.2 Menurunnya tingkat kekurangan gizi	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	5,28	5,08	4,88
Misi 2	Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata dan Inklusif				
2.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah		Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	N/A	41,41	43,70
	2.1.1 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Tingkat Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	30,72	32,47	33,29
	2.1.2 Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	Tingkat Kemantapan Jalan (persen)	60,57	61,37	62,17
		Rasio Konektivitas (%)	60	56	56
		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	80,94	81,00	81,44
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi (%)		54,37	54,42	55,13	
Misi 3	Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq				
3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,18	70,6	71,24
	3.1.1 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,85	75,05	75,25

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026
pengetahuan dan teknologi (Iptek)		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	97,25	98,15	98,25
	3.1.2 Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,39	12,41	12,46
3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)		Indeks Pembangunan Sosial dan Budaya	N/A	67,05	67,76
	3.2.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Indeks Literasi Daerah	76,93	77,53	78,13
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	24,14	24,85	25,34
	3.2.2 Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,533	0,532	0,531
Penurunan Prevalensi Stunting pada balita		20,5	18,47	16,73	
Misi 4	Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Akuntabel				
4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	82,85	65,00	65,50
	4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	Persentase Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (%)	127	100	100
		Indeks Pelayanan Publik	N/A	4,30 - 4,33	4,34-4,36
4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,67	3,68 - 3,82	3,83 - 3,97
	4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	1,55	1,55	1,65

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029

4.1.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi cara-cara yang diambil tersebut. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan demikian, Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dijabarkan lebih rinci dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan perencanaan di tahun 2026 disesuaikan dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD atau dengan kata lain Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.2. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1.1.1.1 Meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.	a. Pemberian insentif dan kemudahan investasi industri pengolahan
			b. Fasilitasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Ciambar dan Cikembar
			c. Pembangunan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis potensi daerah
		1.1.1.2 Peningkatan sumber daya manusia (SDM) industri	a. Optimalisasi Gedung Promosi IKM sebagai pusat pelatihan bagi IKM
			b. IKM Motekar: Pelatihan produksi IKM
		1.1.1.3 Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan inovasi.	a. Peningkatan akses pasar berbasis digital
			b. Fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk (NIB, halal, PIRT, dsb)
			c. IKM Motekar: Peningkatan produktivitas IKM melalui adopsi teknologi dan fasilitasi Sarpras
			d. Pengembangan konsep Ekonomi Sirkular di tingkat IKM
			e. Mendorong praktik ekonomi sirkular daerah untuk penguatan IKM yang inovatif

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		1.1.1.4 Memperkuat rantai pasok industri pengolahan agar lebih efisien dan berdaya saing.	a. Mendorong hilirisasi bahan baku produk primer unggulan daerah
			b. Mengembangkan kemitraan dalam penguatan rantai pasok
			c. Menyelaraskan kebijakan hulu-hilir pembangunan sentra (IKM) berbasis potensi daerah
	b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.1.1.5 Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan	a. Memperkuat tata kelola pengembangan pariwisata berstandar internasional
			b. Pengembangan kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark
			c. PARIWISATA BERDAYA: Penguatan event besar pariwisata
			d. PARIWISATA BERDAYA: Revitalisasi amenities destinasi pariwisata unggulan
			e. PARIWISATA BERDAYA: Peningkatan SDM kepariwisataan berbasis Sapta Pesona melalui pelatihan dan sertifikasi
			f. PARIWISATA BERDAYA: Standarisasi atraksi, amenities dan promosi wisata
			g. Pariwisata Berdaya : Standarisasi atraksi,

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			amenitas dan promosi wisata
		1.1.1.6 Mendorong ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing	a. Fasilitasi perizinan dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif
			b. Fasilitasi pelatihan, sertifikasi dan sarana produksi
			c. Penyediaan ruang kreatif/Creative Hub bagi pelaku ekonomi kreatif
			d. Penguatan Event Ekonomi Kreatif (Promosi)
			e. Pengembangan Desa Kreatif
		1.1.1.7 Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis	a. Peningkatan visibilitas identitas daerah dengan mengedepankan unsur kebudayaan dan religiusitas
			b. Mendorong kerjasama pengelolaan destinasi wisata milik Pemda kepada pihak swasta
			c. Penguatan City Branding promosi pariwisata
			d. Penguatan Event Pariwisata Potensi Lokal Berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	
			e. Mendorong Pengembangan Industri Pariwisata yang Berdaya Saing	
			f. Mendorong peran BUMD dalam penguatan promosi dan kemitraan pariwisata	
	c. Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1.1.1.8 Intensifikasi pertanian berbasis teknologi		a. Fasilitasi sarana dan prasarana bagi petani, peternak, dan nelayan
				b. Petani/Peternak/Nelayan Motekar: Fasilitasi pupuk bersubsidi
				c. Penggunaan teknologi tepat guna bagi petani, peternak dan nelayan
				d. Penguatan ekosistem pertanian/peternakan/perikanan berkelanjutan
		1.1.1.9 Menjaga ketersediaan lahan pertanian		a. Pengembangan sentra produksi
				b. Melindungi lahan pertanian produktif
		1.1.1.10 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian dan perikanan		a. Meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian, peternakan dan perikanan
				b. Mencetak pelaku usaha (petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) champion sebagai upaya regenerasi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			<p>c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan</p> <p>d. Fasilitasi sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan</p> <p>e. Mendorong Rumah Potong Hewan menjadi bagian dari unit usaha daerah</p>
	d. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1.1.1.11 Pengembangan kewirausahaan daerah	<p>a. Memperkuat inkubasi bisnis dan pendampingan wirausaha.</p> <p>b. Mempermudah akses pembiayaan dan permodalan.</p> <p>c. Fasilitasi pemberian insentif bagi UMKM</p> <p>d. Fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk bagi UMKM</p> <p>e. Mendorong pengembangan wirausaha baru</p> <p>f. Mengembangkan koperasi berbasis pertanian dan pariwisata</p> <p>g. UMKM Motekar: Fasilitasi permodalan dan akses pasar dengan prioritas untuk CPCL yang mengikuti pelatihan produksi dan mendapatkan bantuan sarana produksi (IKM)</p>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	
			h. Subsidi Kredit Mikro Mitra Mubarakah: Fasilitasi pembiayaan bagi UMKM	
			i. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah sebagai alternatif penguatan ekonomi daerah	
			j. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial PROGRAM TRENDI (Program pesanTREN melek Digital)	
	e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.1.1.12 Meningkatkan peluang kerja melalui investasi dan sektor ekonomi produktif		a. Penyediaan insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja rentan
				b. Optimalisasi program padat karya dan pemberdayaan masyarakat
				c. Meningkatkan informasi pasar kerja dan layanan bursa kerja yang efektif
		1.1.1.13 Memperkuat program vokasi dan link-and-match dunia industri.	Generasi Mencrang: Pengembangan pelatihan berbasis vokasi sesuai kebutuhan industri melalui Balai Latihan Kerja (BLK)	
		1.1.1.14 Memberikan dukungan kepada pengembangan	a. Memfasilitasi sarana produksi untuk mendukung wirausaha mandiri	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		wirausaha mandiri sebagai salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja	b. Memfasilitasi sarana produksi untuk mendukung wirausaha mandiri
1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah	a. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	1.1.2.1 Meningkatkan investasi daerah melalui penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)	a. Mendorong promosi investasi daerah
			b. Mengoptimalkan pemberian insentif dan kemudahan investasi
	c. Mendorong ketersediaan <i>Investment Project Ready to Offer (IPRO)</i>		
	d. Memperkuat digitalisasi layanan perizinan		
	e. Memperkuat kolaborasi mendukung iklim investasi yang kondusif		
	1.1.2.2 Meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis sumber daya lokal.	a. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha agar Siap Ekspor	
		b. Fasilitasi sertifikasi produk ekspor sesuai standar global	
1.1.2.3 Memperluas akses pasar internasional melalui promosi dan diplomasi dagang.	c. Fasilitasi kerja sama perdagangan dengan mitra strategis	Pameran Dagang/Misi Dagang Internasional	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	1.1.3.1 Peningkatan Perlindungan dan Konservasi di Kawasan Lindung dan Budidaya untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem	a. Penghijauan dan Penambahan Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
			b. Perlindungan kawasan konservasi di Perairan Umum Daratan (PUD)
			c. Pembangunan Taman Interaksi Warga (Taman INovasi, TEknologi, olahRAga, Kreativitas dan Silaturahmi Warga) dalam upaya menambah ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi hunian dan keseimbangan ekosistem wilayah
			d. Peningkatan Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Kawasan Sumber Air dan Sungai
		1.1.3.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	a. Penguatan Kebijakan dan Penegakan Hukum Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
			b. Pengawasan Kepada Pelaku Usaha terhadap Rencana Pengelolaan dan Pemantauan yang Ditetapkan
c. Pengendalian Sumber Pencemar terhadap Baku Mutu Kualitas Air dan Udara			

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			d. Peningkatan partisipasi masyarakat mengenai aktivitas pencemaran dan kerusakan lingkungan
	b. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission (Ton CO ₂ eq)	1.1.3.3 Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan	a. Pengendalian emisi kendaraan bermotor dan penerapan energi ramah lingkungan
			b. Fasilitasi lahan kritis dan ekosistem melalui reforestasi dan peningkatan vegetasi, serta penerapan agroforestri untuk pemulihan sumber daya alam untuk peningkatan kualitas air, udara serta ketahanan iklim
			c. Penerapan pola kegiatan pertanian peternakan yang berkelanjutan dan rendah emisi
		1.1.3.4 Peningkatan Pengelolaan Persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan	a. Penerapan aktivitas ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat
			b. Optimalisasi sistem pengangkutan persampahan berbasis aspek 3R (<i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i>)
			c. Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan teknologi pengelolaan persampahan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1.2.1 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)	a. Tingkat Kemiskinan (Persen)	1.2.1.1 Verifikasi dan validasi data tunggal kemiskinan Kabupaten Sukabumi	Melakukan verifikasi dan validasi lapangan
		1.2.1.2 Mendorong pengurangan kemiskinan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	a. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis data tunggal
			b. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin berbasis data tunggal
			c. Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan berbasis data tunggal
	b. Indeks Gini (Poin)	1.2.1.3 Mendorong pemerataan pembangunan wilayah	d. Penguatan Coverage dari BPJS Ketenagakerjaan
			a. Membangun kawasan pertanian tematik untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat
b. Membangun sentra ekonomi tematik sebagai basis pertumbuhan ekonomi wilayah			
		c. Mengoptimalkan pembangunan kawasan berbasis tata ruang	
1.2.2 Menurunnya tingkat kekurangan gizi	a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1.2.2.1 Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	a. Peningkatan infrastruktur ketahanan pangan, seperti pembangunan lumbung pangan desa dan optimalisasi cadangan pangan pemerintah.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			b. Penguatan diversifikasi dan fortifikasi pangan
			c. Pengembangan kebijakan pangan asal pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal
		1.2.2.2 Penguatan Akses, Keterjangkauan dan Ketahanan Pangan bagi Kelompok Rentan	a. Peningkatan pemahaman pemberdayaan masyarakat terkait ketahanan pangan keluarga
			b. Memastikan ketersediaan gizi yang cukup dengan harga terjangkau bagi ibu hamil, bayi dan balita melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi Catin, ibu hamil dan balita, serta kampanye pola makan sehat
			c. Pemberian bantuan pangan langsung untuk mendorong keseimbangan kebutuhan gizi masyarakat
2.1.1 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	a. Tingkat Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (persen)	2.1.1.1 Meningkatkan pemerataan akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas infrastruktur pelayanan dasar Perumahan dan Permukiman	a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana air bersih menuju akses air minum aman.
			b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi menuju akses sanitasi aman.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		2.1.1.2 Meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	<p>a. Pembangunan Rumah SAKINAH (Pembangunan Rumah Sehat, layak, NYaman, Aman dan berkah : Membangun rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>b. Pembangunan Rumah SAKINAH (Pembangunan Rumah Sehat, layak, NYaman, Aman dan berkah: Mengembangkan kawasan permukiman tanggap bencana dan relokasi akibat pembangunan</p> <p>c. Program TUMANINAH (infrasTruktur, MANTap, terINtegrasi dan terarah) : Meningkatkan penataan kawasan kumuh kewenangan kabupaten untuk meningkatkan fungsi hunian yang berkualitas</p> <p>d. Pembangunan Taman Interaksi Warga (Taman INovasi, TEknologi, olahRaga, Kreativitas dan Silaturahmi Warga) : Pembangunan taman-taman tematik yang dapat menjadi pusat aktivitas warga dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas teknologi informasi, olahraga, dll.</p> <p>e. Meningkatkan kualitas PSU Perumahan dan Permukiman mendukung hunian layak,</p>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan
			f. Program TUMANINAH (infrastuktur, MANTap, terintegrasi dan terarah) : Meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan gedung perkantoran Pemda dan gedung perkantoran prioritas yang laik fungsi
2.1.2 Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	1. Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	2.1.2.1 Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	a. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan
			b. Program TUMANINAH (infrastuktur, MANTap, terintegrasi dan terarah) : Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis Penunjang Perekonomian
	2. Rasio Konektivitas (Poin)	2.1.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	a. Optimalisasi kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan wilayah
			b. Membangun sarana dan prasarana ASDP yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan strategis
	3. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (Persen)	2.1.2.3 Peningkatan pengelolaan ruang sesuai potensi dan daya dukung-daya tampung secara berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah	a. Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkeadilan berbasis potensi serta daya dukung daya tampung lingkungan secara berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			b. Peningkatan penata usahaan pertanian dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
	4. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi (Persen)	2.1.3.1 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi kabupaten
3.1.1 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	a. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) b. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	3.1.1.1 Meningkatkan sumber daya kesehatan	a. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif) : Pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin
			b. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif) : Dokter Bina Desa
			c. Pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi
			d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
			e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
			f. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			g. Meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, menyusui dan Balita
			h. Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan
		3.1.1.2 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera
			b. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif): Peningkatan pola hidup bersih dan seha
			c. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif) : Peningkatan pengetahuan warga tentang gizi seimbang
			d. Penguatan peran aktif lembaga kesehatan dalam peningkatan kualitas kesehatan
3.1.2 Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	3.1.2.1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.	a. GENERASI MENCERANG (Generasi Mandiri, CeRdas dan gemilANG) : pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual melalui adaptasi kurikulum nasional agar lebih relevan dengan konteks lokal dengan memasukkan muatan lokal yang memperkaya pengetahuan siswa tentang

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			<p>budaya, sejarah dan potensi daerah (pariwisata dan pertanian)</p> <p>b. Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.</p> <p>c. penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan pengembangan kurikulum</p> <p>d. pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta penyediaan fasilitas pendukung termasuk fasilitas yang ramah disabilitas</p> <p>e. mengimplementasi program pendidikan inklusif yang efektif, untuk memastikan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah reguler</p> <p>f. Penguatan manajemen sekolah</p> <p>g. Penguatan kurikulum dan metode pembelajaran</p> <p>h. GENERASI MENCERANG (Generasi Mandiri, CeRdas dan gemilANG) : Beasiswa Generasi Mencrang (untuk hafidz Al Quran, anak petani dan buruh migran)</p>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
3.2.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	a. Indeks Literasi Daerah	3.2.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis budaya melalui penyesuaian kurikulum dan pemanfaatan teknologi	a. Mengembangkan model-model pembelajaran literasi yang inovatif dan kontekstual serta responsif terhadap kebutuhan literasi (membaca, menulis, berhitung, literasi digital, literasi finansial, literasi sains dll)
		b. Mengintegrasikan program literasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah lainnya	
		c. Mengembangkan platform literasi digital yang mudah diakses dan interaktif	
		3.2.1.2 Memperkuat ekosistem literasi daerah melalui pembangunan dan revitalisasi perpustakaan berbasis digital serta adanya program literasi berbasis komunitas	a. Mengadakan lomba-lomba literasi, bedah buku dan kegiatan kreatif lainnya untuk menumbuhkan minat baca dan menulis
		b. Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur literasi, termasuk perpustakaan, Taman bacaan masyarakat (TBM), pojok baca dan akses internet dengan fasilitas yang memadai dan koleksi yang menarik	
		c. Memanfaatkan potensi wisata dan budaya lokal sebagai tema dalam pengembangan bahan bacaan dan kegiatan literasi	
		d. Pemberdayaan komunitas dan lembaga literasi	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	b. Persentase Pemajuan Kebudayaan	3.2.1.3 Mengidentifikasi dan mengembangkan program-program unggulan yang fokus pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan aspek-aspek kebudayaan yang spesifik dan memiliki potensi besar	<p>a. Penguatan tata kelola dan kelembagaan pemajuan kebudayaan</p> <p>b. Revitalisasi kampung adat dan warisan tradisional</p> <p>c. Melaksanakan festival seni dan budaya tahunan yang menampilkan kekayaan seni pertunjukan, musik dan kerajinan lokal</p> <p>d. Mengembangkan platform digital untuk promosi kebudayaan daerah (website, media sosial, konten kreatif berbasis budaya lokal)</p> <p>e. Pengembangan CPUGG sebagai warisan geologi dan keanekaragaman budaya yang unik</p> <p>f. Fasilitasi sarana prasarana kebudayaan berbasis masyarakat untuk menguatkan kesadaran budaya</p>
	a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	3.2.2.1 Memperkuat perlindungan anak dan ketahanan keluarga	<p>a. PROGRAM PERMATA SUCI (Program PERempuan MAndiri dan TAngguh untuk SUKabumi Cemerlang dan Inovatif)</p> <p>b. Pembangunan layanan perlindungan anak dan keluarga</p> <p>c. Sosialisasi perlindungan anak dan konseling keluarga</p>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		3.2.2.2 Mengembangkan kebijakan berbasis gender yang inklusif	a. Kolaborasi multi-pihak untuk meningkatkan kesetaraan gender b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan berbasis gender c. Meningkatkan kesetaraan gender dalam ekonomi dan politik d. Penguatan tata kelola kelembagaan gender e. Peningkatan Ketahanan Keluarga
		3.2.2.3 Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	a. Penyadaran, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat b. Pemberdayaan pemuda melalui ekonomi kreatif dan teknologi c. Pembinaan Atlet Daerah d. Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya - Peningkatan kapasitas/keterampilan ketenagakerjaan/kewirausahaan - Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
		3.2.2.4 Intervensi Terpadu Lintas Sektor Melalui	a. Intervensi Sensitif dan Spesifik pada Keluarga Berisiko Stunting

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		Pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting	b. Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang
			c. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	a. Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Kompetensi Aparatur Negara
			b. Penerapan Sistem Merit dalam Karir Aparatur Negara
		4.1.1.2 Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi anggaran daerah	a. Membangun Budaya Birokrasi yang Berintegritas
			b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah
		4.1.1.3 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			b. Meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Sukabumi
		4.1.1.4 Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Prosedur Birokrasi	a. Penguatan kebijakan digitalisasi pelayanan publik, penerapan e-government untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas
			b. Program Usaha Memakmurkan Masjid

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		4.1.1.5 Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal	a. Implementasi teknologi digital dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan birokrasi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi
		b. Optimalisasi pengendalian perencanaan pembangunan berbasis sistem	
		c. Peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa	
	b. Indeks Pelayanan Publik	4.1.1.6 Inovasi dalam Pelayanan Publik	a. Meningkatkan penggunaan big data, AI, dan analitik untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.
	b. Mendorong inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik		
	4.1.1.7 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah	a. Fasilitasi pemenuhan SPM pendidikan	
	b. Fasilitasi pemenuhan SPM kesehatan		
	c. Fasilitasi pemenuhan SPM pekerjaan umum dan penataan ruang		
	d. Fasilitasi pemenuhan SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman		
	e. Fasilitasi Pemenuhan SPM Sosial		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			f. Fasilitasi pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemulihan pasca bencana
			g. Pengarusutamaan Isu Disabilitas dalam semua Sektor Pembangunan
		4.1.1.8 Penyiapan Daerah Otonomi Baru	Fasilitasi Daerah Otonomi Kabupaten/Kota Baru
		4.1.1.9 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada unsur kewilayahan	Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan inovasi di tingkat kecamatan dan kelurahan
4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi	a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Institusi (Poin)	4.2.1.1 Meningkatkan akses infrastruktur digital di seluruh daerah dengan membangun jaringan internet di daerah terpencil dan penguatan infrastruktur telekomunikasi	a. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial PROGRAM TRENDI (Program pesanTREN melek Digital)
		4.2.1.2 Optimalisasi layanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan big data untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan layanan masyarakat	Peningkatan infrastruktur digital untuk pemerataan akses dan konektivitas daerah
			Pengembangan kebijakan yang mendukung transformasi digital dalam layanan publik

Sumber: Rancangan RPJMD, 2025 -2029

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan arahan presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Terdapat 8 (Delapan) prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 yang meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN2).
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN3).
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN4)
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN5).
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan(P6).
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan (PN7).
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN8).

Berdasarkan tema pembangunan pada RKP Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan RPJMN 2025 -2029, prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 menekankan pada dua kunci utama yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif secara spesifik terlihat pada gambar 4.1 dan 5 arahan direktif presiden pada RKP tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Gambar 4.1. Prioritas Pembangunan Pada RKP 2026



Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025

Tabel 4.3. Program Direktif Presiden pada RKP Tahun 2026

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan			
				Indikator	2024	2025			2026		
1	Pengelolaan Sampah Terpadu	1	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota dengan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan	KP : Perubahan Perilaku dan penguatan Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64	58	60	Lokasi PSEL dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang diusulkan dalam PSN RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain berada di DK Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado.	1	Pelibatan Danantara untuk menarik investasi dalam pengelolaan sampah
		2	Menciptakan nilai tambah ekonomi dari hasil pengolahan sampah		Meningkatnya Sampah Dikelola (%)	39,01 %	51,21 %	63,41 %	Wilayah metropolitan dengan timbulan sampah	2	Dukungan penugasan PLN

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan		
					Indikator	2024	2025				2026
		3	Mengurangi volume sampah kota secara signifikan		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepala Keluarga yang Melakukan Pengelolaan Sampah secara Terstandar (Pilar 4 STBM)	4	30	60	>1.000 ton/hari: Kota Adm. Jakarta Timur, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota	3	Bantuan biaya operasional dengan DAK Non-Fisik
		4	Meningkatkan investasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah	ProP : Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 % (13% terdaur ulang)	24% (16% terdaur ulang)	28% (17% terdaur ulang)	Tangerang, Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Depok, Kota Palembang, Kota	4	Mendorong Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
		5	Meningkatkan tata kelola persampahan		Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut	744,60 ton	18 ton	296 ton	Semarang, Kota Makassar, Kota. Adm. Jakarta Pusat, Kota Batam, Kota Tangerang Selatan, Kota	5	Dukungan DAK Fisik dan Non-Fisik Persampahan

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator				Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
					Indikator	2024	2025	2026			
					(kumulatif)						
		6	Mendukung target nasional dan komitmen internasional dalam pengurangan gas rumah kaca						Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Bandar Lampung, Kota Bogor, Kota Malang, Kota Padang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin dan sekitarnya, Kota Jambi dan sekitarnya, Kota Pontianak dan sekitarnya, Kota Surakarta dan sekitarnya, Kota Yogyakarta dan sekitarnya, Kota Manado		

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
					Indikator	2024	2025			
								dan sekitarnya, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi.		
2	Sekolah Rakyat		Mencetak agen perubahan pada keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan.	-	Sekolah	-	100sekolah	200sekolah	1	Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui APBN dan APBD
					Siswa Miskin, Rentan, dan Disabilitas	-	9.600 siswa	19.500 siswa	2	Pendanaan melalui DAK, KPBU, BUMN Pendidikan, dan mitra pembangunan

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan		
				Indikator	2024	2025			2026	
							rentan yang inklusif.			
3	Penerapan Digitalisasi Pendidikan	1	Meningkatkan pemerataan fasilitas teknologi informasi pada satuan pendidikan di Indonesia.	KP: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	Satuan Pendidikan Tipe I (memiliki listrik dan internet)	-	38.472	88.45	38 Provinsi	Pendanaan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (selaku K/L utama).
		2	Meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran berkualitas untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar peserta didik.	ProP: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi	Satuan Pendidikan Tipe II (memiliki listrik, tanpa internet)	-	-	27.569		
		3	Akselerasi penguatan literasi, numerasi, dan sains dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran.	RO: Platform Digital Pendidikan	Satuan Pendidikan Tipe III (tanpa listrik dan internet)	-	-	2.59		

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
				Indikator	2024	2025			2026
		4	Mengintegrasikan layanan digital pendidikan yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.	ProP: Penyediaan Sarana dalam Mendukung Digitalisasi Pembelajaran					
		5	Mempromosikan kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan terorganisasi di satuan pendidikan untuk mengurangi penggunaan berlebihan terhadap gawai.	RO:- Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran- SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran- SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran- SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran-					

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program		Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
					Indikator	2024	2025			2026
				SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran-SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran-Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran						
4	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan melalui bantuan sosial yang terintegrasi, melalui kartu kesejahteraan	KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57 %	7,0 – 8,0 %	6,5 – 7,5 %	Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif akan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota	Pendanaan melalui APBN dan mitra pembangunan.
		2	Mendukung perlindungan sosial adaptif agar responsif terhadap	ProP: - Bantuan Keluarga, Pendidikan, dan	Jumlah Keluarga Miskin Penerima	N/A	1,5 juta keluarga	1,5 juta keluarga	Pengentasan kemiskinan periode tahun 2025-2029	

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
				Indikator	2024	2025			
		guncangan ekonomi, sosial, dan bencana	Kesehatan - Bantuan Energi dan Pangan - Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan	Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi dari Kemiskinan				dilaksanakan pada 10 provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan).	
		3 Mendorong kemandirian ekonomi dengan akses pada pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan, melalui kartu usaha afirmatif	KP:Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (%)	60% (2023)	65%	70%		
		4 Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan melalui	ProP: - Penguatan Kapasitas Kerja - Penguatan	Jumlah Penerima Manfaat Kartu	0	1 juta jiwa	1,5 juta jiwa		

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
				Indikator	2024	2025			
		sinkronisasi program-program pemberdayaan yang terintegrasi dengan pendampingan intensif dan berkelanjutan	Kewirausahaan Afirmatif	Usaha Afirmatif yang Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan					
		5 Menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan melalui pemanfaatan pemanfaatan DTSEN sebagai acuan utama							
		6 Mendorong interoperabilitas sistem data antarprogram dan antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program							
		7 Meningkatkan inklusi sosial dan akses layanan dasar bagi kelompok rentan seperti lansia,							

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
				Indikator	2024	2025			2026
		penyanggah disabilitas, dan perempuan kepala keluarga							
		8 Mendorong graduasi bantuan sosial melalui peningkatan kemandirian ekonomi, terutama dengan kesempatan berusaha dan bekerja yang merata dan afirmatif bagi penduduk miskin dan rentan							
		9 Mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat rentan melalui integrasi layanan digital							
5	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	KP: Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Jumlah Berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP)	-	80.000	-	Seluruh desa/kelurahan di Indonesia, dengan prioritas pengembangan berdasarkan potensi ekonomi dan	APBN, APBD, Dana Desa, dan BUMN melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)
		2 Menekan tingkat kemiskinan ekstrem	ProP: - Peningkatan	Terjaganya Rasio	-	-	30%		

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan
				Indikator	2024	2025		
			Kapasitas Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Modal Sendiri Terhadap Total Aset KMP				kesiapan kelembagaan.
		3 Menciptakan lapangan kerja	RO Kunci: -Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*					
		4 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi	- Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*					
		5 Modernisasi manajemen sistem perkoperasian	- Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*					
		6 Menekan harga di tingkat konsumen	Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*					
		7 Meningkatkan harga di tingkat petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik	- Pendampingan Produksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih					

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan
				Indikator	2024	2025		
		8 Mewujudkan rantai pasok yang efektif	Putih* -Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa - Grand Design Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* - Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Koperasi - Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani - Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pembentukan dan					

No	Program Direktif Presiden	Tujuan Program	Kegiatan Prioritas	Target dan Indikator			Lokasi Prioritas	Sinergi Pendanaan	
				Indikator	2024	2025			
			Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*						

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, 2025

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Program Prioritas Daerah didasarkan pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi sasaran pembangunan tahun 2026. Program prioritas daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (*visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan*) sesuai dengan Rancnagan RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 Prioritas pembangunan dan 25 (dua puluh lima) program prioritas daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
 - a. Program Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dan Layanan Pengobatan Tradisional;
 - b. Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui;
 - c. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;
 - d. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi;
 - f. Program Peningkatan Inovasi.
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif
 - a. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
 - b. Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;
 - c. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksimelalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
 - d. Program Peningkatan dan pemerataan investasi;
 - e. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
 - f. Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
 - g. Terkendalnya stabilitas ekonomi makro daerah;
 - h. Meningkatnya digitalisasi pada sektor-sektor ekonomi strategis;
 - i. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

- sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri;
- j. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan;
 - k. Program Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
 - l. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan.
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya
- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
 - b. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;
 - c. Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi;
 - d. Program Pengurangan Risiko Bencana;
 - e. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Perubahan Iklim;
 - f. Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*
- a. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan;
 - c. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2026 disusun berdasarkan isu strategis daerah, dan janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 serta penelaahan prioritas nasional, Provinsi Jawa Barat. Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan penting untuk menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi gambaran umum daerah, memperhatikan

dinamika isu strategis global dan nasional. Adapun isu strategis di Kabupaten Sukabumi tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Transformasi perekonomian daerah berbasis sumber daya alam berkelanjutan dengan mengedepankan risiko kebencanaan.
2. Pemetaan akses terhadap sumber daya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan yang berbasis nilai spiritual dan sosial.
3. Pemetaan akses dan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, serta infrastruktur pendukung perekonomian daerah.
4. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan daya saing daerah di tengah perkembangan global.
5. Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing global yang tercermin dari integrasi nilai budaya, akhlak mulia, iman dan takwa.
6. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
7. Transformasi digital untuk pembangunan daerah yang berkah dan berdaya saing.

Berdasarkan isu strategis, strategi dan arah kebijakan di tahun 2026 ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata
2. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif
3. Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq
4. Membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi. Program prioritas tahun 2026 untuk penunjang prioritas pembangunan dan sasaran strategis daerah merupakan program unggulan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja utama (IKU) daerah. Program prioritas tersebut menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis, tujuan daerah, visi daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan tujuan, sasaran strategis dan program prioritas kabupaten sukabumi tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.4, Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi pada tabel 4.5, dukungan Program Prioritas terhadap Kegiatan Prioritas Nasional pada tabel 4.6.

dan dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Proyek Strategis Nasional pada Tabel 4.7.

Tabel 4.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Program Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
Prioritas Pembangunan I	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata			
1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	1.1.1.a Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan, akomodasi makan minum dan pertanian untuk mendorong perekonomian daerah	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) c. Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pemberdayaan UMKM Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Budidaya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
		1.1.1.b Meningkatnya kewirausahaan daerah untuk mendukung produktivitas	d. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan UMKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
		perekonomian daerah		
		1.1.1.c Menurunnya angka pengangguran daerah	e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Hubungan Industrial Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja
	1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah	1.1.2.a Mendorong upaya pengembangan investasi daerah yang berorientasi pada ekspor berbasis bahan baku lokal	a. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) b. Pertumbuhan Nilai Ekspor (%)	Promosi Penanaman Modal Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengembangan Ekspor
	1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	1.1.3.a Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		1.1.3.b Meningkatnya kegiatan pembangunan rendah karbon (per sektor sesuai kewenangan kabupaten) berorientasi pada	b. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Program Penyelenggaraan LLAJ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
		penurunan emisi GRK		
1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan	1.2.1 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)	Terjadinya peningkatan kualitas hidup sesuai dengan standar hidup layak melalui Pemerataan Akses Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	a. Persentase Pencapaian Tingkat Kemiskinan (Persen)	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan jaminan sosial Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Profil Kependudukan Perencanaan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Perizinan usaha pertanian Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi Sosial Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Hubungan Industrial Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Penyelenggaraan Jalan Pengembangan Perumahan Kawasan permukiman Penanganan Kerawanan Pangan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
		b. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat yang Ditandai dengan Pemerataan Akses Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan	b. Indeks Gini (Poin)	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan UMKM Program perencanaan dan Pembangunan Industri Penyelenggaraan Penataan Ruang
	1.2.2 Menurunnya tingkat kekurangan gizi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Perlindungan dan jaminan social Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Prioritas Pembangunan 2	Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata dan Inklusif			
2.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah	2.1.1 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	a. Tingkat Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (persen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program Penatagunaan Tanah
	2.1.2 Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang	Meningkatnya konektivitas dan kualitas jaringan jalan yang	a. Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			b. Rasio Konektivitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
	perekonomian yang berkualitas dan merata	menunjang perekonomian		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	d. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten	e. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas Pembangunan 3	Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq			
3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)	3.1.1 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	a. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) b. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Memenuhi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	3.1.2 Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Berkeadilan untuk Memperpanjang Masa Belajar dan Meningkatkan Kompetensi Generasi Muda	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pengelolaan Pendidikan
3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah	3.2.1 Meningkatnya pelestarian dan	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam	a. Indeks Literasi Daerah	Pengembangan bahasa dan Sastra Pembinaan perpustakaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)	pengembangan budaya lokal	Memahami Budaya melalui literasi		
		Menguatnya Identitas dan Ketahanan Budaya Lokal	b. Persentase Pemajuan Kebudayaan	Pengembangan kebudayaan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pengembangan kesenian tradisional Pengembangan kebudayaan Pengembangan kebudayaan
	3.2.2 Meningkatkan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kesetaraan gender dan peran aktif pemuda di berbagai aspek kehidupan	a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Peningkatan Kualitas Keluarga Perlindungan Khusus Anak Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		Penurunan Prevalensi Stunting untuk mewujudkan Generasi sehat, cerdas dan produktif	b. Penurunan Prevalensi Stunting	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera
Prioritas Pembangunan 4	Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Akuntabel			
4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel	4.1.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Akuntabel, dan Berorientasi Hasil	a. Persentase pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi	Pengembangan sumber daya manusia Kepegawaian Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan Barang Milik daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan arsip Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
				Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Administrasi Pemerintah Desa Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dan pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Penelitian dan Pengembangan Daerah Riset dan Inovasi Daerah Pengelolaan Pendidikan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program pengembangan perumahan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanggulangan Bencana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Pemerintahan dan Otonomi Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis	4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi	Menguatnya Kapasitas Pemerintah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang adaptif	a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Institusi (Poin)	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pengelolaan aplikasi informatika

Tabel 4.5. Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Nasional	Provinsi	Kabupaten
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1).	P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	P4. Membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN2).	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata P2. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif P3. Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN3).	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata P2. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN4)	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan,	P1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata P2. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif P3. Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq

Nasional	Provinsi	Kabupaten
	serta Miskin dan Kaya	
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN5).	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan(P6).	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P2. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan (PN7).	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	P3. Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq P1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata P4. Membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN8)	P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P3. Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq P2. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif

Tabel 4.6. Dukungan Program Perangkat Daerah Pada Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)"	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
2	Prioritas Nasional 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru"	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Fund le Invest		
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah		
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan		
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan		
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
		Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan		
		Peningkatan Penyediaan Energi		
		Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi		
Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan				

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Konservasi Sumber Daya Air		
		Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa		
		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
		Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		
		Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik		
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut		
		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Prioritas Nasional 3 "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya		
		Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi"	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		
		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena		
		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba		
		Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo		
		Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim		
		Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
4	Prioritas Nasional 4 "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas"	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas		
		Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah		
		Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul		
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi		
		Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
		Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pencegahan dan Penurunan Stunting		
		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
Penuntasan TBC				
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita				

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi		
		Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis		
		Investasi pelayanan kesehatan primer		
		Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses		
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
5	Prioritas Nasional 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri"	Pengembangan Hilirisasi Nikel		
		Pengembangan Hilirisasi Tembaga		
		Pengembangan Hilirisasi Bauksit		
		Pengembangan Hilirisasi Timah		
		Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit		
		Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut		
		Pengembangan Industri Kimia		
		Pembangunan Industri Semikonduktor		
		Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja		
		Pengembangan Industri Dirgantara		
		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
		Pengembangan KIT Batang		
		Pengembangan KI Weda Bay		
6	Prioritas Nasional 6 "Membangun dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan"	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif		
		Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif		
		Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemandahan ke Ibu Kota Nusantara		
		Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa		
		Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN		
7	Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan"	Transformasi Digital Layanan Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Diskominfo
		Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas RPJMN 2025 - 2029	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
8	Prioritas Nasional 8 "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur"	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
		Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

Tabel 4.7. Dukungan Program Perangkat Daerah Pada Proyek Strategis Nasional Tahun 2026

No	Proyek Strategis Nasional	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Program Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketanahan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
3	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap dan Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
4	Program Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
5	Layanan Irigasi Pendukung Ketahanan Pangan Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
6	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan
7	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketanahan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian

No	Proyek Strategis Nasional	Dukungan Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
10	Pembangunan tiga Juta Rumah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan dan Kawasam Permukiman
11	Pengelolaan Sampah Terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
12	Sekolah Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
13	Koperasi Merah Putih	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.2.4 Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Proyek prioritas Kabupaten Sukabumi merupakan fokus pembangunan daerah yang berasal dari janji- janji politik Kepala Daerah terpilih dalam upaya mewujudkan visi-misi yang sudah ditetapkan. Terdapat 11 (sebelas) proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Rancangan RPJMD 2025-2029. Deskripsi proyek prioritas dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Generasi Mencrang (Mandiri, Cerdas, dan Gemilang)**

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, *Generasi Mencrang* (Mandiri, Cerdas, dan Gemilang) ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2025-2029. Program ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah inisiatif strategis yang digagas sebagai realisasi janji politik bupati dan wakil bupati terpilih untuk mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Dengan menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai landasan, *Generasi Mencrang* diharapkan mampu menjadi katalis perubahan sekaligus pintu gerbang kesejahteraan masyarakat Sukabumi yang lebih luas dan merata.

Program utama yang diusung dalam *Generasi Mencrang* mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan serta upaya mempersiapkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah. Salah satu pilar utamanya adalah pemberian *Beasiswa Generasi Mencrang*, yang secara khusus menyasar para hafidz al-qur'an serta siswa yang rawan putus sekolah (DO). Program beasiswa ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan sanggup menjawab tantangan rendahnya capaian pendidikan di kalangan tertentu, namun juga sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang keagamaan. Dengan adanya ruang yang lebih besar bagi para penghafal Al-Qur'an dan anak-anak yang berisiko putus sekolah, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah di Sukabumi yang tersisih akibat keterbatasan ekonomi maupun sosial.

Tidak hanya berhenti pada pemberian beasiswa, akselerasi kualitas SDM juga dilakukan melalui pengembangan sekolah berbasis vokasi. Kebijakan ini menjadi solusi strategis atas ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang selama ini menjadi tantangan besar, khususnya di Sukabumi yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan pariwisata. Melalui penguatan sekolah vokasi, para generasi muda didorong untuk mengembangkan keterampilan praktis, pengetahuan teknis, dan mental

kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan pertanian lokal. Langkah ini diyakini akan memperkuat daya saing lulusan sekolah di pasar kerja sekaligus menekan angka pengangguran terdidik di daerah.

Selaras dengan penguatan vokasi, pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis pertanian dan pariwisata merupakan strategi penting lain dalam program ini. Kurikulum ini dirancang agar siswa mengenal, memahami, dan mencintai kekayaan alam, budaya, serta kearifan lokal Sukabumi. Materi pembelajaran yang kontekstual diharapkan dapat menumbuhkan semangat inovasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah sejak dini, sekaligus mendorong lahirnya generasi pelaku usaha baru di bidang pertanian dan pariwisata milik Sukabumi sendiri.

Komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan juga diwujudkan melalui pemberian beasiswa pendidikan sarjana bagi anak-anak keluarga petani dan buruh migran. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah namun masih menghadapi beragam keterbatasan, khususnya dalam mengakses pendidikan tinggi. Melalui dukungan dana pendidikan, anak-anak keluarga marginal diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, serta menjembatani kesenjangan sosial yang selama ini masih terasa.

Seluruh poin utama *Generasi Mencrang* menjadi manifestasi dari keseriusan bupati dan wakil bupati terpilih dalam memenuhi janji politik mereka. Program ini akan didorong dalam kerangka kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga perguruan tinggi. Melalui keberpihakan dan inovasi, *Generasi Mencrang* diharapkan menjadi lokomotif perubahan, membangun generasi Sukabumi yang mandiri, cerdas, dan gemilang demi terwujudnya masa depan yang lebih baik untuk semua.

1.1 Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Hafidz Al-Quran

Konsep kunci dalam program Generasi Mencrang meliputi upaya strategis pemerintah Kabupaten Sukabumi membuka akses pendidikan yang lebih inklusif, khususnya bagi siswa hafidz Al-Quran dan siswa yang rentan putus sekolah. Program beasiswa pendidikan untuk siswa hafidz Al-Quran diluncurkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya pembentukan sumber daya manusia yang religius dan berkarakter sejak usia dini. Sasaran utama program ini adalah siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran (disertai bukti sertifikat dan prestasi), maupun mereka yang terancam putus sekolah akibat kendala ekonomi.

Beasiswa ini tidak hanya bersifat penghargaan, namun juga sebagai strategi menekan angka putus sekolah. Dukungan program ini selaras dengan misi besar pemerintah daerah, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, serta berbasis ilmu pengetahuan dan keimanan-ketaqwaan. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi dalam menciptakan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan program beasiswa melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, melalui mekanisme seleksi yang ketat bekerja sama dengan lembaga terkait di bidang hafidz Al-Quran. Selain memastikan penerima tepat sasaran, proses evaluasi juga rutin dilakukan untuk mempertimbangkan kelanjutan pemberian beasiswa berdasarkan perkembangan kemampuan hafalan Al-Quran. Sumber anggaran berasal dari APBD, dengan perencanaan target sebanyak 200 siswa SD dan 300 siswa SMP. Dengan konsep demikian, program ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter religius dan penguatan generasi masa depan Sukabumi yang mandiri, cerdas, dan gemilang.

1.2 Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri

Konsep kunci dari program *Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi* tersebut berfokus pada peran strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis sektor unggulan daerah, serta memberikan beasiswa vokasi bagi lulusan SMA/ sederajat agar dapat mengakses pendidikan kejuruan yang lebih relevan dengan dunia kerja. Hal ini selaras dengan misi membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan.

Target program meliputi pendirian dua SMK kejuruan baru di bidang pariwisata dan pertanian serta pemberian beasiswa kepada siswa vokasi, agar terjadi pemerataan pendidikan berkualitas dan penyiapan angkatan kerja yang berdaya saing. Program ini dianggarkan sebesar dua miliar rupiah per tahun yang bersumber dari APBD, dengan penanggung jawab utama adalah Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif. Dinas Pendidikan bertugas membangun jejaring dengan UPTD Provinsi Jawa Barat untuk pendirian SMK, termasuk memastikan masuknya usulan pembangunan ke dokumen perencanaan provinsi dan pengadaan lahan. Sementara untuk beasiswa vokasi, Bagian Kesra memfasilitasi kerja sama dengan lembaga vokasi dalam dan luar negeri, menyeleksi dan menyalurkan hibah pendidikan, sekaligus melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan distribusi dana

hibah. Dengan konsep ini, pengembangan sekolah berbasis vokasi diharapkan mendorong terciptanya generasi muda Sukabumi yang siap masuk dunia kerja sesuai kebutuhan daerah dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

1.3 Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis Pertanian dan Pariwisata

Konsep kunci dari program Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pertanian dan Pariwisata berfokus pada adaptasi kurikulum nasional agar lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah Kabupaten Sukabumi. Melalui integrasi muatan lokal ke dalam pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, program ini bertujuan memperkaya wawasan siswa tentang budaya, sejarah, serta kekuatan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Salah satu inovasi utama adalah penerapan kurikulum KASEPUHAN yang mencakup konsep kehidupan alam, agama, seni, etika, peradaban, nilai universal, dan harmoni alam Nusantara. Kurikulum ini dirancang sebagai model yang akan diterapkan di setiap kecamatan, terutama pada jenjang SD dan SMP yang berada di kawasan strategis.

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan kunci, mulai dari identifikasi potensi lokal di bidang pertanian dan pariwisata, survei kebutuhan siswa, hingga konsultasi dengan para ahli serta pelaku industri terkait. Materi muatan lokal diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, PKn maupun mata pelajaran muatan lokal lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap potensi daerah. Pembelajaran dirancang dalam bentuk proyek, kunjungan lapangan, praktik langsung, serta modul berbasis pengalaman dan teknologi interaktif. Tidak hanya itu, program ini juga memberi pelatihan kepada guru, mengundang narasumber dari sektor terkait, dan mendorong kolaborasi dengan pelaku industri agar proses pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan menarik.

Penanggung jawab utama program ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dengan dukungan anggaran dari APBD. Seluruh proses dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas integrasi dan relevansi materi, serta mengembangkan keberlanjutan program berdasarkan hasil umpan balik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemuda Sukabumi tumbuh menjadi generasi yang paham, cinta, dan mampu memajukan potensi daerahnya.

1.4 Beasiswa Pendidikan Sarjana untuk Keluarga Petani dan Buruh Migran

Konsep kunci dari program Beasiswa Pendidikan Sarjana untuk Keluarga Petani dan Buruh Migran adalah pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sukabumi, terutama yang berprestasi dan berasal dari keluarga petani dan buruh migran. Bantuan ini tujuannya tidak hanya agar mereka dapat menempuh pendidikan strata satu di universitas dalam negeri, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Sukabumi. Program ini diharapkan dapat mendorong para penerima beasiswa untuk kembali dan mengabdikan di daerahnya setelah menyelesaikan studi, sebagai upaya menciptakan SDM unggul, berbudaya, dan berbasis iptek serta imtaq sesuai misi pembangunan daerah.

Selain aspek bantuan pembiayaan, konsep kunci lain terletak pada upaya mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata bagi kelompok masyarakat yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi. Dengan sasaran strategis anak-anak petani dan buruh migran yang punya prestasi, program ini berupaya mempersempit kesenjangan sosial serta meningkatkan mobilitas sosial dalam masyarakat. Targetnya adalah pendistribusian beasiswa kepada lebih dari seribu mahasiswa setiap tahun dengan anggaran dari APBD yang dikelola secara hibah atau swakelola melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan program diawali dengan sosialisasi dan fasilitasi, seleksi calon penerima oleh Dinas Pendidikan, hingga penyaluran hibah ke universitas tujuan. Pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, dan bagian tata pemerintahan, termasuk pembentukan tim pendamping yang bertanggung jawab atas monitoring serta evaluasi. Dengan konsep ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya memastikan tidak ada potensi daerah yang terabaikan dan seluruh anak daerah mendapat peluang maju setara menuju generasi Sukabumi yang mandiri, cerdas, dan gemilang.

2. Program Sukabumi Sakti (Sukabumi sehat, kuat, dan inspiratif)

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat lahir dan batin, Pemerintah Kabupaten Sukabumi merumuskan Program Prioritas Sukabumi Sakti (Sukabumi Sehat, Kuat, dan Inspiratif) untuk tahun 2025–2029. Program ini merupakan gambaran nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkeadilan, penguatan layanan berbasis desa, serta edukasi dan pembiasaan pola hidup sehat. Sukabumi Sakti lahir sebagai respons atas tantangan kesehatan yang masih membayang-bayangi masyarakat Sukabumi, mulai dari kesenjangan akses terhadap layanan medis, rendahnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat, sampai

permasalahan gizi yang masih menghantui kelompok rentan, terutama masyarakat miskin di wilayah rural maupun urban.

Salah satu pilar utama dari Sukabumi Sakti adalah Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin. Pemerintah daerah menegaskan keberpihakannya pada kelompok termarjinalkan dengan memastikan masyarakat miskin dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa beban biaya. Program ini dirancang agar seluruh warga yang memenuhi kriteria kurang mampu, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan terpencil, dapat layak mendapatkan perawatan medis, layanan rawat jalan, hingga obat-obatan esensial yang mereka butuhkan. Inovasi pembiayaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi strategi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan, tidak ada lagi warga Sukabumi yang menunda atau bahkan mengabaikan kebutuhan medisnya hanya karena hambatan ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah memperkuat layanan dasar kesehatan melalui inovasi Dokter Bina Desa. Inisiatif ini merupakan langkah strategis guna mendekatkan layanan medis kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang selama ini minim akses terhadap dokter atau tenaga kesehatan profesional. Setiap desa yang masuk program akan didampingi dokter dan tim kesehatan yang secara rutin melakukan kunjungan, pemeriksaan kesehatan, edukasi penyakit, serta pendampingan penanganan kasus berat. Tidak hanya bersifat kuratif, peran Dokter Bina Desa juga mencakup pemberdayaan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa terhadap fasilitas medis lokal, serta menurunkan angka penyakit yang tidak tertangani akibat keterbatasan akses layanan.

Sejalan dengan penguatan sisi layanan, Sukabumi Sakti menegaskan pentingnya Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat di keluarga dan lingkungan masyarakat. Pemerintah mendorong perubahan perilaku melalui berbagai bentuk intervensi, baik edukasi langsung, kampanye publik, maupun pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal. Kegiatan seperti sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), gerakan cuci tangan, penyediaan fasilitas sanitasi, hingga pemantauan kebersihan lingkungan dilakukan secara berkesinambungan. Intervensi ini menarget perilaku sederhana namun berdampak besar dalam mencegah penularan penyakit menular ataupun penyakit tidak menular akibat lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran dan praktik hidup bersih, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat menumbuhkan perilaku preventif sejak dini sebagai modal penting menuju Sukabumi yang sehat dan tangguh.

Tak kalah penting, Sukabumi Sakti menempatkan Peningkatan Pengetahuan Warga tentang Gizi Seimbang sebagai program yang diperkuat. Pemerintah daerah

mengedepankan edukasi dan layanan konseling gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan remaja. Melalui penyuluhan, distribusi informasi, serta pendampingan di posyandu dan puskesmas, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya asupan gizi seimbang dalam tumbuh kembang anak, peningkatan produktivitas, serta pemeliharaan kesehatan sepanjang hayat. Program ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga mengajak masyarakat mempraktikkan pola makan dan menu sehat sesuai potensi pangan lokal. Harapannya, status gizi masyarakat Sukabumi dapat meningkat signifikan, sekaligus menurunkan angka stunting, anemia remaja, dan masalah gizi lain secara berkelanjutan.

Dengan integrasi keempat pilar utama tersebut, Sukabumi Sakti hadir sebagai bukti nyata bahwa pembangunan berbasis kesehatan adalah fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, kuat, dan inspiratif. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak atas kesehatan, sembari membangun kultur masyarakat yang peduli akan kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan gizi untuk masa depan yang lebih gemilang.

2.1 Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin

Konsep kunci dari program Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Sukabumi adalah pemberian akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan tanpa biaya bagi warga tidak mampu. Program ini secara khusus menyasar masyarakat miskin atau rentan miskin yang sering tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena kendala finansial. Salah satu strategi utama dalam program ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari APBD untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan dasar di fasilitas milik pemerintah, termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah. Dengan pelaksana utama Dinas Kesehatan dan menggandeng Dinas Sosial, pemerintah daerah melakukan proses verifikasi penerima manfaat supaya program tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan skema jaminan kesehatan nasional.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan, serta pemberian obat-obatan esensial. Selain itu, program ini juga mendorong kemudahan administrasi melalui sistem rujukan terpadu dan integrasi data penerima program kesehatan nasional agar masyarakat miskin di luar peserta BPJS tetap terlayani dengan baik. Pengelolaan program dilakukan secara terintegrasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit, disertai prosedur penjaminan klaim yang sederhana namun akuntabel.

Dengan pendekatan ini, program ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan angka cakupan layanan medis bagi masyarakat miskin, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan

sosial serta menurunkan beban biaya kesehatan rumah tangga. Harapannya, ke depan tidak ada lagi warga Sukabumi yang menunda atau bahkan mengabaikan pengobatan karena keterbatasan ekonomi, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini menjadi pijakan utama bagi terwujudnya misi Sukabumi yang sehat, kuat, dan inspiratif.

2.2 Dokter Bina Desa

Konsep kunci dari program Dokter Bina Desa adalah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, merata, dan proaktif bagi masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi, khususnya yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap tenaga medis profesional. Program ini menempatkan dokter sebagai pendamping tetap di desa-desa prioritas, dimana mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan kuratif, tetapi juga menjadi motor penggerak promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Melalui pola pembinaan yang bersifat rutin dan terjadwal, dokter-dokter ini melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, konsultasi, penyuluhan penyakit, deteksi dini faktor risiko, serta penanganan masalah-masalah kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Kerja sama yang erat antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan kader kesehatan desa menjadi bagian sentral dalam menjalankan program ini. Dokter tidak berjalan sendiri, tetapi membangun sinergi dengan tenaga kesehatan lain seperti bidan, perawat, serta kader posyandu agar transfer ilmu dan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu inovasi dalam pelaksanaannya adalah pendataan menyeluruh kondisi kesehatan warga desa dan pelaporan masalah secara sistematis ke dinas terkait agar respons dan tindak lanjut lebih cepat dan tepat.

Selain memperbaiki akses layanan, program Dokter Bina Desa juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta pengetahuan tentang sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dari pembinaan dokter. Dengan konsep menyeluruh ini, pemerintah daerah berharap terjadi penurunan angka penyakit berbasis lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, mewujudkan Sukabumi yang sehat, kuat, dan inspiratif secara merata di seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil.

2.3 Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Program Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu pilar dalam program strategis Sukabumi SAKTI, yang menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini dirancang untuk mendorong perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.

Program ini tidak hanya fokus pada aspek edukatif, tetapi juga membangun sistem sosial dan lingkungan yang mendukung transformasi perilaku sehat melalui kolaborasi lintas sektor dan melibatkan komunitas. Tujuan utama dari program ini mencakup enam poin strategis:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya PHBS;
2. Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat dan bersih;
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui perilaku sehat;
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan;
5. Memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil penggerak PHBS;
6. Mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

Pelaksanaan program ini disinergikan dengan lokasi-lokasi prioritas Kabupaten Sukabumi Sehat, guna mendukung pencapaian status Wistara Paripurna, melalui penataan dan pembinaan terhadap sembilan tatanan Kabupaten Sehat. Target utama dari program ini adalah penguatan dan penataan sembilan tatanan tersebut, yang mencakup antara lain tatanan kawasan permukiman, satuan pendidikan, pasar, tempat kerja, dan tempat ibadah.

Total kebutuhan anggaran untuk mendukung program ini adalah Rp500 juta, yang dialokasikan melalui dua mekanisme:

- APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi,
- Hibah kepada Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas implementasi di lapangan.

Program ini berada dalam kerangka besar Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Rangkaian aktivitas utama meliputi:

- Pembinaan terhadap sembilan tatanan Kabupaten Sukabumi Sehat untuk menciptakan lingkungan hidup yang mendukung PHBS;
- Penerapan sistem penghargaan dan insentif (reward) kepada wilayah/lokus yang berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan PHBS;
- Pelibatan tokoh lokal, komunitas sosial, dan relawan, yang secara aktif menyebarkan edukasi PHBS melalui kampanye digital, media sosial, dan kegiatan komunitas berbasis event offline.

Program ini secara langsung mendukung arah pembangunan Kabupaten Sukabumi, dengan kontribusi nyata terhadap:

1. Misi pembangunan SDM unggul dan berbudaya berbasis Iptek dan Imtaq;
2. Sasaran strategis meningkatnya integrasi layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
3. Arah kebijakan peningkatan sumber daya kesehatan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan perilaku sehari-hari.

Dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan, Program Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat diharapkan menjadi salah satu pengungkit utama dalam membentuk masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan semangat Sukabumi SAKTI.

2.4 Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang

Program Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang merupakan program keempat dari program prioritas dalam inisiatif Sukabumi SAKTI, yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan sesuai prinsip gizi seimbang—sebagai fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang, daya tahan tubuh, serta produktivitas masyarakat di semua jenjang usia.

Program ini menasar seluruh lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia, yang disinergikan dengan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting, khususnya pada 142.539 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan program ini dibiayai melalui mekanisme reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar.

Program ini akan dilaksanakan melalui kerangka Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Turunan kegiatan

dari program ini berada dalam lingkup Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Adapun bentuk aktivitas konkret dari sub kegiatan tersebut meliputi:

- Posyandu Gizi sebagai garda terdepan dalam layanan gizi berbasis masyarakat;
- Kampanye “Isi Piringku” untuk mengedukasi masyarakat tentang komposisi makanan sehat sehari-hari;
- Intervensi Stunting dengan pendekatan multidimensi berbasis keluarga risiko stunting;
- Edukasi Gizi di Sekolah dan Komunitas, untuk membentuk pola konsumsi sehat sejak usia dini dan memperkuat peran masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi keluarga.

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang mendukung pencapaian arah pembangunan daerah melalui:

1. Misi: Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, serta berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan (Iptek dan Imtaq);
3. Sasaran Strategis: Terwujudnya integrasi layanan kesehatan yang merata dan berkesinambungan;
4. Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan serta memperkuat peran aktif masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan berbasis data, Program Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pola hidup sehat di tingkat rumah tangga, serta turut berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Sukabumi.

3. Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya

Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang komprehensif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Program ini dirancang sebagai langkah strategis dalam membangun generasi muda yang berdaya saing, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, serta nasionalisme.

Melalui pendekatan berbasis penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pemuda dalam berbagai sektor kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun kepemimpinan.

Program ini memiliki tujuan utama untuk:

- Meningkatkan keterampilan dan kapasitas pemuda dalam bidang kewirausahaan dan kepemimpinan,
- Mendorong pembentukan karakter dan jiwa kebangsaan di kalangan pemuda,
- Memberikan ruang kreasi dan aktualisasi bagi organisasi kepemudaan dan pemuda berprestasi,
- Mengembangkan ekosistem kepemudaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sasaran utama dari Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya adalah:

- Pemuda umum sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 40 Tahun 2009,
- Wirausaha muda dan pemuda kreatif,
- Organisasi kepemudaan tingkat lokal,
- Pemuda berprestasi yang memiliki potensi untuk menjadi pelopor pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini mencakup beberapa kegiatan inti yang dilaksanakan secara terstruktur, dengan total anggaran sebesar Rp2 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi melalui skema pembiayaan reguler dan hibah. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Festival Kreativitas Pemuda

Diselenggarakan sebagai ajang kolaborasi dan aktualisasi kreativitas pemuda melalui Youth Camp tingkat kabupaten yang menampilkan festival seni, budaya, serta forum diskusi kepemudaan. Kegiatan ini termasuk dalam sub kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Fokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing wirausaha muda melalui pelatihan kewirausahaan, sertifikasi kompetensi (BNSP), pengembangan konten kreatif digital, serta fasilitasi sarana inkubasi usaha. Ini menjadi bagian dari sub kegiatan pengembangan wirausaha pemula tingkat kabupaten.

3. Pameran Produk Kreatif Pemuda

Menyediakan ruang ekspresi dan promosi bagi produk inovatif karya wirausaha muda melalui gelar produk kreatif pemuda. Pameran ini sekaligus menjadi ajang membangun jejaring pasar dan kolaborasi lintas sektor.

4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Memberikan dukungan berupa hibah dan pelatihan tata kelola organisasi, serta pelatihan softskill kepemimpinan dan kepeloporan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas organisasi pemuda agar lebih adaptif dan profesional.

Program ini diimplementasikan melalui kerangka besar Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan utama berupa:

- Kegiatan dalam bentuk Youth Camp,
- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dan komunitas,
- Peningkatan kompetensi dan karakter pemuda secara berkelanjutan.
- Gelar Produk Wirausaha pemuda pemula

Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan daerah, dengan peran strategis terhadap:

1. Misi: Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan;
2. Sasaran Strategis: Meningkatkan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender;
3. Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah secara aktif dan kolaboratif.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan, Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan pemuda Kabupaten Sukabumi menuju generasi yang tangguh, cakap, dan mampu berperan sebagai agen perubahan di masa depan.

4. Program Permata Suci (Program PERempuan MAndiri dan TAngguh untuk SUkabumi Cemerlang dan Inovatif)

Program Permata Suci adalah program Pemberdayaan perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi perempuan di segala bidang. Program Permata Suci menekankan pada peningkatan kapasitas/keterampilan perempuan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, mencapai kesetaraan gender, serta mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Permata Suci memiliki lima fokus utama, yaitu: Pendidikan, Kesetaraan gender, Kesehatan, Ekonomi dan Pengembangan potensi diri perempuan.

Tujuan Program Permata Suci adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga, mencapai kesetaraan gender, serta mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sasaran Program ini adalah Kelompok perempuan yang pernah mendapatkan pelatihan program Perempuan Hebat untuk Keluarga yang Berkualitas dengan target peserta 4700 orang perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Permata Suci dibiayai melalui mekanisme anggaran regular yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi dengan proyeksi anggaran sebesar 1 (satu) miliar.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Permata Suci melibatkan beberapa dinas terkait, yaitu: DP3A, DKUKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Disnakertrans. DP3A dalam implementasi Program Permata Suci melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga. Kegiatan yang dilaksanakannya adalah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Rancangan aksi kegiatannya dibagi kedalam dua kegiatan, yaitu Pelatihan Pemberdayaan ekonomi keluarga dan Pemberian bantuan permodalan kepada kelompok perempuan

Program Permata Suci merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung misi Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq dengan sasaran strategis meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender serta arah kebijakan meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

5. Program Trendi (Program pesantREN melek Digital)

Program Trendi merupakan Program Pemberdayaan Pesantren melalui Penerapan Teknologi Informasi baik di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi (Pengembangan Kewirausahaan Pesantren Berbasis Digital). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memasarkan produk ekonomi secara digital dan kemampuan membuat laporan keuangan usaha ekonomi berbasis digital. Program ini difokuskan pada pesantren-pesantren yang memiliki usaha ekonomi. Program Trendi menargetkan 10 pesantren untuk dibina setiap tahunnya.

Program Trendi dilaksanakan oleh DKUKM dirancang melalui program pemberdayaan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM yang difokuskan untuk pesantren diturunkan dalam kegiatan berupa Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Rancangan aktivitas yang disusun dalam sub kegiatan ini adalah:

- Bimbingan Teknis Digitalisasi Pemasaran Usaha Ekonomi Bagi Pesantren
- Bimbingan Teknis Literasi Keuangan Berbasis Digital Bagi Pesantren
- Bimbingan Teknis Visualisasi, Fotografi dan Videografi Produk Pelaku Usaha Mikro Berbasis Pesantren

6. Program Usaha Memakmurkan Masjid

Program Usaha Memakmurkan Masjid merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan menitik beratkan pada upaya pembangunan masjid sebagai rumah peribadatan yang mengedepankan pemberdayaan masjid serta pembinaan kaum muslimin.

Proyek Prioritas Usaha Memakmurkan Masjid bertujuan untuk Meningkatkan fungsi masjid, Membangun dan membina masjid. Mendorong pendidikan keagamaan, dan Memperkuat peran masjid dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Sasaran Program ini adalah masjid dan mushola. Pada Program Usaha Memakmurkan Masjid, target yang ingin dicapai adalah membina 47 masjid/mushola setiap tahun. Proyek Prioritas ini dilaksanakan secara terpadu lintas perangkat daerah dan organisasi keagamaan di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Proyek prioritas ini difasilitasi melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program/Kegiatan/subkegiatan yang relevan di setiap Perangkat Daerah. Rancangan aktivitas yang akan dilakukan meliputi:

- Pembangunan/rehabilitasi sarana keagamaan
- Pembentukan Qoryah Mubarakah melalui strategi pemberdayaan masjid. Pola pemberdayaan yang dilakukan bersifat lintas sektor dan bersinergi dengan beberapa program pemberdayaan lainnya. Beberapa pemberdayaan yang bisa dilakukan, Contohnya:
 - ❖ Diskusi keislaman untuk generasi muda
 - ❖ Pelatihan membaca Al-Qur'an bagi anak-anak dan dewasa
 - ❖ Pelatihan kewirausahaan berbasis syariah
 - ❖ Perpustakaan Islam yang terbuka untuk masyarakat.
 - ❖ Pelatihan manajemen masjid agar lebih efektif dalam pelayanan
 - ❖ Pemanfaatan teknologi dalam dakwah, seperti media sosial atau podcast Islami.
 - ❖ Peningkatan ketangguhan Umat dalam menghadapi bencana
 - ❖ dan pemberdayaan lainnya sesuai kondisi lokal
- Optimalisasi Kebijakan Majelis Taklim Aparatur
- Pembiasaan Akhlak Mubarakah di Sekolah Kewenangan Kabupaten

Kegiatan-kegiatan dalam Proyek Prioritas Usaha Memakmurkan Masjid mendukung terhadap misi membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel, sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif,

profesional dan adaptif, serta arah kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Prosedur Birokrasi.

7. Petani, Nelayan, UMKM-IKM Motekar (Mandiri dengan Optimalisasi TEKnologi secara terARah)

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan IKM. Upaya ini dilakukan melalui intervensi teknologi tepat guna yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta skalabilitas usaha masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap pembiayaan, pasar, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Program ini mendukung misi pembangunan daerah dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan daya saing daerah. Dengan sasaran strategis peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, arah kebijakan difokuskan pada pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha melalui fasilitasi sarana produksi, penguatan kapasitas kewirausahaan, serta pengembangan ekosistem usaha yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Melalui dukungan lintas perangkat daerah (Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, KUKM, dan Dagin) serta pemanfaatan anggaran yang terintegrasi, intervensi ini diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha unggul yang menjadi motor penggerak perekonomian lokal.

Untuk mendukung pengembangan UMKM Motekar, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro berupa **Subsidi Kredit Mikro Mitra Mubarakah**, yaitu program pembiayaan dengan subsidi bunga yang difokuskan bagi usaha mikro Produktif agar dapat lebih mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan menjadi UMKM Naik Kelas dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas yang menangani urusan UMKM bekerjasama dengan perbankan.

8. Pariwisata Berdaya (Berstandar dan Berbudaya)

Sebagai bagian dari upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengembangkan program penguatan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing

pariwisata berbasis potensi lokal melalui : Penguatan kelembagaan pengelola destinasi pariwisata, Penguatan Tata Kelola destinasi pariwisata, Penataan sarana dasar pariwisata, Penguatan Promosi Pariwisata, terutama penguatan event dan digitalisasi promosi, Penguatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi, Standarisasi pariwisata dalam aspek promosi, amenitas, dan standar pengelolaan destinasi.

Program ini sejalan dengan misi pembangunan daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata. Sasaran strategisnya mencakup Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Arah kebijakan difokuskan pada Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan; Mendorong ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing; Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis. Dengan alokasi anggaran yang memadai dan pendekatan kolaboratif, pengembangan pariwisata ini diharapkan mampu menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan citra daerah dan perekonomian lokal secara berkelanjutan.

9. Pembangunan Rumah Sakinah

Dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan inklusif, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan warga terdampak bencana. Program penyediaan rumah layak huni ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan sosial serta ekonomi penghuninya.

Program ini mendukung misi pembangunan daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran strategis program ini meliputi peningkatan kualitas permukiman, pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh, serta rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana. Melalui mekanisme hibah yang bersumber dari APBD, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019, program ini menargetkan pembangunan dan perbaikan setidaknya 1.100 unit rumah per tahun. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan permukiman yang manusiawi serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

10. Taman Interaksi Warga

Penyediaan Taman berbasis ruang terbuka hijau yang dirancang dengan konsep atau tema tertentu untuk menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung serta peningkatan kualitas hidup. Tema yang digunakan bisa berdasarkan unsur alam, budaya, hiburan, edukasi, atau konsep kreatif lainnya yang dilengkapi fasilitas informasi teknologi. Program Taman Interaksi Warga ini bertujuan untuk menciptakan Pembangunan taman-taman tematik yang dapat menjadi pusat aktivitas warga dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas teknologi informasi, olahraga, dan lain-lain.

Program ini mendukung misi pembangunan membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif. Sasaran strategis program ini meliputi peningkatan kualitas permukiman, pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh, serta rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif. Arah kebijakan difokuskan Untuk meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk menghadirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta taman-taman tematik yang unik, kreatif, dan fungsional. Kami percaya bahwa ruang-ruang publik yang tertata baik bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, ruang ekspresi budaya, serta sarana edukatif dan rekreatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami membangun lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

11. Program Tumaninah

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan wilayah dan penguatan konektivitas antar kawasan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menginisiasi Program Tumaninah, yakni program strategis pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. Program ini dirancang untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa, membuka keterisolasian wilayah, serta menciptakan stimulus pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata. Melalui konektivitas yang andal, akses masyarakat terhadap pelayanan publik, kawasan produktif, dan pusat pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Program ini merupakan bagian dari implementasi misi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif. Sasaran strategisnya adalah tersedianya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten, kegiatan ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis, pengentasan kawasan kumuh melalui

penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta penataan infrastruktur perdesaan dan gedung pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan dan preservasi ruas jalan strategis dan pembangunan beberapa jembatan prioritas di berbagai kecamatan. Selain itu, program ini juga mencakup pengadaan tanah, penyusunan dokumen teknis perencanaan (DED dan RC), serta pembangunan gedung perkantoran sebagai bagian dari lanjutan penataan kawasan Jajaway.

Melalui sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPTR, dan OPD lainnya, pelaksanaan Program Tumaninah diharapkan mampu mewujudkan infrastruktur wilayah yang tangguh, mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4.8. Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan dengan Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Proyek Prioritas	Program Prioritas
Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.	Generasi Mencrang 1. Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran	Pengelolaan Pendidikan
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.	Generasi Mencrang 2. Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	Generasi Mencrang 3. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis Pertanian dan Pariwisata	Pengembangan Kurikulum
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	Generasi Mencrang 4. Beasiswa pendidikan sarjana untuk keluarga petani dan buruh migran	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti 1. Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya	Meningkatnya integrasi	1. Meningkatkan sumber	Program Sukabumi Sakti	Pemenuhan Upaya

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Proyek Prioritas	Program Prioritas
	manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	layanan kesehatan secara merata	daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	2. Dokter Bina Desa	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti 3. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti 4. Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Program Permata Suci	Peningkatan Kualitas Keluarga
	Meningkatkan pertumbuhan	Meningkatnya	Pengembangan	Program Trendi	Program Pemberdayaan

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Proyek Prioritas	Program Prioritas
	ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata	produktivitas perekonomian daerah	kewirausahaan daerah		UMKM
	Membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Prosedur Birokrasi	Program Usaha Memakmurkan Masjid	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program relevan di Perangkat Daerah
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Intensifikasi pertanian berbasis teknologi, Peningkatan sumber daya manusia (SDM) industri, Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan inovasi, Pengembangan kewirausahaan daerah	Petani, Nelayan, UMKM-IKM Motekar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan; Mendorong	Pariwisata Berdaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Proyek Prioritas	Program Prioritas
	dan pariwisata		ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing; Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Pembangunan Rumah Sakinah	Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Taman Interaksi Warga	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif	Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	Program Tumaninah	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Kawasan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung

Sumber: Rancangan RPJMD 2025-2029,

4.2.5 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026 merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dalam RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2026. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil kajian dan pembahasan dari Badan Anggaran DPRD dan Pimpinan Fraksi-fraksi yang ditelaah dan dianalisis terhadap kondisi aktual yang dihadapi oleh daerah dan masyarakat sebagai permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, hasil evaluasi dari pelaksanaan rencana pembangunan Pemerintah Daerah yang diperoleh DPRD melalui hasil rapat/hearing, penjangkaran aspirasi melalui reses atau saran dan masukan dari masyarakat dan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Adapun saran dan masukan DPRD berupa arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2026, antara lain:

Tabel 4.9. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukabumi

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
1	Urusan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Kesehatan
	Peningkatan kualitas dan akses Sarana Prasarana Kesehatan.			
	Penyediaan Tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) di puskesmas dan Rumah Sakit			
	Optimalisasi Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses fasilitasi JKN bagi masyarakat			
	Ketersediaan Dokter di daerah terpencil.			
	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di RSUD dan Puskesmas			
	program penambahan untuk perbaikan gizi masyarakat penanganan dan pencegahan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi (AKB),			
2	Urusan Pendidikan	Persentase APK Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas dan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan			
	Standarisasi penyebaran /penempatan guru disetiap sekolah perlu dilakukan secara optimal.			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD dan SMP.			
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas SD dan SMP.			
	Meningkatkan dan menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang relevan untuk mewujudkan visi daerah			
3	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan dan Jembatan Jalan Kabupaten			
	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten			
	Peningkatan status jalan, seperti jalan desa menjadi jalan Kabupaten.			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
4	Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Jalan Permukiman dan Drainase Permukiman.			
	pemeliharaan PSU perumahan di Kabupaten Sukabumi.			
	Peningkatan pemenuhan Sarana Air Bersih, Sanitasi lingkungan MCK			
	Menyusun <i>grand design</i> dan <i>plan action</i> pencapaian target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).			
5	Urusan sosial	Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Sekretariat Daerah
	bidang keagamaan mulai sarana dan prasarana ibadah serta pendidikan keagamaan yang disampaikan masyarakat perlu diakomodir serta direncanakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Pemerintah Daerah, karena hal tersebut sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang religius.			
6	Urusan tenaga kerja dan transmigrasi			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
	Program padat karya bagi masyarakat.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan kerja dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi.			
	Peningkatan pengangguran terbuka, perlu diantisipasi melalui pelatihan produktif seperti Pelatihan Menjahit Non Institusional, Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor Non Institusional.			
	Kompetensi tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga yang perlu mendapat perhatian agar daya saing pekerja menjadi pertimbangan utama selain soal upah yang makin kompetitif antar daerah.			
7	Urusan pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Ketanahan Pangan
	Pengembangan potensi lokal hasil pertanian di Kabupaten Sukabumi seperti padi, ubi kayu dan lainnya.			
	Mengoptimalkan peran Perumda Agrobisnis dalam penyediaan ketersediaan pangan / ketahanan pangan dan pengstabilan harga.			
8	Urusan lingkungan hidup	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan koordinasi terhadap pengelolaan hutan pemanfaatnya, agar memperhatikan kelestarian hayati, terutama untuk daerah serapan air.			
	Perhatian terhadap pengelolaan sampah terpadu			
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik disetiap wilayah Kecamatan.			
9	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sampai tingkat Desa.			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
10	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase status desa mandiri	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembekalan kepada Para Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan Desa, agar lebih sinergis dengan rencana pembangunan di tingkat daerah.			
	Mengoptimalkan dan mengembangkan potensi Desa, seperti pembentukan dan pengembangan Desa Wisata, pengembangan BUMDES.			
11	Urusan perhubungan	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten (PJU)			
12	Urusan persandian, komunikasi dan informatika	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
	Peningkatan pelayanan jaringan untuk daerah-daerah yang blankspot, melalui kerjasama dengan penyedia jaringan (operator seluler).			
	Pengelolaan Berita dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi, cepat dan aman.			
13	Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Koperasi dan UKM
	fasilitasi bantuan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Sukabumi.			
	fasilitasi untuk promosi dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Sukabumi.			
	Fasilitasi bantuan untuk perizinan dan lisensi produk UMKM			
14	Urusan kebudayaan, pemudaan dan olah raga	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.			
	Pemberdayaan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
		yang dibina dan dikembangkan		
15	Urusan pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dibangun	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Pengembangan Destinasi Wisata berbasis potensi lokal			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang perlu ditambah sebagai sumber PAD.			
	Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pengembangan Destinasi wisata geopark ciletuh-Palabuhanratu, sebagai destinasi wisata wisatawan lokal dan mancanegara.			
16	Urusan pertanian,	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pertanian
	Sarana dan prasarana fasilitasi jalan dan irigasi untuk penunjang lahan pertanian			
	Bantuan untuk fasilitasi alat-alat pertanian dan sarana produksi pertanian			
	Penertiban Lahan pertanian yang beralih fungsi.			
	Fasilitasi Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para petani.			
17	Urusan Peternakan	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Peternakan
	Pengadaan bibit ternak (kambing, domba, sapi potong dan sapi perah)			
	Peningkatan dan fasilitasi pengembangan ternak yang dikelola oleh masyarakat			
19	Urusan perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral,	Persentase Jumlah IKM Mandiri	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Peragangan dan Perindustrian
	Fasilitasi Desain dan Cetak Kemasan Produk IKM (Pelatihan, Pengadaan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Akses Pasar).			
	Mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan murah bagi masyarakat.			

4.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah

Arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sukabumi, saat ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan potensi daerah. Ini mencakup program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sukabumi juga berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini tercermin dalam berbagai program, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta upaya untuk menjaga sumber daya alam. Secara umum, arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk mencapai visi "Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)". Visi ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup

4.3.1 Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, diiringi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Pembangunan kewilayahan dalam RPJMN memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan daya saing Kawasan.

Dalam RPJMN, Kabupaten Sukabumi berfokus pada 3 Kawasan, yaitu: kawasan pertumbuhan, kawasan swasembada pangan, air dan energi serta kawasan konservasi/rawan bencana.

1. **Kawasan Pertumbuhan:** Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor Sukabumi-Cianjur, Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, antara lain melalui:

- Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan Potensi dan masalah Perkotaan secara terpadu
- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
 - Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC)
 - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/ Kota, khususnya pada RSUD Kota Bogor (PHTC)
 - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/ Kota, khususnya pada RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi (PHTC)
 - Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
 - Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang
 - Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi
 - Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang
 - Urban Renewal pada kota-kota wisata, antara lain: Bogor dan Sukabumi
 - Pengembangan KEK Lido
 - Pengembangan kota agropolitan Sukabumi
2. **Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat** (Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur). Beberapa program dan kegiatan pembangunan yang akan diintervensi adalah:
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cipamingkis dan D. I. Ciletuh
 - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
 - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
 - Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri, DAS Cibuni

- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesangrahan, DAS Cimandiri
- Pembangunan infrastruktur PLTP Cisolok-Cisukarame
- Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kabupaten Sukabumi)
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OFT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

3. Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak (E1), TN Gede-Pangrango (E2), TN Ciremai (E3), dan Geopark Ciletuh (E4), Beberapa program dan kegiatan pembangunan yang akan diintervensi adalah:

- TN Halimun-Salak: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi
- TN Gede-Pangrango: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi
- TN Ciremai: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka
- Geopark Ciletuh: Kabupaten Sukabumi

4.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 – 2043, kebijakan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Sukabumi meliputi:

- a) Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya, dengan strategi:
 1. Memantapkan pengembangan 2 WP dan 8 SWP untuk pemerataan pembangunan Wilayah Utara dan Selatan;
 2. Mengembangkan PKW, PKL, PPK, dan PPL sesuai fungsi dan perannya;
 3. Memantapkan fungsi PKW, PKL, PPK, dan PPL sesuai SPM;
- b) Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan, dengan strategi:
 1. Memantapkan peran PPL pada masing-masing SWP;
 2. Memantapkan keterkaitan fungsional antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
 3. Mengembangkan infrastruktur dasar Kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi; dan
 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam
- c) Pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata, dengan strategi:
 1. Mengembangkan sistem pusat permukiman dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana Wilayah secara berjenjang dan sinergis;
 2. Menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan Wilayah;
 3. Menata Kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di Wilayah Selatan Kabupaten; dan
 4. Menata Kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di Wilayah Utara Kabupaten.

Indikasi Program pada tahun 2023-2043 adalah:

- **Pada PKW Palabuhanratu:**
 1. Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)
 2. Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional

- **Pada PKL (Cibadak, Jampangkulon, Sagaranten, Cicurug) & PPK & PPL:**
 1. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana Pendidikan
 2. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana Kesehatan
 3. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman
 4. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Cibadak & Cicurug
 5. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sukabumi (Kadudampit – Sukabumi – Sukaraja)
- **Jalan Arteri, Kolektor, Lokal** meliputi:
 1. Program Pembangunan, Penggantian, Pelebaran, Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan
 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan
 3. Program peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran simpang dan manajemen simpang
 4. Pembangunan jalan tol
 5. Pembangunan jalan strategis: jalan lingkar di Kawasan perkotaan & Ruas jalan ekonomi menuju kawasan industri, kawasan wisata
- **Jaringan Ketenagalistrikan, Telekomunikasi & Air Bersih:**
 1. Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Pembangkit Listrik
 2. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem SUTET & SUTT
 3. Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, *Optical Distribution Point* (ODP), *Optical Distribution Cabinet* (ODC), dan kabel *fiber optic*
 4. Pembangunan Menara telekomunikasi
 5. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan jaringan unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan
 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota
- **Jaringan Evakuasi Bencana:**
Kawasan strategis lainnya

4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Kabupaten Sukabumi

1) Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Citamansakti

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 menetapkan Kawasan Perdesaan Citamansakti Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dengan tema Agrowisata. Pengembangan kawasan perdesaan ini diharapkan menjadi suatu proses terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan lintas desa dengan memanfaatkan potensi unggulan perdesaannya dan saling terhubung secara sosial, ekonomi, dan geografis.

Tujuan Pengembangan Kawasan Perdesaan ini adalah:

- Meningkatkan daya saing desa-desa dalam satu kawasan;
- Mengoptimalkan potensi unggulan kawasan (pertanian, pariwisata, perikanan, kerajinan, dll.);
- Mempercepat pelayanan dasar dan infrastruktur antar desa secara merata;
- Mendorong kolaborasi antar desa, termasuk dalam pengelolaan usaha bersama (BUMDes Bersama);
- Mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mencegah urbanisasi berlebihan.

Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) menjadi instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pengembangan kawasan perdesaan secara menyeluruh. IPKP mencakup 5 dimensi utama yaitu:

- Konektivitas Kawasan dengan indikator diantaranya Ketersediaan dan kualitas jalan penghubung antar desa/kawasan;
- Ekonomi Kawasan dengan indikator diantaranya Produktivitas komoditas unggulan, keberadaan UKM, pasar;
- Pelayanan Dasar dengan indikator diantaranya Akses terhadap air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan;
- Kelembagaan Kawasan dengan indikator diantaranya Keberadaan BUMDes bersama, forum kerjasama antar desa;
- Lingkungan dan Tata Ruang dengan indikator diantaranya Zonasi lahan, keberlanjutan lingkungan, pengelolaan risiko bencana.

IPKP ini diharapkan menjadi acuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan Citamansakti bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

2) Kawasan Pertanian

Merujuk pada Permentan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi

batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang. Menggunakan definisi tersebut, kawasan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian secara menyeluruh, memperluas akses petani terhadap sarana pendukung, memperkuat kelembagaan petani dan ekonomi lokal, menelaraskan arah kebijakan dan program pembangunan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengembangan kawasan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari penyediaan infrastruktur yang memadai. Kawasan ini umumnya ditopang oleh sistem irigasi yang andal, jaringan jalan distribusi yang baik, serta fasilitas penunjang seperti gudang, tempat pengolahan hasil, dan pusat layanan pertanian. Kehadiran infrastruktur tersebut bukan hanya meningkatkan efisiensi proses budidaya, tetapi juga menurunkan biaya produksi dan meminimalkan kehilangan hasil panen (*losses*), sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Namun, pengembangan kawasan pertanian tidak cukup berhenti pada sektor hulu saja. Untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan, arah pembangunan kawasan perlu dilanjutkan hingga ke sektor hilir. Hal ini mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tinggi, seperti makanan olahan, bahan baku industri, atau produk turunan lainnya yang memiliki daya saing di pasar domestik maupun ekspor. Dengan pendekatan ini, hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga diproses lebih lanjut untuk meningkatkan nilai jual, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan pemasaran.

Arah hilirisasi ini memerlukan dukungan ekosistem yang terpadu, mulai dari kelembagaan petani yang kuat, kemitraan dengan pelaku usaha, akses terhadap pembiayaan dan teknologi pengolahan, hingga sistem logistik dan pemasaran yang efisien. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun rantai nilai pertanian yang utuh dari hulu ke hilir.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di Kabupaten Sukabumi memprioritaskan pengembangan kawasan berbasis potensi unggulan daerah. Kawasan agroindustri hortikultura difokuskan pada komoditas cabai dengan pusat pengembangan di Kabandungan dan didukung oleh wilayah penunjang seperti Cikidang, Kalapanunggal, Bojonggenteng, Parakansalak, Cidahu, dan Cicurug. Untuk agroindustri pangan, kawasan inti padi berada di Ciemas dengan dukungan dari Surade dan Ciracap, sedangkan pengembangan ubi kayu dipusatkan di Jampang Kulon dengan penunjang Waluran. Pada subsektor perkebunan, kawasan

kelapa dalam difokuskan di Ciracap dengan jaringan kawasan penunjang meliputi Surade, Ciemas, Waluran, Jampang Kulon, dan Tegalbuleud, sementara kopi dikembangkan di Purabaya dengan dukungan Nyalindung dan Gegerbitung.



Gambar 4.2. Kawasan Pertanian

3) Kawasan/Sentra Peternakan

Kawasan pertanian nasional yang berupa kawasan peternakan memiliki kriteria seperti adanya pengusahaan ternak dengan populasi tertentu, ketersediaan sumber air dan pakan, serta sumber daya manusia yang menguasai peternakan dan kesehatan hewan. Kawasan ini juga harus memiliki akses transportasi yang baik ke sentra produksi serta konektivitas yang kuat dengan jaringan infrastruktur dan kelembagaan pendukung. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada status kesehatan hewan dan infrastruktur yang mendukung di wilayah tersebut. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil peternakan secara menyeluruh, memperluas akses peternak terhadap sarana pendukung, memperkuat kelembagaan peternak dan ekonomi lokal, menyelaraskan arah kebijakan dan program pembangunan peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Pengembangan kawasan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur yang memadai. Kawasan ini idealnya dilengkapi dengan akses air bersih, jaringan jalan distribusi yang baik, fasilitas kandang kolektif atau

komunal, unit pengolahan pakan, serta pos layanan kesehatan hewan. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan ternak, meningkatkan efisiensi usaha budidaya, serta menekan biaya produksi dan risiko kehilangan akibat penyakit atau manajemen yang buruk. Dampaknya langsung terasa dalam peningkatan produktivitas, efisiensi sistem pemeliharaan, dan pendapatan peternak.

Namun, pengembangan kawasan peternakan tidak cukup hanya pada sektor budidaya. Untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, arah pembangunan perlu dilanjutkan hingga ke sektor hilir. Ini meliputi pengolahan produk ternak seperti daging olahan, susu pasteurisasi, telur dalam bentuk siap konsumsi, kulit, dan pupuk organik dari limbah peternakan. Dengan strategi hilirisasi ini, produk peternakan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tinggi yang memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Ini membuka peluang pasar baru sekaligus memperluas kesempatan kerja, khususnya di sektor pengolahan, pengemasan, dan distribusi.

Keberhasilan hilirisasi peternakan sangat ditentukan oleh kekuatan ekosistem yang mendukung, termasuk kelembagaan peternak yang solid, kemitraan usaha yang adil, kemudahan akses terhadap teknologi pengolahan dan pembiayaan, serta sistem logistik dan rantai pasok yang efisien. Kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri peternakan, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat menjadi pondasi penting untuk membangun rantai nilai peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengembangan peternakan mencakup sapi potong di Ciracap dan Tegalbuleud, sapi perah di Sukalarang dan Nyalindung, serta domba di Kabandungan, Kalapanunggal, dan Cikidang.



Gambar 4.3. Kawasan/Sentra Peternakan

4) Kawasan/Sentra Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan tangkap merujuk pada pengembangan kampung nelayan maju dan kampung nelayan modern sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kampung Nelayan Maju dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern. Kampung nelayan adalah suatu lingkungan permukiman yang dihuni oleh masyarakat yang mayoritasnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kampung Nelayan Maju adalah Kampung Nelayan yang tertata, bersih, dan sehat yang mampu meningkatkan produktivitas nelayan dan keluarganya. Kampung nelayan modern adalah kampung nelayan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang tertata dengan baik untuk mendukung seluruh kegiatan kelautan dan perikanan, mulai dari awal hingga akhir proses usaha secara terpadu.

Kawasan Budidaya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan). Sentra Hasil Perikanan adalah pusat kegiatan usaha Perikanan terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam kawasan pengelolaan Perikanan berbasis potensi sumber daya ikan, sumber daya manusia, kondisi lingkungan

yang mendukung, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan).

Pengembangan kawasan perikanan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan hasil perikanan secara menyeluruh, meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperluas akses pelaku perikanan terhadap teknologi budidaya dan penangkapan, memperkuat kelembagaan nelayan serta menyelaraskan arah kebijakan dan program pembangunan sektor perikanan. Sektor perikanan budidaya difokuskan di Caringin (nila), Palabuhanratu (sidat), Cisaat (ikan hias), serta Surade dan Ciracap (udang). Adapun kawasan perikanan tangkap dan olahan difokuskan dalam KSK Minapolitan yang mencakup Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Surade, Ciracap, dan Tegalbuleud.

Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk membentuk klaster ekonomi produktif, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

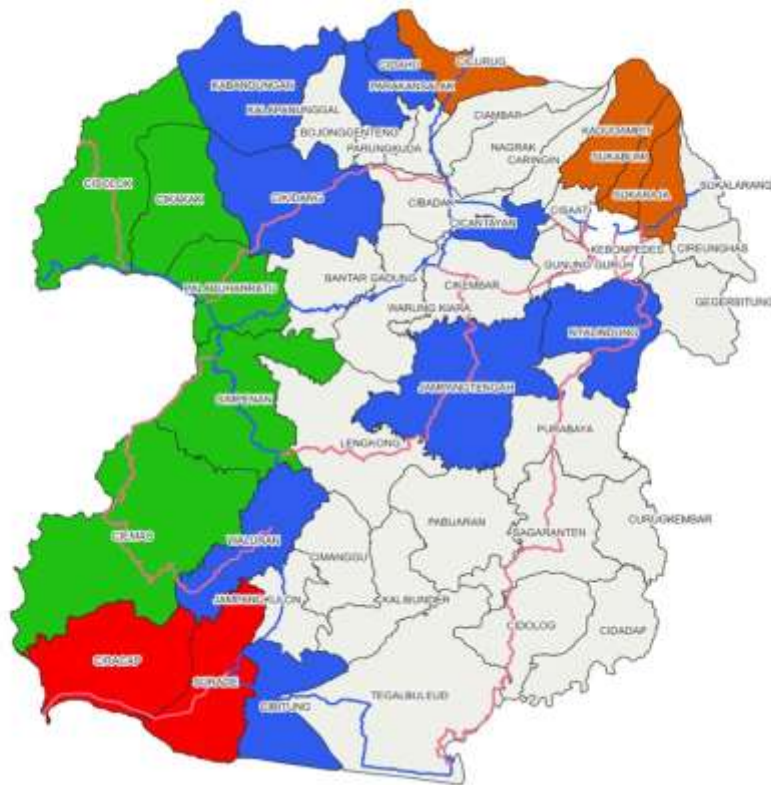


Gambar 4.4. Kawasan/Sentra Perikanan

5) Kawasan Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup. Pengembangan kawasan yang diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Sukabumi 2023-

2043 ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan; dan mengangkat citra bangsa melalui pariwisata. Pada tataran pelaksanaannya, pengembangan kawasan pariwisata mencakup pengembangan destinasi wisata pada kawasan, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.



Gambar 4.5. Kawasan Pariwisata

Pengembangan Kawasan Pariwisata difokuskan pada penguatan tata kelola, optimalisasi promosi, penguatan SDM dan pembangunan sarana dasar destinasi dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Kawasan Pariwisata Palabuhanratu: Palabuhanratu, Cikakak, Cisolok, Simpenan, dan Ciemas;
- b. Pengembangan Desa Wisata: Kabundungan, Parakansalak, Cidahu, Cikidang, Cicantayan, Waluran, Nyalindung, Jampangtengah, dan Cibitung;
- c. Pengembangan Destinasi Pariwisata di KSK Unggenteng: Ciracap dan Surade; dan
- d. Pengembangan Destinasi Pariwisata di KSK Koridor Cicurug-Sukabumi-Sukalarang: Cicurug, Kadudampit, Sukabumi dan Sukaraja.

- a. Sentra Olahan Ikan: Palabuhanratu
- b. Sentra Gula Merah Aren: Kabandungan, Cicantayan, Cikakak, Cisolok
- c. Sentra Kerajinan Bambu: Caringin dan Kadudampit
- d. Sentra Garam: Tegalbuleud
- e. Sentra Enye: Cikembar
- f. Sentra Pindang Ikan: Bantargadung
- g. Sentra Logam: Cisaat
- h. Sentra Kerajinan Batu Alam: Purabaya dan Sagaranten
- i. Sentra Konveksi: Sukaraja dan Sukalarang
- j. Sentra Opak Ketan: Surade, Jampangkulon dan Cibitung
- k. Sentra Makanan Ringan: Cicurug dan Cidahu
- l. Sentra Gula Kelapa: Ciracap
- m. Sentra Alas Kaki: Cibadak, dan
- n. Sentra Kopi: Gegerbitung dan Cisolok

Tabel 4.10. Keselarasan Kebijakan Kewilayahan RKP 2026 dan RKPD Tahun 2026

RKP 2026			RKPD 2026			
No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Ket
1	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	1. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;	Kabupaten Sukabumi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tataruang	
		2. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik untuk pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC)				
		3. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi				
		4. Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang				
		5. Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi				
		6. Pengembangan pariwisata 6A di	Kawasan Pariwisata	Program Peningkatan	Dinas Pariwisata	

RKP 2026			RKPD 2026			
No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Ket
		hotspot seperti Palabuhanratu, Cianjur, Taman Bumi Ciletuh, dan Gunungpadang		Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
		7. Pengembangan KEK Lido				
		8. Pengembangan kota agropolitan Sukabumi	Kawasan Pertanian dan Kawasan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan	
2	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Priangan Barat	1. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat: D.I. Cipamingkis dan D.I. Ciletuh	Kawasan Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum	
		2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Kawasan Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	
		3. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	
		4. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani, termasuk kawasan peternakan	Kawasan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan	
		5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	
		6. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	

RKP 2026			RKPD 2026			
No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Ket
			Kawasan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan	
		7. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan di catchment area, terutama pada DAS utama (Cisadane, Ciliwung, dsb.)				
		8. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama di DAS utama	Kabupaten Sukabumi	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		9. Pembangunan Bendungan Cibeet				
		10. Pembangunan infrastruktur PLTP Gunung Salak VII				
		11. Pembangunan infrastruktur PLTP Cisolak–Cisukamare	Kabupaten Sukabumi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		12. Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kabupaten Sukabumi)	Kawasan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMD	
		13. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, melalui perlindungan lahan, reforma agraria, revitalisasi, dan pupuk/pakan/pestisida organik	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	

RKP 2026			RKPD 2026			
No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Ket
		14. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan prasarana produksi seperti benih unggul, infrastruktur transportasi digital, dan kualitas pascapanen	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	
		15. Peningkatan manajemen usaha tani dan akses pembiayaan, asuransi, serta penguatan koperasi, logistik, dan penyimpanan komoditas pangan utama	Kawasan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	
		16. Peningkatan kapasitas SDM pertanian lokal, penyuluh, dan jejaring kerja sama kelembagaan lokal	Kawasan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	
			Kawasan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Peternakan	
3	Kawasan Konservasi TNGHS, TNNGP dan Geopark Ciletuh	1. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan ekosistem serta area bernilai keanekaragaman hayati tinggi	Cicatih, CPUGGp	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem				
		3. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan				
		4. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem secara berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi	Kabupaten Sukabumi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	
		5. Peningkatan bioprospeksi,		Program Penyediaan dan		

RKP 2026			RKPD 2026			
No	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Program	Perangkat Daerah	Ket
		bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		Pengembangan Sarana Pertanian		
		6. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri				
		7. Penguatan pengelolaan hutan lestari				
		8. Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan				
		9. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	Kabupaten Sukabumi	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
		10. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	Kabupaten Sukabumi	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
		11. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana	Kabupaten Sukabumi	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	
			Kawasan Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target berdasarkan bidang urusan. Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 pada tahun rencana dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi tahun 2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, serta hibah.

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, sehingga seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang ingin dicapai. Seluruh program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 akan diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2026.

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan Perangkat Daerah. Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran dokumen RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1. URUSAN PENDIDIKAN								
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase akreditasi sekolah dengan predikat minimal baik	%	48,14	49,33	918.010	54,09	942.387
		2. Persentase APK Sekolah Dasar	%	99,62	99,66		99,82	
		3. Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	%	96,47	96,5		96,62	
		4. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (3-6 tahun)	%	55,31	57,41		65,81	
		5. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	24,82	28,92		45,31	
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal “KASEPUHAN”	%	0	10	2.200	75	3.240
01.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap jumlah jam pelajaran yang diampu	Rasio	01.34	01.33	34.280	01.24	34.400

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
01.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan Atas Usulan Izin Satuan Pendidikan Baru/Diperbaharui	%	75	77	1.000	85	1.400
01.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Sunda	%	80,05	80,1	650	80,3	970
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pemenuhan SPM kesehatan	%	99	100	100.923	100	67.090
		2. Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	%	60	63	2.182	71	2.452
		3. Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan layanan siklus hidup dan rujukan	%	71	76	14.594	100	22.225
		4. Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	70,01	80	326.689	85	384.516
		5. Persentase pemeriksaan malaria secara mikroskopis dan RDT dibandingkan dengan target	%	77,55	80	167	100	175
		6. Persentase kualitas kesehatan lingkungan memenuhi syarat	%	63	67	2.788	83	6.193

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		7. Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	100	100	497	100	698
		8. Persentase wasting	%	3,5	3,2	31.608	02.04	44.518
		9. Persentase pelayan kesehatan yang terakreditasi paripurna	%	87	87	198	90	143
		10. Kab/kota yang merespon sinyal sistem kewaspadaan dini dan respon kurang 24 jam minimal 80%	%	77,5	82,5	2.861	92.05.00	3.392
		11. Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	%	6	10	1.547	30	1.917
		12. Persentase kelas C dan D serta Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah yang berizin	%	100	100	1.068	100	2.330
		13. Persentase Fasyankes terintegrasi SIKN	%	42	45	643	57	1.047
		14. Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar	%	72	75	99.691	88	117.877
01.02.03	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu aktif dengan Siklus Hidup	%	30	35	3.181	75	3.513

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Bidang Kesehatan							
01.02.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi ijin praktek	%	100	100	764	100	382
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap Populasi	%	1,05	1,1	37.461	1,3	36.184
01.02.05	Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100	100	693	100	1.018
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	%	54,37	55,13	74.500	58,06	161.100
01.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	89,3	91,33	100.000	95,38	100.000
01.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses rumah tangga dengan akses air limbah domestik yang layak	%	51,9	52,15	30.000	53,13	30.000

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
01.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Sistem Drainase perkotaan pada KSK yang ditangani	%	N/A	6,4	25.000	32	25.000
01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman pada KSK yang ditangani	%	N/A	100	5.000	100	5.000
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung milik pemerintah daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	106.350	100	10.000
01.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada KSK yang ditangani	%	100	100	10.000	100	10.000
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	60,58	62,17	307.400	65,46	359.600
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli	%	100	100	1.010	100	1.450
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	80,94	81,44	1.350	83,44	1.750
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase RT dengan akses rumah layak huni akibat korban bencana alam	%	N/A	21,83	6.000	97,12	6.000

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		Persentase RT dengan akses rumah layak huni akibat relokasi program pemerintah	%	100	100	500	100	500
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang ditangani	%	53,03	71,82	8.000	100	4.000
01.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitas nya	%	32,83	33,38	20.000	35,07	20.000
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase PSU Perumahan yang dilakukan pemeliharaan (setelah diserahkan ke pemerintah)	%	38	59	5.400	75	5.400
		2. Persentase ruang publik tematik yang dibangun	%	N/A	100	20.000	100	5.000
01.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	N/A	100	500	100	500

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	70	68	5.245	100	5.458
		2. Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	75	80	3.522	100	3.857
		3. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50	50	445	100	483
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	-	100	5.980,40	100	4.600
		2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	-	100	6.719,70	100	8.600
		3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	15	30	500	90	500
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	28,76	33,94	500	83,16	1.136
		2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	91,94	93,5	10.000	100	10.000
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	N/A	24,59	808	26,28	849
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan	%	N/A	43,66	1.310	44,57	1.315

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial						
		Persentase Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan pemberdayaan sosial;	%	N/A	18,22	189	21,78	301
01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%	N/A	100	10	100	10
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) - Indikator IKK	%	98,67	100	1.995,60	100	1.995,60
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	N/A	20	566	20	566
01.06.05		Persentase Usulan Penindaklayakan, Usulan	%	N/A	100	1.642,20	100	2.473,20

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan						
		Persentase Penerima Manfaat yang Menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	N/A	2,64	744,6	2,64	744,6
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana.	%	100	100	1.817	100	0,609027778
		Jumlah Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Orang	N/A	1050	960,65	1050	960,65
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	10	100	70
7. URUSAN TENAGA KERJA								
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	64,28	98,25	60	100	60
02.07.03	Program Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,24	4	7.074	6	7.074

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	dan Produktivitas Tenaga Kerja							
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	17,81	22	2.450	32	3.200
02.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	100	100	523,25	100	466,25
8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	N/A	2	900	4	900
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	N/A	100	600	100	600
02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	N/A	20	2.000	20	2000
02.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	N/A	150	100	150	100

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	N/A	100	400	100	400
02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	N/A	100	800	100	800
9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
02.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	%	7,5	10	674	18	1.300
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	91	91,5	3.588	93,5	5.025
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,37	3,11	425	2,07	635
02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	87	87,7	1.223	88,9	2.054
10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
02.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Permasalahan/ Sengketa Tanah	%	100	100	200	100	200
02.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	100	15.000	100	15.000
02.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Fasilitasi Penataan Aset dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria	%	100	100	300	100	300
02.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Tanah	%	100	100	1.350	100	500
11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahun	%	100	100	1.305	100	1.775
02.11.03	Program Pengendalian	1. Indeks Kualitas Air	Poin	48,82	66,07	1.000	66,87	6.500
		2. Indeks Kualitas Udara	Poin	91,26	65,88	1.000	67,48	2.000

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3. Persentase Parameter Pengujian Kualitas Air dan Udara yang Terakreditasi	%	N/A	34,15	2.400	43,9	2.500
02.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Indeks kualitas tutupan lahan	%	44,91	66,77	1.000	67,04	1.000
		2. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola	%	4 Lokasi	100	1.500	100	1.500
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	18,7	21,3	100	30	355
02.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Persentase pengawasan kepada usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%	17,2	15,49	280	19,23	360
		2. Persentase persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, rincian teknis, SLO yang diperiksa dan dinilai	%	99,12	100	155	100	385

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
02.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	25	100	75	100	75
		Persentase kearifan lokal sektor lingkungan hidup yang ditingkatkan pengelolaannya	%	N/A	100	200	100	200
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilaksanakan	%	60	67,57	560	100	850
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan yang didapatkan oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	37,5	62,5	125	100	250
02.11.10	Program Penanganan Pengaduan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup	%	100	100	380	100	600

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Lingkungan Hidup							
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	62,05	67,94	74.900	100	87.180
12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	85	85	600	94	725
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	99	99,1	570	99,5	650
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	65	82	565	90	675
02.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	150
13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
02.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	2,62	7,9	1.050	18,37	1.450
02.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	14,44	15,75	1.369	21	1.419
02.13.04	Program Administrasi	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD	%	16,67	33,33	3.409	100	5.626

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Pemerintahan Desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya						
		2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	16,54	33,07	500	100	500
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	1,84	20	20.000	100	20.000
		2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	0	100	250
14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	2,21	2,208	1.526	2,2	2.234
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	28	28		25	
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	71,98	72	16.245	72,04	23.784
		2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,96	9,75		9,31	
02.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok	%	82,03	82,03	13.525	85	19.802

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Ketahanan Keluarga						
15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Jalan	%	49	47	5.830	57	30.000
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (Persen)	%	0	100	40.500	100	40.500
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas ASDP	%	11	9	1.800	15	2.100
16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
02.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Jumlah dan Sebaran Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	N/A	18	5.687	100	7.330
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Sumber Daya Teknologi Digital yang disediakan Diskominfosan	%	N/A	35	10.000	55	10.000
17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
02.17.02	Program Pemberdayaan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	%	UMKM 2024 : 11.979 UMKM	3	1.600	5	2.150
02.17.03	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	UMKM yang Bermitra Tahun 2024 : 634 UMKM	6	1.000	10	1.800

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
				Jumlah UMKM Binaan 2024 : 11.979 UMKM				
02.17.04	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha KSP/USP Koperasi	%	KSP/USP Aktif Tahun 2024 : 181 Unit	2	200	8	400
02.17.05	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	Koperasi Aktif Tahun 2024 : 633 Unit	6	300	12	500
02.17.06	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	Koperasi Aktif Tahun 2024 : 633 Unit Jumlah Koperasi Keseluruhan 2024 : 1919	36	200	40	500
02.17.07	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	Koperasi Aktif Tahun 2024 : 633	43,5	969	11,3	579
02.17.08	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	Koperasi Aktif Tahun 2024 : 633	5	455	9	636
18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	4.068.425.129.607 Rupiah	100	500	100	400

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	1028 Investor	6	1.200	10	1.600
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	9.463 Izin	70	600	90	900
02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	51 Pengaduan	100	350	100	350
02.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	8 Data/Informasi	100	50	100	50
19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	N/A	20	2.200	20	2.610
02.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatkab	%	N/A	0,99	19.350	1,65	24.180

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	N/A	100	2.050	100	2.180
20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	2,65	300	2,75	400
21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Poin	N/A	350	1.155	435	1.474
22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Lembaga Adat Daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	100	100	1.760	100	1.930
02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	N/A	20	260	20	320
02.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	N/A	100	230	100	290
02.22.05	Program Pelestarian dan	Persentase Peningkatan Cagar Budaya dan Warisan	%	N/A	20	485	20	560

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Pengelolaan Cagar Budaya	Budaya Tak Benda yang Ditetapkan						
02.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	N/A	100	1.100	100	1.800
23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	76,93	78	10.360	85	6.310
02.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara dan naskah kuno yang diinventarisasi dan dilestarikan	Eksemplar	650	1.230	800	2.030	950
24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	86,82	88	3.100	95	3.600
02.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	66,67	69	1.250	78	1.350
25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	%	8,567 Ton	2	14.654	10	38.389
		2. Jumlah Pengembangan Sentra Perikanan Tangkap	Lokasi	-	1		1	
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	%	33,905 Ton	2	5.437	10	8.179
		2. Jumlah Pengembangan Sentra Perikanan Budidaya	Lokasi	-	1		1	
03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penanganan pelanggaran Administrasi bidang perikanan (%)	%	100	100	205	100	839
03.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	%	17,164 Ton	2	5.517	10	4.690
		2. Jumlah Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Lokasi	-	1		1	
26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	3.498.976 Orang	2,5	15.000	2,5	25.000

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	35 Event/Promosi	5	5.100	5	7.900
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	10 Orang	2	750	6	1.750
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	85 Orang	5	1.400	5	1.350
27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
03.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	%	2	2	5.275	10	12.000
		2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	2	2	7.000	10	10.000
03.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase peningkatan Luas Tanam (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	2	2	34.195	10	48.000
		2. Tingkat pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	4.400	100	5.000

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	47	65	1.375	75	1.725
		2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	100	100	300	100	500
03.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana yang difasilitasi	%	100	100	2.210	100	1.750
		2. Persentase Wilayah Penanganan Bencana Pertanian	%	47	100	600	100	600
03.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	1. Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian yang Difasilitasi	%	100	100	175	100	300
		2. Persentase Pelaku Usaha Peternakan Yang Difasilitasi Untuk mengurus Izin Usaha	%	100	100	150	100	350
03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	20	20	2900	20	5.000
		2. Persentase SDM Peternakan yang Ditingkatkan	%	70	70	250	70	450
28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
03.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Panas Bumi yang dihasilkan	%	7 lokasi potensi pemanfaatan panas bumi langsung	25	600	25	750
29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
03.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	1200 izin usaha yang difasilitasi	100	250	100	350
03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	12 pasar semi modern	50	7.000	50	12.000
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	19 komoditas bapokting yang dipantau	90	2.000	90	4.000
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Nilai	496.112.925,29 USD	506.2336.28,96	1.500	547.963.560,47	3.000
03.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	N/A	100	1.100	100	1.630
03.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	30 produk lokal yang dipromosikan	100	1.000	100	2.000

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Produk Dalam Negeri							
30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
03.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi	%	200 IKM yang difasilitasi	3	10.000	3	20.000
03.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	130 IKM	100	1.000	100	2.000
03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Dokumen	1 Dokumen	1	1.000	1	2.000
31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
03.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	12	20	515	20	840
03.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	20,4	21.8	120	20	220
32. SEKRETARIAT DAERAH								
04.01.02	Program Pemerintahan dan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	39.680	100	42.775

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Kesejahteraan Rakyat							
04.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	5.725	100	6.300
33. SEKRETARIAT DPRD								
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	95	95	17.496	95	23.288
		2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N						
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	95	95	18.794	95	27.517
34. PERENCANAAN								
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	1.875	100	3.125
		2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD						
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	3.225	100	3.225
		2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA						
35. KEUANGAN								
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penyusunan APBD tepat Waktu	%	100	100	4.101	100	4.225
		2. Persentase Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah	%	94	94,25	776.262	95,25	799.784
		3. Persentase Penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	2.047	100	2.110
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Tepat Waktu	%	100	100	5.188	100	5.345
36. KEPEGAWAIAN								
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	14,45	15,9	2.836	23,28	4.152
		2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	N/A	100	1.500	100	2.300
		3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	N/A	100	1.200	100	1.500

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	23,01	23,3	980	24,8	1.180
37. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	N/A	100	1.800	100	1.800
		2. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	N/A	100	50	100	90
		3. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	N/A	10	800	40	1.600
		4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	N/A	100	1.500	100	1.900
38. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
05.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100	100	1.800	100	1.800
		2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah						
		3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah						

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		4. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah						
39. URUSAN PENGAWASAN								
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	77,95	78,5	8.000	80,5	9.450
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,3	3,31	300	3,35	400
		2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	3,215	3,22	1.650	3,26	2.100
40. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Indeks	85,7	86	1.810	88	2.045
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik di Kecamatan	Orang/Kecamatan	-	700 (7 kec)	9.573	1000 (10 kec)	10.527

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							
08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Ormas	-	100	1.175	100	1.700
08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks	-	60	1.560	75	1.657
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	-	100	8.215	100	10.731
41. UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik tingkat kecamatan yang dilaksanakan	%	N/A	100	4.700	100	4.700

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2026		2030	
				(Baseline 2024)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	%	100	100	9.700	100	9.700
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	100	4.700	100	4.700
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	N/A	100	4.700	100	4.700
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat pembinaan	%	N/A	100	4.700	100	4.700

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan Perangkat Daerah. Berikut rekapitulasi indikasi pagu perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Pagu Perangkat Daerah Per Program Pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Dinas Pendidikan	1.310.680.599.944,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	869.644.578.844,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	403.792.875.100,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.100.776.000,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33.352.700.000,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	733.000.000,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.056.670.000,00	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	373.023.936.137,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.706.978.210,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	186.455.586.562,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	35.329.962.365,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	331.409.000,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
3	UPTD RSUD Palabuhanratu	117.136.618.407,00	UPTD RSUD Palabuhanratu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.000.000.000,00	UPTD RSUD Palabuhanratu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.136.618.407,00	UPTD RSUD Palabuhanratu
4	UPTD RSUD Sekarwangi	158.677.217.569,00	UPTD RSUD Sekarwangi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.755.720.866,00	UPTD RSUD Sekarwangi
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.804.956.703,00	UPTD RSUD Sekarwangi
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	116.540.000,00	UPTD RSUD Sekarwangi
5	UPTD Puskesmas Karawang	3.265.863.233,00	UPTD Puskesmas Karawang

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.038.038.533,00	UPTD Puskesmas Karawang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.224.972.700,00	UPTD Puskesmas Karawang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.852.000,00	UPTD Puskesmas Karawang
6	UPTD Puskesmas Sukaraja	4.951.718.531,00	UPTD Puskesmas Sukaraja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.694.370.531,00	UPTD Puskesmas Sukaraja
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.178.698.000,00	UPTD Puskesmas Sukaraja
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.650.000,00	UPTD Puskesmas Sukaraja
7	UPTD Puskesmas Limbangan	3.103.875.135,00	UPTD Puskesmas Limbangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.884.861.885,00	UPTD Puskesmas Limbangan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.214.593.250,00	UPTD Puskesmas Limbangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.420.000,00	UPTD Puskesmas Limbangan
8	UPTD Puskesmas Kebonpedes	2.726.051.509,00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.762.635.009,00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	956.806.500,00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.610.000,00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
9	UPTD Puskesmas Cireunghas	3.431.922.251,00	UPTD Puskesmas Cireunghas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.340.218.151,00	UPTD Puskesmas Cireunghas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.069.624.100,00	UPTD Puskesmas Cireunghas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.080.000,00	UPTD Puskesmas Cireunghas
10	UPTD Puskesmas Sukalarang	4.050.555.230,00	UPTD Puskesmas Sukalarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.486.865.730,00	UPTD Puskesmas Sukalarang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.558.519.500,00	UPTD Puskesmas Sukalarang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.170.000,00	UPTD Puskesmas Sukalarang
11	UPTD Puskesmas Gegerbitung	4.204.736.980,00	UPTD Puskesmas Gegerbitung

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.024.965.480,00	UPTD Puskesmas Gegerbitung
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.174.291.500,00	UPTD Puskesmas Gegerbitung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.480.000,00	UPTD Puskesmas Gegerbitung
12	UPTD Puskesmas Nyalindung	2.641.928.935,00	UPTD Puskesmas Nyalindung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.585.631.935,00	UPTD Puskesmas Nyalindung
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.052.343.000,00	UPTD Puskesmas Nyalindung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.954.000,00	UPTD Puskesmas Nyalindung
13	UPTD Puskesmas Cijangkar	1.762.930.939,00	UPTD Puskesmas Cijangkar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.016.138.439,00	UPTD Puskesmas Cijangkar
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	742.131.500,00	UPTD Puskesmas Cijangkar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.661.000,00	UPTD Puskesmas Cijangkar
14	UPTD Puskesmas Purabaya	4.023.830.077,00	UPTD Puskesmas Purabaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.993.537.577,00	UPTD Puskesmas Purabaya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.018.882.500,00	UPTD Puskesmas Purabaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.410.000,00	UPTD Puskesmas Purabaya
15	UPTD Puskesmas Sagaranten	3.871.070.564,00	UPTD Puskesmas Sagaranten
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.539.564,00	UPTD Puskesmas Sagaranten
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	977.411.000,00	UPTD Puskesmas Sagaranten
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.120.000,00	UPTD Puskesmas Sagaranten
16	UPTD Puskesmas Cidolog	1.323.056.474,00	UPTD Puskesmas Cidolog
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	717.353.474,00	UPTD Puskesmas Cidolog
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	601.953.000,00	UPTD Puskesmas Cidolog
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.750.000,00	UPTD Puskesmas Cidolog
17	UPTD Puskesmas Cidap	1.824.412.265,00	UPTD Puskesmas Cidap

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.138.557.265,00	UPTD Puskesmas Cidadap
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	674.210.000,00	UPTD Puskesmas Cidadap
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.645.000,00	UPTD Puskesmas Cidadap
18	UPTD Puskesmas Curugkembar	2.884.558.563,00	UPTD Puskesmas Curugkembar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.863.850.563,00	UPTD Puskesmas Curugkembar
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.020.468.000,00	UPTD Puskesmas Curugkembar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	240.000,00	UPTD Puskesmas Curugkembar
19	UPTD Puskesmas Pabuaran	3.466.650.756,00	UPTD Puskesmas Pabuaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.386.088.056,00	UPTD Puskesmas Pabuaran
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.068.661.700,00	UPTD Puskesmas Pabuaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.901.000,00	UPTD Puskesmas Pabuaran
20	UPTD Puskesmas Bangbayang	1.361.416.018,00	UPTD Puskesmas Bangbayang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	475.876.018,00	UPTD Puskesmas Bangbayang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	881.680.000,00	UPTD Puskesmas Bangbayang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.860.000,00	UPTD Puskesmas Bangbayang
21	UPTD Puskesmas Tegalbuleud	2.003.950.316,00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.255.927.016,00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	744.208.300,00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.815.000,00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
22	UPTD Puskesmas Cibitung	2.450.450.159,00	UPTD Puskesmas Cibitung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.605.951.159,00	UPTD Puskesmas Cibitung
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.319.000,00	UPTD Puskesmas Cibitung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.180.000,00	UPTD Puskesmas Cibitung
23	UPTD Puskesmas Surade	4.045.976.755,00	UPTD Puskesmas Surade

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.665.192.255,00	UPTD Puskesmas Surade
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.370.704.500,00	UPTD Puskesmas Surade
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.080.000,00	UPTD Puskesmas Surade
24	UPTD Puskesmas Buniwangi	2.791.475.651,00	UPTD Puskesmas Buniwangi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.666.467.651,00	UPTD Puskesmas Buniwangi
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.118.048.000,00	UPTD Puskesmas Buniwangi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.960.000,00	UPTD Puskesmas Buniwangi
25	UPTD Puskesmas Ciracap	4.497.345.600,00	UPTD Puskesmas Ciracap
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.039.175.100,00	UPTD Puskesmas Ciracap
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.453.750.500,00	UPTD Puskesmas Ciracap
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.420.000,00	UPTD Puskesmas Ciracap
26	UPTD Puskesmas Ciemas	2.095.706.944,00	UPTD Puskesmas Ciemas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.396.032.944,00	UPTD Puskesmas Ciemas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.842.000,00	UPTD Puskesmas Ciemas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.832.000,00	UPTD Puskesmas Ciemas
27	UPTD Puskesmas Tamanjaya	2.510.026.966,00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.487.739.466,00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.001.287.500,00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.000.000,00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
28	UPTD Puskesmas Waluran	2.656.438.456,00	UPTD Puskesmas Waluran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.555.279.156,00	UPTD Puskesmas Waluran
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.097.070.300,00	UPTD Puskesmas Waluran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.089.000,00	UPTD Puskesmas Waluran
29	UPTD Puskesmas Jampangkulon	5.136.201.298,00	UPTD Puskesmas Jampangkulon

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.569.172.698,00	UPTD Puskesmas Jampangkulon
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.559.276.600,00	UPTD Puskesmas Jampangkulon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.752.000,00	UPTD Puskesmas Jampangkulon
30	UPTD Puskesmas Kalibunder	2.937.130.659,00	UPTD Puskesmas Kalibunder
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.883.631.659,00	UPTD Puskesmas Kalibunder
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.050.290.000,00	UPTD Puskesmas Kalibunder
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.209.000,00	UPTD Puskesmas Kalibunder
31	UPTD Puskesmas Cimanggu	2.297.045.834,00	UPTD Puskesmas Cimanggu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.569.229.834,00	UPTD Puskesmas Cimanggu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	724.291.000,00	UPTD Puskesmas Cimanggu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.525.000,00	UPTD Puskesmas Cimanggu
32	UPTD Puskesmas Warungkiara	4.993.053.594,00	UPTD Puskesmas Warungkiara
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.142.094,00	UPTD Puskesmas Warungkiara
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.490.659.500,00	UPTD Puskesmas Warungkiara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.252.000,00	UPTD Puskesmas Warungkiara
33	UPTD Puskesmas Bantargadung	3.024.037.302,00	UPTD Puskesmas Bantargadung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.183.800.302,00	UPTD Puskesmas Bantargadung
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	835.974.000,00	UPTD Puskesmas Bantargadung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.263.000,00	UPTD Puskesmas Bantargadung
34	UPTD Puskesmas Citarik	3.962.674.359,00	UPTD Puskesmas Citarik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.040.992.859,00	UPTD Puskesmas Citarik
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	916.158.500,00	UPTD Puskesmas Citarik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.523.000,00	UPTD Puskesmas Citarik
35	UPTD Puskesmas Simpenan	5.252.751.634,00	UPTD Puskesmas Simpenan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.413.044.234,00	UPTD Puskesmas Simpenan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.834.367.400,00	UPTD Puskesmas Simpenan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.340.000,00	UPTD Puskesmas Simpenan
36	UPTD Puskesmas Palabuhanratu	5.398.466.802,00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.699.037.702,00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.655.929.100,00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.500.000,00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
37	UPTD Puskesmas Cikakak	4.659.126.565,00	UPTD Puskesmas Cikakak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.425.864.865,00	UPTD Puskesmas Cikakak
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.230.606.700,00	UPTD Puskesmas Cikakak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.655.000,00	UPTD Puskesmas Cikakak
38	UPTD Puskesmas Cisolok	6.527.882.492,00	UPTD Puskesmas Cisolok
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.634.592.292,00	UPTD Puskesmas Cisolok
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.885.903.200,00	UPTD Puskesmas Cisolok
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.387.000,00	UPTD Puskesmas Cisolok
39	UPTD Puskesmas Cikidang	5.678.096.429,00	UPTD Puskesmas Cikidang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.380.966.929,00	UPTD Puskesmas Cikidang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.288.879.500,00	UPTD Puskesmas Cikidang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.250.000,00	UPTD Puskesmas Cikidang
40	UPTD Puskesmas Kabandungan	4.838.706.935,00	UPTD Puskesmas Kabandungan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.750.837.935,00	UPTD Puskesmas Kabandungan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.026.389.000,00	UPTD Puskesmas Kabandungan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61.480.000,00	UPTD Puskesmas Kabandungan
41	UPTD Puskesmas Kalapanunggal	4.390.547.551,00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.416.418.051,00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	964.529.500,00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.600.000,00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal
42	UPTD Puskesmas Bojonggenteng	3.612.545.101,00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.567.236.101,00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.043.029.000,00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.280.000,00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng
43	UPTD Puskesmas Parakansalak	3.764.193.515,00	UPTD Puskesmas Parakansalak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.631.379.015,00	UPTD Puskesmas Parakansalak
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.127.360.500,00	UPTD Puskesmas Parakansalak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.454.000,00	UPTD Puskesmas Parakansalak
44	UPTD Puskesmas Parungkuda	5.299.282.565,00	UPTD Puskesmas Parungkuda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.536.531.065,00	UPTD Puskesmas Parungkuda
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.752.751.500,00	UPTD Puskesmas Parungkuda
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.000.000,00	UPTD Puskesmas Parungkuda
45	UPTD Puskesmas Cidahu	5.681.704.020,00	UPTD Puskesmas Cidahu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.619.676.470,00	UPTD Puskesmas Cidahu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.056.879.550,00	UPTD Puskesmas Cidahu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.148.000,00	UPTD Puskesmas Cidahu
46	UPTD Puskesmas Cicurug	7.440.530.155,00	UPTD Puskesmas Cicurug
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.710.268.655,00	UPTD Puskesmas Cicurug
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.727.165.500,00	UPTD Puskesmas Cicurug
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.096.000,00	UPTD Puskesmas Cicurug
47	UPTD Puskesmas Cipari	1.624.298.058,00	UPTD Puskesmas Cipari

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	809.665.058,00	UPTD Puskesmas Cipari
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	810.674.000,00	UPTD Puskesmas Cipari
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.959.000,00	UPTD Puskesmas Cipari
48	UPTD Puskesmas Ciambar	4.077.428.286,00	UPTD Puskesmas Ciambar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.796.107.786,00	UPTD Puskesmas Ciambar
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.278.222.500,00	UPTD Puskesmas Ciambar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.098.000,00	UPTD Puskesmas Ciambar
49	UPTD Puskesmas Girijaya	2.451.290.516,00	UPTD Puskesmas Girijaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.596.563.016,00	UPTD Puskesmas Girijaya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	850.557.500,00	UPTD Puskesmas Girijaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.170.000,00	UPTD Puskesmas Girijaya
50	UPTD Puskesmas Nagrak	4.318.731.713,00	UPTD Puskesmas Nagrak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.359.333.213,00	UPTD Puskesmas Nagrak
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	955.708.500,00	UPTD Puskesmas Nagrak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.690.000,00	UPTD Puskesmas Nagrak
51	UPTD Puskesmas Sekarwangi	4.087.354.921,00	UPTD Puskesmas Sekarwangi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.843.015.421,00	UPTD Puskesmas Sekarwangi
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.225.908.500,00	UPTD Puskesmas Sekarwangi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.431.000,00	UPTD Puskesmas Sekarwangi
52	UPTD Puskesmas Cibadak	3.439.677.950,00	UPTD Puskesmas Cibadak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.427.984.950,00	UPTD Puskesmas Cibadak
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.007.597.000,00	UPTD Puskesmas Cibadak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.096.000,00	UPTD Puskesmas Cibadak
53	UPTD Puskesmas Cicantayan	3.993.891.104,00	UPTD Puskesmas Cicantayan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.651.120.604,00	UPTD Puskesmas Cicantayan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.337.190.500,00	UPTD Puskesmas Cicantayan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.580.000,00	UPTD Puskesmas Cicantayan
54	UPTD Puskesmas Caringin	4.196.942.670,00	UPTD Puskesmas Caringin
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.677.876.370,00	UPTD Puskesmas Caringin
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.469.966.300,00	UPTD Puskesmas Caringin
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	49.100.000,00	UPTD Puskesmas Caringin
55	UPTD Puskesmas Cisaat	6.161.478.551,00	UPTD Puskesmas Cisaat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.606.733.451,00	UPTD Puskesmas Cisaat
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.550.725.100,00	UPTD Puskesmas Cisaat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.020.000,00	UPTD Puskesmas Cisaat
56	UPTD Puskesmas Selajambe	1.840.622.815,00	UPTD Puskesmas Selajambe
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.027.078.815,00	UPTD Puskesmas Selajambe
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	803.872.000,00	UPTD Puskesmas Selajambe
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.672.000,00	UPTD Puskesmas Selajambe
57	UPTD Puskesmas Cibolang	2.789.779.463,00	UPTD Puskesmas Cibolang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.125.837.463,00	UPTD Puskesmas Cibolang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.617.942.000,00	UPTD Puskesmas Cibolang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.000.000,00	UPTD Puskesmas Cibolang
58	UPTD Puskesmas Kadudampit	4.169.641.514,00	UPTD Puskesmas Kadudampit
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.961.413.014,00	UPTD Puskesmas Kadudampit
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.203.089.500,00	UPTD Puskesmas Kadudampit
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.139.000,00	UPTD Puskesmas Kadudampit
59	UPTD Puskesmas Lengkong	3.327.814.235,00	UPTD Puskesmas Lengkong

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.222.530.235,00	UPTD Puskesmas Lengkong
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.055.770.000,00	UPTD Puskesmas Lengkong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	49.514.000,00	UPTD Puskesmas Lengkong
60	UPTD Puskesmas Jampangtengah	4.849.703.833,00	UPTD Puskesmas Jampangtengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.367.575.333,00	UPTD Puskesmas Jampangtengah
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.479.793.500,00	UPTD Puskesmas Jampangtengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.335.000,00	UPTD Puskesmas Jampangtengah
61	UPTD Puskesmas Gunungguruh	2.937.042.016,00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.716.959.516,00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.215.222.500,00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.860.000,00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
62	UPTD Puskesmas Cikembar	4.780.376.268,00	UPTD Puskesmas Cikembar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.915.053.668,00	UPTD Puskesmas Cikembar
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.859.530.600,00	UPTD Puskesmas Cikembar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.792.000,00	UPTD Puskesmas Cikembar
63	UPTD Gudang Farmasi	100.000.000,00	UPTD Gudang Farmasi
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000,00	UPTD Gudang Farmasi
64	UPTD Klinik Kesehatan Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah	1.531.074.318,00	UPTD Klinik Kesehatan Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.531.074.318,00	UPTD Klinik Kesehatan Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah
65	UPTD RSUD Sagaranten	26.377.264.625,00	UPTD RSUD Sagaranten
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.916.288.565,00	UPTD RSUD Sagaranten
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.460.976.060,00	UPTD RSUD Sagaranten

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
66	Dinas Pekerjaan Umum	391.188.198.135,00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.833.231.026,00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	37.311.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	307.431.367.109,00	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.612.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	273.109.393.638,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	76.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.866.417.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	115.440.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	104.998.948.409,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.823.644.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.707.647.486,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.900.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.603.492.600,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20.460.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	26.883.803.943,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
68	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23.675.150.455,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.157.738.455,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.517.412.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.140.887.953,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.630.887.953,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.510.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
70	Satuan Polisi Pamong Praja	12.309.471.359,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.347.471.359,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	962.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
71	Dinas Sosial	16.550.480.066,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.117.496.826,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.006.099.000,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.091.000,00	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.509.640.800,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.907.900.000,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.000.146.000,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	7.106.440,00	Dinas Sosial
72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.671.977.353,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.891.955.853,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	12.300.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.682.200.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.602.435.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	305.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	120.495.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	57.591.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.310.312.381,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.805.312.381,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	900.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	405.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	370.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	680.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
74	Dinas Ketahanan Pangan	12.148.078.013,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.622.180.513,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	670.504.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.748.742.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	306.651.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
75	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.950.941.368,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	312.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.068.332.368,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	6.261.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	159.109.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
76	Dinas Lingkungan Hidup	66.644.120.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.381.771.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.605.684.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	460.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	46.546.664.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.768.438.926,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.599.820.926,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	343.348.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	365.990.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	366.730.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	92.550.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.619.265.594,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.954.265.594,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENATAAN DESA	395.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.370.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
79	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.483.159.715,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.744.859.715,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	351.040.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	15.668.120.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	10.719.140.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
80	Dinas Perhubungan	57.892.721.057,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.751.571.807,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	35.463.149.250,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.678.000.000,00	Dinas Perhubungan
81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	19.230.855.341,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.337.028.841,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.365.160.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	142.318.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	286.348.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.642.527.318,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.432.287.318,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	98.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	249.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	969.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	705.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.489.240.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.600.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.546.290.650,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.126.290.650,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	470.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	355.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	270.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	25.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
84	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	36.342.901.917,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.907.501.917,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.350.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.050.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.760.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	260.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	230.400.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	485.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
85	Dinas Arsip dan Perpustakaan	16.002.675.162,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.400.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	400.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.552.675.162,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	920.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	730.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
86	Dinas Perikanan	37.223.736.644,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.411.651.544,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	14.654.107.400,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.436.431.700,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	205.126.000,00	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.516.420.000,00	Dinas Perikanan
87	Dinas Pariwisata	23.042.668.276,00	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.158.334.876,00	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.695.024.400,00	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.953.774.000,00	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	955.535.000,00	Dinas Pariwisata

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.280.000.000,00	Dinas Pariwisata
88	Dinas Peternakan	22.432.853.000,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.684.949.690,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.281.000.000,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.892.258.990,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.826.604.000,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	583.740.320,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	45.000.000,00	Dinas Peternakan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	119.300.000,00	Dinas Peternakan
89	Dinas Pertanian	74.000.000.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.245.000.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.275.000.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.195.000.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.210.000.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	175.000.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.900.000.000,00	Dinas Pertanian
90	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.797.564.862,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	600.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.095.298.862,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	180.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.048.156.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	449.910.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	600.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	690.200.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	280.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.044.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	200.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	610.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
91	Sekretariat Daerah	109.851.105.420,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.813.855.420,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.627.750.000,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.409.500.000,00	Sekretariat Daerah
92	Sekretariat DPRD	88.575.716.739,00	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.624.279.455,00	Sekretariat DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	34.951.437.284,00	Sekretariat DPRD
93	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.875.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.225.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	857.800.263.074,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.499.954.956,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	782.111.954.165,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.188.353.953,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
95	Badan Pendapatan Daerah	35.053.088.447,00	Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.760.618.947,00	Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.292.469.500,00	Badan Pendapatan Daerah
96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.790.811.295,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.209.188.705,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
97	Inspektorat	28.426.605.123,00	Inspektorat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.324.667.123,00	Inspektorat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.848.917.000,00	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.253.021.000,00	Inspektorat
98	Kecamatan Bantargadung	2.820.824.273,00	Kecamatan Bantargadung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.720.024.273,00	Kecamatan Bantargadung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Bantargadung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.800.000,00	Kecamatan Bantargadung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Bantargadung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Bantargadung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Bantargadung
99	Kecamatan Bojonggenteng	2.500.508.031,00	Kecamatan Bojonggenteng
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.392.283.031,00	Kecamatan Bojonggenteng
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.360.000,00	Kecamatan Bojonggenteng
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.665.000,00	Kecamatan Bojonggenteng
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Bojonggenteng
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Bojonggenteng
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Bojonggenteng
100	Kecamatan Caringin	3.157.443.913,00	Kecamatan Caringin
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.082.443.913,00	Kecamatan Caringin
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	Kecamatan Caringin
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Caringin
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Caringin
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Caringin
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Caringin

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
101	Kecamatan Ciambar	2.634.274.662,00	Kecamatan Ciambar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.537.174.662,00	Kecamatan Ciambar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.650.000,00	Kecamatan Ciambar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.260.000,00	Kecamatan Ciambar
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.190.000,00	Kecamatan Ciambar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Ciambar
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Ciambar
102	Kecamatan Cibadak	5.146.414.503,00	Kecamatan Cibadak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.171.414.503,00	Kecamatan Cibadak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cibadak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.000.000,00	Kecamatan Cibadak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cibadak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	Kecamatan Cibadak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cibadak
103	Kecamatan Cibitung	3.085.655.047,00	Kecamatan Cibitung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.988.455.047,00	Kecamatan Cibitung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Cibitung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cibitung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Cibitung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cibitung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cibitung
104	Kecamatan Cicantayan	3.027.042.317,00	Kecamatan Cicantayan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.952.042.317,00	Kecamatan Cicantayan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	Kecamatan Cicantayan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cicantayan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cicantayan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cicantayan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cicantayan
105	Kecamatan Cicurug	5.092.628.651,00	Kecamatan Cicurug
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.102.068.651,00	Kecamatan Cicurug
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.560.000,00	Kecamatan Cicurug
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.000.000,00	Kecamatan Cicurug
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cicurug
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cicurug
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cicurug
106	Kecamatan Cidadap	2.762.366.903,00	Kecamatan Cidadap
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.684.706.903,00	Kecamatan Cidadap
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.800.000,00	Kecamatan Cidadap
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.660.000,00	Kecamatan Cidadap
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.200.000,00	Kecamatan Cidadap
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000,00	Kecamatan Cidadap
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.000.000,00	Kecamatan Cidadap
107	Kecamatan Cidahu	2.554.862.042,00	Kecamatan Cidahu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.477.662.042,00	Kecamatan Cidahu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cidahu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cidahu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Cidahu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cidahu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cidahu
108	Kecamatan Cidolog	2.660.526.882,00	Kecamatan Cidolog
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.583.326.882,00	Kecamatan Cidolog
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cidolog

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cidolog
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Cidolog
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cidolog
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cidolog
109	Kecamatan Ciemas	2.356.298.985,00	Kecamatan Ciemas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.299.998.985,00	Kecamatan Ciemas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Ciemas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.300.000,00	Kecamatan Ciemas
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	Kecamatan Ciemas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	Kecamatan Ciemas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	Kecamatan Ciemas
110	Kecamatan Cikakak	2.329.486.285,00	Kecamatan Cikakak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.252.286.285,00	Kecamatan Cikakak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cikakak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cikakak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Cikakak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cikakak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cikakak
111	Kecamatan Cikembar	3.019.035.709,00	Kecamatan Cikembar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.941.835.709,00	Kecamatan Cikembar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cikembar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cikembar
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Cikembar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cikembar
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cikembar
112	Kecamatan Cikidang	3.076.219.375,00	Kecamatan Cikidang

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.006.219.375,00	Kecamatan Cikidang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cikidang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cikidang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cikidang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cikidang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cikidang
113	Kecamatan Cimanggu	3.100.024.684,00	Kecamatan Cimanggu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.002.824.684,00	Kecamatan Cimanggu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Cimanggu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cimanggu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Cimanggu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cimanggu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cimanggu
114	Kecamatan Ciracap	3.153.004.220,00	Kecamatan Ciracap
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.075.804.220,00	Kecamatan Ciracap
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Ciracap
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Ciracap
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Ciracap
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Ciracap
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Ciracap
115	Kecamatan Cireunghas	3.191.672.596,00	Kecamatan Cireunghas
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.121.827.596,00	Kecamatan Cireunghas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.946.000,00	Kecamatan Cireunghas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.999.000,00	Kecamatan Cireunghas
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.971.000,00	Kecamatan Cireunghas

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.951.000,00	Kecamatan Cireunghas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.978.000,00	Kecamatan Cireunghas
116	Kecamatan Cisaat	3.493.185.805,00	Kecamatan Cisaat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.403.185.805,00	Kecamatan Cisaat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000,00	Kecamatan Cisaat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00	Kecamatan Cisaat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cisaat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cisaat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cisaat
117	Kecamatan Cisolok	2.783.516.343,00	Kecamatan Cisolok
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.713.516.343,00	Kecamatan Cisolok
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Cisolok
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Cisolok
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cisolok
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Cisolok
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Cisolok
118	Kecamatan Curugkembar	2.710.267.850,00	Kecamatan Curugkembar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.633.067.850,00	Kecamatan Curugkembar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Curugkembar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Curugkembar
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Curugkembar
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Curugkembar
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Curugkembar
119	Kecamatan Gegerbitung	2.516.330.866,00	Kecamatan Gegerbitung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.419.330.866,00	Kecamatan Gegerbitung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Gegerbitung

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Gegerbitung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.000.000,00	Kecamatan Gegerbitung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Gegerbitung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Gegerbitung
120	Kecamatan Gunungguruh	3.222.790.946,00	Kecamatan Gunungguruh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.140.711.946,00	Kecamatan Gunungguruh
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.495.000,00	Kecamatan Gunungguruh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Gunungguruh
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Gunungguruh
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Gunungguruh
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.584.000,00	Kecamatan Gunungguruh
121	Kecamatan Jampang Kulon	5.274.358.518,00	Kecamatan Jampang Kulon
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.277.158.518,00	Kecamatan Jampang Kulon
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Jampang Kulon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.000.000,00	Kecamatan Jampang Kulon
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Jampang Kulon
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Jampang Kulon
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Jampang Kulon
122	Kecamatan Jampang Tengah	2.301.164.936,00	Kecamatan Jampang Tengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.203.964.936,00	Kecamatan Jampang Tengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Jampang Tengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Jampang Tengah
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Jampang Tengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Jampang Tengah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Jampang Tengah
123	Kecamatan Kabandungan	2.695.063.017,00	Kecamatan Kabandungan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.623.263.017,00	Kecamatan Kabandungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Kabandungan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Kabandungan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.800.000,00	Kecamatan Kabandungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Kabandungan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Kabandungan
124	Kecamatan Kadudampit	2.354.433.356,00	Kecamatan Kadudampit
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.265.070.356,00	Kecamatan Kadudampit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Kadudampit
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Kadudampit
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Kadudampit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.363.000,00	Kecamatan Kadudampit
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Kadudampit
125	Kecamatan Kalapanunggal	2.912.676.012,00	Kecamatan Kalapanunggal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.830.546.012,00	Kecamatan Kalapanunggal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.355.000,00	Kecamatan Kalapanunggal
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.350.000,00	Kecamatan Kalapanunggal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.550.000,00	Kecamatan Kalapanunggal
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.785.000,00	Kecamatan Kalapanunggal
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.090.000,00	Kecamatan Kalapanunggal
126	Kecamatan Kalibunder	2.636.125.010,00	Kecamatan Kalibunder
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.533.925.010,00	Kecamatan Kalibunder
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	Kecamatan Kalibunder
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Kalibunder
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Kalibunder

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Kalibunder
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Kalibunder
127	Kecamatan Kebonpedes	2.935.726.554,00	Kecamatan Kebonpedes
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.868.226.554,00	Kecamatan Kebonpedes
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.000.000,00	Kecamatan Kebonpedes
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Kebonpedes
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Kebonpedes
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Kebonpedes
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.500.000,00	Kecamatan Kebonpedes
128	Kecamatan Lengkong	2.656.320.269,00	Kecamatan Lengkong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.559.120.269,00	Kecamatan Lengkong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Lengkong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Lengkong
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Lengkong
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Lengkong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Lengkong
129	Kecamatan Nagrak	3.217.852.912,00	Kecamatan Nagrak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.142.852.912,00	Kecamatan Nagrak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	Kecamatan Nagrak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Nagrak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Nagrak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Nagrak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Nagrak
130	Kecamatan Nyalindung	3.823.582.217,00	Kecamatan Nyalindung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.747.382.217,00	Kecamatan Nyalindung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Nyalindung

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.000.000,00	Kecamatan Nyalindung
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Nyalindung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Nyalindung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Nyalindung
131	Kecamatan Pabuaran	2.872.776.707,00	Kecamatan Pabuaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.775.576.707,00	Kecamatan Pabuaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Pabuaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Pabuaran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Pabuaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Pabuaran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Pabuaran
132	Kecamatan Parakansalak	2.692.943.248,00	Kecamatan Parakansalak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.635.063.248,00	Kecamatan Parakansalak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Parakansalak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.880.000,00	Kecamatan Parakansalak
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.000.000,00	Kecamatan Parakansalak
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000,00	Kecamatan Parakansalak
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	Kecamatan Parakansalak
133	Kecamatan Parungkuda	2.732.066.842,00	Kecamatan Parungkuda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.662.066.842,00	Kecamatan Parungkuda
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Parungkuda
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Parungkuda
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Parungkuda
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Parungkuda
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Parungkuda
134	Kecamatan Palabuhanratu	4.837.898.314,00	Kecamatan Palabuhanratu

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.849.978.314,00	Kecamatan Palabuhanratu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.900.000,00	Kecamatan Palabuhanratu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.000.000,00	Kecamatan Palabuhanratu
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.800.000,00	Kecamatan Palabuhanratu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,00	Kecamatan Palabuhanratu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.020.000,00	Kecamatan Palabuhanratu
135	Kecamatan Purabaya	2.596.699.790,00	Kecamatan Purabaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.506.919.790,00	Kecamatan Purabaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.920.000,00	Kecamatan Purabaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.970.000,00	Kecamatan Purabaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.925.000,00	Kecamatan Purabaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.925.000,00	Kecamatan Purabaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.040.000,00	Kecamatan Purabaya
136	Kecamatan Sagaranten	2.664.571.863,00	Kecamatan Sagaranten
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.578.607.863,00	Kecamatan Sagaranten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Sagaranten
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.868.000,00	Kecamatan Sagaranten
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.096.000,00	Kecamatan Sagaranten
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Sagaranten
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Sagaranten
137	Kecamatan Simpenan	2.679.332.458,00	Kecamatan Simpenan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.594.332.458,00	Kecamatan Simpenan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	Kecamatan Simpenan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00	Kecamatan Simpenan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Simpenan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	Kecamatan Simpenan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Simpenan
138	Kecamatan Sukabumi	3.563.514.153,00	Kecamatan Sukabumi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.483.778.153,00	Kecamatan Sukabumi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.716.000,00	Kecamatan Sukabumi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.500.000,00	Kecamatan Sukabumi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.740.000,00	Kecamatan Sukabumi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.440.000,00	Kecamatan Sukabumi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.340.000,00	Kecamatan Sukabumi
139	Kecamatan Sukaraja	3.754.482.779,00	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.657.282.779,00	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Sukaraja
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Sukaraja
140	Kecamatan Surade	4.663.901.929,00	Kecamatan Surade
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.666.701.929,00	Kecamatan Surade
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	Kecamatan Surade
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.000.000,00	Kecamatan Surade
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Surade
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Surade
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Surade
141	Kecamatan Tegalbuleud	2.847.928.669,00	Kecamatan Tegalbuleud
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.759.428.669,00	Kecamatan Tegalbuleud
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.500.000,00	Kecamatan Tegalbuleud

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Tegalbuleud
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Tegalbuleud
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Tegalbuleud
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Tegalbuleud
142	Kecamatan Waluran	2.501.191.344,00	Kecamatan Waluran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.418.991.344,00	Kecamatan Waluran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	Kecamatan Waluran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Waluran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.200.000,00	Kecamatan Waluran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Waluran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	Kecamatan Waluran
143	Kecamatan Warungkiara	2.451.544.309,00	Kecamatan Warungkiara
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.382.144.309,00	Kecamatan Warungkiara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.800.000,00	Kecamatan Warungkiara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Warungkiara
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.900.000,00	Kecamatan Warungkiara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	Kecamatan Warungkiara
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.700.000,00	Kecamatan Warungkiara
144	Kecamatan Sukalarang	2.990.043.815,00	Kecamatan Sukalarang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.927.480.815,00	Kecamatan Sukalarang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.968.000,00	Kecamatan Sukalarang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.742.000,00	Kecamatan Sukalarang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.562.000,00	Kecamatan Sukalarang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.861.000,00	Kecamatan Sukalarang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.430.000,00	Kecamatan Sukalarang
145	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.592.317.151,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.439.169.751,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	531.071.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.974.794.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	623.465.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	498.991.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.524.826.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	TOTAL	4.838.687.055.076,00	

5.3. Rencana Pendanaan yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Target pencapaian SPM sangat penting dikarenakan salah satu prioritas pendanaan paling utama setiap tahunnya adalah untuk memenuhi target SPM. Rencana pendanaan yang mendukung SPM tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Rencana Pendanaan yang Mendukung SPM Tahun 2026

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Pagu Tahun 2026	PD Pengampu
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	55.366.677.176	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	269.243.624.264	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.035.658.868	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.146.914.792	Dinas Pendidikan
4	Trantibumlinmas	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.137.098.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	43.780.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	190.240.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Pagu Tahun 2026	PD Pengampu
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2.146.294.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	Trantibumlinmas	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	762.180.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	179.690.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	20.130.000	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Trantibumlinmas	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Trantibumlinmas	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Trantibumlinmas	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.600.000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Pagu Tahun 2026	PD Pengampu
9	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	3.388.843.800	Dinas Sosial
10	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	3.388.843.800	Dinas Sosial
11	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	3.388.843.800	Dinas Sosial
12	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	3.388.843.800	Dinas Sosial
13	Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	932.096.000	Dinas Sosial

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Pagu Tahun 2026	PD Pengampu
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	76.100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.550.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	program pengembangan perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.270.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	630.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Pagu Tahun 2026	PD Pengampu
19	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
20	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
21	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
22	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
23	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
24	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Pagu Tahun 2026	PD Pengampu
25	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
26	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
27	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
28	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan
29	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.410.269.712	Dinas Kesehatan

5.4. Sinergitas Program Mendukung Prioritas Nasional

Program pembangunan daerah ditujukan untuk pencapaian visi, misi, dan target pembangunan daerah. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan daerah, program pembangunan daerah juga turut mendukung pembangunan nasional dan provinsi agar tercapai secara optimal, adapun indikasi pendanaan program yang mendukung program prioritas nasional dan provinsi disajikan pada tabel 5.4 sampai dengan 5.12.

Tabel 5.4. Rekapitulasi Program mendukung Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	449.910.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.682.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Program penempatan tenaga kerja	2.602.435.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Program hubungan industrial	305.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program Pengelolaan perikanan Tangkap	14.654.107.400	Dinas Perikanan
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.748.742.500	Dinas Ketahanan Pangan
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.455.586.562	Dinas Kesehatan
8	Program rehabilitasi sosial	3.509.640.800	Dinas Sosial
9	Program perlindungan dan jaminan sosial	2.907.900.000	Dinas Sosial
10	Program pendaftaran penduduk	343.348.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	670.504.000	Dinas Ketahanan Pangan
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.195.000.000	Dinas Pertanian
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	76.100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.550.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Program kawasan permukiman	9.603.492.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.460.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 5.5. Rekapitulasi Program mendukung Penanggulangan Stunting Tahun 2026

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	370.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.516.420.000	Dinas Perikanan

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.748.742.500	Dinas Ketahanan Pangan
6	Program Pengelolaan Pendidikan	403.792.875.100	Dinas Pendidikan
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.455.586.562	Dinas Kesehatan
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15.668.120.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	10.719.140.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Program Pemberdayaan Sosial	2.006.099.000	Dinas Sosial
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	76.100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.550.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11.370.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.826.604.000	Dinas Peternakan

Tabel 5.6. Rekapitulasi Program Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2026

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	670.504.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.748.742.500	Dinas Ketahanan Pangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	306.651.000	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.654.107.400	Dinas Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.436.431.700	Dinas Perikanan
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	205.126.000	Dinas Perikanan
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	5.516.420.000	Dinas Perikanan
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.275.000.000	Dinas Pertanian
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.195.000.000	Dinas Pertanian
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.210.000.000	Dinas Pertanian
12	Program Perizinan Usaha Pertanian	175.000.000	Dinas Pertanian
13	Program Penyuluhan Pertanian	2.900.000.000	Dinas Pertanian

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.281.000.000	Dinas Peternakan
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.892.258.990	Dinas Peternakan
16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.826.604.000	Dinas Peternakan
17	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	583.740.320	Dinas Peternakan
18	Program Perizinan Usaha Pertanian	45.000.000	Dinas Peternakan
19	Program Penyuluhan Pertanian	119.300.000	Dinas Peternakan
20	Program Penyelenggaraan Jalan	307.431.367.109	Dinas Pekerjaan Umum
21	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	37.311.600.000	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 5.7. Rekapitulasi Program Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.044.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.695.024.400	Dinas Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata	3.953.774.000	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.280.000.000	Dinas Pariwisata
7	Program Pemasaran Pariwisata	3.953.774.000	Dinas Pariwisata
8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	955.535.000	Dinas Pariwisata
9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.280.000.000	Dinas Pariwisata
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.275.000.000	Dinas Pertanian
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.195.000.000	Dinas Pertanian
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.654.107.400	Dinas Perikanan
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.436.431.700	Dinas Perikanan
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.281.000.000	Dinas Peternakan
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.892.258.990	Dinas Peternakan
16	Program Penyuluhan Pertanian	2.900.000.000	Dinas Pertanian
17	Program Penyuluhan Pertanian	119.300.000	Dinas Peternakan
18	Program Pengembangan UMKM	1.600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.489.240.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	705.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21	Program Hubungan Industrial	305.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.602.435.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.682.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Program Perencanaan Tenaga Kerja	12.300.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25	Program Promosi Penanaman Modal	470.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Program Pengembangan Ekspor	600.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.8. Rekapitulasi Program Mendukung Penanganan Inflasi Tahun 2026

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.275.000.000	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.195.000.000	Dinas Pertanian
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	449.910.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.281.000.000	Dinas Peternakan
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.892.258.990	Dinas Peternakan
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.748.742.500	Dinas Ketahanan Pangan
7	Program Pengembangan UMKM	1.600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.9. Rekapitulasi Program Mendukung Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2026

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.455.586.562,00	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	35.329.962.365,00	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	331.409.000,00	Dinas Kesehatan

No	Program Perangkat Daerah	Pagu	Perangkat Daerah
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	403.792.875.100,00	Dinas Pendidikan
6	Program Pengembangan Kurikulum	2.100.776.000,00	Dinas Pendidikan
7	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33.352.700.000,00	Dinas Pendidikan
8	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	733.000.000,00	Dinas Pendidikan
9	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.056.670.000,00	Dinas Pendidikan
10	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	3.600.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Program Pembinaan Perpustakaan	3.400.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
12	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.682.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 5.10. Rekapitulasi Program mendukung Pengembangan UMKM Tahun 2026

NO	PROGRAM	Pagu	PD PENGAMPU
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	98.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	249.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	969.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	705.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.489.240.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Program Pengembangan UMKM	1.600.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	280.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.044.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	200.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Program Promosi Penanaman Modal	470.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 5.11. Rekapitulasi Program mendukung Pengembangan Pariwisata Tahun 2026

No	Program	Pagu	PD Pengampu
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.695.024.400,00	Dinas Pariwisata

No	Program	Pagu	PD Pengampu
2	Program Pemasaran Pariwisata	3.953.774.000,00	Dinas Pariwisata
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	955.535.000,00	Dinas Pariwisata
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.280.000.000,00	Dinas Pariwisata
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.044.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	705.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.489.240.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Program Penyelenggaraan Jalan	307.431.367.109	Dinas Pekerjaan Umum
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	76.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Program Pengelolaan Persampahan	46.546.664.400,00	Dinas Lingkungan Hidup

5.5. Rencana Pendanaan yang Mendukung Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan beberapa proyek prioritas daerah. Proyek ini disusun untuk menjawab isu-isu pembangunan, prioritas pembangunan daerah, dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Sukabumi tahun 2026. Sumber pendanaan proyek prioritas Kabupaten Sukabumi tahun 2026 menerapkan prinsip kolaborasi yaitu APBD Kabupaten Sukabumi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan dana lainnya yang sesuai perundang-undangan. Adapun penjelasan rencana pendanaan yang mendukung Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 disajikan pada tabel 5.12

Tabel 5.12. Rekapitulasi Rencana Program mendukung Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	Proyek Prioritas	Program	Pagu	Perangkat Daerah
1	Generasi Mencrang 1. Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran	Program Pengelolaan Pendidikan	403.792.875.100	Dinas Pendidikan
	Generasi Mencrang 2. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis Pertanian dan Pariwisata	Program Pengembangan Kurikulum	2.100.776.000	Dinas Pendidikan
	Generasi Mencrang		40.627.750.000	Sekretariat Daerah

No	Proyek Prioritas	Program	Pagu	Perangkat Daerah
	3. Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Generasi Mencrang 4. Beasiswa pendidikan sarjana untuk keluarga petani dan buruh migran			
2	Program Sukabumi Sakti 1. Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	186.455.586.562	Dinas Kesehatan
	Program Sukabumi Sakti 2. Dokter Bina Desa			
	Program Sukabumi Sakti 3. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat			
	Program Sukabumi Sakti 4. Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang			
3	Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4	Program Permata Suci	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Trendi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	1.489.240.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Program Usaha Memakmurkan Masjid	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.627.750.000	Sekretariat Daerah
7	Petani, Nelayan, UMKM- IKM Motekar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.281.000.000	Dinas Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	119.300.000	Dinas Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.654.107.400	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.436.431.700	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.516.420.000	Dinas Perikanan
8	Pariwisata Berdaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.695.024.400	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	3.953.774.000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.280.000.000	Dinas Pariwisata

No	Proyek Prioritas	Program	Pagu	Perangkat Daerah
9	Pembangunan Rumah Sakinah	Program Pengembangan Perumahan	6.900.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.460.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Taman Interaksi Warga	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	26.883.803.943	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Program Tumaninah	Program Penyelenggaraan Jalan	307.431.367.109	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	6.261.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Program Kawasan Permukiman	9.603.492.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	104.998.948.409	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (5) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah hasil kerja dari satu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Di samping itu, terdapat pula capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Indikator makro tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Pendapatan Per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten, Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pravelansi Stunting. Dalam penentuan target kinerja indikator makro daerah memperhitungkan banyak hal seperti target indikator makro nasional dan provinsi, kebijakan ekonomi makro. Proyeksi indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target
			2024 (Realisasi)	2025* (Target)	2026**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,18	70,60	71,24
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,87	6,42 - 6,90	6,43
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,11	6,68 - 7,27	6,27 - 6,85
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,15	5,08 - 5,63	5,68
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah Per Kapita Per Tahun	31,16747	29,13 - 31,3	33,3 - 35,47
6	Indeks Gini	Poin	0,342	0,345 - 0,358	0,343 - 0,356
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2Eq/Miliar	N/A	5,32	5,71
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Persen	3,11	3,1	3,1
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,15	65,89	66,15
10	Prevalensi Stunting	Persen	20,5	18,47	16,73

Sumber: *) Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029; **) Kesepakatan dengan Provinsi Jawa Barat

6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sukabumi

Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukabumi, ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu; aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Indikator yang disajikan dalam 4 (empat) kelompok utama ini memberikan gambaran target penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sukabumi. Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program dan dampak (impact) sasaran/tujuan. Indikator Kinerja Daerah disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)						
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	78,59	78,69	78,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen Persen	5,28 31,49	5,28 34,75	5,15 38,01	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Kapasitas Air Baku	M ³ /detik	N/A	4,31	5,22	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,15	65,89	66,15	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5	Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton Co2Eq	780.547,74	861.945,06	951.077,03	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	9,08	13,44	18,82	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Timbulan Sampah	Persen	3,35	3,80	4,30	Perangkat Daerah Pengampu

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
	Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
8	Indeks Risiko Bencana	Skor	168,97	167,04 - 171	167,04 - 171	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,99	1,08	1,03	Badan Pusat Statistik
10	Rasio Penduduk	Persen	102,60	102,48	102,36	Badan Pusat Statistik
11	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	679	691,88	705	Badan Pusat Statistik
12	Proyeksi Penduduk 5 tahun	Juta Jiwa	2.828,02	2.853,64	2.879,26	Badan Pusat Statistik
13	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO ₂ Eq/Miliar	N/A	5,32	5,71	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
						Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	62,05	64,93	67,94	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
15	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	78,59	78,69	78,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,15	5,08 - 5,63	5,68	Badan Pusat Statistik
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,87	6,42 - 6,90	6,43	Badan Pusat Statistik
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	Persen	31,16747	29,13 - 31,3	33,3 - 35,47	Badan Pusat Statistik
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,11	6,68 - 7,27	6,27 - 6,85	Badan Pusat Statistik
5	Indeks Gini	Persen	0,342	0,345 - 0,358	0,343 - 0,356	Badan Pusat Statistik
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	70,18	70,6	71,24	Badan Pusat Statistik
7	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,85	75,05	75,25	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
8	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	20,5	18,47	16,73	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	Kasus	47	N/A	43	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10	Angka Kematian Bayi	Per/1000KH	10	N/A	9	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen	90	90	90	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	7,66	7,77	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,41	12,46	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
15	Indeks Literasi Daerah	Poin	76,93	77,53	78,13	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,25	98,15	98,25	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
17	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	24,14	24,85	25,34	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
18	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,533	0,532	0,531	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,39	0,41	0,43	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	17,13	16,79	16,91	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,66	2,67	2,68	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	Persen	N/A	4,8	4,85	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
4	Jumlah Kerjasama Daerah per Tahun	Jumlah	N/A	2	2	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
5	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	N/A	2,46	2,57	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Indeks Inovasi Daerah	Poin	64,82	65,01	65,03	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
7	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	41,41	43,50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	31,49	32,47	33,29	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase Desa Mandiri	Persen	41,21	46,46	51,71	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	N/A	87,08	87,23	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
2	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	1,55	1,55	1,65	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,49	4,30 - 4,33	4,34 - 4,36	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
4	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,540	3,68 - 3,82	3,83 - 3,97	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
6	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Poin	N/A	N/A	0,35	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029;

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan merumuskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Proyeksi target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.3

Tabel 6.3. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
I. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1. PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	70,71	73,75	76,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,99	99,99	99,99	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	93,83	94,71	95,59	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	Persen	20,72	24,82	28,92	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. KESEHATAN						
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	0,067	0,068	0,071	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	97,5	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,5	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	99,6	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	99,1	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	94,8	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	62,07	54,42	55,13	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	89,30	90,31	91,33	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	51,90	51,91	52,15	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	90,50	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	60,57	61,37	62,17	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	72,05	73,5	76,7	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Persen	53,03	62,42	71,82	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	67,17	66,89	66,62	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Jumlah persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	12,51	65	70	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	91,94	92,50	93,50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	11,23	11,23	11,23	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6. SOSIAL						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	98,67	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
II. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
7. TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	64,28	98	98,25	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	3,24	3,50	4	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Tenaga Kerja (persen)	22.593.938.509,438	25 Milyar	26 Milyar	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	17,81	20	22	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1,01	1,5	2	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,48	6,41	6,29	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. PANGAN						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	25,86	30,86	35,86	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
10. PERTANAHAN						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	99,76	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	454,49	N/A	N/A	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	Poin	65,15	65,89	66,15	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persen	43,89	45,93	48,06	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	40,63	96,67	86,70	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,04	99,05	99,08	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	45,02	45,5	46	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	96,35	97	97,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	5,71	21	42	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	41,21	46,46	51,71	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Anak	2,210	2,209	2,208	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	71,98	71,99	72,00	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	9,96	9,86	9,75	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
15. PERHUBUNGAN						
1	Rasio konektivitas	Persen	60	56	56	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Ratio	0,23	0,22	0,28	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	20	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	15,83	16	16	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
17. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	100	2,5	3,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	83,3	83,55	83,78	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah
18. PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Persen	-30,60	2	2,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaan Modal
19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,61	0,69	0,77	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,38	1,45	1,53	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	43	46	49	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
20. STATISTIK						

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
21. PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	N/A	350	365	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
22. KEBUDAYAAN						
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
23. PERPUSTAKAAN						
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	49,15	50	52	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	76,93	77	78	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
24. KEARSIPAN						
1	Persentase PD yang menerapkan kearsipan secara baku	Persen	66	67	68	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	86,82	87	88	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66,67	67	69	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
III. Urusan Pilihan						
25. KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	43.073	43.322	44.020	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
26. PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	1.120,50	2,5	2,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
						Pemerintahan Bidang Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	Persen	-19,65	2,5	2,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	42,73	43	44	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	2,66	2,67	2,68	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	1,44	1,5	1,6	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pariwisata
27. PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,263	6,263	6,280	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	12,44	12,44	12,44	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Pertanian
28. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	Persen	0	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Energi dan Suber Daya Mineral
29. PERDAGANGAN						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	43,1	30	32	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	Persen	35	39	43	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
30. PERINDUSTRIAN						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	4	5	7	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
						Bidang Perindustrian
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	30	30	30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	4	5	7	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	30	30	30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Kawasan Industri (IKUI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini:	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perindustrian
IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
31. PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	16,87	16,87	16,87	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
2	Rasio PAD	Persen	16,62	N/A	16,14	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Poin	3,300	3,300	3,310	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	3,215	3,215	3,220	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	69,82	69,82	69,82	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
32. PENGADAAN						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	42,13	42,13	50	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	25,23	25,23	30	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah
33. KEPEGAWAIAN						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	72,48	72,48	72,48	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	23,75	23,75	23,75	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
34. MANAJEMEN KEUANGAN						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	2,52	2,52	2,52	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target		Pengampu Urusan
				2025	2026	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	7,66	7	7	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
3	Assets management					Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
	1. Apakah ada daftar aset tetap?	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Tercantum/Tidak	Tercantum	Tercantum	Tercantum	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,95	N/A	3	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
35. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	95,41	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

6.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target pencapaian IKU daerah akan menjadi perjanjian kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian indikator *outcome* program pembangunan daerah

setiap tahun atau capaian indikator yang bersifat mandiri setiap tahun. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian IKU daerah untuk periode 2025-2029, yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dalam RKPD Tahun 2026 sudah sesuai/ konsisten dengan target Rancangan RPJMD tahun 2025-2029, yaitu: terdiri dari 27 IKU. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2026 yang mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

No	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026
IKU1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	17,13	16,79	16,91
IKU2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,66	2,66	2,68
IKU3	Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	22,58	22,80	22,81
IKU4	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,73	2,46	2,57
IKU5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,11	6,52 – 7,03	6,60
IKU6	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	29,12	28,34	28,40
IKU7	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Persen	496 Juta USD	5	5
IKU8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,15	65,89	66,15
IKU9	Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton Co2Eq	N/A	780.547,74	861.945,06
IKU10	Persentase Pencapaian Tingkat Kemiskinan	Persen	96	100	100
IKU11	Indeks Gini	Poin	0,342	0,345 - 0,358	0,343 - 0,356
IKU12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	5,28	5,28	5,15
IKU13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	31,49	32,47	33,29
IKU14	Tingkat Kemantapan Jalan (persen)	Persen	60,57	61,37	62,17
IKU15	Rasio Konektivitas	Poin	60	56	56
IKU16	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	80,94	81,00	81,44
IKU17	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	54,37	54,42	55,13

No	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026
IKU18	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,85	75,05	75,25
IKU19	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,25	98,15	98,25
IKU20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,41	12,46
IKU21	Indeks Literasi Daerah	Poin	76,93	77,53	78,13
IKU22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Persen	24,14	24,85	25,34
IKU23	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,533	0,532	0,531
IKU24	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	20,5	18,47	16,73
IKU25	Persentase Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (%)	Persen	127	100	100
IKU26	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,49	4,30 - 4,33	4,34-4,36
IKU27	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Poin	1,55	1,55	1,65

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029;

6.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Target pencapaian SPM sangat penting dikarenakan salah satu prioritas pendanaan paling utama setiap tahunnya adalah untuk memenuhi target SPM. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPDP Tahun 2026 sudah sesuai/konsisten dengan target Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu: 29 (dua puluh sembilan) indikator SPM meliputi 6 bidang urusan (3 indikator bidang Pendidikan; 12 indikator bidang Kesehatan; 5 indikator bidang Trantibumlinmas; 2 indikator bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2 indikator bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 5 indikator bidang Sosial). Seluruh Target SPM Tahun 2026 ditetapkan 100%. Adapun target capaian indikator SPM di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.5

Tabel 6.5. Penetapan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukabumi
Tahun 2026

No	Bidang Urusan	Jenis SPM	Program PD	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)
				2024 (Realisasi)	2025 (Proyeksi)	2026
1	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	98,72	100,00	100,00
2	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	99,18	100,00	100,00
3	Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	99,72	100,00	100,00
4	Trantibumlinmas	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	100,00	100,00
5	Trantibumlinmas	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	100,00	100,00
6	Trantibumlinmas	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	100	100,00	100,00
7	Trantibumlinmas	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	100	100,00	100,00
8	Trantibumlinmas	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	100	100,00	100,00
9	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial	92,31	100,00	100,00
10	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial	91,67	100,00	100,00
11	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Rehabilitasi sosial	92,31	100,00	100,00
12	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial	83,33	100,00	100,00
13	Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi	Program Penanganan Bencana	100	100	100

No	Bidang Urusan	Jenis SPM	Program PD	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)
				2024 (Realisasi)	2025 (Proyeksi)	2026
		korban bencana kab/kota				
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	85,08	100,00	100,00
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	79,05	100,00	100,00
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Program Pengembangan Perumahan	100	100,00	100,00
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	Program Pengembangan Perumahan	100	100,00	100,00
18	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97,50	100,00	100,00
19	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97,50	100,00	100,00
20	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99,60	100,00	100,00
21	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99,10	100,00	100,00
22	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	100,00	100,00	100,00

No	Bidang Urusan	Jenis SPM	Program PD	Kondisi Kinerja Awal (%)		Target (%)
				2024 (Realisasi)	2025 (Proyeksi)	2026
			Upaya Kesehatan Masyarakat			
23	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	95,00	100,00	100,00
24	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	100,00	100,00
25	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	100,00	100,00
26	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100,00	100,00
27	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100,00	100,00
28	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100,00	100,00
29	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100,00	100,00

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029;

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029 yang mempunyai tema yaitu **“Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”**. RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 memuat proses perencanaan pembangunan, dimana pelaksanaannya diturunkan kedalam sasaran, indikator dan target pembangunan yang dicapai melalui strategi dan kebijakan. Selanjutnya penetapan prioritas pembangunan Tahun 2026, mengacu pada proyek prioritas Kabupaten Sukabumi yang disinergikan dengan kebijakan kewilayahan dan isu-isu strategis, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan isu-isu global.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian prioritas pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026;
2. RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2026;
3. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Pada akhirnya pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 akan dapat terwujud secara optimal dan mencapai sasaran pembangunan apabila

didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam mewujudkan pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Sukabumi.

BUPATI SUKABUMI,

ttd

ASEP JAPAR